



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi, kebijakan dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB IX : Penutup.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD.
- (3) Dalam pelaksanaannya, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi bencana, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, dilakukan penyesuaian capaian sasaran tahunan dalam RKPD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo periode selanjutnya belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 14 SERI E NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 11-178/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah selain untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah secara adil dan merata guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Bupati, maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijabarkan dalam Renstra PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda.
- Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kestabilan pemerintahan sehingga berdampak pada perubahan kebijakan daerah.

- Yang dimaksud dengan “krisis ekonomi” adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis akibat adanya faktor-faktor tertentu
- Yang dimaksud dengan “konflik sosial budaya” adalah adanya pertentangan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya yang dapat menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
- Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah peristiwa yang merusak atau mengganggu stabilitas keamanan di sebuah daerah.
- Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan satu wilayah administratif menjadi menjadi dua wilayah administratif atau lebih.
- Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah pergantian satu atau lebih kebijakan nasional baik melalui penggabungan, pemisahan, dan/atau pergantian sebagian atau seluruh kebijakan nasional akibat berbagai faktor yang mensyaratkan perlunya penyesuaian dengan kondisi pemerintahan pada tahun berjalan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 14



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
2021-2026

DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026



Pemerintah
Kabupaten Purworejo

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 - 2026



purworejokab.go.id





DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-27
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-28
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-23
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-41
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-171
2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo	II-179
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1
3.2. Kondisi Perekonomian Daerah	III-4
3.3. Kinerja Keuangan Daerah	III-6
3.4. Analisis Keuangan Daerah	III-22
3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-43
3.6. Kerangka Pendanaan	III-47
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1. Lingkungan Eksternal	IV-1
4.2. Lingkungan Internal.....	IV-10
4.3. Permasalahan Pembangunan.....	IV-14
4.4. Isu-Isu Strategis Daerah	IV-42
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi.....	V-1
5.2. Misi.....	V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-6
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1. Strategi	VI-1
6.2. Arah Kebijakan.....	VI-13
6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....	VI-23
6.4. Program Pembangunan Daerah.....	VI-28



halaman

6.5.	Program Unggulan Daerah	VI-35	
6.6.	Program Inovasi Daerah	VI-42	
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....VII-1			
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1	
7.2.	Program Perangkat Daerah	VII-3	
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....VIII-1			
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	VIII-1	
8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-2	
BAB IX PENUTUP			IX-1
9.1.	Pedoman Transisi.....	IX-1	



DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1.1.	Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, dan RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-2025	II-18
Tabel 2.1.	Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo	II-2
Tabel 2.2.	Data DAS di Kabupaten Purworejo	II-5
Tabel 2.3.	Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo.....	II-6
Tabel 2.4.	Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	II-7
Tabel 2.5.	Luasan Kawasan Peruntukan Lindung Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	II-9
Tabel 2.6.	Luasan Kawasan Peruntukan Budi Daya Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	II-10
Tabel 2.7.	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019.....	II-14
Tabel 2.8.	Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019.....	II-15
Tabel 2.9.	Desa/ Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo	II-16
Tabel 2.10.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	II-20
Tabel 2.11.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020	II-22
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	II-22
Tabel 2.13.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)	II-24
Tabel 2.14.	PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)	II-26
Tabel 2.15.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (%)	II-27
Tabel 2.16.	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (%)	II-28
Tabel 2.17.	PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 – 2019 (juta rupiah)	II-29
Tabel 2.18.	PDRB ADHK 2010 menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 – 2019 (juta rupiah)	II-29



Tabel 2.19.	Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2015 - 2019 (%)	II-31
Tabel 2.20.	Laju Pertumbuhan PDRB Purworejo ADHK 2010 menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2015-2019	II-31
Tabel 2.21.	Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2.22.	Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.23.	Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.24.	Jumlah Seni dan Kebudayaan & Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 ...	II-40
Tabel 2.25.	Jumlah Klub, Gedung, Organisasi, dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-41
Tabel 2.26.	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan	II-41
Tabel 2.27.	Cakupan Wilayah Penerapan e-Learning di Tingkat SD dan SMP dari Tahun 2016 – 2020	II-43
Tabel 2.28.	Cakupan Sekolah Berbasis E-Learning (Creative Multimedia) dari Tahun 2016 – 2020.....	II-43
Tabel 2.29.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2016– 2020..	II-44
Tabel 2.30.	Angka Partisipasi Murni Dari Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.31.	Ketersediaan Kurikulum dan Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran PAUD	II-46
Tabel 2.32.	Fasilitas Pendidikan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.33.	Angka Putus Sekolah Tahun 2016 – 2020.....	II-48
Tabel 2.34.	Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2020.....	II-48
Tabel 2.35.	Pendidik Berkualifikasi S-1/D-IV Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.36.	Banyaknya Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs se-Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.37.	Banyaknya Murid TK, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.38.	Banyaknya Guru TK, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.39.	Rasio Guru TK, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-52



Tabel 2.41.	Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	II-56
Tabel 2.42.	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo .	II-57
Tabel 2.43.	Data Jalan Berdasarkan Kewenangannya di Kabupaten Purworejo	II-60
Tabel 2.44.	Data Jalan Poros Desa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purworejo	II-62
Tabel 2.45.	Panjang dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020.....	II-63
Tabel 2.46.	Persentase Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.47.	Jumlah dan Proporsi Jembatan Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.48.	Persentase Peningkatan Kapasitas Jembatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.49.	Persentase Peningkatan Kesesuaian Arah Penggunaan Lahan di Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel 2.50.	Persentase Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh, Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Border City di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.51.	Tersedianya Peraturan & Informasi Rencana Umum dan Rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR & RTR kawasan strategis), Kesesuaian Rencana Tata Ruang dalam RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD, dan Persentase Cakupan Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.52.	Persentase Kinerja Layanan Irigasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-67
Tabel 2.53.	Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan Di Kabupaten Purworejo	II-68
Tabel 2.54.	Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten Purworejo	II-68
Tabel 2.55.	Persentase Luas Titik Genangan yang Tertangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.56.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.57.	Persentase Kesesuaian Bangunan dengan RTBL di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.58.	Cakupan Penanganan Bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.59.	Persentase Permohonan IUJK yang Terlayani sesuai SOP di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-71



Tabel 2.60.	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.61.	Persentase Cakupan Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.62.	Cakupan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.63.	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo	II-74
Tabel 2.64.	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.65.	Persentase Rumah layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.66.	Persentase Kebutuhan Rumah (Backlog Rumah) di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.67.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.68.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.69.	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo	II-80
Tabel 2.70.	Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Purworejo	II-81
Tabel 2.71.	Kinerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.72.	Perkembangan Kapasitas Tramtibumlinmas Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.73.	Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.74.	Kinerja Daerah Urusan Sosial	II-86
Tabel 2.75.	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo	II-88
Tabel 2.76.	Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja	II-91
Tabel 2.77.	Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-94
Tabel 2.78.	Kinerja Daerah Urusan Pangan	II-98
Tabel 2.79.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020	II-99
Tabel 2.80.	Penanganan Desa Rawan/ Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.81.	Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2020	II-100
Tabel 2.82.	Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020	II-102
Tabel 2.83.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020	II-102



Tabel 2.84.	Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dari Tahun 2016 – 2020.....	II-103
Tabel 2.85.	Daya Dukung Air Permukaan Di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2019	II-104
Tabel 2.86.	Kinerja TPB Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-108
Tabel 2.87.	Status Desa Cepat berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020	II-109
Tabel 2.88.	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2016 – 2020	II-109
Tabel 2.89.	Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020	II-110
Tabel 2.90.	Capaian Angka Pertumbuhan Penduduk.....	II-110
Tabel 2.91.	Capaian Pelayanan Kesejahteraan Keluarga	II-111
Tabel 2.92.	Capaian Program Keluarga Berencana	II-112
Tabel 2.93.	Capaian Program Keluarga Sejahtera	II-114
Tabel 2.94.	Capaian Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	II-116
Tabel 2.95.	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.96.	Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.97.	Cakupan Ketersediaan Marka Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.98.	Cakupan Ketersediaan APILL di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.99.	Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo	II-122
Tabel 2.100.	Persentase Tersedianya Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-122
Tabel 2.101.	Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-123
Tabel 2.102.	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.103.	Persentase Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Wajib Uji yang Layak Fungsi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-124



Tabel 2.104. Persentase Kendaraan Operasional Perhubungan yang Layak Fungsi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.105. Jumlah Angkutan Umum dan Jumlah Izin Trayek di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.106. Persentase Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.107. Persentase Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.108. Jaringan Trayek AKAP, AKDP, Angkutan Perdesaaan, dan Angkutan Perbatasan Kabupaten Purworejo.....	II-126
Tabel 2.109. Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan pada Perlintasan Sebidang di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-129
Tabel 2.110. Persentase Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.111. Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.112. Persentase Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-131
Tabel 2.113. Persentase Pertumbuhan UMK, Peningkatan Usaha Mikro yang Dibina, dan Usaha Mikro yang Berkembang menjadi Usaha Kecil di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-132
Tabel 2.114. Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.115. Jumlah Klub, Gedung, Organisasi, dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-135
Tabel 2.116. Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-135
Tabel 2.117. Persentase Layanan Persandian 2016-2020	II-136
Tabel 2.118. Cakupan Pelaku Budaya dalam Even Budaya Daerah..	II-136
Tabel 2.119. Cakupan Pembinaan dan Perlindungan Aset Budaya..	II-137
Tabel 2.120. Pertumbuhan Prestasi Seni dan Budaya Daerah	II-137
Tabel 2.121. Optimalnya Pemanfaatan Wahana Pembinaan Seni Budaya.....	II-137
Tabel 2.122. Capaian Indikator Program Kesenian dan Kebudayaan	II-138
Tabel 2.123. Persentase Tertib Administrasi Kearsipan Lembaga Pemerintah Tahun 2016-2020.....	II-142
Tabel 2.124. Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.....	II-142



Tabel 2.125. Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah	II-143
Tabel 2.126. Persentase Peningkatan Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB	II-144
Tabel 2.127. Cakupan Wilayah Pengembangan TPI	II-144
Tabel 2.128. Jumlah Event Promosi Perikanan.....	II-144
Tabel 2.129. Pesentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan.....	II-145
Tabel 2.130. Kinerja Pengembangan Pariwisata.....	II-145
Tabel 2.131. Capaian Kinerja Subsistem Agroinput dan Agroonfarm	II-146
Tabel 2.132. Jumlah Luasan Panen Komoditas Pertanian (Ha/Tahun)	II-146
Tabel 2.133. Capaian Program Penerapan Teknologi Pertanian.....	II-146
Tabel 2.134. Capaian Program Peningkatan Produksi/Produktivitas Perkebunan.....	II-147
Tabel 2.135. Capaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan.....	II-148
Tabel 2.136. Capaian Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian.....	II-149
Tabel 2.137. Capaian Program Program Peningkatan Produksi Peternakan.....	II-149
Tabel 2.138. Capaian Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	II-150
Tabel 2.139. Capaian Indikator TPB terkait Bidang Pertanian	II-150
Tabel 2.140. Persentase Layanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-151
Tabel 2.141. Persentase Pasar dalam Kondisi Baik, Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah, serta Cakupan Jenis Komoditas yang Dipromosikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-152
Tabel 2.142. Capaian Subsistem Agroprosesing dan Agromarketing	II-152
Tabel 2.143. Capaian Jumlah KUB yang dibina.....	II-153
Tabel 2.144. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina Sistem Pengelolaannya	II-153
Tabel 2.145. Capaian Layanan Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Transmigrasi	II-154
Tabel 2.146. Capaian Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	II-154
Tabel 2.147. Kinerja Bidang Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-155
Tabel 2.148. Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020	II-156
Tabel 2.149. Penjabaran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020	II-158



Tabel 2.150. Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020.....	II-159
Tabel 2.151. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo	II-159
Tabel 2.152. Kinerja Keuangan Daerah Dari Tahun 2016-2020.....	II-160
Tabel 2.153. Target dan Realisasi PAD dari Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)	II-160
Tabel 2.154. Komponen PAD dari Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)	II-161
Tabel 2.155. Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari Tahun 2016-2020.....	II-161
Tabel 2.156. Gambaran Umum Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2021	II-163
Tabel 2.157. Persentase Aparat yang Memiliki Kapasitas Sesuai Standard	II-164
Tabel 2.158. Persentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi.....	II-164
Tabel 2.159. Persentase Pegawai yang Telah Lulus Diklat Prajabatan	II-165
Tabel 2.160. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Diperyaratkan.....	II-165
Tabel 2.161. Tingkat Disiplin Pegawai	II-165
Tabel 2.162. Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	II-165
Tabel 2.163. Realisasi Pengembangan SDM Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020	II-165
Tabel 2.164. Persentase Penguatan SIDA.....	II-167
Tabel 2.165. Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan.....	II-167
Tabel 2.166. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	II-170
Tabel 2.167. Capaian Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020	II-171
Tabel 2.168. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020.....	II-172
Tabel 2.169. Kondisi Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	II-173
Tabel 2.170. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo	II-180
Tabel 3.1. Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2026	III-6
Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-7



Tabel 3.3.	Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020	III-23
Tabel 3.4.	Kontribusi PDRB Kabupaten Purworejo Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2020 (%)	III-27
Tabel 3.5.	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-31
Tabel 3.6.	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-32
Tabel 3.7.	Rasio Belanja Modal Daerah terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-34
Tabel 3.8.	Rasio Belanja Pegawai dengan Total Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-35
Tabel 3.9.	Tax Ratio Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020	III-36
Tabel 3.10.	Ratio Lancar Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-37
Tabel 3.11.	<i>Quick Ratio</i> Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-37
Tabel 3.12.	Ratio Hutang terhadap Aset Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-38
Tabel 3.13.	Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-38
Tabel 3.14.	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-40
Tabel 3.15.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 (dalam ribuan Rupiah)	III-44
Tabel 3.16.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-44
Tabel 3.17.	Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-45
Tabel 3.18.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-46
Tabel 3.19.	Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026	III-48
Tabel 3.20.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026	III-57
Tabel 3.21.	Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026	III-68
Tabel 3.22.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026	III-69



Tabel 3.23.	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.....	III-70
Tabel 5.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.....	V-12
Tabel 6.1.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 1	VI-2
Tabel 6.2.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 2	VI-5
Tabel 6.3.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 3	VI-6
Tabel 6.4.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 4	VI-9
Tabel 6.5.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 5	VI-11
Tabel 6.6.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026	VI-15
Tabel 6.7.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026	VI-29
Tabel 6.8.	Konsep Operasional dan Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.....	VI-36
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Purworejo	VII-2
Tabel 7.2.	<i>Cascading</i> Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.....	VII-4
Tabel 7.3.	Indikasi Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026...VII-87	
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purworejo	VIII-1
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo	VIII-3



DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1.	Skema Keterkaitan Visi Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	I-14
Gambar 1.2.	Skema Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024.....	I-15
Gambar 1.3.	Skema Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	I-16
Gambar 1.4.	Skema Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Visi Misi RPJPD Kab. Purworejo Tahun 2005-2025.....	I-17
Gambar 1.5.	Skema Keterkaitan Visi Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-25
Gambar 1.6.	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran	I-27
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Purworejo.....	II-1
Gambar 2.2.	Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo	II-3
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Purworejo	II-4
Gambar 2.4.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo	II-8
Gambar 2.5.	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Purworejo	II-11
Gambar 2.6.	Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo	II-19
Gambar 2.7.	Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	II-21
Gambar 2.8.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 (%)	II-24
Gambar 2.9.	Perkembangan PDRB ADHK 2010 dan ADHB menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 (triliun rupiah).....	II-30
Gambar 2.10.	PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)	II-32
Gambar 2.11.	Tingkat Inflasi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%).....	II-33
Gambar 2.12.	Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020.....	II-35
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020	II-36



Gambar 2.14.	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020	II-38
Gambar 2.15.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020.....	II-38
Gambar 2.16.	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (ribu rupiah/orang/tahun).....	II-39
Gambar 2.17.	Gedung Olahraga dan Heroes Park.....	II-41
Gambar 2.18.	Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Purworejo ..	II-56
Gambar 2.19.	Proporsi Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo (%)	II-61
Gambar 2.20.	Peta Jaringan Jalan Di Kabupaten Purworejo.....	II-61
Gambar 2.21.	Penanganan Tanah Longsor dan Briefing Tim SAR Penanganan Bencana.....	II-84
Gambar 2.22.	Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019.....	II-101
Gambar 2.23.	Daya Dukung Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019.....	II-101
Gambar 2.24.	Penerimaan Penghargaan Adipura Tahun 2018.....	II-106
Gambar 2.25.	Kepemilikan Kartu Keluarga (%).....	II-106
Gambar 2.26.	Prosentase Kepemilikan KTP Elektronik	II-107
Gambar 2.27.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak.....	II-107
Gambar 2.28.	Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Penduduk Usia 0-18 Tahun	II-108
Gambar 2.29.	Pojok Baca Perpustakaan Paseban Alun-Alun Purworejo	II-139
Gambar 2.30.	Layanan Perpustakaan Keliling	II-140
Gambar 2.31.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan.....	II-140
Gambar 2.32.	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka.....	II-141
Gambar 2.33.	Kegiatan BinteK dan Pelatihan Bidang Kearsipan	II-141
Gambar 2.34.	Unsur-Unsur Reformasi Birokrasi	II-156
Gambar 2.35.	Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-162
Gambar 2.36.	Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Kelompok Umur	II-162
Gambar 2.37.	Pemberian hadiah kepada Juara Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Briket Kokawa dari Purworejo)	II-168
Gambar 2.38.	Kegiatan Krenova Kabupaten Purworejo.....	II-168
Gambar 2.39.	Pengukuhan Dewan Risert Daerah Kabupaten Purworejo	II-169
Gambar 2.40.	Kegiatan Seminar Hasil Penelitian.....	II-169
Gambar 2.41.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020.....	II-172



Gambar 2.42.	Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2015 – 2019.....	II-173
Gambar 2.43.	Distribusi Pengeluaran Pada Penduduk 40% Pendapatan Terrendah Kabupaten Purworejo Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	II-174
Gambar 2.44.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020	II-175
Gambar 2.45.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020	II-176
Gambar 2.46.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020	II-177
Gambar 2.47.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020	II-178
Gambar 2.48.	Interpretasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo	II-205
Gambar 3.1.	Trend dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-11
Gambar 3.2.	Trend dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-13
Gambar 3.3.	Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-14
Gambar 3.4.	Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-15
Gambar 3.5.	Trend dan Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-16
Gambar 3.6.	Trend dan Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-18
Gambar 3.7.	Trend dan Proporsi Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-20
Gambar 3.8.	Trend dan Proporsi Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-21
Gambar 3.9.	Pendapatan Daerah Perkapita Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020	III-23



Gambar 3.10.	Share Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Purworejo Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020	III-25
Gambar 3.11.	Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2020.....	III-25
Gambar 3.12.	Kontribusi APBD Kabupaten Purworejo terhadap PDRB Pada Komponen Konsumsi Pemerintah Tahun 2016-2020.....	III-28
Gambar 3.13.	Kontribusi APBD Kabupaten Purworejo Terhadap PDRB pada Komponen PMTB Tahun 2016-2020.....	III-28
Gambar 3.14.	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-31
Gambar 3.15.	Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-33
Gambar 3.16.	Rasio Belanja Modal Daerah terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-34
Gambar 3.17.	Rasio Belanja Pegawai dengan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020.....	III-35
Gambar 3.18.	<i>Tax Ratio</i> Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020...	III-36
Gambar 4.1.	Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan	IV-43
Gambar 4.2.	Sebaran Desa/Kelurahan Miskin Prioritas 1 Kabupaten Purworejo	IV-44
Gambar 4.3.	Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IV-46
Gambar 4.4.	Isu Strategis Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan	IV-49
Gambar 4.5.	Isu Strategis Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi ...	IV-53
Gambar 4.6.	Isu Strategis Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kelembagaan.....	IV-57
Gambar 6.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo	VI-21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, diawali dengan proses perencanaan yang matang meliputi aspek mekanisme, sistem, maupun substansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menghasilkan suatu rencana yang tepat mutu dan tepat sasaran, proses perencanaan memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat serta menghilangkan sifat-sifat keberpihakan sehingga netralitas dan kualitas perencanaan pembangunan dapat terjaga.

Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah ini merupakan suatu bentuk upaya untuk memberdayakan seluruh potensi daerah yang meliputi semua aspek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Perencanaan pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan sehingga mampu melibatkan dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pendekatan



perencanaan pembangunan tersebut antara lain:

1. Pendekatan politik;
2. Pendekatan teknokratik;
3. Pendekatan partisipatif;
4. Pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*); dan
5. Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Perencanaan pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran-penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan diperlukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Selain berfungsi untuk mengakomodir kepentingan seluruh pihak, berbagai jenis pendekatan perencanaan ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan proses perencanaan dengan proses penganggaran yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Anggaran yang dikucurkan dalam proses pembangunan merupakan cermin dari langkah menuju pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan demikian, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun dengan matang sejak awal sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk menyelaraskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable*



Develelopmen Goals (SDGs) dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang di tingkat nasional dan daerah. Penyelarasan tersebut juga berlaku pada proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong adanya perubahan-perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Aspek pembangunan berkelanjutan terdiri dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Aspek tersebut tertuang dan dijelaskan dalam indikator-indikator capaian dalam TPB. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada yang terlewatkan atau *no-one left behind*. TPB terdiri dari 17 tujuan dan 169 target serta 319 indikator dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Milenium Development Goals* (MDGs).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Oleh karenanya, RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Purworejo dalam lima tahun ke depan juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Kabupaten Purworejo saat ini telah berusia 190 tahun. Setelah ditetapkannya hari jadi pada 27 Februari 1831, pemerintah daerah dan masyarakat setiap tahunnya memperingati hari jadi Kabupaten Purworejo pada tanggal 27 Februari. Pada Desember 2020 telah diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Dengan dilantikannya Bapak Agus Bastian, SE, MM dan Ibu Yuli Hastuti, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada 26



Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 melewati beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD;
3. Penyusunan dokumen Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
6. Penetapan Peraturan Daerah RPJMD.

Proses persiapan penyusunan telah dilakukan sejak tahun 2020 dengan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD yang kemudian disempurnakan hingga Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dilantik. Setelah Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dilantik, maka penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai dengan menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke dalam visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD tersebut kemudian berlanjut hingga penetapan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan tahap IV atau periode terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahannya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik



- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang



- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun



- 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 21);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara



relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan dokumen lain yang relevan di antaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya.

Selanjutnya, dokumen RPJMD yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra bagi Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

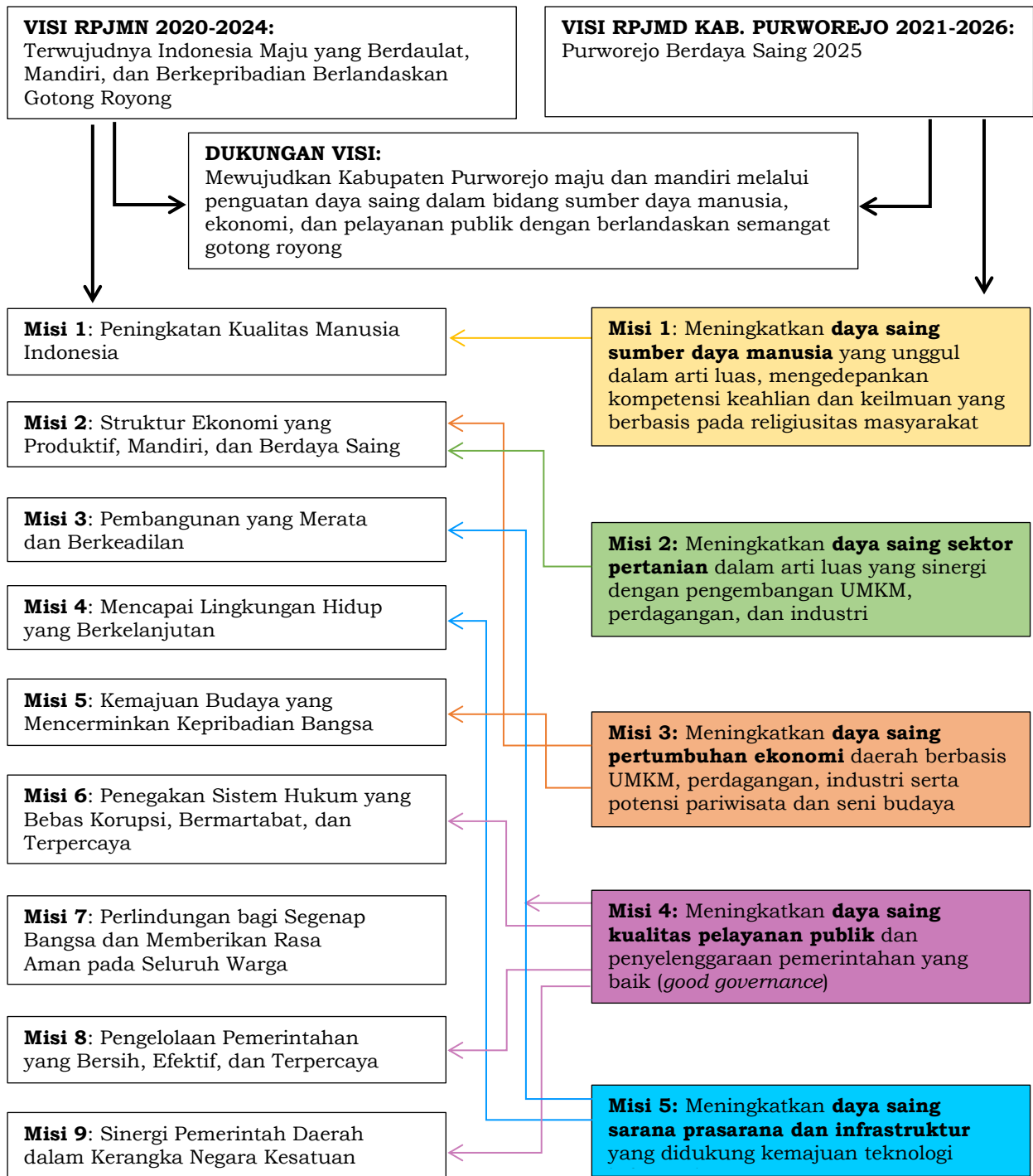
Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 juga mengacu serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten



dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Sedangkan untuk keterkaitan dengan dokumen rencana jangka panjang daerah, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan Pembangunan Jangka Menengah Tahap IV dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel dan skema berikut menunjukkan gambaran keselarasan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025:

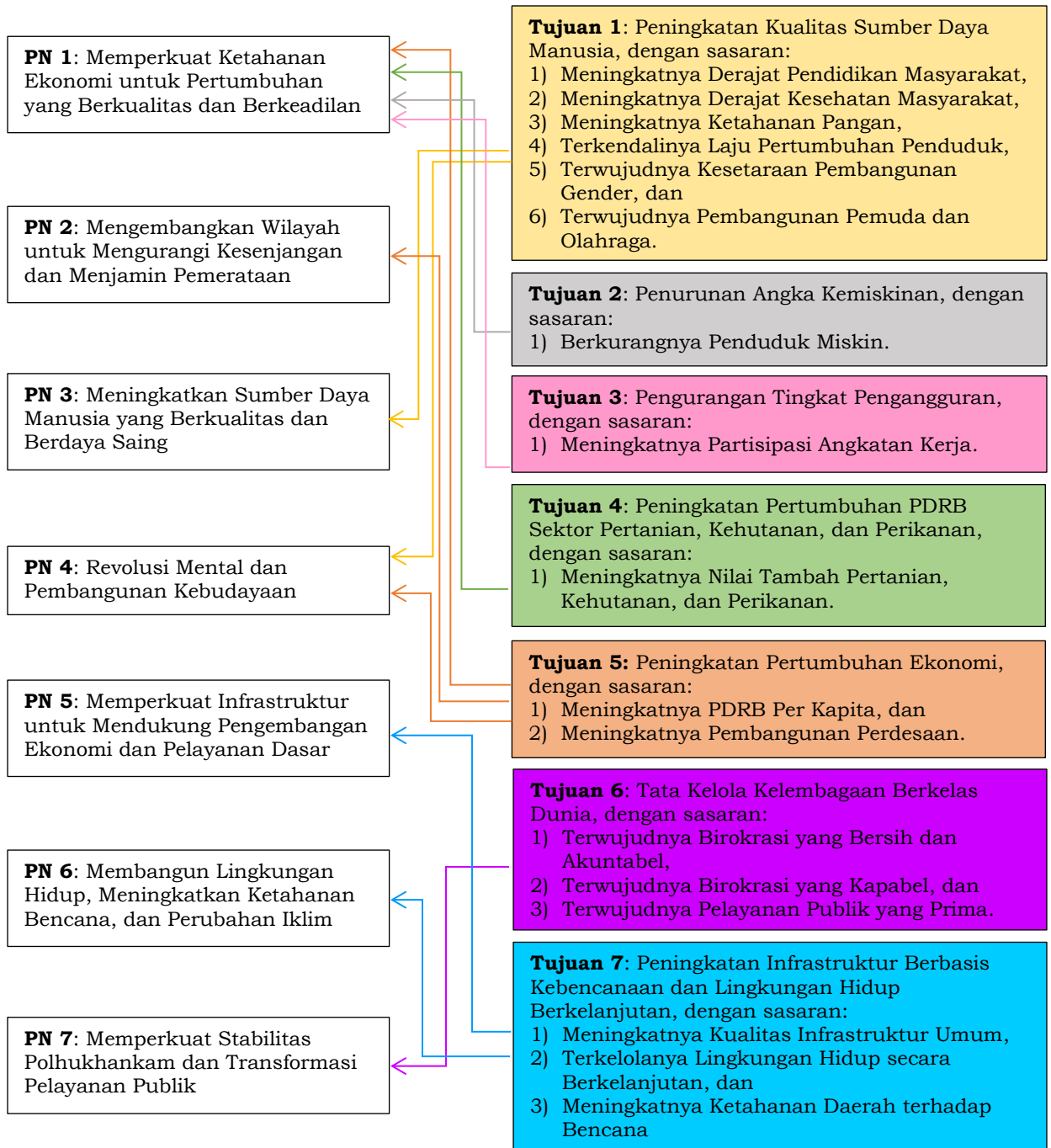


Gambar 1.1. Skema Keterkaitan Visi Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
Sumber : Tim Penyusun, 2021



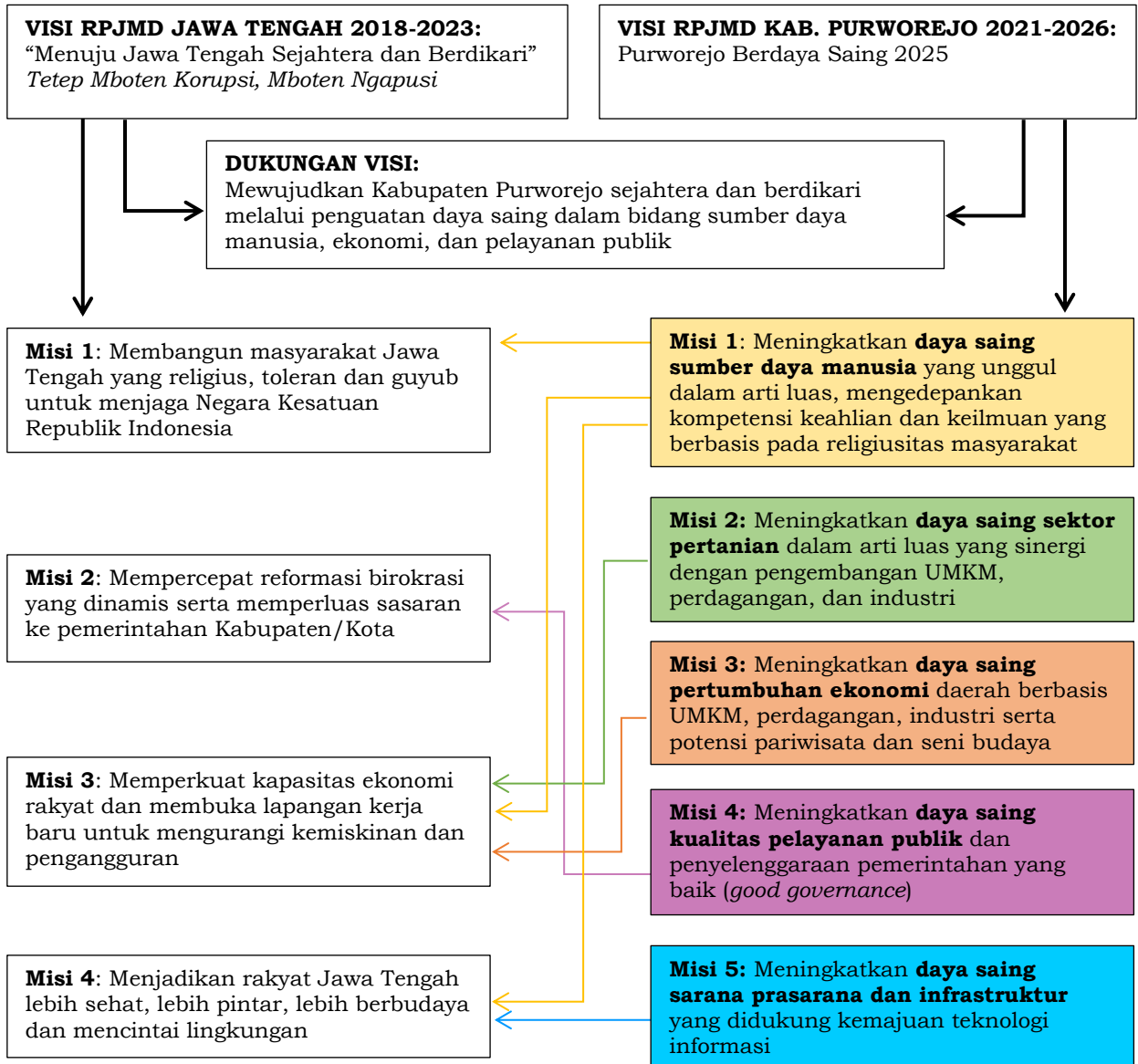
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. PURWOREJO 2021-2026



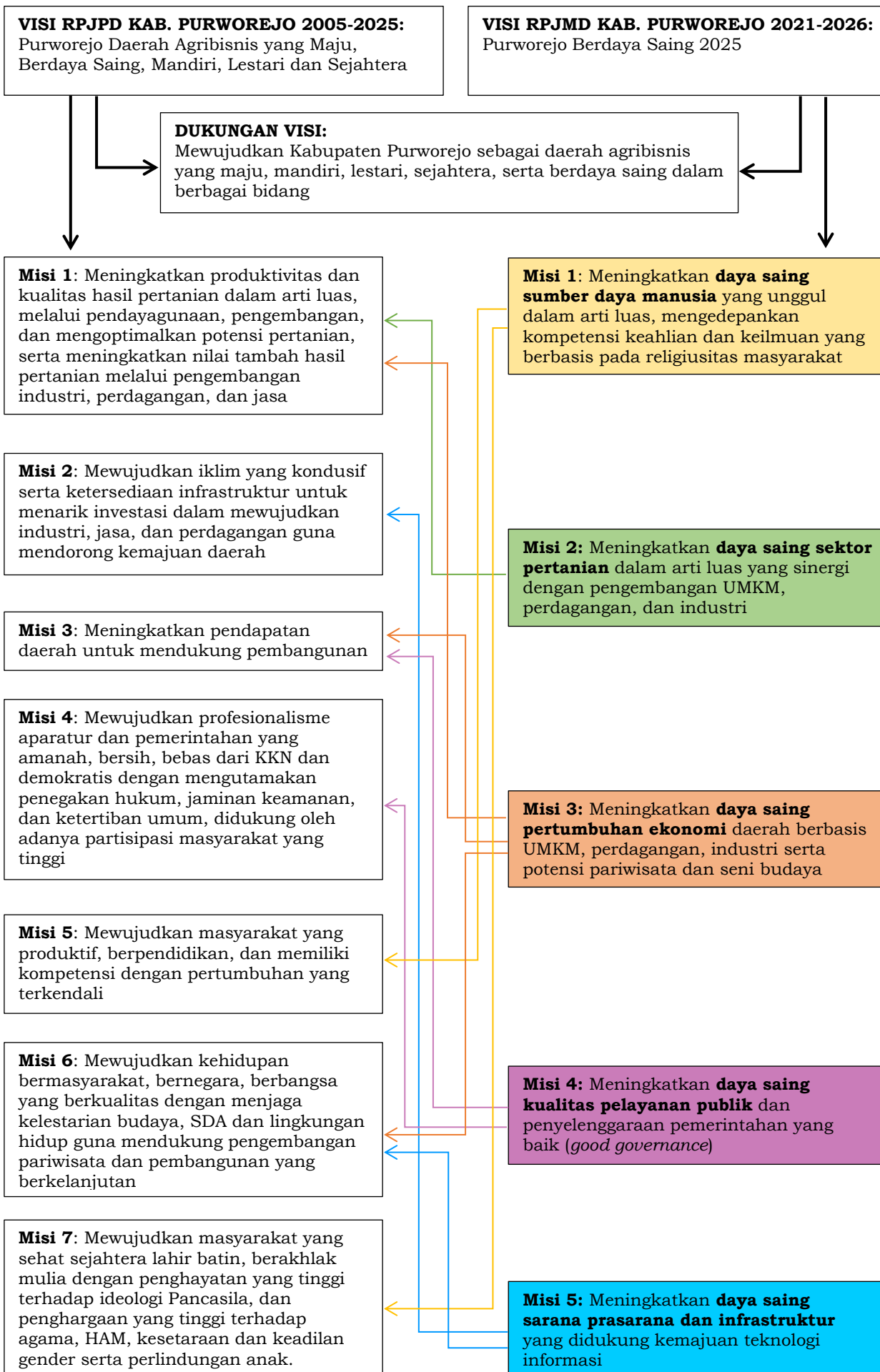
Gambar 1.2. Skema Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Sumber : Tim Penyusun, 2021



Gambar 1.3. Skema Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sumber : Tim Penyusun, 2021



Gambar 1.4. Skema Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Visi Misi RPJPD Kab. Purworejo Tahun 2005-2025

Sumber : Tim Penyusun, 2021



Tabel 1.1. Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, dan RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-2025

	RPJM Nasional 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
Visi	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Purworejo Daerah Agribisnis yang Maju, Berdaya Saing, Mandiri, Lestari dan Sejahtera	Purworejo Berdaya Saing 2025
Misi	Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.	Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
	Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa	Misi 2: Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri



	RPJM Nasional 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
		Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	<p>Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa</p> <p>Misi 3: Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan</p> <p>Misi 6: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan</p>	Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
	Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	Misi 2: Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah	Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi



	RPJM Nasional 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
			Misi 6: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan	
	Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	Misi 2: Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah	Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi
			Misi 6: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan	



	RPJM Nasional 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
	Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa Misi 3: Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Misi 6: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan	Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya



	RPJM Nasional 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
	Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota	Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi	Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Misi 7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota	Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi	Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota	Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi	Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)



	RPJM Nasional 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
	Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota	Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi	Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

Sumber: Tim Penyusun, 2021



1.3.2. Hubungan RPJMD dan RTRW

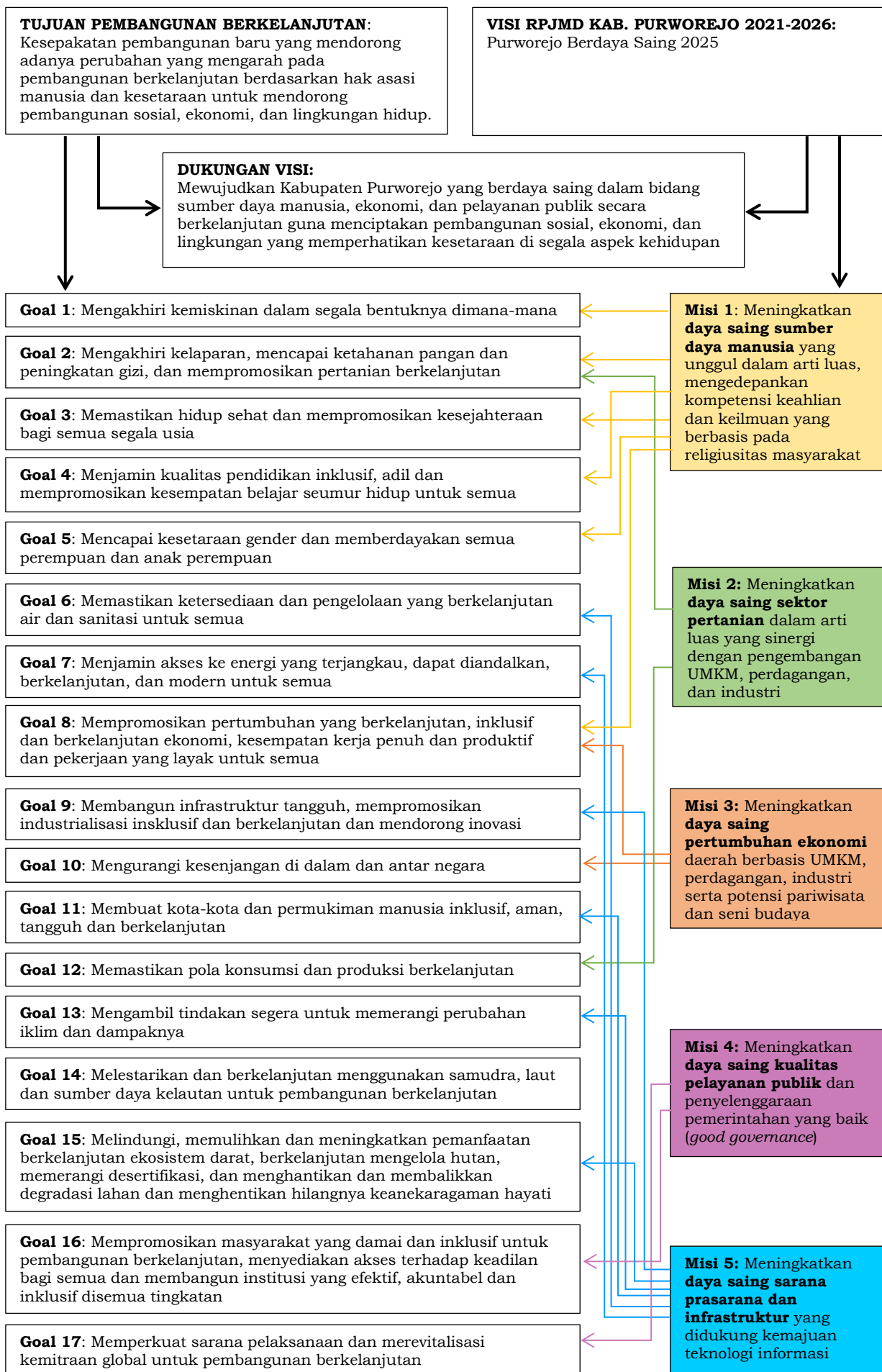
Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 berpedoman pada arah kebijakan pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRWN, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten Purworejo. Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo juga mengintegrasikan rencana struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purworejo sebagai operasionalisasi perwujudan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan KLHS RPJMD

KLHS RPJMD merupakan adalah rangkaian analisis sistematis menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah perlu mengintegrasikan pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan pelaksanaan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang memuat 17 tujuan/ goals empat pilar yakni Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Berikut gambaran skema keterkaitan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar dalam penyusunan KLHS RPJMD:



Gambar 1.5. Skema Keterkaitan Visi Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber : Tim Penyusun, 2021



1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo mulai Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026 melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Renja Perangkat Daerah

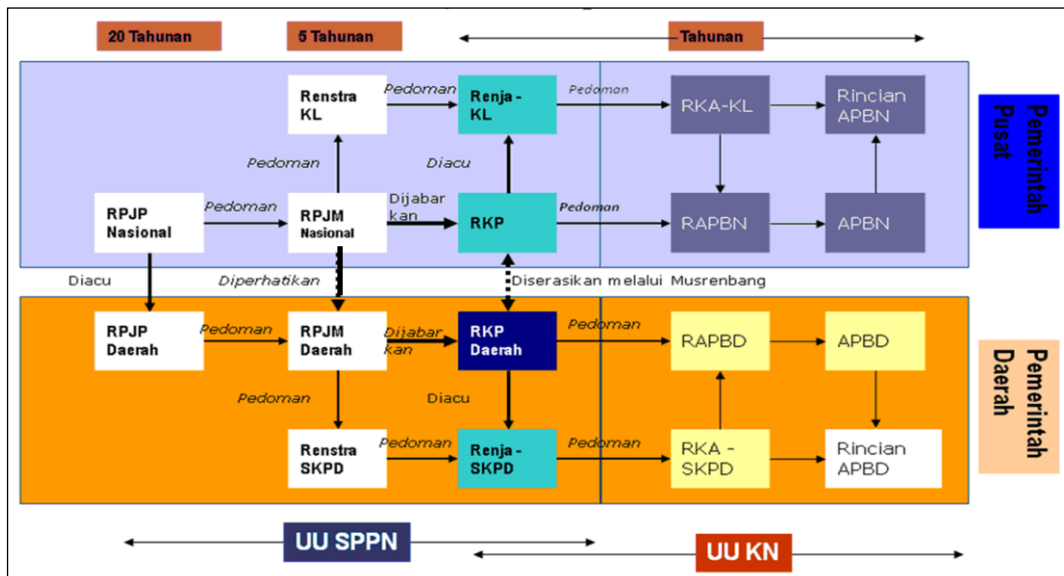
RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.3.7. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan



pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.6. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Purworejo dengan Dokumen Perencanaan Lintas Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, juga harus memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, antara lain Rencana Aksi Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 juga akan dijadikan acuan dalam Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Kabupaten yang akan disusun setelah RPJMD ini ditetapkan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka menengah (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan



cita-cita masyarakat Kabupaten Purworejo.

Dalam RPJMD juga terdapat rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional di dalam perencanaan periode 2021-2026 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purworejo harus mengacu pada dokumen ini.

Adapun tujuan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021-2026;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan; serta
7. Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.



Bab II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Purworejo meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Bab III **Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Bab IV **Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

BAB V **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pembangunan daerah lima tahun ke depan.

BAB VI **Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB VII **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini menyajikan program prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang



dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dan/ atau fungsi pemerintahan.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

BAB IX Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi saat RPJMD berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



Luas administrasi di Kabupaten Purworejo sebesar 1.080,81 km². Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo merupakan 3,18% dari total luasan provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa.

a. Kondisi Geografi Daerah

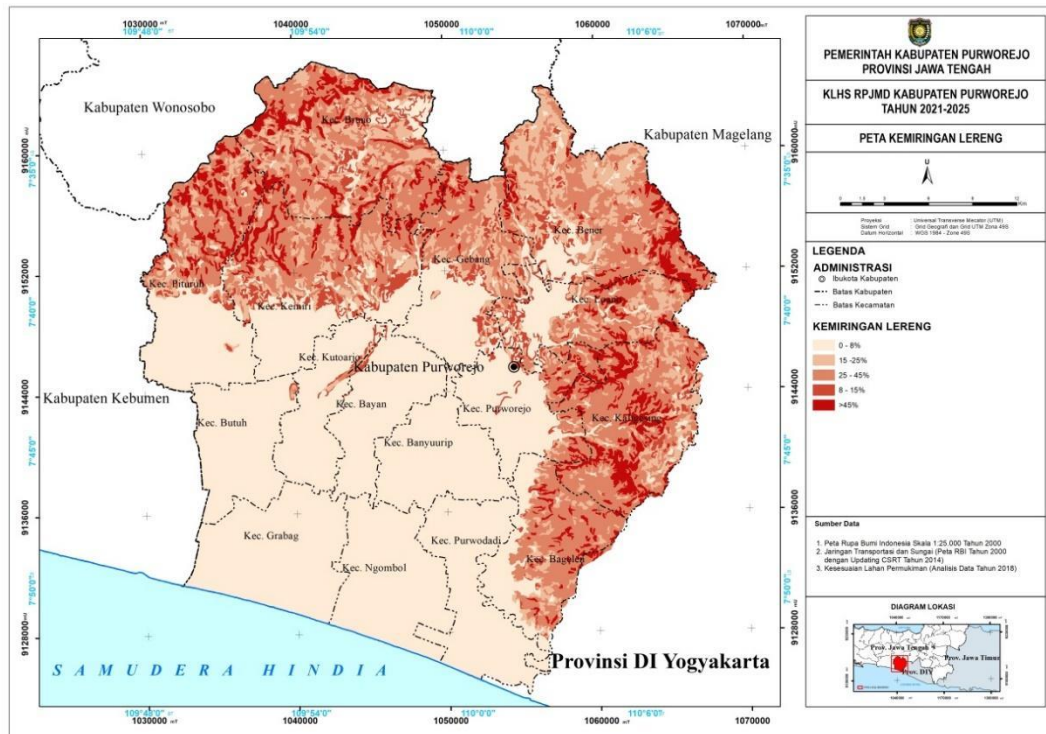
Jumlah desa/kelurahan dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 2.1. Dapat diamati bahwa Kecamatan Bruno (105,68 km²) merupakan kecamatan yang paling luas di tingkat kabupaten. Di samping itu, meski Kecamatan Ngombol luas daerahnya tidak begitu luas (59,08 km²), kecamatan ini memiliki jumlah desa paling banyak, yakni 57 desa.

Tabel 2.1. Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	2	3	4
1	Grabag	32	67,46
2	Ngombol	57	59,08
3	Purwodadi	40	56,09
4	Bagelen	17	63,44
5	Kaligesing	21	78,33
6	Purworejo	25	53,25
7	Banyuurip	27	47,78
8	Bayan	26	44,66
9	Kutoarjo	27	39,2
10	Butuh	41	47,21
11	Pituruh	49	89,01
12	Kemiri	40	103,15
13	Bruno	18	105,68
14	Gebang	25	70,76
15	Loano	21	53,26
16	Bener	28	102,45
	Jumlah	494	1.080,81

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl.



Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

- Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo; Wilayah dengan kelas kelerengan datar ini juga didominasi oleh aktivitas budidaya yang meliputi permukiman, kegiatan produksi, pertanian lahan kering.
- Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
- Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
- Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh;

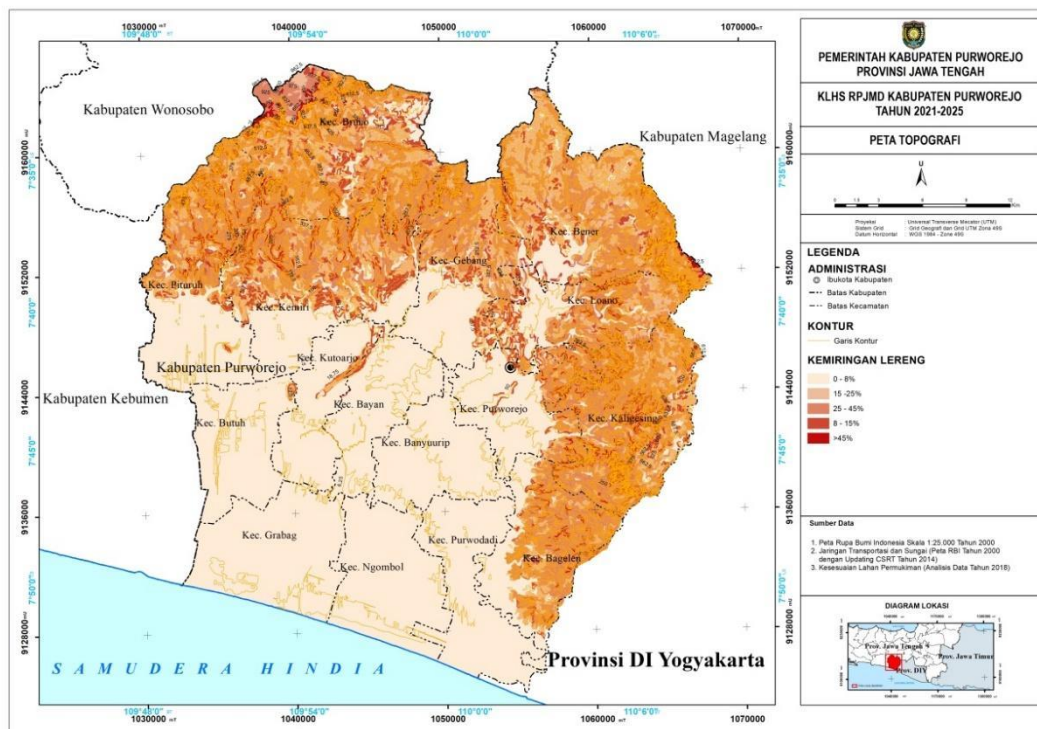
Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 - 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut:

- Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.



- Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

Kenampakan kondisi topografi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Deskripsi mengenai iklim untuk Kabupaten Purworejo lebih dibatasi pada deskripsi mengenai curah hujan dan suhu, dengan pertimbangan bahwa kedua unsur iklim tersebut sangat dominan dengan kerawanan wilayah terhadap ancaman bencana khususnya banjir, kekeringan, dan longsor. Di samping itu, aktivitas sektor pertanian yang menjadi sektor basis bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedua unsur iklim tersebut, khususnya curah hujan.

Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Rata-rata suhu udara antara 19°C–28°C dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar 620 mm/tahun hingga 3720 mm/tahun, sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 70%–90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 311 mm dan bulan Maret sebesar 289 mm. Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada



potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenahan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.

b. Hidrologi

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Purworejo terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yakni sungai, mata air, dan air waduk/bendungan yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.2. Data DAS di Kabupaten Purworejo

No.	Nama DAS	Debit Min (M3/Det)	Debit Max (M3/Det)	Luas (Ha)
1	2	3	4	5
1	DAS Cokroyasan	251	541	35100
2	DAS Mawar	245	1347	78000
3	DAS Bogowonto	600	1187	59000

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Selain sungai, bendung/waduk juga menjadi sumber air permukaan di Kabupaten Purworejo. Pembangunan Bendung Bener di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat juga menjadi salah satu sumber air yang dapat digunakan oleh kebutuhan masyarakat sehari hari dan pengairan bagi pertanian. Disisi lain, terdapat 59 titik mata air di Kabupaten Purworejo dengan total debit 169,2 m³/ detik. Berikut kawasan



mata air di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.3. Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
1	Tuk Umbul	Medono	Bener	10,10
2	Siloko	Ngasinan	Bener	3,00
3	Pening	Ngasinan	Bener	2,00
4	Sirebut	Benowo	Bener	10,00
5	Tuksiwaru	Limbangan	Bener	10,00
6	Tuk Siwuang	Limbangan	Bener	7,00
7	Tuk Mudal	Kalinongko	Loano	42,50
8	Simbar Joyo	Mudalrejo	Loano	27,78
9	Sedayu / Ngrau	Sedayu	Loano	3,40
10	Tuk Songo	Purworejo	Purworejo	7,00
11	Kedungkebo	Pangenrejo	Purworejo	4,64
12	Simbarjoyo	Mudalrejo	Purworejo	27,78
13	Sekalapan	Pakem	Gebang	1,50
14	Tirip	Rendeng	Gebang	1,70
15	Siranda	Girijoyo	Pituruh	5,00
16	Gondosuli I	Pamriyan	Pituruh	2,00
17	Gondosuli II	Pamriyan	Pituruh	3,00
18	Sipetung	Wonosido	Pituruh	3,00
19	Kedondong	Kaligondang	Pituruh	2,00
20	Andong	Brunosari	Bruno	3,00
21	Siglodak	Cempedak	Bruno	2,00
22	Pakisarum	Pakisarum	Bruno	1,00
23	Plipiran	Plipiran	Bruno	2,00
24	Tirip	Clapar	Bagelen	10,00
25	Beji	Clapar	Bagelen	5,00
26	Kaliputat	Clapar	Bagelen	3,00
27	Kali Clapar	Clapar	Bagelen	3,00
28	Nglegok	Soko	Bagelen	5,00
29	Lemah Putih	Soko	Bagelen	20,00
30	Sipoh	Semagung	Bagelen	5,00
31	Ngaglik	Semagung	Bagelen	4,00
32	Sekopek	Semono	Bagelen	4,00
33	Karangginem	Semono	Bagelen	4,00
34	Gandik	Semono	Bagelen	4,00
35	Depok	Semono	Bagelen	6,00
36	Klegen	Semono	Bagelen	3,00
37	Belik	Piji	Bagelen	5,00
38	Pernolo	Kemanukan	Bagelen	5,00
39	Jembangan	Kemanukan	Bagelen	3,00
40	Bawi	Kemanukan	Bagelen	3,00
41	Sipucung	Kemanukan	Bagelen	3,00
42	Sitolang	Sokoagung	Bagelen	2,00
43	Pucungsawit	Sokoagung	Bagelen	2,00
44	Sidandang	Hargorojo	Bagelen	10,00
45	Curug	Sokoagung	Bagelen	6,00
46	Pancuran	Tlogokotes	Bagelen	2,00
47	Singobarong	Somorejo	Bagelen	2,00
48	Pletuk Kidul	Dadirejo	Bagelen	2,00
49	Sudorogo 1	Sudorogo	Kaligesing	2,00
50	Sudorogo 2	Sudorogo	Kaligesing	2,00
51	Tawangsari 1	Tawangsari	Kaligesing	3,00
52	Tawangsari 2	Tawangsari	Kaligesing	1,00
53	Tawangsari 3	Tawangsari	Kaligesing	1,00
54	Tlogobulu 1	Tlogobulu	Kaligesing	3,00



No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
55	Tlogobulu 2	Tlogobulu	Kaligesing	1,00
56	Purbowono 1	Purbowono	Kaligesing	2,00
57	Purbowono 2	Purbowono	Kaligesing	3,00
58	Purbowono 3	Purbowono	Kaligesing	2,00
59	Kaliglagah	Kaliglagah	Kemiri	2,00

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Potensi air bawah tanah Kabupaten Purworejo berada pada Cekungan air bawah tanah (CAT) Kebumen-Purworejo meliputi daerah Gombang bagian barat sampai Kabupaten Purworejo bagian Timur. Luas CAT Kebumen-Purworejo ini adalah 109.800 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/ dangkal sebesar 269,6 juta m³ pertahun. Sedangkan luas cekungan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Purworejo adalah 48.480 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/dangkal 119,04 juta m³/tahun.

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan dengan mengamati pola ruang pada dokumen RTRW Kabupaten Purworejo tahun 2021-2041. Pola ruang Kabupaten Purworejo dibagi atas kawasan peruntukan budidaya dan kawasan peruntukan lindung.

Tabel 2.4. Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

Rencana Pola Ruang Wilayah		Luas (ha)	Luas Total (ha)
Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Konservasi	827,1	919,1
	Kawasan Cagar Budaya	0,0	
	Kawasan Ekosistem Mangrove	91,9	
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	8.321,7	105.895,5
	Kawasan Perkebunan Rakyat	28.214,0	
	Kawasan Pertanian	39.082,1	
	Kawasan Perikanan	18,1	
	Kawasan Pertambangan dan Energi	96,4	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.250,4	

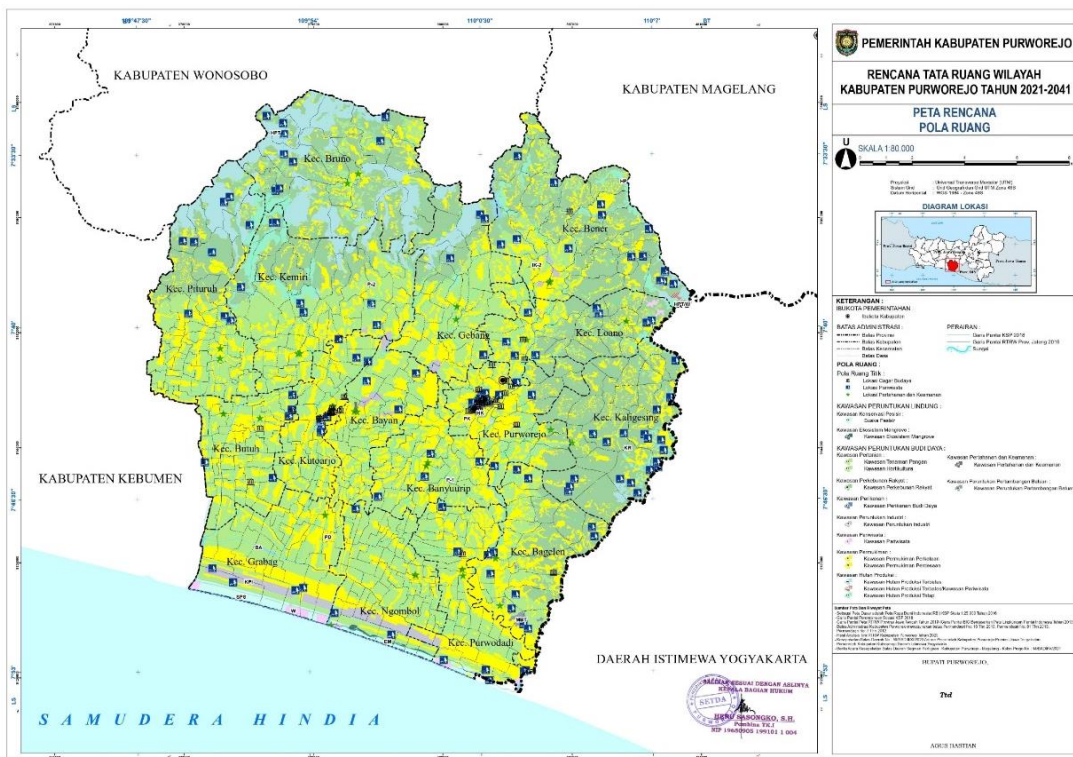


Rencana Pola Ruang Wilayah		Luas (ha)	Luas Total (ha)
	Kawasan Pariwisata	343,3	
	Kawasan Permukiman	28.517,5	
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	51,9	
Badan Air	Badan Air	1.330,5	1.330,5
Luas Total (ha)		108.145,0	108.145,0

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Ditunjukkan dalam tabel di atas, kawasan peruntukan lindung Kabupaten Purworejo terbagi atas kawasan konservasi, kawasan cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove. Kawasan peruntukan budi daya terbagi menjadi kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kabupaten Purworejo memiliki 919,1 ha kawasan peruntukan lindung atau 0,85% dari seluruh luasan di kabupaten. Kawasan ini berada di selatan kabupaten, tepatnya di Kecamatan Grabag, Purwodadi, dan Ngombol. Sementara itu, 105.895,5 ha (97,92%) ialah kawasan peruntukan budi daya. Selebihnya, 1.330,6 ha (1,23%) merupakan badan air. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada peta rencana pola ruang Kabupaten Purworejo berikut.



Gambar 2.4. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo

(Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041)



Berdasarkan rencana pola ruang, Kabupaten Purworejo memiliki kawasan konservasi seluas 827,1 ha yang merupakan suaka pesisir (lokasi: 3 kecamatan). Adapun kawasan ekosistem mangrove seluas 91,9 ha di Kecamatan Ngombol dan Purwodadi.

Tabel 2.5. Luasan Kawasan Peruntukan Lindung Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

No	Kecamatan	Kawasan Konservasi	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
1	Kec. Grabag	490,2	0,0	0,0
2	Kec. Ngombol	207,9	0,0	76,8
3	Kec. Purwodadi	129,0	0,0	15,1
4	Kec. Bagelen	0,0	0,0	0,0
5	Kec. Kaligesing	0,0	0,0	0,0
6	Kec. Purworejo	0,0	0,0	0,0
7	Kec. Banyuurip	0,0	0,0	0,0
8	Kec. Bayan	0,0	0,0	0,0
9	Kec. Kutoarjo	0,0	0,0	0,0
10	Kec. Butuh	0,0	0,0	0,0
11	Kec. Pituruh	0,0	0,0	0,0
12	Kec. Kemiri	0,0	0,0	0,0
13	Kec. Bruno	0,0	0,0	0,0
14	Kec. Gebang	0,0	0,0	0,0
15	Kec. Loano	0,0	0,0	0,0
16	Kec. Bener	0,0	0,0	0,0
Luas Total (ha)		827,1	0,0	91,9

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Kabupaten Purworejo memiliki arahan penggunaan lahan dominan pertanian, seluas 39.082,1 ha atau 36,14% dari luasan total daerah, diikuti permukiman dengan luas 28.517,5 ha (26,37%) dan perkebunan rakyat dengan luas 28.214,0 ha (26,09%). Kawasan pertanian terbagi menjadi kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura, sementara kawasan hutan produksi terbagi ke dalam kawasan hutan produksi terbatas/ kawasan pariwisata dan kawasan hutan produksi tetap. Adapun kawasan permukiman dibedakan menjadi perdesaan-perkotaan.

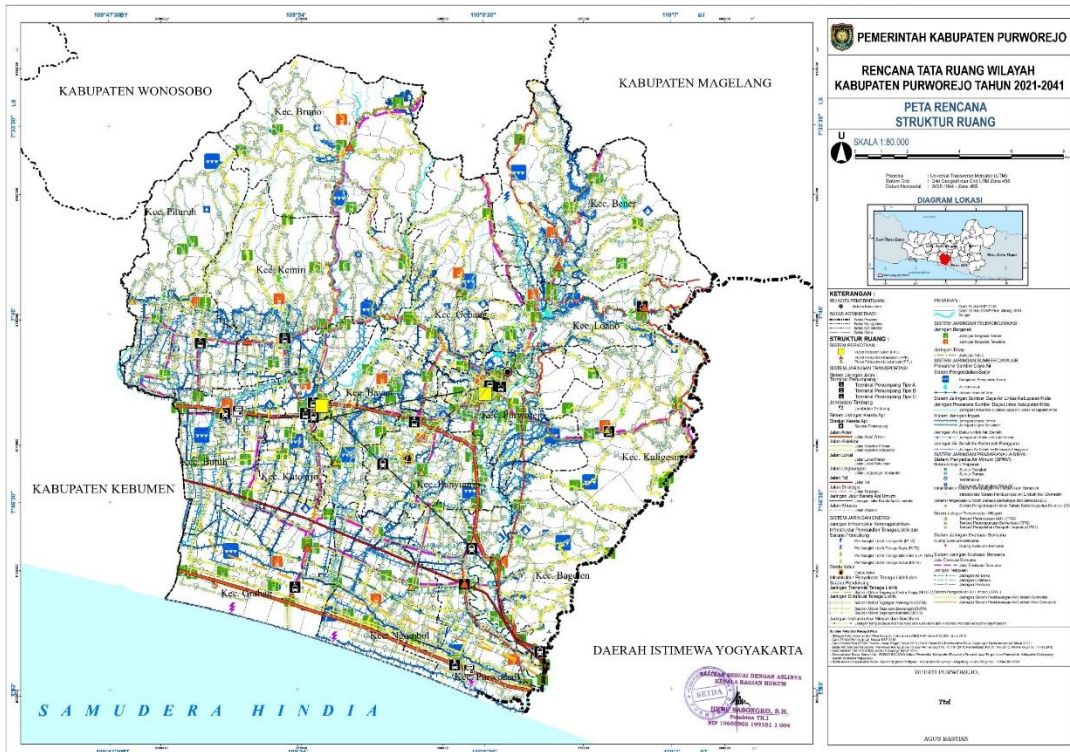
Kawasan hutan produksi dan perkebunan rakyat menjulang di sisi timur dan utara kabupaten, dengan wilayah berupa perbukitan. Kawasan pertanian dan permukiman cukup merata di seluruh kecamatan, kecuali luasan pertanian di Kecamatan Kaligesing. Sementara Kawasan peruntukan industri lebih terpusat di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, dan Bayan.

**Tabel 2.6. Luasan Kawasan Peruntukan Budi Daya Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041**

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata	Kawasan Permukiman	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
1	Kec. Grabag	90,2	57,0	3.176,6	0,0	0,0	497,9	168,7	2.157,5	2,0
2	Kec. Ngombol	40,9	16,8	3.789,0	0,0	0,0	294,0	25,1	1.403,4	0,0
3	Kec. Purwodadi	2,8	1,8	2.928,8	0,0	0,0	130,3	70,1	2.240,1	0,0
4	Kec. Bagelen	0,0	1.796,2	1.982,0	0,0	96,4	0,0	0,0	2.394,1	0,0
5	Kec. Kaligesing	466,9	5.959,6	108,2	0,0	0,0	0,0	3,6	1.274,6	0,0
6	Kec. Purworejo	0,0	1.340,8	1.681,6	0,0	0,0	0,0	23,1	2.153,4	33,6
7	Kec. Banyuurip	0,0	0,0	2.856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.878,1	0,9
8	Kec. Bayan	0,0	0,0	2.456,1	0,0	0,0	150,1	0,0	1.767,1	12,2
9	Kec. Kutoarjo	0,0	0,0	2.298,3	0,0	0,0	0,0	3,6	1.586,4	3,2
10	Kec. Butuh	0,0	0,0	2.953,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.635,1	0,0
11	Kec. Pituruh	1.493,3	2.414,7	2.988,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.941,7	0,0
12	Kec. Kemiri	1.264,0	2.489,4	4.356,8	0,0	0,0	42,2	0,0	2.063,2	0,0
13	Kec. Bruno	3.434,3	4.881,8	1.101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.095,3	0,0
14	Kec. Gebang	688,5	1.486,8	3.102,8	6,0	0,0	66,0	0,0	1.618,8	0,0
15	Kec. Loano	65,6	2.287,0	1.557,0	4,7	0,0	7,4	49,2	1.289,2	0,0
16	Kec. Bener	775,3	5.482,1	1.745,1	7,4	0,0	62,4	0,0	2.019,7	0,0
Luas Total (ha)		8.321,7	28.214,0	39.082,1	18,1	96,4	1.250,4	343,3	28.517,5	51,9

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Kabupaten Purworejo yang terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadikan posisi Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi tersebut berada pada titik silang transportasi lintas selatan Jawa Tengah yang dilalui jalan arteri selatan Pulau Jawa maupun Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), interkoneksi dengan jalur utara-selatan melalui jalan kolektor primer, serta jalur kereta api selatan Jawa. Hadirnya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Rencana struktur ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.5. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Purworejo

(Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041)

Terdapat beberapa Kawasan Strategis di Kabupaten Purworejo. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Purworejo merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu berupa kawasan Borobudur-Kebumen-Dieng dan sekitarnya. Sedangkan kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas kawasan strategis yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial budaya; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Perwujudan kawasan strategis yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas Kawasan sekitar Badan Otorita Borobudur; sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Kawasan Kota Perbatasan (Border City) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag. Perwujudan Kawasan sekitar Badan Otorita Borobudur terdiri atas: pengembangan dan pengelolaan kawasan; peningkatan promosi, iklim investasi, dan realisasi investasi; peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata; pengembangan terminal penumpang untuk pariwisata;



pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat; pengembangan kawasan harus sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; pengembangan kawasan dengan memperhatikan kawasan rawan bencana; dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana. Kehadiran Badan Otorita Borobudur seluas ± 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas ± 50 Ha dalam Peraturan Presiden 46 tahun 2017 merupakan salah satu titik perkembangan baru di wilayah Pegunungan Menoreh di perbatasan tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo DIY. Kawasan Badan Otorita Borobudur (BOB) akan menjadi salah satu destinasi wisata baru dengan konsep *nomadic tourism* diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purworejo.

Untuk membuka akses menuju kawasan Badan Otorita Borobudur terdapat empat pintu utama, yaitu: dua dari Kabupaten Purworejo meliputi jalan Kabupaten Purworejo ruas Kalijambe-Cacaban Lor dan ruas Tumbak Anyar-Banyuasin, kemudian satu ruas dari Magelang melalui Salaman-Pekacangan-Cacaban Lor, dan satu ruas dari Kabupaten Kulon Progo melalui Pagerharjo menuju Sedayu. Pada tahun 2019 telah direncanakan peningkatan jalan pada ruas-ruas tersebut di wilayah Kabupaten Purworejo menuju akses ke Kabupaten Magelang menuju Candi Borobudur dan akses ke Kabupaten Kulon Progo menuju Bandara YIA melalui jalan Bedah Menoreh.

Perwujudan Kawasan sekitar Bandara YIA (*border city*) terdiri atas: rehabilitasi dan revitalisasi kawasan; pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan; peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian; pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat; pembangunan kawasan sesuai dengan tujuan aerotropolis; penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik; dan pengembangan kawasan harus sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. *Yogyakarta International Airport* diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya kawasan *aerotropolis* di Jawa Tengah bagian selatan.

Dengan dibangunnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener berdampak pada arah pengembangan wilayah di



Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener dengan tinggi 159 meter dan panjang timbunan 543 meter akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Debit air yang dihasilkan dari Bendungan Bener sebesar 1.500 liter/detik dapat dimanfaatkan untuk suplai air baku untuk wilayah Perkotaan Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan *Yogyakarta International Airport*. Selain itu, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6 MW, pengairan sawah untuk beberapa Daerah Irigasi (DI) dan sebagai Kawasan wisata.

Dengan karakteristik Kabupaten Purworejo yang letaknya strategis maka layak dikembangkan wilayahnya melalui konsep-konsep *Transit Oriented Development* (TOD) didukung dengan berbagai potensi ekonomi pada masing-masing kawasan strategis. Beberapa titik kawasan yang akan dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan Kutoarjo yang didukung keberadaan Stasiun Besar Kutoarjo. Bus Rapid Transit (BRT) sebagai angkutan Aglomerasi Purwomanggung koridor Stasiun Kutoarjo-Borobudur mulai beroperasi mulai tahun 2020. Sedangkan *Bus Rapid Transit* (BRT) untuk koridor Kutoarjo-Dieng direncanakan beroperasi pada tahun 2021. Keberadaan Stasiun Wojo sebagai pemadu antarmoda transportasi kereta api, bus, dan pesawat udara di kawasan perkotaan perbatasan (*Border City*) di wilayah Kecamatan Bagelen dan Purwodadi terkait keberadaan *Yogyakarta International Airport* (YIA) serta. Untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka masing-masing perkotaan transit akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan amenities perkotaan untuk memenuhi kebutuhan transit. Selain itu pembangunan rel ganda Kutoarjo-Kroya diharapkan meningkatkan akses ke Stasiun Besar Kutoarjo.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Malang diharapkan dapat memacu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Adapun kegiatan-kegiatan yang masuk dalam Peraturan Presiden tersebut diantaranya Pembangunan Ring



Road Timur Purworejo, Peningkatan Jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo- Batas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), peningkatan jalan ke zona Otorita Borobudur (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano), Peningkatan Jalan Banyuasin-Tridadi-Pucungroto-Batas DIY, Pembangunan SPAM Regional (JDU) Keburejo, Pembangunan SPAM IKK Bagelen dan Pembangunan Sekolah Vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata. Pada pembangunan ring road Timur Purworejo, Pemerintah Daerah sudah menyiapkan beberapa readiness criteria, diantaranya penyusunan dokumen masterplan (2017), dokumen feasibility study (2021), penyusunan dokumen appraisal (2020) dan pengadaan lahan (2021). Pengadaan lahan Tahap I telah dilakukan mulai dari Jembatan Sejiwan sampai dengan Pasar Ngasem. Sedangkan pengadaan lahan tahap II akan dilaksanakan mulai dari Pasar Ngasem sampai Jembatan Tlirenggo. Sedangkan untuk jalan akses menuju BOB via Sedayu-Loano, sudah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 1 km melalui dana TMMD.

d. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purworejo terdapat lima potensi rawan bencana, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi, dan potensi rawan bencana kekeringan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Data Informasi Bencana Indonesia yang diluncurkan dari BNPB, diketahui dari tahun 2015-2019, Kabupaten Purworejo telah mengalami 91 kejadian bencana alam, yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, dan kekeringan.

Tabel 2.7. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019

Tahun	Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Pasang	Puting Beliung	Ke-keringan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
2019	2	6	0	10	1	19
2018	0	8	1	3	1	13
2017	5	13	0	13	0	31
2016	3	7	0	5	0	15
2015	3	9	0	1	0	13
Jumlah	13	43	1	32	2	91

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2020



Selama lima tahun terakhir terdapat 91 kejadian bencana alam di Kabupaten Purworejo. Dimana bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana tanah longsor dan bencana puting beliung. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kejadian bencananya, berikut dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.8. Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019

Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Rumah Rusak				Jembatan rusak
		Meninggal	Terluka	Menderita	Berat	Sedang	Ringan	Terendam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Banjir	13	60	10	41.760	76	108	94	3.818	15
Tanah Longsor	43	53	16	1.700	31	138	173	0	1
Gelombang Pasang	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	32	0	11	1.739	20	45	121	0	0
Kekeringan	2	0	0	78.608	0	0	0	0	0

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2020

Selama lima tahun terakhir, bencana di Kabupaten Purworejo telah mengakibatkan beberapa korban baik korban jiwa maupun rumah hingga rusaknya infrastruktur yang ada. Selama lima tahun terakhir, bencana banjir di Kabupaten Purworejo mengakibatkan 60 jiwa meninggal dunia, 10 jiwa terluka, dan 41.760 jiwa menderita, hingga menyebabkan beberapa unit rumah rusak dan terendam. Sedangkan bencana yang menyebabkan paling banyak penduduk menderita adalah bencana kekeringan, di mana menyebabkan 78.608 jiwa menderita.

1. Potensi Rawan Bencana Tanah Longsor

Potensi rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo terdapat di Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Loano, Bener, Gebang, Bruno, Kemiri, Pituruh dan Kutoarjo. Kawasan ini merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak.

**Tabel 2.9. Desa/ Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo**

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Longsor		
	Tinggi	Sedang	Rendah
1	2	3	4
Grabag	0	0	0
Ngombol	0	0	0
Bagelen	7	1	9
Kaligesing	16	5	0
Purworejo	8	1	16
Banyuurip	0	0	0
Bayan	0	0	0
Kutoarjo	3	1	23
Butuh	0	0	0
Pituruh	9	4	36
Kemiri	17	5	18
Bruno	15	3	0
Gebang	9	5	11
Loano	15	6	0
Bener	21	3	4
Jumlah	120	34	117

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2019

2. Potensi Rawan Bencana Banjir

Potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Banyuurip, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Kutoarjo, Kemiri, Pituruh, Gebang, Loano, dan Bener. Kawasan ini memiliki topografi yang rendah dan rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Diantara kecamatan yang rawan banjir, Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi dan Bagelen adalah kecamatan yang sering terdampak banjir karena posisinya yang paling rendah. Genangan banjir di kawasan ini dapat bertahan lebih dari 1 minggu dan selain merendam kawasan permukiman, banjir juga merendam kawasan pertanian sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen di kawasan tersebut.

3. Potensi Rawan Bencana Gelombang Pasang Dan Tsunami

Potensi rawan gelombang pasang dan tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di pesisir Pantai Selatan yang kawasannya berada di Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-tempat yang terkena pasang-surut air laut akibat gaya gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim-musim tertentu. Sedangkan kawasan rawan tsunami adalah tempat-



tempat yang terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran tanah.

Tsunami mempunyai kecepatan yang berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama perjalanan dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret segala sesuatu ke laut. Sampai saat ini, di Kabupaten Purworejo belum memiliki alat deteksi dini tsunami dan baru mengandalkan gejala alam saja.

Pada jarak 0-500 m dari pantai terdapat 11 desa yang berpotensi rawan terhadap bencana gelombang pasang. Ketika gelombang pasang terjadi, air laut yang masuk tidak dapat kembali ke laut sehingga membanjiri kawasan di sekitarnya. Hal ini dikarenakan di kawasan pesisir Kabupaten Purworejo terdapat gumuk-gemuk pasir dan di muara sungai sudah tertutup sedimentasi. Air laut yang bercampur dengan air sungai menjadikan air bersifat payau. Bencana gelombang pasang ini selain merusak kawasan pertanian dan pertambakan, juga mengganggu aktivitas kawasan permukiman di sekitarnya yang ikut terendam luapan air. Banjir baru dapat surut setelah sedimentasi di muara sungai dibuka dan air dapat mengalir kembali ke laut. Usaha pembangunan *jetty* di muara sungai Wawar dan Cokroyasan untuk mengatasi sedimentasi pasir hanya efektif selama 1 tahun. Setelah itu, arah gelombang berubah dan sedimentasi di muara tetap terjadi.

Berbeda halnya dengan bencana gelombang pasang, bencana tsunami berpotensi melanda kawasan yang lebih luas. Dari pengalaman bencana tsunami yang pernah terjadi di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, ketinggiannya mencapai 15 m dan mencapai



radius $\pm 1,5$ km dari tepi pantai. Dari asumsi ini, maka desa yang potensi rawan bencana tsunami mencapai ± 33 desa. Tetapi bila prediksi dibuat lebih besar dengan radius mencapai ± 5 km dari tepi pantai, maka desa yang berpotensi rawan bencana tsunami berkembang menjadi 56 desa.

4. Potensi Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah tempat-tempat yang rentan mengalami peristiwa pelepasan energi sehingga menyebabkan dislokasi/pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, runtuhannya tanah, aktivitas gunung berapi, dan ledakan nuklir. Energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menyebabkan korban jiwa. Potensi rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo.

5. Potensi Rawan Bencana Kekeringan

Potensi rawan bencana kekeringan ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung *control point*. Sedangkan kekeringan dari aspek air bersih berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh air bersih.

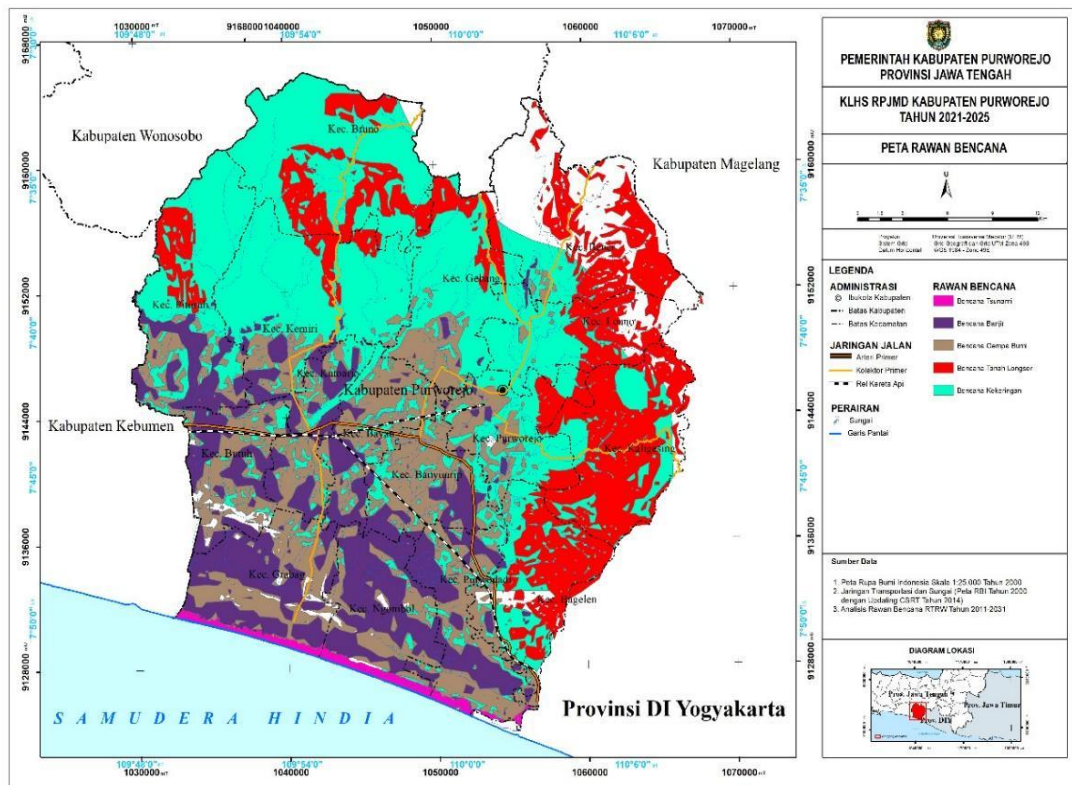
Kekeringan pada daerah irigasi disebabkan karena berkurangnya debit air, tingginya kebocoran pada saluran, tidak adanya saluran tersier, tidak taatnya jadwal pola tanam, kelembagaan P3A tidak berjalan dengan baik, pengambilan air secara liar, kurangnya kesadaran untuk bertanam palawija, dan sistem konvensional yang masih digunakan petani dalam bertanam padi.

Debit sungai terbesar terdapat pada Sungai Bogowonto karena sungai ini merupakan aliran primer dari DAS Bogowonto. Debit sungai dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan



kurangnya sistem penyimpanan air akibat berkurangnya daerah konservasi di sekitar aliran sungai. Hal ini berdampak pada musim kemarau, terdapat sungai/kali yang tidak memiliki debit air bahkan sampai kering hingga musim hujan berikutnya.

Sementara itu, potensi rawan bencana kekeringan air bersih hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo. Untuk daerah pegunungan, pada beberapa kasus sumber air bersih berada jauh di bawah permukiman penduduk sehingga perlu upaya untuk menaikkan air ke atas dengan pompa. Sementara itu pada beberapa desa di tepi pantai airnya payau/asin dan keruh. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan yang panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut.



Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo
(Sumber: DPUPR Kab. Purworejo, 2020)

2) Kondisi Demografi

a. Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2020 sebanyak 769.880 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 85.308 jiwa dan 62.079 jiwa. Distribusi



jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2020 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2010 – 2020 (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	2	4	5	6	7	8
1	Grabag	48.903	1,34	67,46	725	100,8
2	Ngombol	34.791	1,19	59,08	589	98,9
3	Purwodadi	41.095	1,17	56,09	733	97,7
4	Bagelen	30.486	0,58	63,44	481	98,4
5	Kaligesing	31.735	0,84	78,33	405	101,2
6	Purworejo	85.308	0,28	53,25	1.602	98,2
7	Banyuurip	43.234	0,76	47,78	905	97,3
8	Bayan	51.268	1,13	44,66	1.148	98,4
9	Kutoarjo	62.079	0,63	39,2	1.584	98,9
10	Butuh	42.011	0,78	47,21	890	97,9
11	Pituruh	51.191	1,11	89,01	575	101,2
12	Kemiri	58.230	1,37	103,15	565	101,9
13	Bruno	52.033	1,80	105,68	492	105,9
14	Gebang	43.401	0,83	70,76	613	102,2
15	Loano	38.052	0,94	53,26	714	101,6
16	Bener	56.063	1,44	102,45	547	102,4
Jumlah		769.880	0,99	1.080,81	712	100,2

Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2021 & RTRW Kab. Purworejo 2021-2041

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara rata-rata menurut sensus penduduk tahun 2020, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo sebesar 0,99. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo berada di angka positif.

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Besarnya angka kepadatan penduduk kasar kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebesar 712 jiwa/km². Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Purworejo (1.602 jiwa/km²), Kecamatan Kutoarjo (1.584 jiwa/km²), dan Kecamatan Bayan (1.148 jiwa/km²). Sementara itu, daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing, sebesar 405 orang/km². Kecamatan Bagelen juga memiliki kepadatan penduduk yang rendah sebesar 481 orang/km². Hal ini dimungkinkan terjadi karena dua kecamatan tersebut termasuk wilayah dengan kondisi geografis

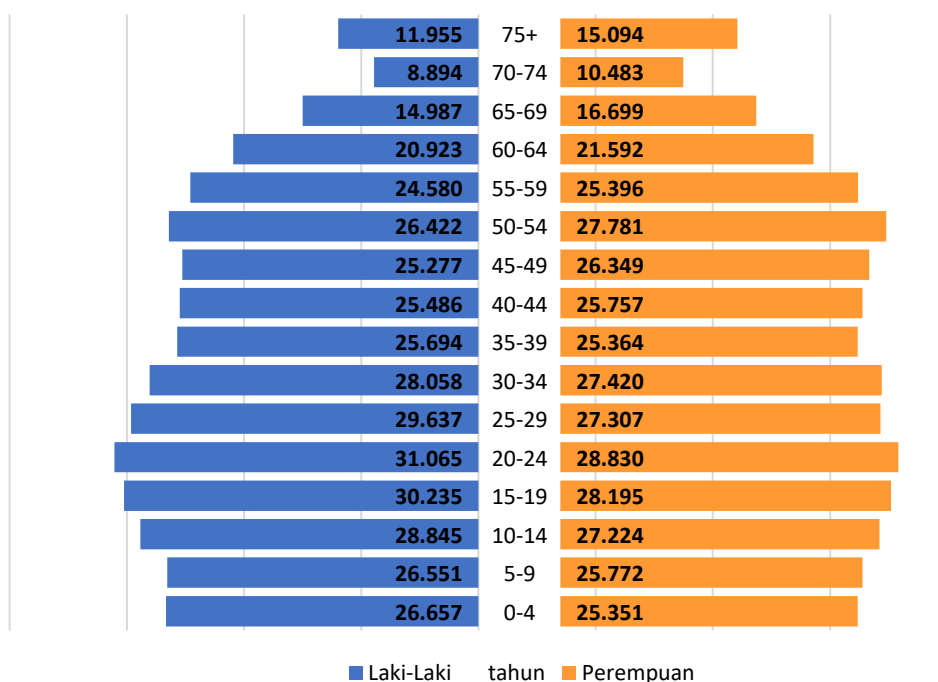


berupa pegunungan dengan lereng terjal serta memiliki kawasan hutan yang cukup luas.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita suatu wilayah pada waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya pria per 100 wanita. Ratio jenis kelamin Kabupaten Purworejo adalah 100,2 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari nilai ratio jenis kelamin di 16 kecamatan ada pula kecamatan mempunyai nilai kurang dari 100 yang artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

b. Struktur Penduduk

Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik, Kabupaten Purworejo sedang berada dalam bonus demografi yang berarti penduduk usia produktif lebih dominan. Lebih dari 90.000 jiwa berada pada rentang usia 15-29 tahun. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.7. Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh



penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.11. Rasio Ketergantungan Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
0 s.d. 14	165.964	164.074	162.323	160.568	160.400
15 s.d. 64	462.475	463.760	464.658	465.204	531.368
65 keatas	84.247	86.740	89.496	92.544	78.112
Rasio Beban Ketergantungan (%)	54,10%	54,08%	54,19%	54,41%	44,89%

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021, diolah

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2020 dapat diamati pada di atas. Hasil sensus penduduk di tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,02% atau sebanyak 531.368 jiwa. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2020 adalah 44,89% yang artinya 100 penduduk usia produktif rata-rata menanggung 44-45 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 keatas). Hal ini menunjukkan kondisi bonus demografi, yakni jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non produktif.

Struktur penduduk juga dapat diamati dari proporsi penduduk menurut agama yang dianut. Sebesar besar (97,96%) penduduk Kabupaten Purworejo beragama islam. Di samping itu terdapat penduduk yang menganut agama protestan (1,03%), katolik (0,91%), hindu (0,01%), budha (0,08%), dan lainnya (0,01%). Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	48.688	154	59	1	1	0
2	Ngombol	33.986	299	503	2	1	0
3	Purwodadi	39.752	699	615	1	8	20
4	Bagelen	29.412	275	378	5	415	1
5	Kaligesing	30.978	355	400	0	1	1
6	Purworejo	79.789	2.858	2.515	24	98	24
7	Banyuurip	41.899	702	605	9	3	16
8	Bayan	50.860	250	156	1	1	0



No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kutoarjo	59.275	1.522	1.231	2	45	4
10	Butuh	41.682	251	69	1	3	5
11	Pituruh	50.802	137	249	1	1	1
12	Kemiri	58.060	133	37	0	0	0
13	Bruno	51.959	35	38	0	0	1
14	Gebang	43.238	86	58	0	18	1
15	Loano	37.886	69	87	0	10	0
16	Bener	55.943	80	34	0	0	6
Jumlah		754.209	7.905	7.034	47	605	80

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

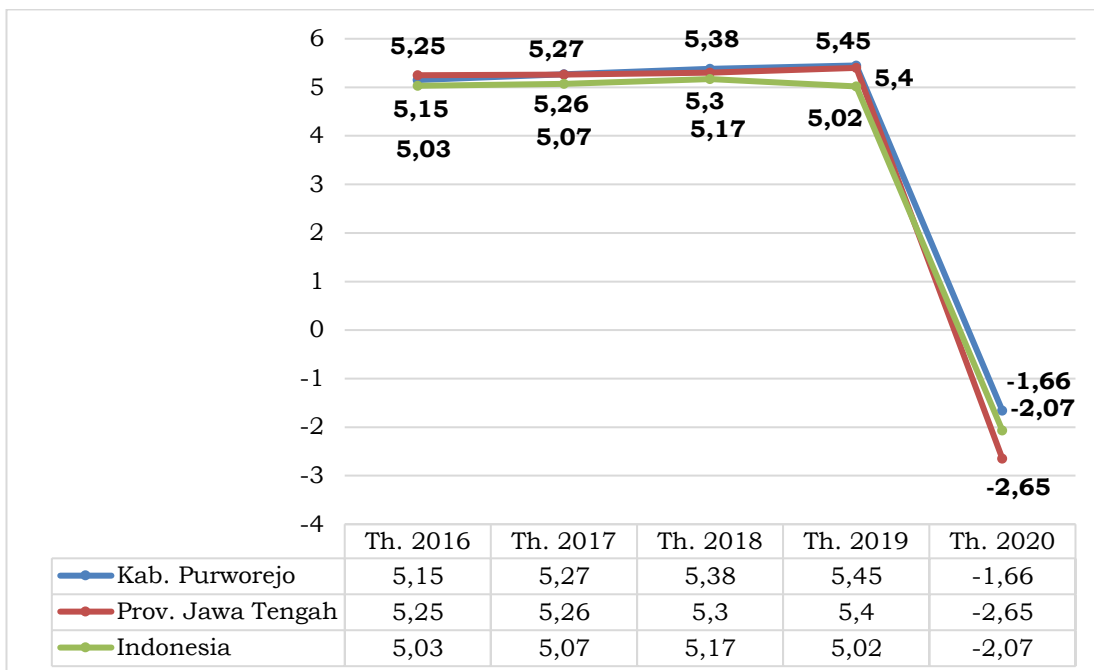
Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri secara perekonomian, merata dan berkelanjutan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga.

1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara umum dideskripsikan melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan. Ketiga variabel ini termasuk sasaran makro yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Purworejo.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2020, Kabupaten Purworejo memiliki angka pertumbuhan ekonomi -1,66%, berada di atas Indonesia (-2,07%) dan Provinsi Jawa Tengah (-2,65%). Adanya pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional mengalami resesi. Lebih lanjut, kondisi pertumbuhan ekonomi ini dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.8. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 – 2020 tertinggi terdapat di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 2.754.144,17 juta rupiah pada tahun 2020. Di tahun terakhir, PDRB atas dasar harga konstan 2010 tertinggi kedua yakni lapangan usaha Industri Pengolahan, sebesar 2.388.457,80 juta rupiah. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.13. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.658.382,23	2.686.873,96	2.733.644,01	2.757.009,13	2.754.144,17
B	Pertambangan dan Penggalian	82.505,27	84.489,12	86.257,44	92.052,60	94.401,96
C	Industri Pengolahan	2.013.075,02	2.116.725,12	2.238.358,91	2.374.858,91	2.388.457,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.609,35	11.153,72	11.735,51	12.346,80	12.563,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.840,41	8.297,57	8.703,17	9.065,41	9.269,92



Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
F	Konstruksi	979.505,58	1.055.669,34	1.124.930,80	1.189.290,73	1.145.040,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.560.255,01	1.643.799,87	1.727.560,58	1.834.966,20	1.754.951,40
H	Transportasi dan Pergudangan	690.437,19	721.205,55	761.243,08	821.833,56	597.861,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253.612,44	270.373,29	288.981,05	311.218,17	296.149,17
J	Informasi dan Komunikasi	697.085,55	802.073,05	894.524,24	990.779,56	1.132.623,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	396.150,17	415.285,73	428.449,03	441.851,26	450.450,32
L	Real Estate	258.830,77	273.667,54	288.661,95	304.566,11	303.683,15
M,N	Jasa Perusahaan	32.811,15	35.613,32	38.956,91	42.705,30	39.661,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	462.614,97	474.338,28	491.432,34	509.574,02	502.212,74
P	Jasa Pendidikan	865.266,47	933.116,28	1.005.615,43	1.081.662,80	1.079.534,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181.541,52	197.275,83	214.116,27	228.949,08	248.311,31
R,S, T,U	Jasa lainnya	271.029,12	293.822,87	321.805,33	350.844,55	323.174,46
Produk Domestik Regional Bruto		11.421.552,22	12.023.780,44	12.664.976,05	13.353.574,19	13.132.491,61

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Selaras dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha tertinggi tahun 2020 atas dasar harga berlaku, sebesar 4.255.862,04 juta rupiah. Di Kabupaten Purworejo selama tahun 2016 – 2020, lapangan usaha yang menyumbang PDRB atas dasar harga berlaku terendah ialah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (11.150,53 juta rupiah). Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.



Tabel 2.14. PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.813.943,17	3.898.524,63	4.073.181,67	4.177.631,20	4.255.862,04
B	Pertambangan dan Penggalian	122.109,01	129.714,86	134.842,34	145.604,91	152.708,54
C	Industri Pengolahan	2.786.620,64	3.017.105,47	3.286.504,84	3.541.303,45	3.645.201,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.232,40	12.782,08	13.864,01	14.602,97	14.772,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.699,61	9.259,61	9.741,79	10.319,85	11.150,53
F	Konstruksi	1.267.050,02	1.399.243,58	1.556.876,09	1.696.261,64	1.639.831,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.871.115,92	2.017.433,74	2.170.630,89	2.353.502,62	2.277.069,45
H	Transportasi dan Pergudangan	787.522,94	835.245,58	888.850,37	979.847,83	735.978,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314.452,06	338.923,02	366.054,97	400.107,01	385.483,87
J	Informasi dan Komunikasi	680.262,24	816.377,39	909.889,45	1.018.133,62	1.166.351,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	543.297,78	593.667,57	633.454,41	663.548,57	676.808,46
L	Real Estate	301.318,45	326.133,02	351.251,36	375.013,89	376.849,34
M,N	Jasa Perusahaan	43.285,89	48.562,92	54.612,03	61.572,17	58.262,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	622.084,38	65.8558,9	691.663,01	727.059,22	726.511,18
P	Jasa Pendidikan	1.263.929,07	1.417.993,48	156.5365,4	1727.226,27	1.740.635,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239.992,37	264.801,23	290.891,69	317.047,36	353.860,72
R,S, T,U	Jasa lainnya	33.6956,4	371.069,36	409.833,11	449.190,56	419.791,17
Produk Domestik Regional Bruto		15.013.872,35	16.155.396,44	17.407.507,43	18.657.973,14	18.637.129,25

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Dalam kondisi pandemi Covid-19, Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki laju pertumbuhan tertinggi (atas dasar harga konstan 2010), sebesar 14,32% di tahun 2020. Meskipun bukan merupakan penyumbang PDRB tertinggi, lapangan usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan laju pertumbuhannya minus sebesar -27,25% di tahun 2020. Adanya



kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berdampak besar terhadap lapangan usaha ini. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (%)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,23	2,09	1,07	1,74	-0,10
B	Pertambangan dan Penggalian	1,85	2,75	2,40	2,09	2,55
C	Industri Pengolahan	5,04	5,11	5,15	5,75	0,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,18	6,70	5,13	5,22	1,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,58	2,01	5,83	4,89	2,26
F	Konstruksi	5,22	5,99	7,78	6,56	-3,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,17	5,79	5,35	5,10	-4,36
H	Transportasi dan Pergudangan	7,49	4,27	4,46	5,55	-27,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,26	6,51	6,61	6,88	-4,84
J	Informasi dan Komunikasi	9,03	9,03	15,06	11,53	14,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,53	7,86	4,83	3,17	1,95
L	Real Estate	6,08	6,36	5,73	5,48	-0,29
M,N	Jasa Perusahaan	8,17	10,05	8,54	9,39	-7,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,23	2,60	2,53	3,60	-1,44
P	Jasa Pendidikan	7,25	8,00	7,84	7,77	-0,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,01	9,94	8,67	8,54	8,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,44	8,70	8,41	9,52	-7,89
Produk Domestik Regional Bruto		5,33	5,15	5,27	5,33	-1,66

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Terdapat tiga lapangan usaha yang pertumbuhannya ditargetkan, yaitu PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Dalam kurun lima tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat dikatakan hampir selalu mengalami penurunan. Sempat naik di tahun 2019 (+1,74%), namun kembali turun di tahun 2020 (-0,10). Kondisi serupa dialami oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang selalu turun sejak tahun 2018.



Dilihat dari distribusinya, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menyumbang PDRB (atas dasar harga berlaku) paling rendah (0,06%) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini tidak dapat menjadi sektor unggulan untuk dikembangkan di Kabupaten Purworejo. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (%)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020*
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,40	24,13	23,40	22,39	22,84
B	Pertambangan dan Penggalian	0,81	0,80	0,77	0,78	0,82
C	Industri Pengolahan	18,56	18,68	18,88	18,98	19,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	8,44	8,66	8,94	9,09	8,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,46	12,49	12,47	12,61	12,22
H	Transportasi dan Pergudangan	5,25	5,17	5,11	5,25	3,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,10	2,10	2,14	2,07
J	Informasi dan Komunikasi	4,53	5,05	5,23	5,46	6,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	3,67	3,64	3,56	3,63
L	Real Estate	2,01	2,02	2,02	2,01	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,31	0,33	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	4,08	3,97	3,90	3,90
P	Jasa Pendidikan	8,42	8,78	8,99	9,26	9,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,64	1,67	1,70	1,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,24	2,30	2,35	2,41	2,25
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Nilai PDRB Kabupaten Purworejo ADHB menurut jenis pengeluaran selama periode tahun 2015 - 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2.17. PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 – 2019 (juta rupiah)**

Jenis Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.110.817,11	11.815.487,41	12.674.170,79	13.623.689,80	14.680.536,63
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	269.233,73	288.221,29	308.667,16	335.039,37	379.793,18
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.650.334,09	1.698.355,86	1.820.454,29	1.906.462,80	1.967.766,43
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.664.544,49	3.923.784,16	4.287.999,42	4.771.359,03	5.199.119,15
E	Perubahan Inventori	216.828,13	124.600,34	185.538,36	292.395,94	196.275,88
F	Ekspor Barang dan Jasa	-3.046.013,93	-2.836.576,71	-3.121.433,58	-3.512.703,52	-3.750.650,92
Produk Domestik Regional Bruto		13.865.643,62	15.013.872,35	16.155.396,44	17.416.243,42	18.672.840,35

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Sejak 2015 agregasi ekonomi Purworejo telah menembus level di atas 13 triliun rupiah. Pada tahun 2019, nilai ekonomi Purworejo mencapai 18,67 triliun rupiah yang sebagian besar digerakkan oleh Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Ekspor. Besarnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencapai 14,68 triliun pada tahun 2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto mencapai 5,20 triliun, dan besarnya Ekspor mencapai 4,80 triliun rupiah. Sayangnya ekonomi Purworejo masih tergerus dengan tingginya nilai impor yang besarnya sampai dengan tahun 2019 masih di atas ekspor Purworejo.

Tabel 2.18. PDRB ADHK 2010 menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 – 2019 (juta rupiah)

Jenis Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.698.804,80	9.006.491,82	9.399.019,70	9.797.929,20	10.303.677,30
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	195.848,78	204.724,37	213.436,80	226.320,00	250.663,15
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.176.058,40	1.178.543,80	1.212.279,04	1.252.570,62	1.282.341,00
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.768.607,17	2.919.663,12	3.120.291,91	3.327.260,84	3.495.373,13
E	Perubahan Inventori	73.728,91	67.437,66	87.243,42	78.776,56	77.749,36

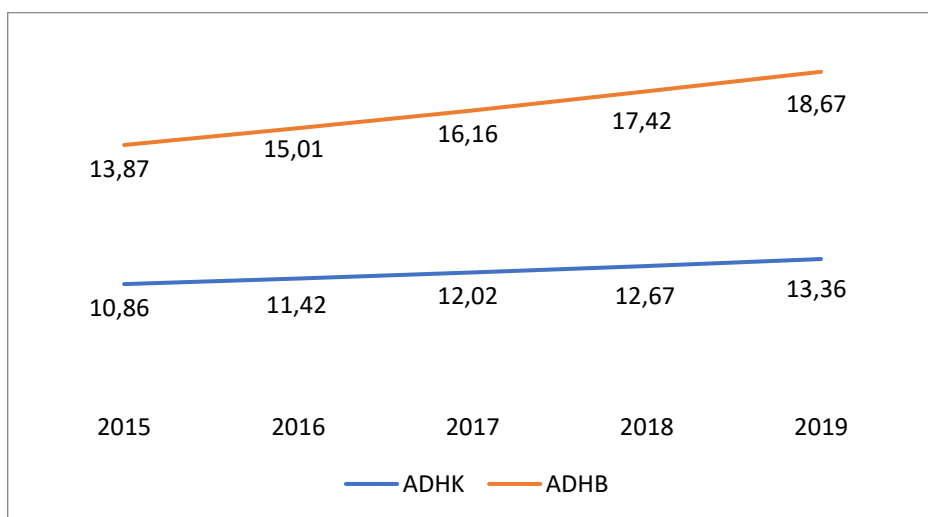


Jenis Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6	7
F	Ekspor Barang dan Jasa	-2.050.402,08	-1.955.308,55	-2.008.490,43	-2.012.479,17	-2.049.029,82
Produk Domestik Regional Bruto		10.862.645,98	11.421.552,22	12.023.780,44	12.670.378,05	13.360.774,12

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut jenis pengeluaran di Kabupaten Purworejo juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat diamati pada tabel di atas. Kemudian, perbandingan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku menurut jenis pengeluaran dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.9. Perkembangan PDRB ADHK 2010 dan ADHB menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Meskipun secara struktur ekonomi peranan Konsumsi Rumah Tangga masih yang terbesar, tetapi sejak tahun 2015 hingga 2019 dominasinya berangsur mengecil dari 80,13 persen pada tahun 2015 menjadi 78,62 persen pada tahun 2019. Peranan ini diambil alih oleh PMTB yang semakin meningkat sejak 2015 sampai dengan 2019 dari 26,43 persen menjadi 27,84 persen terhadap sumbangan PDRB total Purworejo. Secara lebih detail, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2.19. Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2015 - 2019 (%)**

Jenis Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	80,13	78,70	78,45	78,22	78,62
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,94	1,92	1,91	1,92	2,03
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,90	11,31	11,27	10,95	10,54
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,43	26,13	26,54	27,40	27,84
E	Perubahan Inventori	1,56	0,83	1,15	1,68	1,05
F	Ekspor Barang dan Jasa	-21,97	-18,89	-19,32	-20,17	-20,09
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 5,05 persen pada tahun 2019 lebih tinggi daripada empat tahun sebelumnya yaitu 3,92 persen pada tahun 2015, namun melemah pertumbuhannya bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 6,63. Sebaliknya konsumsi rumah tangga tumbuh dikisaran 3 sampai dengan 5 persen dengan rata-rata pertumbuhan masih di bawah pertumbuhan total Purworejo. Selanjutnya, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Laju Pertumbuhan PDRB Purworejo ADHK 2010 menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2015-2019

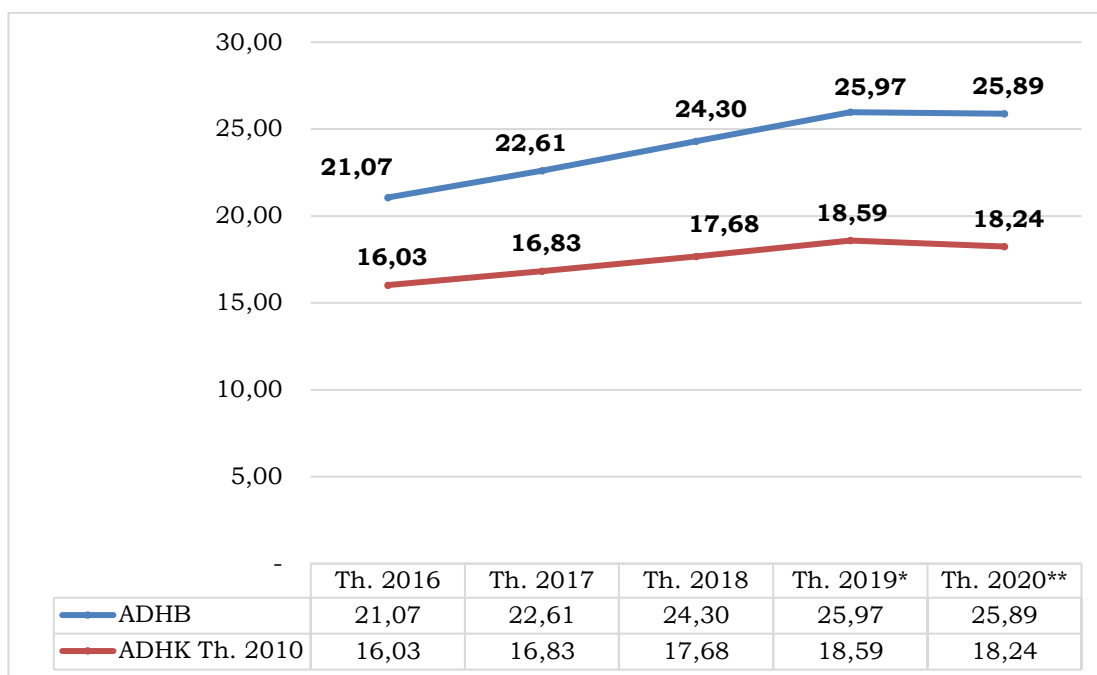
Jenis Pengeluaran		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,79	3,54	4,36	4,24	5,16
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,45	4,53	4,26	6,04	10,76
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,21	0,21	2,86	3,32	2,38
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,92	5,46	6,87	6,63	5,05
E	Perubahan Inventori	-	-8,53	29,37	-9,70	-1,30
F	Ekspor Barang dan Jasa	-	-4,64	2,72	0,20	1,82
Produk Domestik Regional Bruto		-	5,15	5,27	5,38	5,45

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Purworejo selalu mengalami kenaikan pada rentang waktu 2016-2019, kemudian turun di tahun 2020, selaras dengan persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sebesar 25,89 juta rupiah, turun



Rp86.501,50 dari tahun sebelumnya (2019). Sementara atas dasar harga konstan 2010, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo berkisar pada 18,24 juta rupiah. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan target nasional indikator TPB nomor 8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB), capaian di Kabupaten Purworejo masih dibawah target nasional yaitu meningkat menjadi lebih dari 50 juta rupiah. Lebih lanjut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.10. PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021, diolah

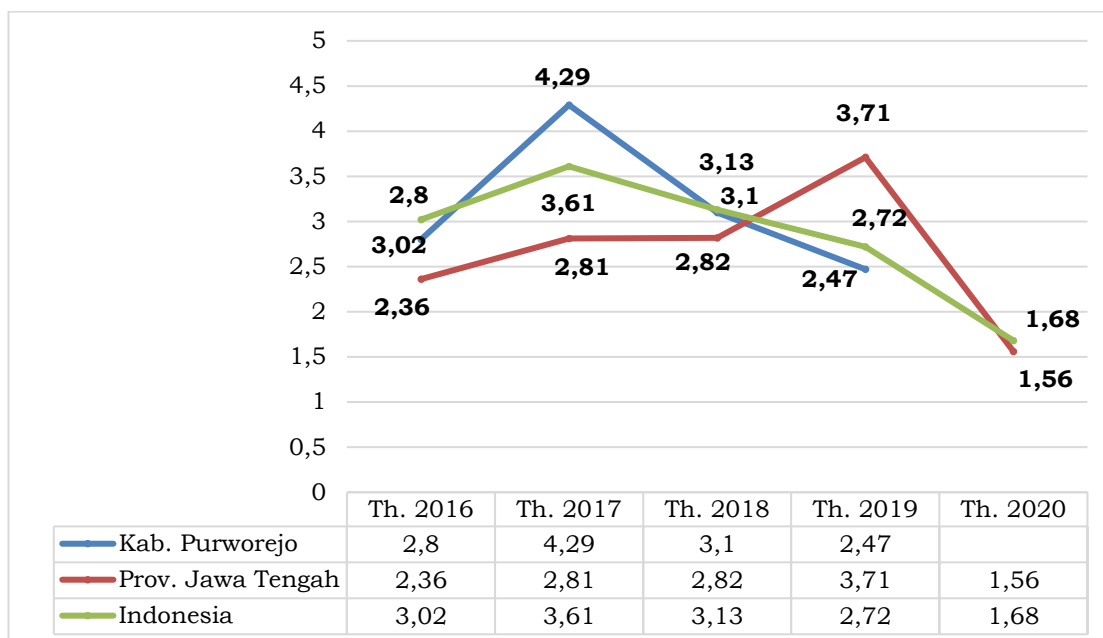
b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang penting dalam dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu daerah, disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas pasar berlebih yang memicu aksi konsumsi atau spekulasi, atau adanya hambatan dalam distribusi dan suplai barang. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan berimplikasi pada hampir semua elemen di dalam sistem ekonomi.

Pada gambar di bawah ini dapat diamati fluktuasi inflasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia dalam kurun waktu 2016 – 2020. Terlihat bahwasanya Kabupaten



Purworejo mengalami inflasi fluktuatif, pada tahun 2017 mencapai 4,29% sementara di tahun selanjutnya (2018) turun pada angka 3,10% (terjadi deflasi), dan di tahun 2019 menjadi 2,47%. Kondisi di tahun 2020, terjadi inflasi 1,68% di tingkat nasional dan merupakan angka inflasi terendah sejak tahun 2014. Begitu pula di tingkat provinsi: 1,56% di tahun 2020.



Gambar 2.14. Tingkat Inflasi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Di tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo. Di daerah ini pada tahun 2020, terjadi inflasi sebesar 1,90%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi dan nasional.

c. Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non



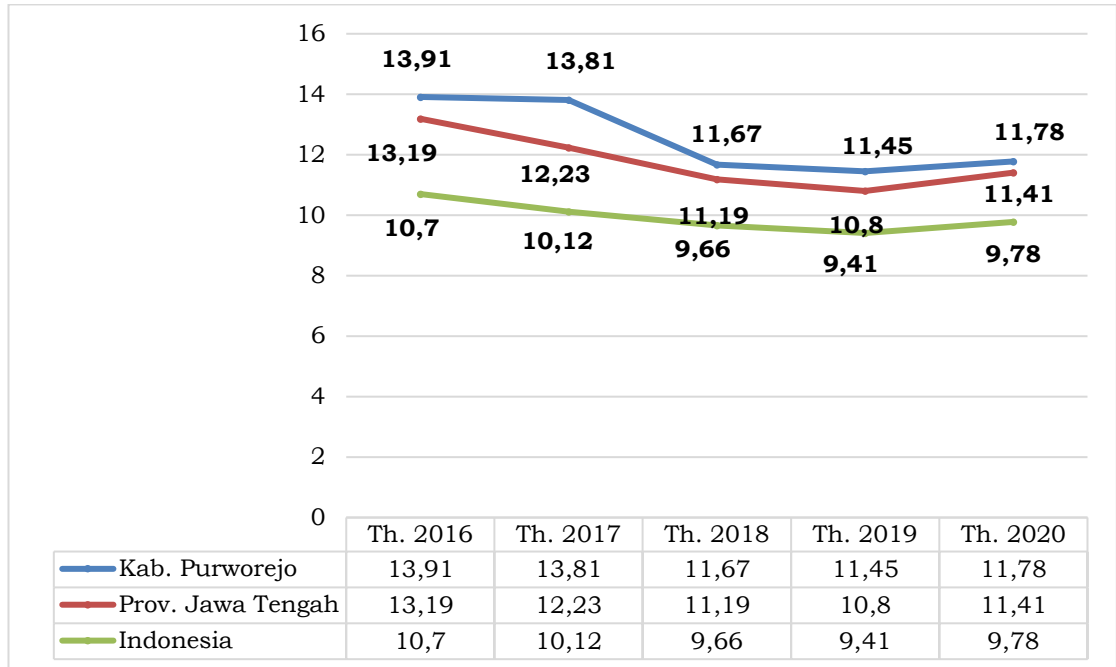
Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten di sekitarnya dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.21. Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020

Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	313.931	325.871	335.995	345.458	364.289
Kab. Kebumen	313.881	325.819	342.437	362.847	380.557
Kab. Wonosobo	297.422	308.553	323.490	340.827	362.683
Kab. Magelang	271.800	281.237	296.327	325.921	342.430
Kab. Kulon Progo	297.353	312.403	323.103	333.781	353.807
Prov. Jawa Tengah	322.644	338.675	357.416	381.873	395.407
Indonesia	361.267	385.953	408.962	438.448	454.652

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2021, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

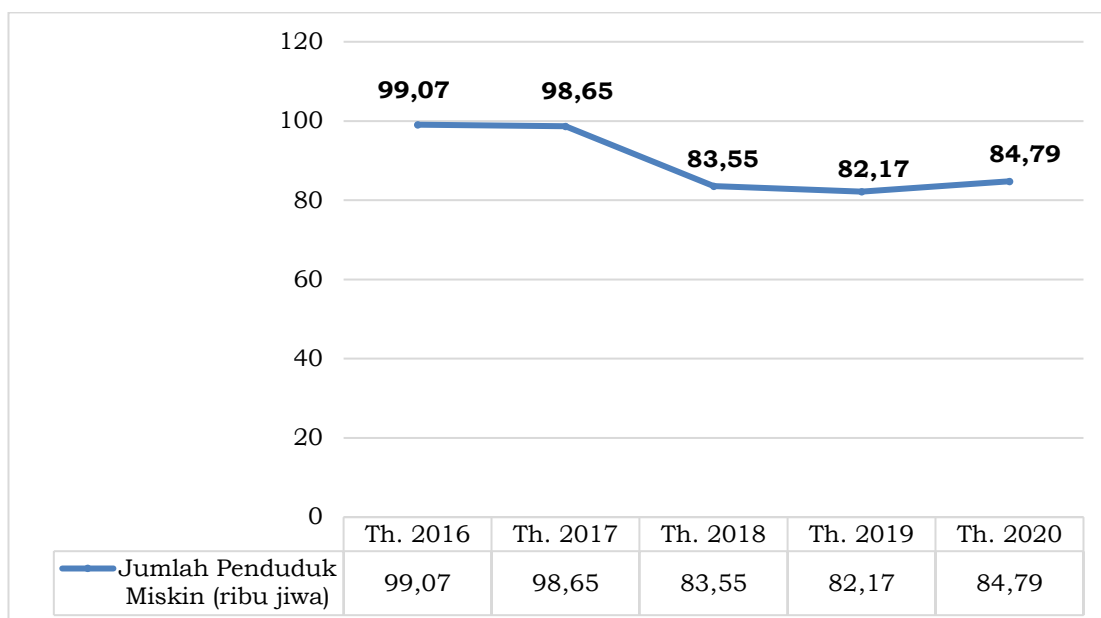
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia selama kurun waktu 2016-2020 ditunjukkan pada di bawah ini. Tingkat kemiskinan menggambarkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Meskipun selalu mengalami penurunan, angka kemiskinan Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Di tahun terakhir (2020, Kabupaten Purworejo memiliki angka kemiskinan 11,78%, di atas Provinsi Jawa Tengah (11,41%) dan Indonesia (9,78%). Tingkat kemiskinan di tahun ini terjadi kenaikan, dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1.2.1* dan 10.1.1 (a), tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada di atas target nasional, yaitu menurun menjadi 7-8%. Masih besarnya gap antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan nasional tentunya membuat kemiskinan menjadi sebuah isu besar yang perlu diselesaikan bersama serta membutuhkan peran berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam pengentasannya.



Gambar 2.12. Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021 &
BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2020. Dari perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo, dapat diukur seberapa besar penduduk miskin Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo relatif selalu mengalami penurunan, kecuali di tahun terakhir. Penurunan terbesar terdapat di tahun 2018 (83.555 jiwa) dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 98.650 jiwa. Dengan masih tingginya persentase dan jumlah penduduk miskin di Purworejo, perlu upaya keras untuk menekan hal, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.



Gambar 2.13 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan pemerintah harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purworejo dan daerah di sekitarnya, serta Jawa Tengah, dan Indonesia dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020

Kedalaman Kemiskinan (%)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	2,67	2,25	1,67	0,84	0,98
Kab. Kebumen	3,78	3,62	2,48	2,58	2,62
Kab. Wonosobo	4,02	3,85	3,25	2,44	2,42
Kab. Magelang	1,84	1,67	1,55	0,98	1,23
Kab. Kulon Progo	3,55	2,79	2,47	2,72	3,32
Prov. Jawa Tengah	2,37	2,21	1,85	1,53	1,72
Indonesia	1,74	1,79	1,63	1,55	1,61

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2021, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada rentang tahun 2016-2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan secara umum cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2020, Kabupaten Purworejo Indeks Kedalaman Kemiskinannya lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya, Jawa Tengah, dan Indonesia, yakni 0,98%. Begitu pula dengan



indeks keparahan kemiskinannya (0,12%) yang dapat diamati pada di bawah ini. Kondisi di tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Purworejo, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin lebih rendah daripada daerah di sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah, serta di tingkat nasional. Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap dua indeks ini, namun tidak begitu signifikan.

Tabel 2.23. Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016-2020

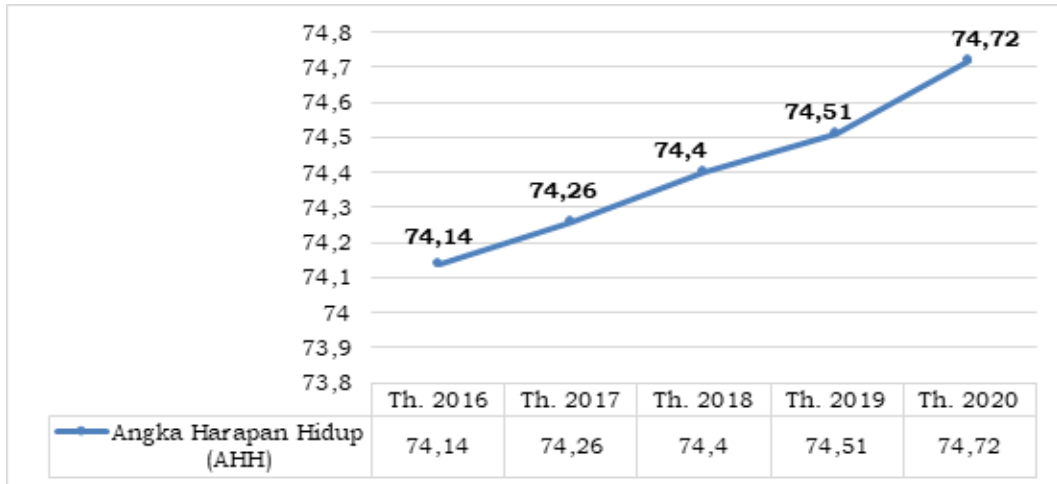
Keparahan Kemiskinan (%)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,76	0,54	0,36	0,10	0,12
Kab. Kebumen	1,11	0,99	0,55	0,65	0,55
Kab. Wonosobo	1,11	1,10	0,78	0,46	0,47
Kab. Magelang	0,44	0,31	0,34	0,17	0,20
Kab. Kulon Progo	1,00	0,64	0,56	0,61	0,86
Prov. Jawa Tengah	0,63	0,57	0,45	0,30	0,34
Indonesia	0,44	0,46	0,41	0,37	0,38

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2021, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2) Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Kabupaten Purworejo selalu mengalami kenaikan AHH dalam kurun waktu 2016 – 2020. Angka ini dapat menjadi cerminan upaya Pemkab Purworejo dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Data terakhir menunjukkan AHH Kabupaten Purworejo mencapai 74,72 (2020). Perkembangan 5 tahun terakhir menunjukkan angka AHH di tahun 2020 terjadi kenaikan paling tinggi (0,2), meskipun terjadi pandemi Covid-19. Hal ini dapat diamati pada gambar berikut.

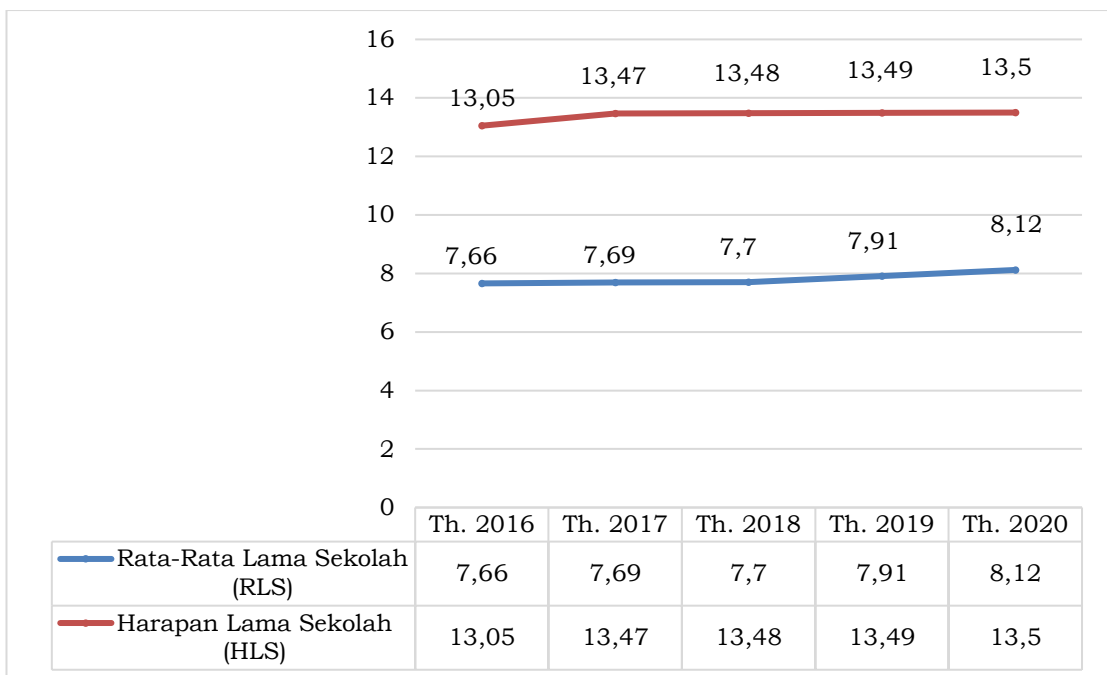


Gambar 2.14. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kondisi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 – 2020 dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.15. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020

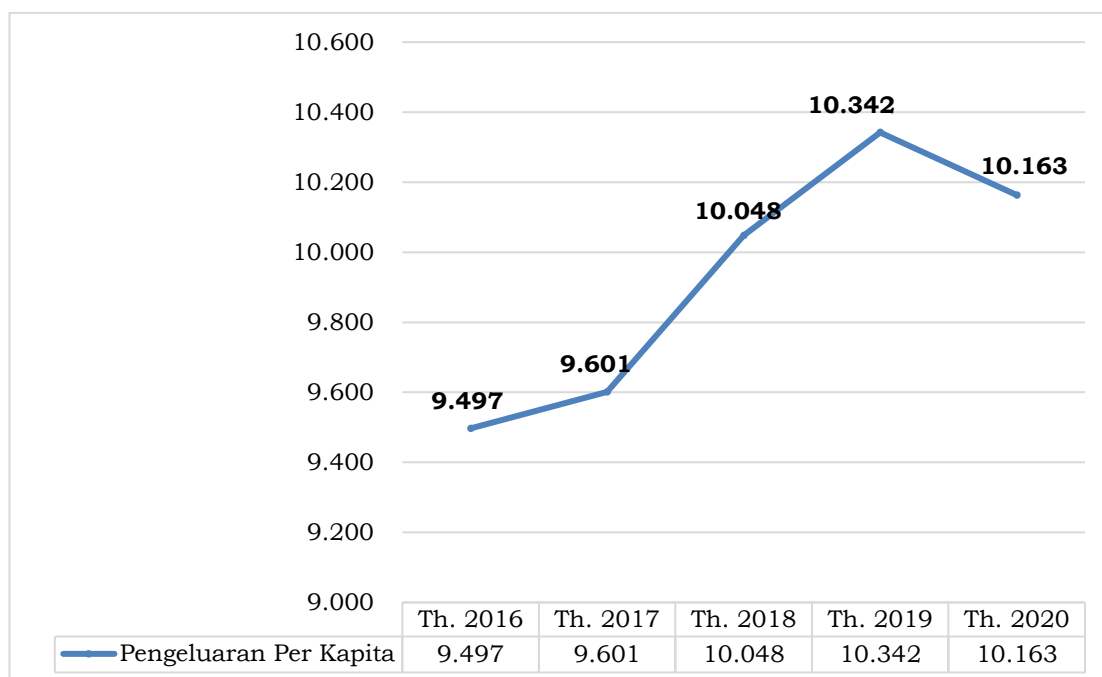
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021



Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun terakhir (2020 RLS menunjukkan angka 8,12, sementara HLS menunjukkan angka 13,50. Angka RLS jika dikaitkan dengan capaian indikator TPB nomor 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, angka RLS di Kabupaten Purworejo masih dibawah target nasional yaitu meningkat menjadi 8,8. Sementara tingginya HLS di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa diharapkan pada masa mendatang, anak dapat menempuh pendidikan setidaknya Diploma I atau Diploma III.

c. **Pengeluaran Per Kapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seorang anggota rumah tangga selama satu tahun. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan pengeluaran per kapita turun menjadi Rp 10.163.000,00. Namun angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita di tahun 2018. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.16. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020 (ribu rupiah/orang/tahun)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021



3) Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya

Kabupaten Purworejo mempunyai beberapa potensi seni dan budaya baik potensi budaya *tangible* maupun *intangible*. Potensi budaya *tangible* misalnya bangunan dan benda cagar budaya sedangkan potensi budaya *intangible* meliputi seni tari, seni musik, sastra dan seni rupa, sedangkan. Potensi-potensi kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Purworejo tersebut patut untuk dikenalkan, dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya dan peradaban manusia.

Tabel 2.24. Jumlah Seni dan Kebudayaan & Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I	Seni dan Kebudayaan					
1	Jumlah Grup Kesenian	367	367	398	411	458
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Museum	1	1	1	1	1
4	Pusat Kebudayaan	0	0	0	0	0
5	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	54	70	0	19	4
II	Cagar Budaya Yang Dilestarikan					
1	Benda Cagar Budaya	192	307	430	505	619
2	Bangunan Cagar Budaya	85	88	91	87	140
3	Situs Cagar Budaya	2	2	13	13	13
4	Kawasan Cagar Budaya	3	3	3	3	3

Sumber: Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021

b. Olahraga

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pembangunan bidang keolahragaan. Kabupaten Purworejo telah memiliki gedung olahraga dan Heroes Park untuk mewadahi kegiatan kepemudaan dan olahraga, yang diharapkan akan dapat meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Purworejo. Namun karena Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 pemanfaatan wahana olahraga tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.



Gambar 2.17. Gedung Olahraga dan Heroes Park

Sumber: Humas Kabupaten Purworejo, 2019

Selanjutnya, perkembangan jumlah klub, gedung, jumlah organisasi, dan kegiatan olahraga dapat diamat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25. Jumlah Klub, Gedung, Organisasi, dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I	Pemuda dan Olahraga					
1	Jumlah Klub Olahraga	85	85	85	90	90
2	Jumlah Gedung Olahraga	16	16	16	16	16
3	Organisasi Olahraga	1	1	1	2	2
4	Kegiatan Olahraga	12	12	12	13	13

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

1) Pendidikan

a. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan

Terdapat tiga jenis layanan dalam SPM bidang pendidikan, antara lain pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan anak usia dini. Ketiga jenis layanan ini belum mencapai target yang seharusnya dicapai (100%). Di tahun 2020, jenis layanan pendidikan dasar memiliki capaian paling tinggi (98,58%), diikuti pendidikan kesetaraan (96,21%), dan pendidikan anak usia dini (80,58%). Lebih lanjut hal ini dapat diamati pada table berikut.

Tabel 2.26. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	98,45%	98,68%
		Anak usia 7-12 tahun yang sudah atau sedang belajar		87,20%
		Anak usia 12-15 tahun yang sudah atau sedang belajar		76,04%



No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	86,11%	100,00 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	83,06%	91,90%

Sumber: Dindikpora Kab. Purworejo, 2021

SPM pendidikan dasar dicapai melalui optimalisasi buku teks pelajaran, perlengkapan belajar, penyediaan biaya personil peserta didik, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/ D-IV, kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin, tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat, jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan, serta satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C. SPM pendidikan kesetaraan dicapai melalui optimalisasi modul belajar, perlengkapan belajar, penyediaan biaya personil peserta didik, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/ D-IV, kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/ D-IV, kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat, PKBM terakreditasi minimal C, serta jumlah rombongan belajar di PKBM. Sementara itu, SPM pendidikan anak usia dini dicapai melalui optimalisasi buku gambar, alat mewarnai, penyediaan biaya personil peserta didik, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/ D-IV, kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/ D-IV, satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C, serta jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan.

b. Cakupan Wilayah Penerapan e-Learning di Tingkat SD dan SMP

Program *e-learning* merupakan model atau program pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan jasa perangkat teknologi berupa internet. Cakupan wilayah penerapan e-learning di Tingkat SD dan SMP sampai dengan tahun 2020 sudah tercapai 100% di 16 wilayah kecamatan di Purworejo

**Tabel 2.27. Cakupan Wilayah Penerapan e-Learning di Tingkat SD dan SMP dari Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Wilayah Penerapan e-Learning di Tingkat SD	0%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Wilayah Penerapan e-Learning di Tingkat SMP	0%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Sampai dengan tahun 2020 jumlah SD dan SMP yang berbasis *e-learning* sebanyak 91 sekolah. Untuk tingkat SMP sudah tercapai 100 persen (43 SMP) namun untuk SD baru 48 yang sudah berbasis *e-learning*. Keterbatasan akses dan SDM menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan *e-learning*

Tabel 2.28. Cakupan Sekolah Berbasis E-Learning (Creative Multimedia) dari Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Sekolah Berbasis E-Learning (Creative Multimedia)	0%	5,80%	11,54%	16,58%	16,58%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020, adalah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.29. Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2016– 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	APK PAUD (3-6 th)	58,60%	68,35%	60,92%	68,32%	62,63%
2	APK SD/MI/Paket A	92,92%	101,54%	107,25%	104,30%	96,65%
3	APK SMP/MTs/Paket B	78,12%	98,46%	102,19%	103,12%	96,19%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan data di atas bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (3-6 th) dari tahun 2016 sebesar 58,60% mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 sebesar 68,32%. Hal tersebut menggambarkan peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perlunya pendidikan anak usia dini.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2016 sebesar 92,92% dan tahun 2018 sebesar 107,25% terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2016 sebesar 78,12%, dan tahun 2019 sebesar 103,12%, terjadi peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan wajib belajar Sembilan tahun.

Namun Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B kemudian dibandingkan dengan angka pada tahun 2019 ketiganya mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* mempengaruhi pelaksanaan kebijakan layanan pendidikan di Kabupaten Purworejo yang kemudian berpengaruh pada partisipasi sekolah masyarakat.

Jika dikaitkan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, 4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat, dan 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK)



Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), keberhasilan peningkatan APK pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Purworejo perlu ditingkatkan karena capaian-capaian tersebut masih dibawah target nasional.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2016 tercapai 81,57% dan tahun 2020 sebesar 93,01%, terjadi peningkatan jumlah peserta didik jenjang SD/MI merupakan keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.30. Angka Partisipasi Murni Dari Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	APM SD/MI	81,57%	90,23%	90,79%	96,92%	93,01%
	APM SMP/MTs	58,72%	77,67%	96,38%	82,40%	83,33%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2016 58,72% dan tahun 2018 sebesar 96,38% terjadi peningkatan jumlah peserta didik jenjang SMP merupakan keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kemudian pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mengalami penurunan menjadi 82,40% dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 83,33%. Capaian di atas mendukung pencapaian indikator TPB nomor 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat.

e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar (SD). PAUD merupakan suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia



emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Untuk menunjang kegiatan PAUD maka dibutuhkan kurikulum dan Sarana Prasarana penunjang pembelajaran.

Tabel 2.31. Ketersediaan Kurikulum dan Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran PAUD

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran PAUD	30,00%	37,00%	34,81%	36,00%	40,02%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Purworejo sudah memiliki kurikulum muatan lokal. Untuk ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang pembelajaran PAUD setiap tahun meningkat dari tahun 2016 sebesar 30% pada tahun 2020 sebesar 40,02%.

f. Fasilitas Pendidikan

Salah satu bentuk pelayanan pendidikan adalah penyediaan sekolah atau ruang kelas yang baik dan sesuai standar nasional.

Tabel 2.32. Fasilitas Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap smp tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	97%	97%	97,40%	54,87%	92,97%
2	Persentase ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi keamanan, kebersihan, keindahan	90,74%	92,78%	92,78%	86,90%	99,49%
3	Persentase ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan	90,97%	94,18%	94,18%	82,94%	100%



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	memenuhi keamanan, kebersihan, keindahan					
4	Persentase SD yang memiliki perpustakaan	74,67%	75,81%	75,81%	96,19%	76,97%
5	Persentase SMP yang memiliki laboratorium penunjang	70%	70%	70%	74,73%	82,61%
6	Persentase SD yang memiliki sanitasi layak	99,43%	84,76%	84,76%	71,80%	93,67%
7	Persentase SMP yang memiliki sanitasi layak	100%	100%	100%	73%	91%
8	Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP.	94%	98%	98%	85,85%	73,27%
9	Proporsi sekolah (SD dan SMP) dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). (4.a.1*)	4,16%	4,10%	4,08%	4,27%	4,27%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Capaian di atas mendukung pencapaian indikator TPB nomor 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua/ WASH) pada jenjang SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat.

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SD/SDLB tahun 2016 sebesar 0,03% dan pada tahun 2020 sebesar 0,19% terjadi peningkatan anak putus sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi anak



putus sekolah di jenjang SD/SDLB antara lain kurangnya motivasi anak, kecerdasan anak dan jarak tempuh sekolah dengan rumah.

Tabel 2.33. Angka Putus Sekolah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka putus sekolah					
	Jenjang SD/SDLB	0,03%	0,00%	0,08%	0,14%	0,19%
	Jenjang SMP/SMPLB	0,05%	0,01%	0,45%	0,36%	0,65%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Angka putus sekolah jenjang SMP/SMPLB tahun 2016 sebesar 0,05% mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 sebesar 0,45%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,36% kemudian naik kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,65%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilaksanakan dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR) sedangkan tidak semua sekolah dan warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik) memiliki akses internet yang memadai untuk interaksi sosial. Selain itu juga tidak semua orang tua peserta didik dapat mendampingi putra-putrinya selama proses belajar dirumah akibat keterbatasan pengetahuan pedagogic.

h. Angka Kelulusan

Angka kelulusan tahun 2016-2020 baik di tingkat SD/SDLB/MI dan SMP/MTs/SMPLB menunjukkan tingkat kelulusan yang relatif sama yaitu 100%.

Tabel 2.34. Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kelulusan					
	SD/SDLB/MI	100%	100%	99,88%	100%	100%
	SMP/MTs/SMPLB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Hal ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

**i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4**

Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Di samping itu, kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi pendidik menjadi salah satu indikator TPB yaitu nomor 4.c.1* Persentase guru TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik. Secara umum kualifikasi pendidik di Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Pendidik Berkualifikasi S-1/D-IV Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan Pendidik yang Telah Berkualifikasi S-1/D-IV & Bersertifikat Pendidik PAUDNI	839	980	980	821	821
2	Ketersediaan Guru Untuk SD sesuai Standar	94,02%	92,12%	92,12%	95%	98,04%
3	Ketersediaan Guru Untuk SMP sesuai Standar	93,11%	99%	91,90%	93,26%	96,82%
4	Kepala SD berkualifikasi Akademik S-1/D-IV telah memiliki Sertifikat Pendidik	97,31%	99,37%	99,37%	98,61%	98,00%
5	Kepala SMP berkualifikasi Akademik S-1/D-IV telah memiliki Sertifikat Pendidik	59%	68%	68%	70,33%	69,57%
6	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik (4.c.1*)	82,43%	77,32%	77,32%	82,49%	60,63%
	(1) Berijazah S1					
	(2) Memiliki Sertifikat Pendidik	51,89%	58,18%	62,52%	57,75%	48,28%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

Untuk Kepala SMP berkualifikasi Akademik S-1/ D-IV telah memiliki Sertifikat Pendidik pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini karena belum ada pengangkatan kepala sekolah



baru, dikarenakan purna tugas dan masih ada Kepala SMP swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Sementara itu, banyaknya sekolah, murid, guru dan rasio guru untuk jenjang TK, SD dan SMP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36. Banyaknya Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs se-Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Sekolah Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	TK Negeri/Swasta	404	412	412	415	412
2	SD/MI	570	571	573	574	570
3	SMP/MTs	105	105	107	109	107

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Tabel 2.37. Banyaknya Murid TK, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Murid Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	TK Negeri/Swasta	12.685	12.465	12.465	11.643	11.459
2	SD/MI	71.334	71.334	70.861	69.636	66.313
3	SMP/MTs	35.479	35.479	35.505	33.493	32.421

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Tabel 2.38. Banyaknya Guru TK, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Guru Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	TK Negeri/Swasta	1.145	1.125	1.125	1.057	1.041
2	SD/MI	5.401	5.401	4.861	4.984	4.920
3	SMP/MTs	2.377	2.377	2.276	2.305	2.294

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Tabel 2.39. Rasio Guru TK, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Rasio Guru Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	TK Negeri/Swasta	11,08	11,08	11,08	11,02	11,01
2	SD/MI	13,21	13,21	14,58	11,52	13,48
3	SMP/MTs	14,93	14,93	14,93	15,60	14,13

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021, diolah)

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan manusia baik kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan psikologi. Di sektor pendidikan yang terasa langsung bagi pendidik dan peserta didik adalah adanya pembatasan interaksi sosial. Siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan gurunya di kelas, tidak dapat bermain ceria dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud



Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 mengamanatkan proses belajar dari rumah. Hal ini jelas menimbulkan perubahan mekanisme proses belajar mengajar yang selama ini telah berlangsung dengan *enjoy* (nyaman) dengan tiba-tiba harus berubah secara drastis dalam kurun waktu yang relatif singkat. Siswa cenderung mandiri dalam menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikannya. Banyak hal yang timbul akibat dari kondisi di masa pandemi Covid-19 dibidang pendidikan antara lain:

1. Tidak ada tuntutan ketuntasan akademis yang merupakan barometer pendidik untuk mengetahui kompetensi peserta didik.
2. Perubahan metode proses belajar mengajar, sistem kelulusan dan penerimaan peserta didik baru.
3. Adanya keterbatasan interaksi sosial langsung antara peserta didik dengan guru, sesama peserta didik dan guru dengan tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Peserta didik mengalami kejenuhan yang berkepanjangan dan tidak tahu kapan berakhirnya masa darurat Covid-19.
5. Adanya keterbatasan pendidik dalam mengamati perkembangan sikap (perilaku) dan keterampilan peserta didik.
6. Tidak semua sekolah dan warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik) memiliki akses internet yang memadai untuk interaksi sosial.
7. Tidak semua orang tua peserta didik dapat mendampingi putra-putrinya selama proses belajar dirumah akibat keterbatasan pengetahuan pedagogic.
8. Dampak ekonomi bagi keluarga adalah naiknya belanja paket internet.

Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dan tenaga pendidik untuk mengatasi kondisi masa pandemi Covid-19:

1. Tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.
2. Memaksimalkan penggunaan media telekomunikasi dan informatika dalam proses kegiatan belajar mengajar.



3. Pendidik dituntut ide kreatif dan inovatif dalam menentukan metode pembelajaran sistem daring.
4. Perubahan mindset pendidik dalam mengukur kompetensi peserta didik.
5. Membentuk kelompok kecil di kelas dan menjadwalkan pembelajaran tatap muka pada masing-masing kelompok.
6. Guru kunjung, siswa yang tempat tinggal saling berdekatan membentuk kelompok kecil dan guru menjadwalkan kunjungan untuk masing-masing kelompok.

Di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo Sekolah Dasar yang terdampak pandemi Covid-19 berjumlah 522 sekolah dengan jumlah siswa 60.214 orang dan kegiatan ujian kelas VI yang tidak dilaksanakan secara konvensional ada di 517 sekolah dengan jumlah siswa 10.768 orang.

Dampak Covid 19 pada bidang pendidikan khususnya pada PAUD, PNF dan PI sangat mempengaruhi proses belajar mengajar pada lembaga PAUD Formal sebanyak 3 TK Negeri dan 412 TK Swasta, sedangkan pada PAUD Non Formal sebanyak 423 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain 224 lembaga, Pos Paud 176 lembaga, TPQ 5 lembaga, SPS 2 lembaga dan TPA 16 lembaga.

2) Kesehatan

Data Capaian Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	75,36	184,29	78,80	179,9	209,92
2	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	11,30	11,20	9,45	10,79	10,93
3	Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)	15,47	12,4	10,5	13,82	12,71
4	Prevalensi gizi buruk	0,10%	0,04%	0,03%	0,06%	0,07%
5	Prevalensi Balita Pendek (stunting)	10,21%	10,57%	8%	9,34%	8,99%
6	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.2*)	7,90	6,68	6,30	7,64	7,07



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
7	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (3.1.2*)	98,54%	99,01%	99,17%	99,54%	99,49%
8	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. (3.1.2. (a))	96,98%	98,28%	98,52%	99,25%	99,24%
9	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (2.1.1.(a))	3,86%	3,35%	4,71%	4,83%	5,57%
10	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (2.2.2*)	3,93%	3,88%	4,29%	4,31%	9,46%
11	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. (2.2.1.(a))	7,76%	8,00%	7,37%	7,22%	6,46%
12	Prevalensi anemia pada ibu hamil. (2.2.2 (a))	14,62%	13,12%	13,96%	12,94%	23,16%
13	Eliminasi malaria (3.3.3 (a))	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi
14	Kejadian Malaria per 1000 orang. (3.3.3*)	0,59	0,52	0,27	0,04	0,01
15	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis (3.3.5*)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati (3.3.5*)	81,82%	87,50%	88,24%	100,00%	100,00%
17	Eliminasi Kusta (3.3.5 (a))	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi
18	Eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). (3.3.5 (b))	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi	Belum Eliminasi

Sumber: Data Dasar Pembangunan Kabupaten Purworejo & Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Angka kematian ibu naik dari tahun 2016 sebesar 75,36 menjadi 209,92 pada tahun 2020. Jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI), capaian di AKI di Kabupaten Purworejo berada di atas target nasional, dimana nasional menargetkan pada angka



dibawah 183. Upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengurangi angka kematian ibu dapat dilihat pada capaian indikator TPB nomor 3.1.2* dan 3.1.2 (a) dari 2016 hingga 2020 jumlah perempuan yang melahirkannya ditolong tenaga kesehatan terlatih dan melahirkan di fasilitas kesehatan meningkat. Meskipun demikian, banyak faktor yang mempengaruhi antara lain pemeriksaan kehamilan ibu hamil lebih dari 12 minggu, ibu hamil resiko tinggi 33,8% dan kasus penyebab lain antara lain Pneumonia, Intoksikasi, PPCM, Emboli, DOA, TB, suspek *fatty liver*.

Angka Kematian Bayi dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan yaitu dari 11,30 per 1000 KH menjadi 10,93 per 1000 KH. Jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, AKB di Kabupaten Purworejo telah mencapai target nasional yaitu di bawah 24. Sementara itu, Angka Kematian Balita dari tahun 2016 sebanyak 15,47 per 1000 KH pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13,08 per 1000 KH. Kondisi tersebut sesuai dengan capaian pada indikator TPB nomor 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, dimana telah mencapai target nasional yakni menurun. Capaian yang cukup baik juga ditunjukkan oleh indikator TPB nomor 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Purworejo yang menurun dari tahun 2016-2020. Meskipun AKB, AKBa, dan AKN di Kabupaten Purworejo berhasil menurun dari tahun 2016-2020, namun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

Prevalensi gizi buruk menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 Prevalensi gizi buruk sebesar 0,10% turun menjadi 0,07% pada tahun 2020. Angka terendah dicapai pada tahun 2018 sebesar 0,03%. Sedangkan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita meningkat (TPB Nomor 2.1.1(a)) dan Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (TPB Nomor 2.2.2*) dari tahun 2016-2020 meskipun masih berada dibawah target nasional. Prevalensi gizi buruk, kekurangan gizi, dan malnutrisi dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola



asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi karena 50 persen gizi buruk dari keluarga miskin, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, pemberdayaan keluarga masih kurang.

Prevalensi Balita Pendek (*stunting*) menunjukkan angka yang menurun tahun 2016 sebesar 10,21% dan pada tahun 2020 sebesar 8,99%. Jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 2.2.1* Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima, capaian diatas telah mencapai target nasional yaitu menurun. Penurunan juga terjadi pada Prevalensi *Stunting* pada Baduta (TPB nomor 2.2.1(a)), dari tahun 2016 sebesar 7,76 menjadi 6,46 pada tahun 2020. Meskipun prevalensi *stunting* pada baduta dan balita telah menurun, namun masih perlu upaya keras untuk mengatasinya. Penyebab terjadinya *stunting* sama dengan prevalensi gizi buruk yaitu kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi karena 50 persen gizi buruk dari keluarga miskin, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, pemberdayaan keluarga masih kurang serta masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) yang beresiko melahirkan bayi *stunting*. Meningkatnya prevalensi ibu hamil dengan anemia dari tahun 2016-2020 juga turut berpengaruh dalam meningkatkan risiko *stunting*.

Kinerja kesehatan lain adalah eliminasi penyakit endemik yang berupa malaria, kusta, dan filariasis. Kabupaten Purworejo dari tahun 2016 hingga tahun 2020 belum mencapai eliminasi ketiga penyakit endemik tersebut. Meskipun demikian, kinerja pelayanan kesehatan terhadap pengobatan penyakit tersebut menunjukkan capaian yang cukup baik, dimana terjadi penurunan kasus malaria, peningkatan angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis, dan peningkatan proporsi kasus kusta yang berhasil diobati.

Sarana Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator bidang kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.41. Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2020**

No	Sarana Dan Tenaga Kesehatan	Jumlah
	SARANA KESEHATAN	
1	Rumah Sakit	12
2	Puskesmas	27
3	Puskesmas Pembantu	60
4	Poliklinik	19
5	Posyandu	1.637
6	Praktek Bidan	483
7	Apotek	38
	TENAGA KESEHATAN	
1	Dokter	77
2	Perawat	250
3	Bidan	486
4	Farmasi	34
5	Ahli Gizi	33

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan rasio tenaga kesehatan sesuai dengan indikator TPB nomor 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan, terjadi peningkatan dari 3,27 tenaga kesehatan/ 1000 penduduk (2016) menjadi 3,49 tenaga kesehatan/ 1000 penduduk (2020). Di sisi lain, jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 3.4.2.(a) jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, belum ada puskesmas yang melayani kesehatan jiwa di Kabupaten Purworejo.

**Gambar 2.18. Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Purworejo**

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2019

Terdapat 12 jenis layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Purworejo. Di tahun 2020, hanya jenis layanan kesehatan ibu bersalin yang memenuhi target (100%). Di samping itu, masih terdapat 4 jenis layanan yang belum terpenuhi di Kabupaten Purworejo (capaian 0,00%), antara lain pelayanan kesehatan Balita, pelayanan kesehatan pada usia



Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	96,87%	99,20%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	99,25%	99,20%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	99,54%	99,50%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	92,95%	80,30%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	99,93%	66,10%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	39,57%	23,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	56,61%	45,40%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	12,88%	8,90%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	92,40%	53,80%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	56,61%	100,00 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00 %	102,50 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100,00 %	83,40%

Sumber: Dinkes Kabupaten Purworejo, 2021



SPM pelayanan kesehatan ibu hamil dicapai melalui optimalisasi Vaksin Tetanus Difetri (Td), Tablet Tambah Darah, Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin), Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, serta Buku KIA. Sementara itu, SPM pelayanan kesehatan ibu bersalin dicapai melalui optimalisasi Formulir Fotograf, Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu), serta Buku KIA.

SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir dicapai melalui optimalisasi Vaksin Hepatitis BO, Vitamin K1 Injeksi, Salep/Tetes Mata Antibiotik, Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, serta Buku KIA. Sementara itu, SPM pelayanan kesehatan balita dicapai melalui optimalisasi Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA, Vitamin A Biru, Vitamin A Merah, Vaksin Imunisasi Dasar (HBO, BCG, Polio, IPV, DPT-HB-Hib, Campak Rubell), Vaksin Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak Rubella), Jarum Suntik dan BHP, serta Peralatan Anafilaktik.

SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dicapai melalui optimalisasi Buku Raport Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, serta Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah. SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dicapai melalui optimalisasi Pedoman dan Media KIE, Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes, serta Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM). Sementara itu, SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut dicapai melalui optimalisasi Strip Uji Pemeriksaan, Gula Darah, Kolesterol, Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G), serta Buku Kesehatan Lansia.



SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi dicapai melalui optimalisasi Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Tensimeter, serta Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM. SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dicapai melalui optimalisasi Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, serta Pedoman dan Media KIE. SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dicapai melalui optimalisasi Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Kit berisi 2 alat fiksasi, Optimalisasi formulir pencatatan dan pelaporan, serta Media KIE. SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dicapai melalui optimalisasi Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), Reagen Zn TB, Masker jenis rumah tangga dan masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, Catridge tes cepat molekuler, Formulir pencatatan dan pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur. Sementara itu, SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dicapai melalui optimalisasi Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, Tes cepat HIV (RDT) pertama, serta Bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK).

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air.

a. Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya penuh dalam

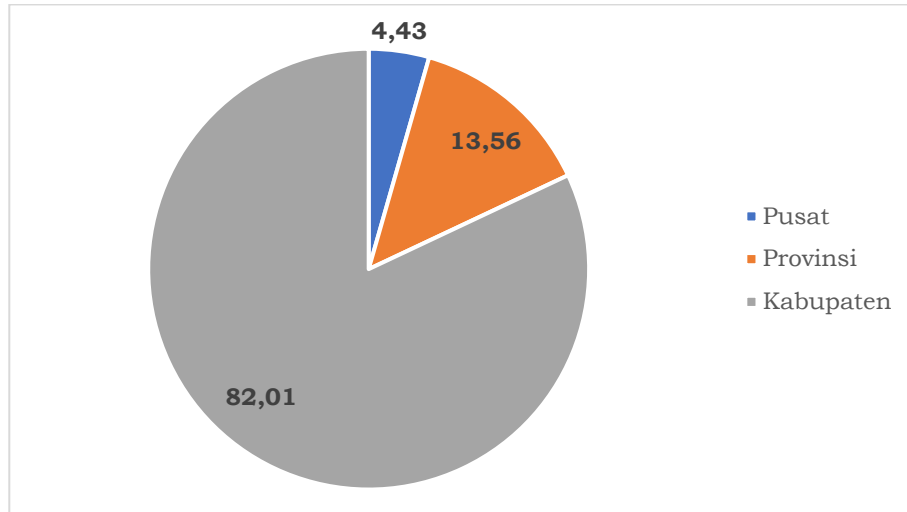


pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 adalah sepanjang 872,82 km. Data jalan di kabupaten Purworejo berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.43. Data Jalan Berdasarkan Kewenangannya di Kabupaten Purworejo

No	Kewenangan	Jumlah (ruas)	Panjang (km)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pusat	4	41,56	SK Menteri PUPR No : 248/KPTS/M/2015
	a. Prembun - Kutoarjo		12,75	
	b. Kutoarjo-Batas Kota Purworejo		7,54	
	c. Jl. Lingkar Selatan Purworejo		4,3	
	d. Jl. Lingkar Selatan Purworejo - Karangnongko (Batas Prov. DIY)		16,97	
2	Provinsi	14	127,23	SK Gubernur Jawa Tengah No : 620/2/Tahun 2016
	a. Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo		31,88	
	b. Bruno/ Bts. Purworejo - Kepil			
	c. Kutoarjo - Ketawang		12,90	
	d. Maron-Purworejo		2,94	
	e. Jl. Ir. H. Juanda		0,41	
	f. Jl. Jend. Gatot Subroto		2,44	
	g. Maron-Kemiri		10,98	
	h. Kemiri-Kepil (Batas Wonosobo)		8,61	
	i. Salaman-Bener (Batas Kab. Purworejo)		8,25	
	j. Bts Kab. Magelang/ Bener-Maron		12,1	
	k. Purworejo-Sibolong/Bts DIY		16,64	
	l. Jl. WR. Supratman		3,09	
	m. Jl. Imam Bonjol (Lingkar Utara Purworejo)		4,2	
	n. Jl. Pahlawan (Lingkar Barat Purworejo)		5,1	
3	Kabupaten	234	769,25	SK Bupati Purworejo No. 188.18/482/IX/2016
	Total	251	938,04	

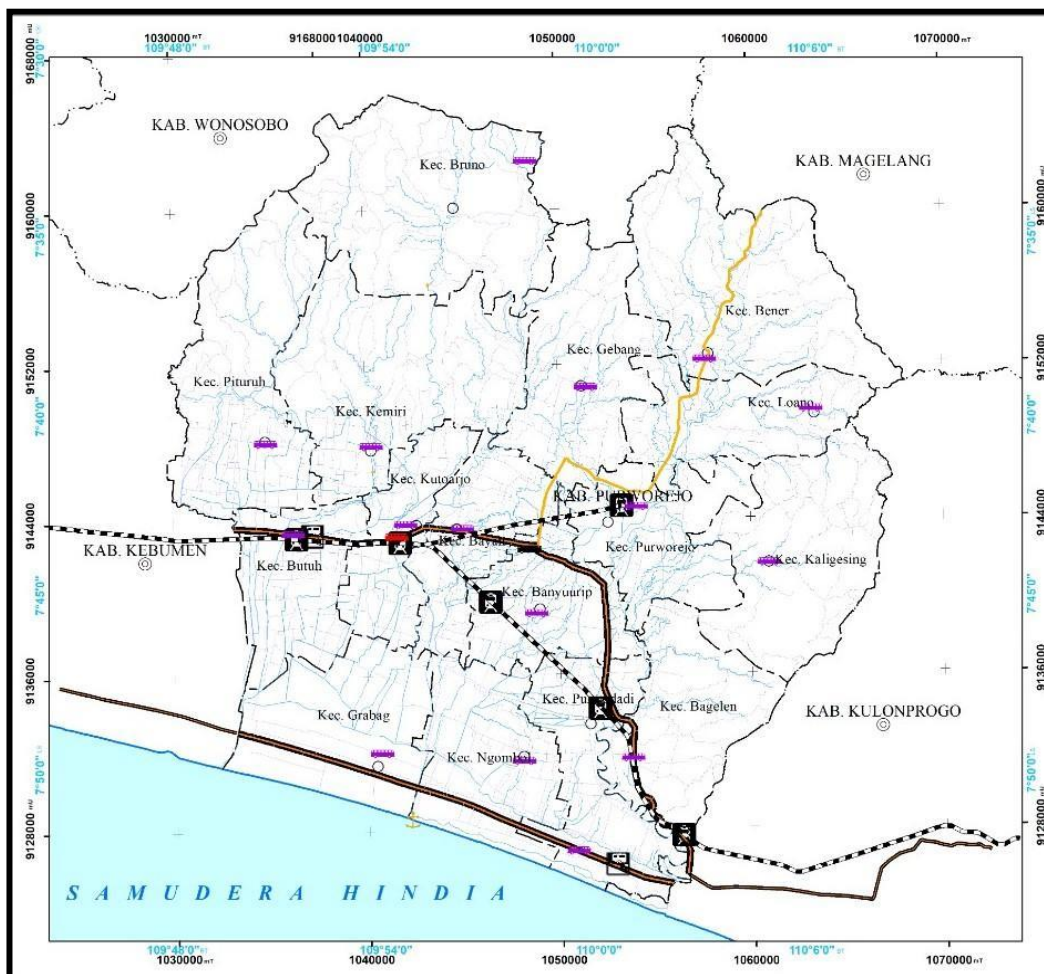
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020



Gambar 2.19. Proporsi Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo (%)

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020, diolah

Persentase panjang jalan kewenangan pusat di Kabupaten Purworejo sebesar 4,43%, jalan kewenangan provinsi 13,56%, dan sisanya 88,01% merupakan kewenangan kabupaten. Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.



Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan Di Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Tahun 2019, diolah



Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 188.18/482/IX/2016 terdapat 248 (dua ratus empat puluh delapan) ruas jalan kewenangan kabupaten dengan panjang total 769,25 km. Konstruksi permukaan jalan kewenangan kabupaten terbagi dalam aspal, hotmix, batu, cor beton, dan tanah.

Selain jalan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten, di Kabupaten Purworejo juga terdapat jalan poros desa. Jalan ini tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Purworejo sepanjang 1.259,931 km. Jalan poros desa menghubungkan antar satu desa dengan desa yang lain di Kabupaten Purworejo. Data panjang jalan poros desa yang terdapat di masing-masing kecamatan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.44. Data Jalan Poros Desa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Panjang (km)
1	2	3
1	Purworejo	51,195
2	Kutoarjo	46,105
3	Banyuurip	67,306
4	Bayan	60,244
5	Purwodadi	77,276
6	Grabag	78,606
7	Ngombol	73,07
8	Bagelen	65,622
9	Kaligesing	74,079
10	Butuh	69,296
11	Kemiri	106,041
12	Pituruh	137,825
13	Loano	62,995
14	Bruno	110,008
15	Bener	102,624
16	Gebang	77,639
	Total	1.259,931

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo 2019, diolah

Kecamatan Pituruh merupakan kecamatan yang mempunyai jalan poros desa terpanjang yaitu sebesar 137,825 km atau sebesar 10,93%. Sedangkan panjang jalan poros desa terpendek terdapat di Kecamatan Kutoarjo, sebesar 46,105 km atau sebesar 3,65%.

Kondisi jalan kabupaten semakin membaik selama 5 tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat proporsi jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2016 sebesar 73,19% meningkat menjadi 78,89% di tahun 2020. Panjang dan proporsi jalan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Purworejo selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.45. Panjang dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang jalan kondisi baik (km)	432,67	444,46	480,17	500,13	248,00
2	Panjang jalan kondisi sedang (km)	130,38	110,98	107,98	98,15	358,89
3	Panjang jalan kondisi rusak ringan (km)	131,10	111,21	95,50	86,74	101,60
4	Panjang jalan kondisi rusak berat (km)	75,10	102,60	85,60	75,23	60,760
5	Total Panjang jaringan jalan kabupaten (km)	769,25	769,25	769,25	769,25	769,25
6	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	73,19%	72,21%	76,46%	78,94%	78,89%
7	Proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak ringan	17,04%	14,45%	12,41%	11,27%	13,20
8	Proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak berat	9,76%	13,33%	11,12%	9,78%	7,89%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

Pada dokumen perencanaan, peningkatan kapasitas jalan kabupaten ditargetkan 18,8 km. Kondisi eksisting di lapangan, jalan kabupaten yang telah ditingkatkan sepanjang 23,17 yang mengakibatkan capaiannya sebesar 123,24%.

Tabel 2.46. Persentase Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten (%)	30,31	42,46	58,51	89,52	123,24
2	Panjang jalan kabupaten yang telah ditingkatkan kapasitasnya (km)	5,71	8	11	16,83	23,17
3	Panjang jalan kabupaten yang akan ditingkatkan kapasitasnya (km)	18,84	18,84	18,8	18,8	18,8

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

Kondisi jembatan di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat selama kurun waktu 2016-2020. Hal itu dapat dilihat



proporsi jembatan kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 94,50% meningkat menjadi 99,10 % di tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Purworejo memprioritaskan perbaikan jembatan mengingat jembatan adalah infrastruktur yang penting untuk menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Purworejo. Panjang dan proporsi jembatan di Kabupaten Purworejo berdasarkan kondisi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.47. Jumlah dan Proporsi Jembatan Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jembatan dalam kondisi baik	332	335	335	336	433
2	Jembatan dalam kondisi rusak ringan	77	75	75	75	6
3	Jembatan dalam kondisi rusak perbaikan berkala	27	26	26	26	2
4	Jembatan dalam kondisi rusak berat	5	5	5	4	2
5	Jembatan dalam kondisi kritis	1	1	1	1	0
6	Jembatan dalam kondisi runtuh	1	1	1	1	0
7	Total jumlah jembatan kewenangan kabupaten (buah)	443	443	443	443	443
8	Proporsi jembatan dalam kondisi rusak ringan	74,94%	75,62%	75,62%	75,84%	97,74%
9	Proporsi jembatan dalam kondisi rusak perbaikan berkala	6,09%	58,69%	58,69%	58,69%	0,45%
10	Proporsi jembatan dalam kondisi rusak berat	1,12%	1,12%	1,12%	0,90%	0,00%
11	Proporsi jembatan dalam kondisi rusak kritis	0%	0%	0%	0%	0%
12	Proporsi jembatan dalam kondisi rusak runtuh	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

DPUPR Kabupaten Purworejo menargetkan 41 jembatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam jangka lima tahunan. Namun demikian sampai saat ini baru 27 jembatan yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas jembatan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya lebih keras untuk mencapai target ini.

**Tabel 2.48. Persentase Peningkatan Kapasitas Jembatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Jembatan	29,27%	43,90%	56,10%	63,41%	65,85%
2	Jumlah Jembatan yang telah ditingkatkan kapasitasnya (buah)	12	18	23	26	27
3	Jumlah Jembatan yang akan ditingkatkan kapasitasnya (buah)	41	41	41	41	41

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

b. Penataan Ruang

Kabupaten Purworejo memiliki luas 108.081 ha. Dari luasan ini, sebesar 89.786 ha telah sesuai dengan RTRW. Dengan adanya penyesuaian RTRW Kabupaten Purworejo yang telah menggunakan CSRT 2013 serta adanya revisi batas administrasi dengan Kulon Progo, diharapkan persentase kesesuaian arahan penggunaan lahan semakin meningkat.

Tabel 2.49. Persentase Peningkatan Kesesuaian Arahan Penggunaan Lahan di Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Kesesuaian Arahan Penggunaan Lahan	82,95%	82,95%	83,23%	83,23%	83,07%
2	Luasan pemanfaatan ruang yang telah sesuai RTRW (ha)	89.657	89.657	89.960	89.960	89.786
3	Luas seluruh wilayah kabupaten (ha)	108.081	108.081	108.081	108.081	108.081

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021, diolah

Terdapat pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo, dan Border City di Kabupaten Purworejo. Saat ini, persentase pengembangan kawasan tersebut mencapai 51,89%. Gambaran kondisi lima tahunnya dapat diamati pada tabel berikut.



Tabel 2.50. Persentase Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh, Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Border City di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh, Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Border City	46,13%	48,35%	53,01%	50,65%	51,89%
2	Total prosentase pengembangan pengembangan masing-masing kawasan (kawasan cepat tumbuh (30%), perkotaan Purworejo-Kutoarjo (35%) dan border city (35%) (%)	46,13%	48,35%	53,01%	50,65%	51,89%
3	Target prosentase pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city (%)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

Peraturan daerah tentang tata ruang yang ditargetkan pada DPUPR sebanyak 21. Sampai saat ini peraturan daerah tentang tata ruang yang telah diterbitkan sebanyak 3 buah. Sementara itu, indikator mengenai kesesuaian rencana tata ruang dalam RPJMD/ Renstra PD dan RKPD/ Renja PD serta cakupan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang mencapai 100%.

Tabel 2.51. Tersedianya Peraturan & Informasi Rencana Umum dan Rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR & RTR kawasan strategis), Kesesuaian Rencana Tata Ruang dalam RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD, dan Persentase Cakupan Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Peraturan & Informasi Rencana Umum & rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR & RTR kawasan strategis)	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
2	Jumlah peraturan daerah tentang tata ruang (buah)	3	3	3	3	3
3	Jumlah peraturan daerah tentang tata ruang yang seharusnya ada (buah)	21	21	21	21	21



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
4	% Kesesuaian Rencana Tata Ruang dalam RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah urusan yang telah dikaji terhadap rencana tata ruang (urusan)	14	14	14	14	14
6	Jumlah urusan yang harus dikaji terhadap rencana tata ruang (urusan)	14	14	14	14	14
7	Persentase Cakupan Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah perizinan tata ruang yang diajukan (buah)	580	142	275	262	622
9	Jumlah perizinan tata ruang yang dilayani (buah)	580	142	275	262	622

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

c. Sumber Daya Air

Kinerja layanan irigasi dihitung dari 95% nilai kinerja sistem irigasi pada DI kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dan 5% pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten. Di tahun 2020, kinerja layanan irigasi mencapai 66,18%. Kinerja layanan irigasi di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.52. Persentase Kinerja Layanan Irigasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kinerja Layanan Irigasi	57,73%	59,20%	60,47%	62,02%	66,18%
2	Kinerja sistem irigasi pada DI kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	60,51%	62,06%	63,40%	64,39%	68,52%
3	Persentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten	4,83%	4,83%	4,83%	17,00%	21,74%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan



dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi yaitu:

- Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenisnya dibagi menjadi Daerah Irigasi Permukaan (DIP) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR). Daerah Irigasi permukaan di Kabupaten Purworejo berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53. Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan Di Kabupaten Purworejo

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luasan (ha)
1	2	3	4
1	Pusat	3	19.908
	DI Boro		5.136
	DI Kedungputri		4.341
	DI Waduk Wadaslintang		10.431
2	Provinsi	3	2.840
	DI Watujagir		210
	DI Kalibutek		98
	DI Loning Kragilan		2.532
3	Kabupaten	250	9.470

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Sedangkan Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten Purworejo

No	Nama DIR	Luasan (ha)
1	2	3
1	DIR Depok	11
2	DIR Gedangan	30
3	DIR Girirejo	14
4	DIR Jatikontal	60
5	DIR Jatimalang	75
6	DIR Jogoboyo	30
7	DIR Karanganyar	40
8	DIR Keburuhan	33
9	DIR Malangrejo	31
10	DIR Ngentak	47
11	DIR Pagak	43
12	DIR Pejagran	2
13	DIR Tunjungan	2
14	DIR Wero	35
	TOTAL	453

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020



Kabupaten Purworejo memiliki luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang sebesar 329.010 m². Lebih dari 300.000 m² ini, 177.275 m² sudah tertangani (bebas genangan). Pada tahun terakhir (2020, luas titik genangan yang tertangani sebesar 53,88% sehingga perlu upaya keras untuk menjangkau seluruh luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang seluruhnya.

Tabel 2.55. Persentase Luas Titik Genangan yang Tertangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Luas Titik Genangan yang Tertangani	39,10%	40,32%	41,72%	52,36%	53,88%
2	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang yang sudah tertangani (terbebas dari genangan) (m ²)	128.632	132.665	137.265	172.275	177.275
3	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (m ²)	329.010	329.010	329.010	329.010	329.010

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

Panjang saluran serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun di dalam Rencana Induk Sistem Drainase yang tercantum dalam perencanaan Kota/Kabupaten ialah sepanjang 247.955 m. Panjang saluran yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kota/Kabupaten adalah 69.936 m, sehingga capaian di tahun 2020 sebesar 28,21%.

Tabel 2.56. Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	25,23%	26,99%	27,61%	28,01%	28,21%
2	Jumlah panjang saluran yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kota/Kabupaten (m)	62.560	66.926	68.452	69.452	69.936
3	Jumlah panjang saluran serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun di	247.955	247.955	247.955	247.955	247.955



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	dalam Rencana Induk Sistem Drainase yang tercantum dalam perencanaan Kota/Kabupaten (m)					

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

d. Tata Bangunan dan Lingkungan

Prosentase jumlah IMB yang diterbitkan adalah kumulatif penerbitan IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Perda Bangunan Gedung guna meningkatkan tertib pembangunan bangunan gedung terhadap jumlah bangunan gedung di kabupaten yang sudah terinventarisasi. Bangunan gedung di Kabupaten Purworejo yang terinventarisasi sebanyak 202.106 buah. sementara itu, jumlah data IMB yang telah diterbitkan sejak tahun 2016-2020 sebanyak 6.289 buah. Capaian 3,11% kesesuaian bangunan dengan RTBL ini membutuhkan upaya keras untuk meningkat, meskipun kecenderungannya semakin baik dari tahun ke tahun.

Tabel 2.57. Persentase Kesesuaian Bangunan dengan RTBL di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kesesuaian Bangunan dengan RTBL	0,06%	0,21%	2,50%	2,78%	5,70%
2	Jumlah data IMB yang diterbitkan (terinventarisasi)	120	430	5.061	5.619	11.520
3	Jumlah data bangunan gedung di kabupaten (terinventarisasi)	202.106	202.106	202.106	202.106	202.106

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

Terdapat 582 bangunan gedung negara kewenangan kabupaten yang telah terinventarisasi. Dalam perkembangannya, saat ini terdapat 518 bangunan gedung negara dalam kondisi baik. Cakupan penanganan bangunan gedung dalam rentang waktu 2016-2020 dapat diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2.58. Cakupan Penanganan Bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Penanganan Bangunan Gedung	24,05%	42,78%	42,78%	44,16%	89,00%
2	Jumlah Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik (terinventarisasi)	140	249	249	257	518
3	Jumlah Bangunan Gedung Negara Kewenangan Kabupaten (terinventarisasi)	582	582	582	582	582

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

e. Jasa Konstruksi

DPUPR Kabupaten Purworejo tiap tahunnya selalu melayani permohonan IUJK sesuai SOP. Terlihat pada tabel di bawah, permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP tertinggi di tahun 2018, sementara itu di tahun terakhir (2020, terdapat 74 permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP.

Tabel 2.59. Persentase Permohonan IUJK yang Terlayani sesuai SOP di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Permohonan IUJK yang Terlayani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP	40	30	177	52	74
3	Jumlah Permohonan IUJK yang masuk	40	30	177	52	74

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021

Jenis data dan informasi jasa konstruksi di DPUPR Kabupaten Purworejo ditargetkan 7 buah. Di tahun 2020, terdapat 7 jenis data dan informasi jasa konstruksi yang sudah ada atau sebesar 100%.

Tabel 2.60. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	42,86 %	42,86%	57,14%	85,71%	100%
2	Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang sudah ada	3	3	4	6	7
3	Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang seharusnya ada	7	7	7	7	7

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2021



f. Air Minum

Jumlah penduduk yang dilayani sistem air minum baik perpipaan maupun non perpipaan di Kabupaten Purworejo terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum layak pada tahun 2016 sebesar 621.774 jiwa meningkat menjadi 666.210 jiwa di tahun 2020. Dengan demikian masih terdapat 53.974 jiwa atau 7,49% penduduk Kabupaten Purworejo yang belum mengakses air minum layak. Jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan 6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, capaian air minum di Kabupaten Purworejo tentunya masih dibawah target nasional, dimana nasional mentarget meningkat sebesar 100%.

Beberapa hal yang menjadi pendorong pesatnya capaian air minum di Kabupaten Purworejo yaitu adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui Program Pamsimas, Program Hibah Insentif Desa, Program Hibah Air Minum Perdesaan, DAK Air Minum, dan Program Pamsimas APBD. Selain itu masifnya pemasangan Sambungan Rumah (SR) dari PDAM melalui subsidi pemasangan SR baru ditengarai menjadikan peningkatan capaian air minum yang cukup signifikan. SPAM Regional Keburejo dengan kapasitas sementara 50 liter/detik secara tidak langsung meningkatkan akses air minum layak dan aman bagi masyarakat utamanya di Kecamatan Pituruh dan Kemiri.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam capaian air minum di Kabupaten Purworejo yaitu belum tersedianya data primer terpadu yang akurat yang dapat digunakan sebagai basis data intervensi, sedangkan data yang tersedia hanya sebatas data sekunder dengan banyak definisi operasional dan dikeluarkan oleh banyak sector. Selain itu belum *clean and clear*nya status lahan yang akan dipakai untuk pengembangan jaringan air minum juga menjadi penghambat capaian air minum. Selain itu, kurangnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Prov Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dalam



penyediaan air minum juga menjadi faktor yang membuat kurang optimalnya intervensi pengembangan jaringan air minum dalam hal ini SPAM Regional Keburejo. Penduduk yang dapat mengakses air minum layak di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61. Persentase Cakupan Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Cakupan Air Minum	87,91%	98,00%	89,11%	89,33%	92.51%
2	Jumlah penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan (jiwa)	624.543	700.283	638.453	641.672	666.210
3	Jumlah penduduk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (jiwa)	710.435	714.574	716.477	718.316	720.184

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

g. Air Limbah

Sebagai salah satu infrastruktur layanan dasar yang vital, pelayanan pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat dipenuhi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan target pelayanan air limbah nasional yaitu *universal acces* yang mengamanatkan pelayanan air limbah dapat diakses 100% penduduk.

Tabel 2.62. Cakupan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Akses Sanitasi Layak	81,27%	84.64%	84.78%	85.01%	84.70%
2	Jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jiwa)	577.373	604.815	607.429	610.640	609.995
3	Jumlah penduduk seluruhnya (jiwa)	710.435	714.574	716.477	718.316	720.184

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

Capaian tersebut jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Cakupan akses sanitasi layak di Kabupaten



Purworejo masih jauh dibawah target nasional yakni meningkat 100%.

Masih rendahnya tingkat cakupan layanan akses sanitasi layak oleh masyarakat disebabkan karena masih kurangnya intervensi program sanitasi. Untuk itu, dalam rangka peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jetis. Sedangkan untuk penanganan/pengurangan sampah domestik digalakkan pembentukan bank sampah di tingkat masyarakat dan juga pembangunan Tempat Sampah (TPS 3R).

Kabupaten Purworejo memiliki dua jenis layanan yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic. Di tahun 2019 maupun 2020, kedua jenis layanan ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan (100%). Terdapat sedikit peningkatan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, menjadi 46,25% di tahun 2020 atau bertambah 0,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun untuk layanan pengolahan air limbah domestik capaiannya turun sebesar 0,11%. Hal ini lebih lanjut dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.63. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	45,93%	46,25%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	28,34%	28,23%

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

Rendahnya capaian SPM bidang pekerjaan umum menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Purworejo. SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dicapai melalui optimalisasi Pelayanan SPAM jaringan perpipaan serta Pelayanan



SPAM bukan jaringan perpipaan. Sementara itu, SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dicapai melalui optimalisasi Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha, Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan, serta Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjamin masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah juga bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan.

Rasio permukiman layak huni merupakan perbandingan antara jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi: jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kelurahan/desa) terhadap Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu



(kelurahan/desa). Kondisi rasio permukiman layak huni relatif semakin baik setiap tahunnya, mencapai 85,22% di tahun 2020.

Tabel 2.64. Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Permukiman Layak Huni	63,77%	64,98%	69,84%	75,71%	85,22%
2	Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kelurahan/desa)	315	321	345	374	421
3	Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kelurahan/desa)	494	494	494	494	494

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

Capaian rasio rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan walaupun nilainya fluktuatif tiap tahun. Misalnya capaian di tahun 2017 sebesar 2,25 % akan tetapi pada tahun 2018 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,46 %. Tetapi secara umum nilai capaiannya mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2016-2020 terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 3,99 %. Dengan demikian masih terdapat 25,026 unit rumah atau sekitar 12,38 % rumah tidak layak huni yang harus ditangani. Kinerja ini mendukung pencapaian indikator TPB nomor 11.1.1. (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Beberapa hal yang menjadi pendorong tercapainya persentase rumah layak huni karena adanya kolaborasi pendanaan dari berbagai macam program pemerintah maupun swasta/CSR, diantaranya adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Perumahan (DAK Perumahan), Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) dari APBD Provinsi, rehabilitasi RTLH dari APBD Kabupaten, Program Pembangunan rumah rusun dan rumah



khusus baik dari APBN maupun dana CSR lainnya misalnya dari Baznas. Sedangkan beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya peningkatan rasio perumahan layak huni yakni penanganan peningkatan kualitas perumahan masih dilakukan secara parsial, dan belum maksimalnya pendanaan APBDes untuk pembiayaan RTLH. Persentase capaian Rumah Layak Huni Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.65. Persentase Rumah layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rumah layak Huni	83,63%	85,88%	86,34%	86,79%	87,62%
2	Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu (rumah)	169.022	173.565	174.494	175.416	177.080
3	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (rumah)	202.106	202.106	202.106	202.106	202.106

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena faktor bencana alam dan relokasi adanya program pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 jenis layanan terkait SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 adalah 217.249 dan jumlah rumah yang tersedia sebesar 202.226 unit. Ini berarti terdapat rumah tangga masih menumpang dengan KK induknya sebanyak 15.023 KK. Berdasarkan data ini terdapat kekurangan kepemilikan rumah (backlog) yang cukup besar dan harus dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan dunia



usaha. Status backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016-2020 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.66. Persentase Kebutuhan Rumah (Backlog Rumah) di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kebutuhan Rumah (Backlog Rumah)	3,03%	5,44%	5,44%	6,97%	6,91%
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki rumah	6.485	11.627	11.627	15.142	15.023
3	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	213.733	213.733	213.733	217.249	217.249

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

Penyebab semakin meningkatnya backlog rumah yaitu pertumbuhan kebutuhan rumah (pertumbuhan rumah tangga) tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah layak huni sesuai dengan angka tambahan kebutuhan rumah. Hal ini disebabkan karena tingginya harga property rumah akibat luas lahan yang semakin sempit dan masih kurangnya pasokan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Secara keseluruhan, terdapat 103.482 ha lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di tahun 2020, seluas 21.525 ha dinilai sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Masih menjadi PR Pemkab Purworejo karena indikator cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU ini realisasinya cukup jauh dibandingkan dengan target yang tercantum dalam RPJMD.

Tabel 2.67. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	35,50%	15,75%	12,47%	12,47%	20,80%
2	Luas lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	36.740	16.298	12.909	12.909	21.525
3	Luas total lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	103.482	103.482	103.482	103.482	103.482

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021



Permasalahan bidang permukiman yang lain di Kabupaten Purworejo adalah masih tingginya luasan kawasan kumuh. Data awal Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten adalah 197,41 ha (SK Bupati Nomor 050/373/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Purworejo), tersebar di 11 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Mranti, Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kelurahan Baledono, Kelurahan Pangen Rejo dan Kelurahan Keseneng, Kelurahan Bandung, Kelurahan Katerban, Kelurahan Semawung Daleman, Kelurahan Semawung Kembaran. Dari hasil penanganan Program Kotaku dengan Bantuan Dana Investasi (BDI) dari pusat Kabupaten pada Tahun 2017, luasan kumuh bisa berkurang menjadi 182,25 ha.

Dari tahun 2016-2020 luasan kawasan kumuh yang tertangani sebesar 70,71 hektar. Akan tetapi karena kurangnya kegiatan pencegahan Kawasan kumuh baru, berdasarkan pendataan pada tahun 2020, luas kawasan kumuh bertambah lagi menjadi 136,11 ha (SK Bupati Nomor 160.18/526/2020. Akan tetapi jika sebelumnya Kawasan kumuh terdapat di 11 desa/kelurahan dari 2 Kecamatan, SK kumuh yang baru hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Mranti, Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kelurahan Baledono, Kelurahan Pangen Rejo dan Kelurahan Keseneng. Kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo seluas 49,918 Ha direncanakan akan ditangani melalui kegiatan penanganan kumuh skala kawasan pada tahun 2021 melalui pendanaan dari *National Slum Upgrading Program* (NSUP). Sehingga pada tahun 2021, diharapkan Kecamatan Kutoarjo sudah bebas dari Kawasan kumuh. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	100,00 %	92,32%	65,63%	52,93%	68,95%



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
2	Luas kawasan permukiman kumuh (Ha)	197,41	182,25	129,56	104,48	136,11
3	Luas kawasan permukiman di RTRW (Ha)	197,41	197,41	197,41	197,41	197,41

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

Terdapat dua jenis layanan bidang perumahan dan permukiman yang harus dipenuhi Kabupaten Purworejo dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Kedua jenis layanan ini capaiannya menurun di tahun 2020. Sebesar 5,42% untuk jenis layanan penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota, sementara jenis layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota capaiannya sebesar 25%. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	25,00%	58,2%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	33,33%	75,00%

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

SPM penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dicapai melalui optimalisasi Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, Pembangunan kembali



rumah bagi korban bencana, Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana, serta Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana. Sementara itu, SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dicapai melalui optimalisasi Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, Subsidi uang sewa, serta Penyediaan rumah layak huni. Di tahun 2020, realisasi SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai 75%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 33,33%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 dilakukan penyediaan rumah untuk relokasi korban bencana tahun-tahun sebelumnya.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas, terdapat enam jenis layanan yang harus dipenuhi Kabupaten Purworejo. Tiga jenis layanan di antaranya telah mencapai 100% di tahun 2020, antara lain pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Tiga jenis layanan lainnya perlu diupayakan, terlebih jenis layanan Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi karena capaiannya di tahun 2020 sebesar 0,00%.

Tabel 2.70. Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0,00%	0,00%
2	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100,00 %	100,00 %
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh	40,00%	18,80%



No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
		informasi rawan bencana		
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,00%	100,00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	33,33%	50,00%
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00 %	100,00 %

Sumber: Satpol PP Damkar & BPBD Kabupaten Purworejo, 2021

SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi dicapai melalui optimalisasi pelayanan kerugian materil, serta pelayanan kerugian pelayanan pengobatan. Sementara itu, SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu dicapai melalui optimalisasi Penegakan Perda sesuai SOP, Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar, serta Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar.

SPM pelayanan informasi rawan bencana dicapai melalui optimalisasi Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana, Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, serta Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana. SPM pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dicapai melalui optimalisasi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sementara itu, SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dicapai melalui optimalisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pendataan terhadap



warga yang terkena/menjadi korban bencana, Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana, serta Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas

SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dicapai melalui optimalisasi Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak, serta Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.

a. Kebencanaan

Kabupaten Purworejo menempati urutan pertama untuk Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada tahun 2020. Sedangkan menurut perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-4 Kabupaten/Kota se Indonesia dengan skor 215,2 dan masuk kategori resiko tinggi. Purworejo menjadi daerah yang geografisnya multi ancaman terjadinya bencana alam dan memiliki karakteristik bencana yang unik, dimana setiap terjadi banjir pasti juga terjadi tanah longsor. Sehingga untuk mengatasi masalah ini maka perlu adanya respon yang cepat antara keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana, sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan cepat, tepat, efisien dan efektif.



Gambar 2.21. Penanganan Tanah Longsor dan Briefing Tim SAR Penanganan Bencana



Untuk penanggulangan bencana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercapai 100%. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan Pelatihan Tim SAR Penanganan Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Gladi Lapangan Penanganan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana. Kinerja yang cukup baik ini juga didukung dengan menurunnya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana, meningkatnya jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, menurunnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

Meskipun capaian kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo adalah 100%, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan indeks risiko bencana yang ada.

Tabel 2.71. Kinerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. (1.5.3*), (11.b.2*), dan (13.1.1*)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). (11.5.1.(a))	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2
4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (1.5.1*), (11.5.1*) dan (13.1.2*)	157	187	55	12	14
5	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. (11.5.1 (c))	0	11	14	14	14
6	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. (11.5.2. (a)) dan (1.5.2 (a))	Rp. 11.384.150.000	Rp. 1.588.400.000	Rp. 1.446.800.000	Rp. 1.398.000.000	Rp. 1.467.000.000
7	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah (1.5.1.(a))	5 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	3 lokasi	N/A
8	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi (1.5.1.(e))	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2021

b. Penyelenggaraan Trantibum dan Penegakan Perda

Upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), adalah menjadi tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



(Satpol PP Damkar). Kinerja Satpol PP selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72. Perkembangan Kapasitas Tramtibumlinmas Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah polisi pamong praja	75	77	70	79	120
2	Jumlah Linmas	6.163	5.925	5.929	5.770	5.133
3	Cakupan patrol petugas satpol	144%	192%	192%	100%	100%
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	234	309	345	4.655	228

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, 2021

Jumlah linmas Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan anggota linmas pada umumnya sudah lanjut usia dan belum adanya penambahan anggota baru. Untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3 terjadi lonjakan kasus pada tahun 2019 dikarenakan adanya pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.73. Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	2	3	4	5
1	2016	2.293	2.293	100
2	2017	3.437	3.437	100
3	2018	1.669	1.669	100
4	2019	2.111	2.111	100
5	2020	2.824	2.824	100

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa untuk penegakan perda tahun 2016-2020 sudah sangat baik dengan persentase 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pelanggaran Perda yang ada dapat terselesaikan.

6) Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki 5 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 dan capaian indikator TPB yang tergambar sebagai berikut:

**Tabel 2.74. Kinerja Daerah Urusan Sosial**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses Terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan	0,03%	0,03%	0,03%	0,35%	50,15%
4	Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang Dibina	29,85%	16,86%	14,03%	13,82%	43,54%
5	Cakupan Penghargaan Kepahlawanan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (1.2.1*) dan (10.1.1.(a))	13,91	13,81	11,67	11,45	11,78
7	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. (1.3.1. (c))	29,89	26,21	N/A	N/A	N/A
8	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. (1.3.1 (d))	13877	21348	34505	33635	N/A
9	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara	N/A	N/A	6,33	7,97	N/A



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. (1.a.1*)					
10	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. (1.a.2*)	30,97	36,04	35,30	35,76	46,75

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021

Pada sasaran mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan indikator persentase cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu, terlihat capaian pada tahun 2016-2020 menunjukkan angka 100% yang berarti cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu yang mencakup desil 1 dan desil 2 data PBDT 2015 sudah sepenuhnya terlayani dan mencapai target. Jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 1.2.1*, capaian tersebut belum berdampak signifikan dalam penurunan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan data capaian pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa unsur PMKS yang ditangani sudah mencapai target yang ditetapkan sehingga besar capaiannya adalah 100%. Sedangkan penanganan/pemberdayaan PMKS, terdapat peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan/pemberdayaan PMKS yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dan sudah mencapai target akhir yang ditentukan.



Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Meskipun sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, namun jumlah pembinaan PSKS kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian yang sudah melebihi target yang ditetapkan.

Cakupan penghargaan kepahlawanan ada persentase pemberian penghargaan terhadap keluarga pahlawan perintis dan keluarga veteran terhadap seluruh keluarga pahlawan yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya pemberian penghargaan kepahlawanan dapat terpenuhi sebesar 100% yang berarti seluruh keluarga pahlawan perintis dan veteran yang ada di Kabupaten Purworejo telah diberikan penghargaan sebagaimana mestinya.

Terdapat lima jenis layanan yang harus dipenuhi Kabupaten Purworejo dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi terakhir di tahun 2020, hanya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota yang capaiannya mencapai 100%. Empat jenis layanan lain perlu diupayakan di tahun berikutnya, terlebih layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial karena capaiannya sebesar 0,00%. Lebih lanjut hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.75. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	13,33%	20,00%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20,00%	33,33%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	6,67%	0,00%



No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	6,67%	20,00%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	0,00%	100,00 %

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021

SPM rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial dicapai melalui optimalisasi Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan, Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru, Penyediaan permakanan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Penyediaan perbekalan kesehatan, Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, Layanan rujukan, Layanan data dan pengaduan, serta Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti.

SPM rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dicapai melalui optimalisasi Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan, Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki



kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru, Penyediaan permakanaan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Penyediaan perbekalan Kesehatan, Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, Layanan rujukan, Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti, serta Layanan data dan pengaduan.

SPM rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial dicapai melalui optimalisasi Layanan data dan pengaduan, Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti, Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan, Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru, Penyediaan permakanaan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Penyediaan perbekalan Kesehatan, Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga,serta Layanan rujukan.

SPM rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dicapai melalui optimalisasi Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar



diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru, Penyediaan permakanaan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Penyediaan perbekalan kesehatan, Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, Layanan rujukan, Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan, Layanan data dan pengaduan, serta Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti

SPM perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten dicapai melalui Penyediaan permakanaan, Penyediaan sandang, Penyediaan tempat penampungan pengungsi, Penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta Pelayanan dukungan psikososial.

7) Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 5 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 dan capaian indikator TPB yang tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.76. Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelayanan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tiap Tahun	10,51%	10,60%	16,58%	17,23%	10,33%



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditangani Tiap Tahun	16,84%	23,35%	27,72%	31,16%	3,65%
4	Capaian Sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja	13,44%	22,89%	32,04%	36,86%	43,39%
5	Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	35,38%	47,81%	57,44%	64,90%	69,30%
6	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (8.2.1*)	N/A	N/A	2,16	3,08	N/A
7	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, (8.3.1*)	N/A	56,19	52,84	46,44	N/A
8	Persentase tenaga kerja formal. (8.3.1.(a))	N/A	25,48	28,25	32,92	N/A
9	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. (8.3.1.(b))	N/A	34,84	35,83	37,54	N/A
10	Upah rata-rata per jam pekerja. (8.5.1*)	Rp. 8.125,00	Rp. 9.031,25	Rp. 9.831,25	Rp. 10.625,00	Rp. 11.531,25
11	Tingkat pengangguran terbuka (8.5.2*)	4,01	3,64	4,51	2,96	4,04
12	Tingkat setengah pengangguran. (8.5.2.(a))	N/A	32,66	33,07	36,12	N/A
13	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. (10.4.1 (b))	70,86	74,72	76,98	77,32	81,80

Sumber: Dinperinaker & BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Peningkatan daya saing tenaga kerja mencakup akselerasi pada dua unsur yaitu unsur pencari kerja dan unsur pekerja. Kedua unsur ini perlu dilayani dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data pada tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja sudah mencapai 100% setiap tahunnya yang menunjukkan tercapainya target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Meskipun demikian jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 8.5.2* dan 8.5.2 (a),



cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja belum mampu menurunkan angka pengangguran terbuka maupun setengah terbuka di Kabupaten Purworejo.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, upaya pelatihan keterampilan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya melalui Dinperinaker maupun bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Pada data tabel di atas menunjukkan masih rendahnya capaian indikator ini terutama terjadinya penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 akibat adanya efisiensi anggaran yang bersumber dari APBN karena mewabahnya pandemi Covid-19. Target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD 2016-2021 adalah sebesar 14,83% sehingga diperlukan upaya keras dalam rangka memenuhi capaian target yang sudah ditentukan.

Tenaga kerja yang ditangani setiap tahunnya termasuk ke dalam salah satu upaya peningkatan kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja (Angkatan Kerja Lokal/AKL, Angkatan Kerja Antar Daerah/AKAD, dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) ataupun melalui perluasan kerja. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada dihentikannya AKAN, terjadi penurunan persentase yang sangat besar pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 3,65% sedangkan target akhir pada RPJMD 2016-2021 adalah sebesar 26,30% sehingga diperlukan upaya keras dalam pencapaian target ini.

Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja mencakup dua indikator yaitu capaian sarana hubungan industrial (HI) dan syarat kerja serta indikator perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dalam capaian sarana, meningkatnya jumlah sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan seperti Peraturan Perusahaan (PP), Tripartit-Bipartit, Pembinaan Hubungan industrial yaitu Serikat Pekerja, Apindo dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial (Bina HI), Sistem Pengupahan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dihitung dari jumlah perusahaan yang terdaftar tahun 2015 (539 perusahaan). Berdasarkan data capaian tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang baik dan



masih *on the track* dengan target akhir RPJMD 2016-2021 yaitu sebesar 50%.

Perlindungan pekerja adalah perangkat atau aturan yang menjamin bahwa setiap pekerja dilindungi keselamatan, kesejahteraan, keselamatan bagi diri dan keluarganya serta dapat tercover dalam program jaminan sosial. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berdasarkan data capaian pada tahun 2016-2020 pada tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dan berdasarkan tren yang ada dirasa masih akan mampu mencapai target sebesar 75% pada tahun 2021. Capaian ini jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 10.4.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016-2020.

8) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 9 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 dan indikator TPB yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.77. Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Indikator Pemenuhan Hak Anak)	70,49%	70,79%	75,50%	78,00%	81,00%
2.	Persentase PD Kabupaten yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	73,17%	90,24%	85,37%	38,10%	60,00%
3.	Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten	34,40%	34,00%	41,65%	36,00%	23,54%
4.	Persentase Desa yang Menerapkan	10,66%	21,54%	40,00%	60,00%	19,02%



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan Responsif Gender dalam Perencanaan Anggaran Desa					
5.	Cakupan Ketersediaan Tenaga Pelayanan Pengaduan Terlatih, Bantuan Hukum Untuk Mendampingi Korban dan Saksi dan Layanan Pemulangan Korban Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Penanganan Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak	70,00%	70,49%	80,00%	81,00%	81,50%
8.	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak	76,91%	72,00%	82,14%	92,30%	93,00%
9.	Jumlah Kelompok Perempuan yang Dilatih	7	11	20	30	90
11	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. (5.1.1*)	3	3	3	3	3
12	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (5.2.1*)	5,93	9,08	14,61	14,21	N/A
13	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. (5.2.2*)	0,0149	0,0068	0,0055	0,0025	N/A
14	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	100	100	100	100	N/A



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	komprehensif. (5.2.2.(a))					
15	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (5.3.1*)	1,68	1,84	1,48	1,05	N/A

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu indikator dalam memenuhi peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak yang sudah diberikan dihitung dengan dibandingkan pada standar nilai pemenuhan hak anak dalam Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan data pada tabel di atas, pergerakan positif telah ditunjukkan pada tahun 2016-2020.

Sedangkan persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender menunjukkan peningkatan pada tahun 2017 tetapi kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2019, dan naik kembali di tahun 2020. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Purworejo didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Indikator persentase anggaran responsif gender di Perangkat Daerah dihitung dengan membandingkan jumlah anggaran yang mendukung kegiatan responsif gender dengan total anggaran belanja langsung APBD. Pada tahun 2016-2020 terjadi tren yang fluktuatif namun terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 akibat adanya efisiensi karena pandemi Covid-19.

Persentase desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang telah mengikuti sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan total seluruh desa. Data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari



tahun 2016-2020 namun demikian, capaian pada tahun 2020 masih belum memenuhi target sebesar 80% pada tahun 2020 dan sebesar 100% pada tahun 2021. Dengan demikian masih diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih, bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak menunjukkan tercapainya target sebesar 100% pada setiap tahunnya mulai tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengaduan maupun korban yang memerlukan bantuan hukum sudah ditangani dengan baik. Seperti halnya dengan indikator persentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak juga menunjukkan capaian sebesar 100% setiap tahunnya pada tahun 2016-2020. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat terselesaikan dengan baik. capaian tersebut juga ditunjukkan pada capaian indikator TPB nomor 5.2.2.(a), dimana Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan capaian indikator TPB nomor 5.2.1*, terjadi peningkatan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Kondisi tersebut perlu diantisipasi lebih baik, dimana tidak hanya menyelesaikan kasus yang terjadi namun mencegah terjadinya kasus kekerasan baik pada anak maupun pada perempuan. Sedangkan capaian indikator TPB 5.2.2* proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak dinilai dengan menghitung terpenuhinya hak anak sesuai dengan cluster dalam 31 indikator Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan tabel di atas, capaiannya membaik dan diharapkan target tahun 2021



sebesar 82% akan dapat terpenuhi. Sementara itu, pada indikator persentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak menunjukkan peningkatan capaian dari tahun 2016-2020 dan sudah memenuhi capaian target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah kasus anak bermasalah dapat terselesaikan dengan baik. Indikator jumlah kelompok perempuan yang dilatih merupakan suatu upaya pemberian pelatihan kepada kelompok-kelompok perempuan sesuai dengan potensi yang dikelola. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2016-2020, pada tahun 2020 kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada 90 orang.

9) Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 2 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 dan indikator TPB yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.78. Kinerja Daerah Urusan Pangan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rasio Ketersediaan Energi (2200 kal/cap/hari) (%)	152,95	154,77	135,99	154,78	132,11
2.	Rasio Ketersediaan Protein (57 gr/cap/ hari) (%)	163,28	256,67	150,70	256,67	109,06
3.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment. (2.1.1*))	17,25	17,69	15,74	17,59	16,72
4.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. (2.1.2. (a))	32,20	38,10	28,10	23,70	56,30
5.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. (2.2.2.(c))	85,50	85,60	85,60	85,80	85,90

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Rasio ketersediaan energi adalah ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein. Data tabel di atas menunjukkan adanya kestabilan rasio ketersediaan energi dari tahun 2016-2020 dan sudah melebihi target akhir sebesar 100%. Namun demikian terjadi penurunan pada tahun 2018 dan 2020 karena adanya penurunan produksi tanaman pangan khususnya



jagung, dan tanaman palawija serta turunnya impor/ produk pangan yang masuk.

Rasio ketersediaan protein adalah tingkat ketersediaan protein dalam kandungan pangan per kapita per hari. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan protein pada tahun 2016-2020 telah melebihi target sebesar 100%. Penurunan capaian terjadi di tahun 2018 dan 2020 karena turunnya impor/ produk yang masuk ke Purworejo dan tingginya produk yang dijual ke luar daerah.

Sedang capaian indikator TPB pada bidang urusan pangan yaitu indikator nomor 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan tahun 2018. Sedangkan capaian indikator 2.1.2 (a) dimana proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari terjadi peningkatan dari tahun 2016-2020 sedangkan nasional menargetkan turun menjadi 8,5%.

Selain itu, skor pola pangan harapan yang termuat dalam indikator TPB nomor 2.2.2 (c) yang juga menjadi indikator sasaran daerah pada RPJMD Tahun 2016-2021 terjadi peningkatan kinerja yang cukup baik dari tahun 2016 hingga tahun 2020 meskipun capaian tersebut belum mampu mencapai target nasional yakni skor PPH meningkat menjadi 95,2.

Selain indikator-indikator tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dari tahun 2018 mengukur indeks ketahanan pangan tiap tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Berikut Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo dari tahun 2018-2020:

Tabel 2.79. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Tahun	Indeks Ketersediaan	Indeks Keterjangkauan	Indeks Pemanfaatan	Indeks Ketahanan Pangan	Peringkat
2018	N/A	N/A	N/A	78,63	79
2019	92,94	80,43	76,46	82,60	53
2020	92,57	82,69	75,67	82,85	76

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018-2020, BKP Kementerian Pertanian, 2018-2020



Berdasarkan data indeks ketahanan pangan tersebut, Kabupaten Purworejo dari tahun 2018 hingga tahun 2020 berada pada prioritas 6 yakni merupakan kabupaten dengan kelompok ketahanan paling baik di Indonesia. Sedangkan jika dirinci per kecamatan, diketahui bahwa Kecamatan Kaligesing merupakan kecamatan paling rentan rawan pangan di Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo terdapat 45 desa rawan/ rentan pangan dan telah dilakukan penanganan pada 29 desa rawan/rentan pangan. Berikut penanganan desa rawan/ rentan pangan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2020:

Tabel 2.80. Penanganan Desa Rawan/ Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desa Rawan/ Rentan Pangan	45	45	45	45	45
2.	Desa Rawan/ Rentan Pangan yang Tertangani	5	5	14	18	29
3.	Persentase Desa Rawan/Rentan Pangan yang Tertangani	11,11	11,11	31,11	40,00	64,44

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Desa rawan/rentan pangan di atas dihitung berdasarkan hasil analisis pada tahun 2014. Penanganan desa rawan/rentan pangan tersebut dilakukan dengan menyalurkan cadangan pangan pada desa rawan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Selain itu juga dilakukan

Pada tahun 2020, telah dilakukan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* yang mengacu pada panduan dari Badan Ketahanan Pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 147 desa atau 29,76% termasuk dalam kategori rentan pangan (prioritas 1-3) di Kabupaten Purworejo, sedang sisanya merupakan kategori tahan (prioritas 4-6). Berikut hasil analisis FSVA di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020.

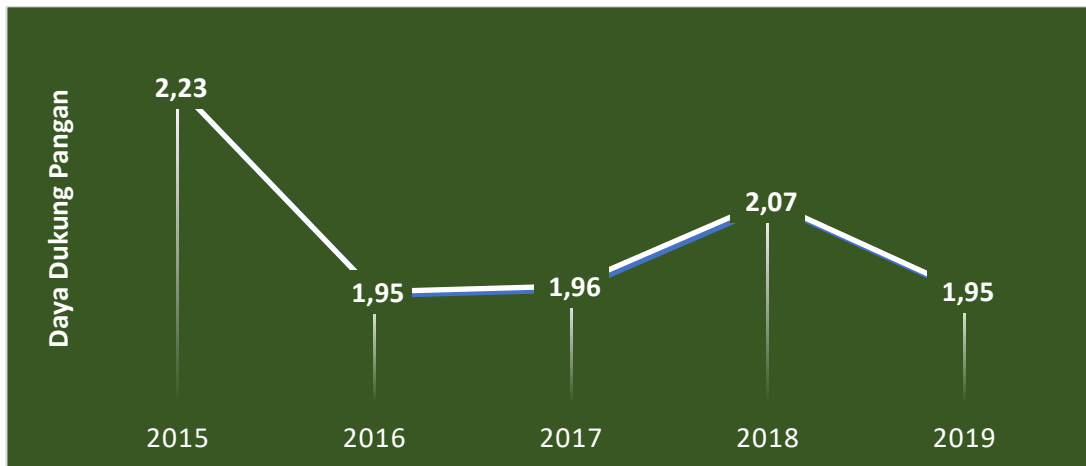
Tabel 2.81. Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Prioritas	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Prioritas 1 (Sangat Rentan)	8	1,62
2	Prioritas 2 (Rentan)	65	13,16
3	Prioritas 3 (Agak Rentan)	74	14,98
4	Prioritas 4 (Agak Tahan)	84	17,00
5	Prioritas 5 (Tahan)	131	26,52
6	Prioritas 6 (Sangat Tahan)	132	26,72

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021



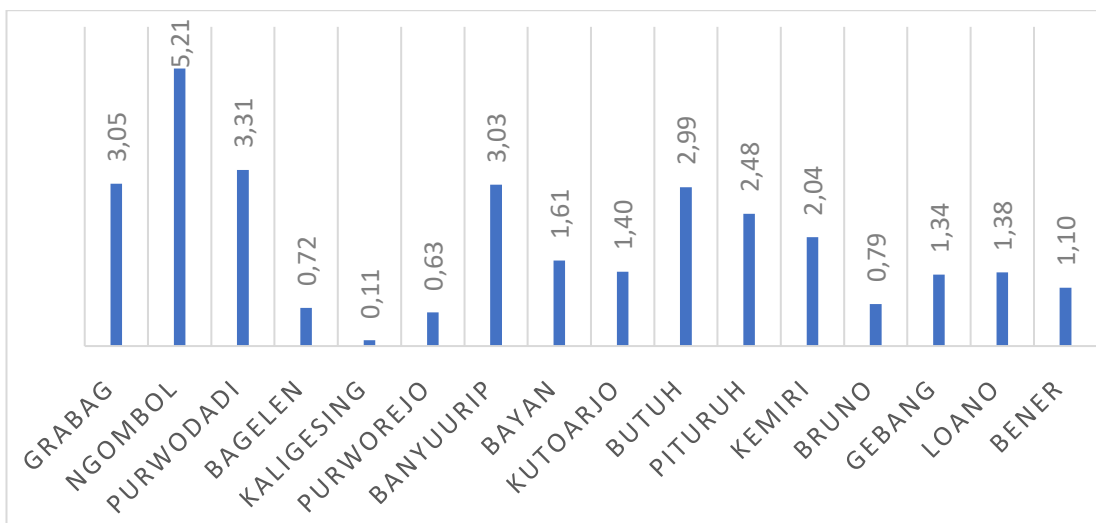
Disisi lain, berdasarkan hasil analisis dalam Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 daya dukung pangan di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa pada tahun 2019 berada pada angka 1,95 dimana termasuk daerah yang surplus pangan. Namun perlu dijadikan perhatian, bahwa secara umum terjadi tren penurunan daya dukung pangan di Kabupaten Purworejo selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.22. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Jika dilihat secara rinci pada tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo, daya dukung pangan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.23. Daya Dukung Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2019

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Kecamatan dengan daya dukung pangan surplus adalah Kecamatan Ngombol, Kecamatan Grabag, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, dan Kecamatan Bener. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan ini merupakan penghasil bahan makanan



dari sektor pertanian di Kabupaten Purworejo. Sedangkan kecamatan yang mengalami defisit pangan adalah Kecamatan Bagelen, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Bruno. Dengan adanya distribusi bahan pangan, maka defisit tersebut dapat dicukupi dari hasil produksi dari kecamatan lain yang mengalami surplus.

10) **Pertanahan**

Persentase penanganan masalah pertanahan di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 100%. Hal ini juga sejalan dengan persentase tanah negara yang teridentifikasi dan tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan.

Tabel 2.82. Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penanganan Masalah Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Tanah Negara yang Teridentifikasi	100%	100%	100%		
3	Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanahan	100%	100%	100%	100%	

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2021

11) **Lingkungan Hidup**

Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibangun dari komponen kualitas air, udara, tanah, dan penanganan sampah. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.83. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	59,66	62,69	58,00	68,10	68,98
2	Indeks Kualitas Air	83,00	65,00	50,00	66,92	72,72
3	Indeks Kualitas Udara	72,00	83,97	96,60	97,91	96,35
4	Indeks Tutupan Hutan/ Lahan	21,00%	31,00	40,00	46,62	45,66

Sumber: DLH Kabupaten Purworejo, 2021



Kondisi IKLHD di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Penurunan sempat terjadi di tahun 2018 dengan indeks kualitas air paling rendah dari lima tahun terakhir, sebesar 50%.

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki 10 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 dan indikator TPB yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.84. Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dari Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Terpenuhinya Baku Mutu Kualitas Air Sungai	83,00%	65,00%	50,00%	66,92%	72,72%
2	Persentase Terpenuhinya Kualitas Udara Ambien	72,00%	83,97%	96,60%	97,91%	96,35%
3	Persentase Tingkat Tutupan Lahan Berupa Hutan/ Vegetasi Terhadap Luas Wilayah	21,00%	31,00%	40,00%	46,62%	45,66%
4	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan 3R	18,00%	18,00%	21,65%	23,59%	35,89%
5	Persentase Sampah yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
6	Volume Sampah yang terangkut dan diolah di TPA (m3)	95.778	111.262	15.484	14.453	16.855
7	Volume Sampah Seluruhnya (m3)	95.778	111.262	15.484	14.453	16.855
8	Persentase Cakupan Layanan Persampahan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah penduduk yang terlayani penanganan sampah (jiwa)	137.572	157.572	157.572	50.265	234.791
10	Jumlah penduduk harus dilayani penanganan sampah di kawasan perkotaan (jiwa)	137.572	157.572	157.572	50.265	234.791



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
11	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. (6.3.2.(b))	Kelas II	Kelas II	Kelas II	Kelas II	Kelas II
12	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). (12.5.1.(a))	N/A	N/A	42.279,92 ton	90.978,74 ton	96.434,91 ton
13	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.(12.5.1.(a))	N/A	N/A	189,60 ton	349,42 ton	153,25 ton

Sumber: DLH Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan analisis daya dukung air permukaan di Kabupaten Purworejo yang termuat dalam Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, daya dukung air permukaan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.85. Daya Dukung Air Permukaan Di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2019

Tahun	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	DDA
1	2	3	4
2014	1.009.802.778,80	682.264.269	1,48
2015	872.316.194,80	682.525.569	1,28
2016	1.428.142.930,20	675.111.812	2,12
2017	1.201.835.834,40	676.616.838	1,78
2018	865.100.068,00	674.307.246	1,28
2019	608.877.271,20	671.612.946	0,91

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren daya dukung air permukaan di Kabupaten Purworejo cenderung menurun selama beberapa tahun ke belakang, dimana pada tahun 2019, Kabupaten Purworejo telah mengalami defisit air permukaan. Pada tahun 2019, BPBD Kab. Purworejo mencatat kekeringan melanda 68 desa di 11 kecamatan, berimbas pada 28.077 jiwa kesulitan air bersih dimana paling banyak terdapat pada Kecamatan Bagelen, Kecamatan Kaligesing, dan Kecamatan Pituruh. Permasalahan di atas diperparah dengan adanya pencemaran pada air permukaan yaitu sungai. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan nilai IKA yang cukup rendah jika dibandingkan IKU maupun IKTL di Kabupaten Purworejo.



Berdasarkan analisis kualitas air sungai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, beberapa parameter pemantauan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, yakni:

- a.** Sungai Bogowonto melebihi baku mutu pada parameter fecal coliform dan total coliform.
- b.** Sungai Wawar melebihi baku mutu pada parameter fosfat di titik sampling Bruno, Kemiri, dan Butuh akibat limbah domestik, limbah pertanian dan peternakan. Selain itu, juga melebihi baku mutu pada parameter fecal coliform dan total coliform.
- c.** Sungai Jali melebihi baku mutu pada parameter fecal coliform dan total coliform.

Sedangkan untuk kualitas udara, kuantitas pencemar udara yang ada di Kab. Purworejo, utamanya NO₂ dan SO₂ berada pada jumlah kecil, mengingat jumlah industri yang masih sedikit, jumlah moda transportasi yang jauh lebih sedikit dibanding kota-kota besar, serta peranan jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara yang terhitung tinggi di lebih dari separuh wilayah administrasi Kab. Purworejo. Melalui pengukuran udara ambien yang dilakukan setiap tahunnya pada lokasi yang sama, teranalisa jumlah gas NO₂ dan SO₂ jauh di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Layanan persampahan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016-2020 masih dilakukan pada kawasan perkotaan saja. Sedangkan pada kawasan pedesaan

Di sisi lain, pada bidang lingkungan hidup Kabupaten Purworejo berhasil mendapatkan penghargaan Piala Adipura pada tahun 2018. Prestasi daerah dalam mewujudkan kota yang bersih dan indah ini diterima pada 14 Januari 2019 oleh Bupati Purworejo. Hal ini merupakan prestasi setelah 25 tahun Kabupaten Purworejo tidak mendapat Adipura.

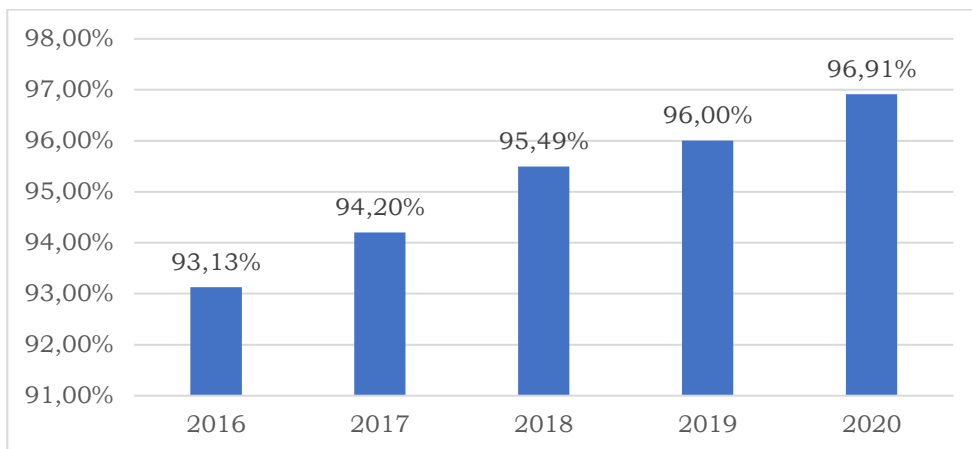


Gambar 2.24. Penerimaan Penghargaan Adipura Tahun 2018

Sumber: DLH Kabupaten Purworejo, 2019

12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil meliputi kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan KTP Elektronik, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), dan kepemilikan akta kelahiran. Kepemilikan Kartu Keluarga bagi penduduk Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2016-2020 terus meningkat dari 93,13 % pada tahun 2016 menjadi 96,91% pada tahun 2020.



Gambar 2.25. Kepemilikan Kartu Keluarga (%)

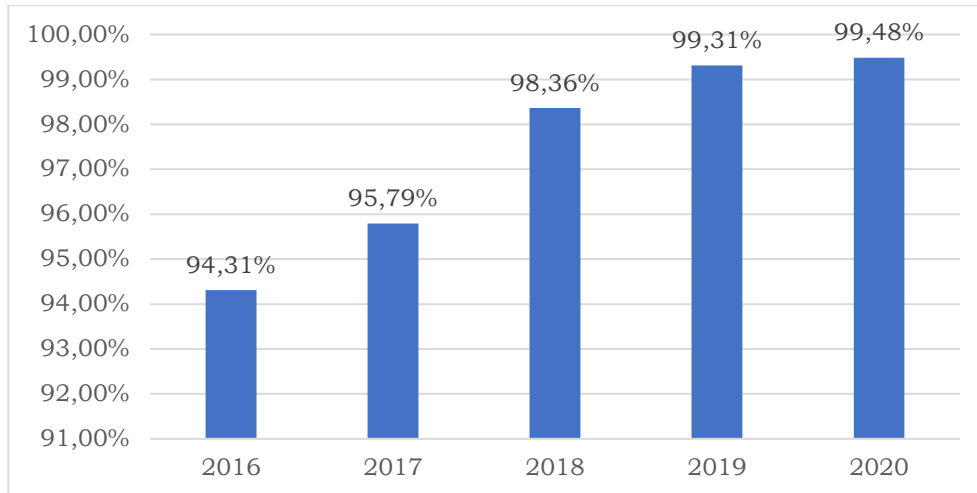
Sumber : Dindikcapil Kabupaten Purworejo, 2021

Dari gambar menunjukkan bahwa kepemilikan kartu keluarga terus meningkat. Hal ini didukung dengan Gerakan Indonesia sadar Adminduk, pendampingan bagi petugas desa/kelurahan dan kerjasama dengan KUA sehingga pasangan nikah bias langsung diubah statusnya dan membuat KK sendiri.

Kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 94,31% dan pada tahun 2020 sebesar 99,48%. Peningkatan kepemilikan KTP Elektronik didukung dengan adanya pendampingan SIAK RELASI dan Aplikasi SINDOLALAK serta adanya jemput bola bagi



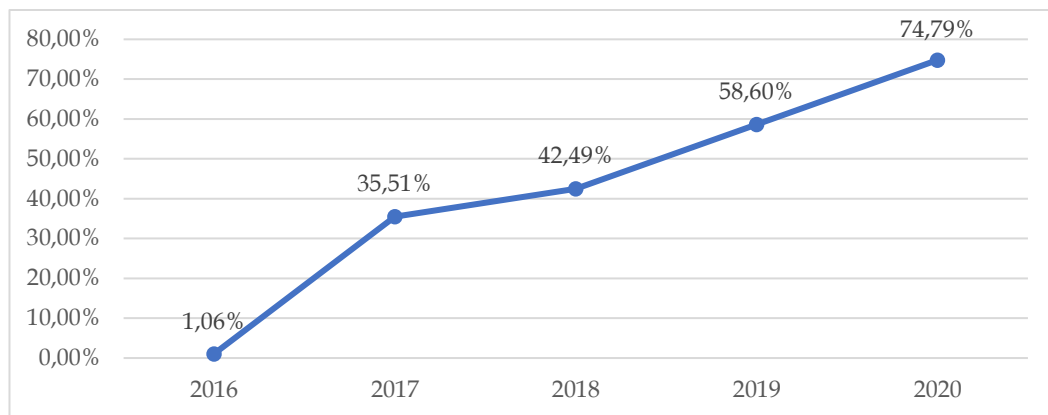
penduduk rentan, wajib KTP yang ada di pondok pesantren dan wajib KTP di desa/kel secara umum.



Gambar 2.26. Prosentase Kepemilikan KTP Elektronik

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Purworejo, 2021

Kepemilikan KIA juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 1,06% menjadi 74,79% pada 2020.



Gambar 2.27. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

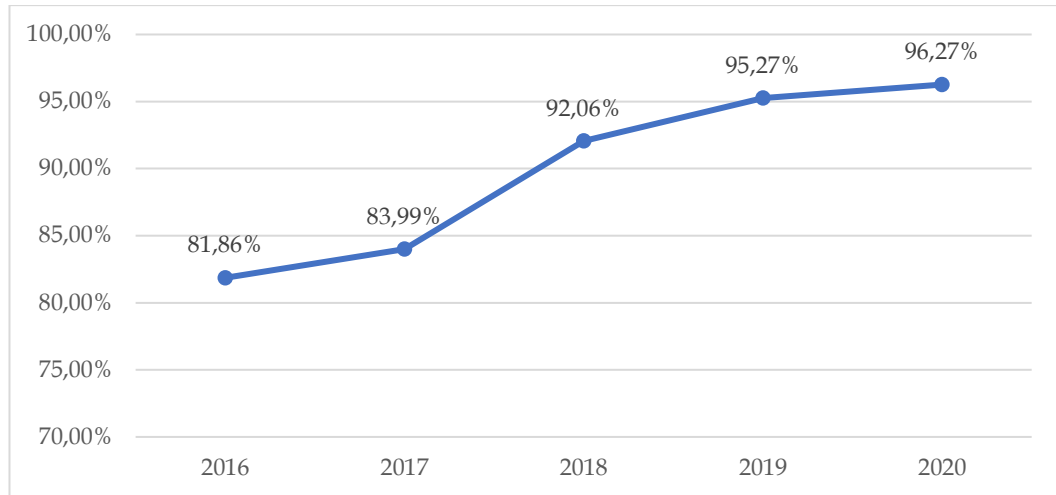
Sumber: Dindikcapil Kabupaten Purworejo, 2021

Peningkatan ini didukung dengan adanya kerjasama dengan Dindikpora Kabupaten Purworejo melalui pengajuan KIA secara kolektif melalui PAUD, SD/MI, SMP/MTS, adanya pelayanan terpadu pencatatan sipil (3 in 1), pengurusan akta kelahiran, penerbitan KIA dan KK sekaligus, serta bekerjasama dengan Tim Pengerak PKK untuk ikut mensosialisasikan pada saat pertemuan rutin.

Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 – 18 tahun dari tahun 2016 sebesar 81,86% meningkat menjadi 96,27% di tahun 2020. Peningkatan kepemilikan Akta kelahiran didukung dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan (rumah sakit



dan puskesmas), adanya aplikasi online menyebabkan setiap kelahiran dapat langsung tercatat.



Gambar 2.28. Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Penduduk Usia 0-18 Tahun

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Purworejo, 2021

Selain itu, terdapat beberapa kinerja pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut TPB sebagai berikut:

Tabel 2.86. Kinerja TPB Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (16.9.1*)	96,80%	96,80%	96,80%	96,80%	97,10%
2	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. (16.9.1. (a))	N/A	N/A	99,72%	97,97%	N/A
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. (16.9.1 (b))	90,85%	89,79%	93,26%	95,62%	96,30%
4	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) (17.19.2 (b))	16.243	19.236	20.798	32.373	N/A

Sumber : Dindikcapil, 2021

13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat



desa. Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Status desa sesuai dengan indikator kinerja pembangunan daerah dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan Desa cepat berkembang pada tahun 2016 sebesar 66,10% menjadi 99,15% pada tahun 2020.

Tabel 2.87. Status Desa Cepat berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Status Desa berdasar Skala Kab. Purworejo					
	Desa Cepat berkembang	66,10%	66,10%	66,74%	96,80%	99,15%
	Desa Berkembang	22,39%	22,39%	21,75%	2,77%	0,43%
	Desa Kurang berkembang	11,51%	11,51%	11,51%	0,43%	0,43%

Sumber: Dinpermasdes Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan implementasi undang-undang desa, Indeks Desa Membangun (IDM) untuk Kabupaten Purworejo dengan status desa maju semakin meningkat dari tahun 2016 sebanyak 28 desa pada tahun 2020 sebanyak 116 desa.

Tabel 2.88. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Status Desa Berdasar Indeks Desa Membangun					
	Desa Maju	5,97%	5,97%	5,97%	17,06%	24,73%
	Desa Berkembang	46,70%	46,70%	46,70%	77,19%	73,77%
	Desa Tertinggal	45,84%	45,84%	45,84%	5,76%	1,49%
	Desa Sangat Tertinggal	1,49%	1,49%	1,49%	0,00%	0,00%

Sumber: Dinpermasdes Kabupaten Purworejo, 2021

Untuk status desa di Kabupaten Purworejo belum ada yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun, sedangkan dengan skala Kabupaten hampir semua desa merupakan Desa Cepat Berkembang.



Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Purworejo adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Perkembangan lembaga ekonomi desa di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2016-2020 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.89. Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	469	469	469	469	469
2	Jumlah PKK Desa/Kelurahan Aktif	494	494	494	494	494
3	Jumlah Posyandu Aktif	1.647	1.647	1.647	1.645	1.645
4	Jumlah Bumdes	0	157	237	298	374
5	Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Aktif	16	16	16	16	16
6	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	0	9	16	16	16
7	Jumlah Unit Bumdes Bersama	0	0	1	3	3

Sumber: Dinpermasdes Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan data di atas bahwa semua lembaga dan PKK di desa dan kelurahan telah aktif berperan dalam pembangunan. Desa di Kabupaten Purworejo telah memiliki RPJM-Des dan tertib dalam penyelenggaraan keuangan desa. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di setiap kecamatan telah terbentuk dan berperan aktif dalam musyawarah pembangunan.

14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 15 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 dan indikator TPB yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.90. Capaian Angka Pertumbuhan Penduduk

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,36%	0,32%	0,36%	0,26%	0,22%
2.	Angka kelahiran pada perempuan	6	13	11	13	6



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). (5.3.1 (b)) dan (3.7.2*)					
3.	Total Fertility Rate (TFR). (3.7.2.(a))	5,41	5,17	5,32	5,37	N/A

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021

Angka pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Purworejo per tahun pada periode waktu tertentu dengan maksud untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk ini. Target akhir angka pertumbuhan penduduk pada RPJMD 2016-2021 adalah sebesar 0,35% di mana berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa target tersebut sudah terpenuhi pada tahun 2020 (0,22%). Sedangkan jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 3.7.2* ASFR tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Angka ASFR menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2017 dan 2019 dan menurun menjadi seperti realisasi pada tahun 2016, yakni 6. Sedangkan indikator TPB nomor 3.7.2 (a) TFR menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2019 meskipun tidak terlalu signifikan. Realisasi tersebut masih diatas target nasional yaitu 2,28.

Tabel 2.91. Capaian Pelayanan Kesejahteraan Keluarga

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan Keluarga yang Mendapat Layanan UPPKS	2,67%	2,70%	3,76%	2,70%	1,86%
2.	Cakupan Keluarga yang Mendapat Layanan Tri Bina	60,45%	75,57%	63,76%	62,44%	61,74%

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021

Cakupan penanganan keluarga yang mendapat pelayanan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada tahun 2016-2020 berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi, terakhir di tahun 2020 capaiannya sebesar 1,86%. Penurunan di tahun 2020 terjadi karena keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS terkena Covid-19 sehingga pembinaan ke kelompok UPPKS tidak bisa terlaksana. Sedangkan



cakupan keluarga yang mendapat layanan Tri Bina menunjukkan pergerakan angka yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Namun demikian, target akhir pada tahun 2021 adalah sebesar 61,74% sehingga capaian pada tahun 2020 dinilai masih *on the track* dan dirasa akan mampu terpenuhi pada tahun 2021.

Tabel 2.92. Capaian Program Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rata-rata jumlah Anak per Keluarga	1,3	1,3	1,3	1,3	0,8
2.	Jumlah Kelompok KB Pria	48	49	51	48	48
3.	Rasio Akseptor KB	9,62%	9,70%	10,20%	6,83%	11,31%
4.	Cakupan peserta KB aktif	82,52%	82,87%	82,89%	75,97%	70,90%
5.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	7,80%	7,67%	7,49%	12,61%	12,36%
6.	Persentase Remaja yang Diberikan Penyuluhan KRR	4,69%	6,30%	8,92%	11,57%	10,50%
7.	Persentase Jumlah Peserta KB Mandiri	47,64%	41,90%	42,50%	37,35%	38,76%
8.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (3.7.1.(a))	82,07%	82,32%	79,00%	76,20%	N/A
9.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. (3.7.1.(b))	32,85%	33,66%	33,15%	32,55%	N/A
10.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). (5.6.1.(a))	7,80%	7,67%	7,49%	12,61%	12,36%
11.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. (5.6.1.(b))	82,07%	82,32%	79,00%	76,20%	N/A

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021



Target akhir RPJMD 2016-2021 pada indikator rata-rata jumlah anak per keluarga adalah sebesar 1,3 di mana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian akhir pada tahun 2020 adalah sebesar 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini sudah tercapai. Capaian jumlah kelompok KB pria yang menggunakan alat kontrasepsi MOP atau vasektomi dan kondom bergerak secara fluktuatif dalam jangka waktu 2016-2020 dan menunjukkan angka 48 pada tahun 2020 dengan target akhir sebesar 53 pada tahun 2021. Capaian ini dinilai masih *on the track* dan diharapkan akan mampu terpenuhi pada tahun 2021.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 tahun per 100 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Berdasarkan tabel di atas, rasio akseptor KB secara umum mengalami peningkatan serta sudah mencapai target akhir RPJMD 2016-2021. Cakupan peserta KB aktif dihitung dengan membandingkan peserta aktif (PA) dengan pasangan usia subur (PUS) dalam kurun waktu tertentu. Data pada tahun 2016-2020 seperti tercantum dalam tabel di atas menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun namun masih *on the track* untuk dapat mencapai target akhir pada tahun 2021. Sedangkan jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin telah mencapai target nasional yakni meningkat menjadi 65%. Capaian pada indikator TPB 3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern juga mencapai target nasional meskipun tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2019.

Unmet Need atau tidak terpenuhinya kebutuhan ber-KB pada pasangan usia subur besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan/direncanakan sehingga berpengaruh pada ledakan pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, persentase indikator ini perlu diturunkan hingga mencapai angka 7% pada tahun 2021. Namun berdasarkan data pada tabel di atas, justru menunjukkan peningkatan hingga angka 12,36%. Sedangkan jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 5.6.1 (a) *Unmet Need* KB



capaian di Kabupaten Purworejo berada diatas target nasional dimana nasional menarget menurun menjadi 7,4%.

Remaja perlu diberikan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi yang akan bermanfaat untuk kualitas kesehatan individu hingga ke depannya. Berdasarkan tabel di atas, persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2020 dirasa masih *on the track* dan masih mampu memenuhi target akhir RPJMD 2016-2021 pada tahun 2021. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan ini terkait dengan capaian indikator TPB nomor 5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern, namun capaian indikator ini masih dibawah target nasional yaitu meningkat menjadi 85%. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan perlu juga dilakukan pada usia remaja maupun pasangan usia subur.

Pasangan usia subur yang memperoleh pelayanan KB dengan biaya pelayanan secara mandiri disebut sebagai Peserta KB Mandiri. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB mandiri pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan meskipun pergerakannya tidak terlalu signifikan. Data pada tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 38,76% dengan target pada akhir RPJMD 2016-2021 sebesar 44,05%. Dengan demikian capaian ini masih *on the track* dan diharapkan mampu tercapai pada tahun 2021.

Tabel 2.93. Capaian Program Keluarga Sejahtera

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	81,84%	85,82%	83,46%	83,86%	83,84%
2.	Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) paripurna	6,49%	17,87%	14,39%	27,79%	19,50%
3.	Cakupan Kelompok Bina Keluarga	12,65%	21,02%	25,24%	31,86%	37,94%



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Remaja (BKR) Paripurna					
4.	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	6,92%	15,89%	15,40%	17,30%	20,73%

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021

Indikator persentase anggota UPPKS yang ber-KB dihitung dengan membandingkan jumlah PUS anggota UPPKS yang ber-KB dengan jumlah total PUS. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada capaian ini. Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna dihitung dengan membandingkan jumlah BKB Paripurna dengan BKB yang ada. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka bergerak secara fluktuatif dan mengalami peningkatan cukup pesat pada tahun 2019 namun mengalami penurunan cukup besar pada tahun 2020.

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna dihitung dengan membandingkan jumlah BKR Paripurna dengan BKR yang ada. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian BKR Paripurna menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Seperti halnya dengan BKR Paripurna, cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna yang dihitung dengan membandingkan jumlah BKL Paripurna dengan BKL yang ada menunjukkan peningkatan capaian secara positif dari tahun 2016 hingga 2020.

Pada keempat indikator capaian program keluarga sejahtera seperti tercantum dalam tabel di atas menunjukkan hasil *on the track* jika disandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 karena masih belum mencapai target namun diharapkan pada tahun 2021 target tersebut dapat tercapai karena *gap* yang tidak terlalu besar.



Tabel 2.94. Capaian Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur Miskin yang Terlayani KB (akseptor)	560	557	1.114	1.671	0
2.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah) (1.4.1. (c))	82,07	82,32	79,00	76,20	N/A

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Purworejo, 2021

Jumlah pasangan usia subur (PUS) miskin yang terlayani KB dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, namun pada tahun 2020 tidak ada layanan KB terhadap pasangan usia subur miskin. Hal ini akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran dilakukan refocusing. Realisasi ini tentunya terkait dengan capaian pada indikator TPB nomor 1.4.1 (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah), namun terjadi penurunan capaian dari tahun 2016 ke tahun 2019.

15) Perhubungan

Pengembangan sektor transportasi diharapkan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kabupaten Purworejo, yang mengedepankan sektor wisata dan pertanian. Ini artinya bahwa sektor transportasi harus menjadi bagian dari sektor pertanian dan pariwisata. Keberhasilan pembangunan sektor transportasi dalam RPJMD 2016-2021 bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, dan infrastruktur lainnya (*output*) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaannya (*outcome*), serta



mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo (*impact*).

Keberadaan *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menjadi pemicu tumbuhnya kawasan *aerotropolis* di Jawa Tengah bagian selatan. Rencana jaringan transportasi yang akan dikembangkan di kawasan sekitar YIA (*Border City*) antara lain jaringan jalan, jalur pejalan kaki, dan jaringan jalur kereta api. Rencana jaringan jalan meliputi peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi yang menghubungkan dengan batas Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY; Peningkatan jalan strategis nasional (Jalan Daendels) yang menghubungkan dengan batas Kabupaten Kebumen-Purworejo-Kulonprogo; serta Peningkatan dan pengembangan system jalan lingkungan di seluruh kawasan. Rencana jalur pejalan kaki di Kawasan *Border City* berada pada kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan pejalan kaki seperti pusat perbelanjaan/hiburan, pusat perkantoran, sarana pelayanan umum, perumahan, dan pariwisata. Jalur kereta api yang melewati Kawasan *Border City* yaitu jaringan jalur kereta api antar Kota Surakarta-Kutoarjo dengan salah satu pemberhentian di Stasiun Wojo, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen. Rencana jaringan rel kereta api di Kawasan *Border City* yaitu peningkatan kualitas jaringan jalur kereta api dengan mengembangkan simpul-simpul transportasi melalui pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD). Penerapannya dengan merencanakan halte pada area strategis dengan simpul-simpul permukiman, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan kantong parkir sebagai sarana untuk mencapai halte pemberhentian transportasi umum. Kantong parkir disediakan utamanya untuk sepeda demi mendorong penggunaan kendaraan non bermotor dan tercipta kawasan yang *walkable* dan *transit supportive*.

Transit Oriented Development (TOD) didukung dengan berbagai potensi ekonomi pada masing-masing kawasan strategis. Beberapa titik kawasan yang akan dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan Kutoarjo yang didukung keberadaan Stasiun Besar Kutoarjo. Bus Rapid Transit (BRT) sebagai angkutan



Aglomerasi Purwomanggung koridor Stasiun Kutoarjo-Borobudur mulai beroperasi mulai tahun 2020. Sedangkan *Bus Rapid Transit* (BRT) untuk koridor Kutoarjo-Dieng direncanakan beroperasi pada tahun 2021. Keberadaan Stasiun Wojo sebagai pemadu antarmoda transportasi kereta api, bus, dan pesawat udara di kawasan perkotaan *Border City* di wilayah Kecamatan Bagelen dan Purwodadi terkait keberadaan *Yogyakarta International Airport* (YIA) serta. Untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka masing-masing perkotaan transit akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan amenities perkotaan untuk memenuhi kebutuhan transit. Selain itu pembangunan rel ganda Kutoarjo-Kroya diharapkan meningkatkan akses ke Stasiun Besar Kutoarjo.

Berikut pembahasan per sub urusan yang ada pada Urusan Perhubungan.

a. Terminal

Untuk menunjang keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang angkutan darat sangat dibutuhkan infrastruktur berupa terminal. Kabupaten Purworejo mempunyai 3 tipe terminal, yaitu Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C. Terminal Bis Purworejo yang merupakan terminal Tipe A terletak di Desa Candisari Kecamatan Banyuurip. Terminal ini melayani angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Pemerintah Pusat mempunyai rencana untuk mengganti terminal tipe A yang sudah ada dengan yang baru. Penyusunan dokumen DED dilakukan pada tahun 2021, sedangkan pekerjaan konstruksi direncanakan dilaksanakan pada tahun 2022.

Sedangkan untuk Terminal Tipe B, terdapat 2 (dua) tipe Terminal Tipe B di Kabupaten Purworejo yaitu Terminal Nampurejo dan Terminal Suronegaran. Terminal Nampurejo masih berfungsi sedangkan Terminal Suronegaran beralih fungsi menjadi tempat bongkar muat pedagang Pasar Suronegaran. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membangun Terminal Tipe B di Kutoarjo. Penyusunan dokumen perencanaan sudah dilaksanakan pada tahun 2020, sedangkan pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan pada tahun 2021.



Sedangkan terminal Tipe C yang ada di Kabupaten Purworejo berjumlah 3, yaitu Terminal Kongsu, Terminal Kutoarjo dan Terminal Non Bis Kutoarjo. Ketiga terminal tersebut masih berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa penyelenggara terminal wajib menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada penumpang angkutan dalam hal pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan. Ketiga terminal Tipe C di Kabupaten Purworejo sudah berusaha memenuhi pelayanan tersebut, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas keamanan jalan, kantor penjaga terminal, petugas operasional terminal, ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas dan petugas kebersihan, drainase, ketersediaan letak jalur pemberangkatan dan kedatangan, tempat naik/turun penumpang dan tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

b. Fasilitas Keselamatan Jalan

Di Kabupaten Purworejo, kasus kecelakaan lalu lintas meningkat setiap tahunnya. Misalnya berdasarkan data dari Satlantas Polres Purworejo, pada tahun 2018 terjadi 475 kasus kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2019 nilainya meningkat menjadi 576 kasus. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas selain disebabkan oleh kesalahan pengemudi dan kondisi kendaraan juga biasanya disebabkan karena kondisi medan jalan, atau kurangnya rambu jalan, alat pengaman jalan, dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Penyediaan rambu jalan dan RPPJ merupakan salah satu indikator ketercapaian urusan perhubungan. Rambu jalan dipasang pada daerah rawan kecelakaan, geometris jalan lurus menikung dan halus, serta volume kendaraan ramai akan tetapi belum ada rambu jalan. Sedangkan RPPJ ditempatkan pada jalan pada kawasan strategis yang belum terdapat rambu penunjuk jalan. Pada tahun 2020, capaian ketersediaan rambu jalan sebesar 84 %, atau sejumlah 2.656 buah dari target 3.154. Jumlah tersebut



terdiri dari 2455 buah rambu jalan dan 201 buah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ). Secara umum dalam rentang lima tahun terakhir, cakupan ketersediaan rambu jalan di Kabupaten Purworejo semakin membaik, akan tetapi masih terdapat gap sejumlah 498 rambu jalan.

Tabel 2.95. Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan	54%	61%	77%	78%	84%
2	Jumlah rambu jalan yang ada	1.692	1.935	2.414	2.462	2.656
3	Jumlah rambu jalan yang seharusnya ada	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Untuk menunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan, ketersediaan Alat Pengaman Jalan (APJ) mutlak diperlukan. Alat pengaman jalan meliputi rambu jalan, marka jalan, APILL dan LPJU. Alat pengaman jalan meliputi pagar pengaman jalan (guard rail), cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), serta pita pengaduh. Cakupan ketersediaan alat pengaman jalan di Kabupaten Purworejo pada tahun terakhir (2020 mencapai 74%. Terdapat gap antara target dan realisasinya di tiap tahun karena keterbatasan anggaran. Diharapkan cakupan ketersediaan alat pengaman jalan ini tercapai targetnya di akhir tahun RPJMD.

Tabel 2.96. Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan	37%	37%	63%	63%	74%
2	Jumlah pagar pengaman jalan (guard rail)	681	681	762	1.072	1.172
3	Jumlah pagar pengaman jalan (guard rail) yang seharusnya ada	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
4	Jumlah cermin tikungan	26	26	38	55	59
5	Jumlah cermin tikungan yang seharusnya ada	120	120	120	120	120
6	Jumlah tanda patok tikungan (delineator)	150	150	387	120	256



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Jumlah tanda patok tikungan (delineator) yang seharusnya ada	400	400	400	400	400
8	Jumlah pita penggaduh	16	26	28	41	41
9	Jumlah pita penggaduh yang seharusnya ada	48	48	48	48	48

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Marka jalan yang ditargetkan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sebanyak 86.373 meter. Meskipun demikian di tahun terakhir (2020, jumlah marka jalan yang ada pada angka 73.418 meter. Meskipun selalu membaik tiap tahunnya, cakupan ketersediaan marka jalan sebesar 85% ini akan terus diupayakan.

Tabel 2.97. Cakupan Ketersediaan Marka Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Ketersediaan Marka Jalan	30%	38%	49%	67%	85%
2	Jumlah marka jalan yang ada (m)	25.746	33.246	40.448	57.623	73.418
3	Jumlah marka jalan yang seharusnya ada (m)	86.373	86.373	86.373	86.373	86.373

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat 99unit APILL di Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 26unit Traffic Light (TL) (11 titik ACTS), 70unit Warning Light (WL) dan 3unit Pelican Crossing. Sebagian besar APILL yang ada masih berfungsi karena adanya support pemeliharaan dari dana APBD. Saat ini di Kabupaten Purworejo memiliki 99 APILL. Dalam RPJMD, target jumlah APILL yang seharusnya ada sebanyak 155 buah. Perkembangan cakupan ketersediaan APILL di Kabupaten Purworejo dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.98. Cakupan Ketersediaan APILL di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Ketersediaan APILL	55%	56%	58%	57%	64%
2	Jumlah APILL yang ada	86	87	90	89	99
3	Jumlah APILL yang seharusnya ada	155	155	155	155	155



Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Ketersediaan halte yang layak fungsi pada setiap prasarana Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum merupakan salah satu indikator pada bidang urusan perhubungan. Di tahun 2019, ketercapaiannya telah mencapai 100%. Untuk menunjang Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mengajukan usulan penyediaan halte di sekolah-sekolah melalui dana APBN. Sehingga di tahun 2020 terdapat tambahan halte sebanyak 6 unit. Data sebaran letak halte di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99. Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo

No	Nama Jalan	Jumlah		Keterangan
1	2	3		4
1	Depan PDAM	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
2	Depan RS Permata	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
3	Depan Dinas Pertanian	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
4	Depan Kejaksaan Lama	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
5	Alun-alun KTA	1	Lokasi	APBD 2016
6	Depan SMP N 1 Purworejo	1	Lokasi	APBD 2017
7	Simpang 3 Boro	1	Lokasi	APBD 2017
8	SMPN 26 / DPU	1	Lokasi	APBD 2019
9	SMP 2	1	Lokasi	APBNP 2020
10	SMP 31	1	Lokasi	APBNP 2020
11	SMA 3	1	Lokasi	APBNP 2020
12	RSUD Cokronegoro/AKPER	1	Lokasi	APBNP 2020
13	SMA 2	1	Lokasi	APBNP 2020
14	Kec Bayan / SMP Bayan	1	Lokasi	APBNP 2020
	JUMLAH	14	Lokasi	

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Dengan adanya penambahan 6 halte di tahun 2020, ketercapaian indikator ini menjadi 175%.

Tabel 2.100. Persentase Tersedianya Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Tersedianya Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum	63%	88%	88%	100%	175%



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah halte yang ada	5	7	7	8	14
3	Jumlah halte yang seharusnya ada	8	8	8	8	8

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

c. Lalu Lintas

Dalam kurun waktu 2016-2020, persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum di Kabupaten Purworejo sebesar 100%. Terdapat 610 angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/ kota yang menerapkan standar keselamatan di tahun terakhir.

Tabel 2.101. Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	602	614	614	610	610
3	Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota yang seharusnya menerapkan standar keselamatan	602	614	614	610	610

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang di Kabupaten Purworejo mencapai 100% setiap tahunnya.

d. Uji Laik Kendaraan

Jumlah KBWU pada tahun 2020 sebanyak 4.500 buah. Kondisi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, di bulan April - pertengahan Juni pelayanan uji kendaraan tutup. Oleh karena itu terdapat penurunan jumlah KBWU yang memiliki KIR, sejumlah 4.177 di tahun 2019 menjadi 3.202 di tahun 2020.

**Tabel 2.102. Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	100%	115%	100%	93%	71%
2	Jumlah KBWU yang memiliki KIR	4.025	4.614	4.500	4.177	3.202
3	Jumlah KBWU	4.025	4.025	4.500	4.500	4.500

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Kabupaten Purworejo memiliki 1 unit pengujian kendaraan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, unit pengujian kendaraan wajib uji ini dinilai layak fungsi.

Tabel 2.103. Persentase Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Wajib Uji yang Layak Fungsi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Wajib Uji yang Layak Fungsi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah unit pengujian kendaraan yang ada	1	1	1	1	1
3	Jumlah unit pengujian kendaraan yang seharusnya ada	1	1	1	1	1

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Di tahun 2018, Dinas Perhubungan memperoleh hibah crane. Hal ini menyebabkan sejak tahun tersebut, kendaraan operasional perhubungan yang dikelola oleh dinas terkait sebanyak 7 buah, sehingga capaian kinerjanya mencapai 117%.

Tabel 2.104. Persentase Kendaraan Operasional Perhubungan yang Layak Fungsi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kendaraan Operasional Perhubungan yang Layak Fungsi	83%	100%	117%	117%	117%
2	Jumlah kendaraan operasional perhubungan	5	6	7	7	7
3	Jumlah kendaraan operasional perhubungan yang seharusnya ada	6	6	6	6	6

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021



e. Angkutan Umum

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Purworejo terutama transportasi darat dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas bagi pemakai jalan. Jumlah angkutan umum di Kabupaten Purworejo pada kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan dari 1.407 unit pada tahun 2019 menjadi 1.041 unit di tahun 2020. Pada kurun waktu tersebut jumlah penumpang angkutan darat juga mengalami penurunan. Penurunan jumlah penumpang angkutan darat disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan sendiri baik sepeda motor atau mobil dan kemudahan akses transportasi dengan menggunakan daring. Adanya penyesuaian kepemilikan yang semula milik perorangan menjadi badan hukum dan pembatasan usia kendaraan angkutan umum menjadi faktor penurunan jumlah angkutan umum di Kabupaten Purworejo. Data jumlah angkutan umum dan izin trayek di Kabupaten Purworejo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105. Jumlah Angkutan Umum dan Jumlah Izin Trayek di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah angkutan umum darat (unit)	1.407	1.330	1.144	1.068	1.041
2	Jumlah izin trayek	66	66	66	66	66

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum massal, pada tahun 2020 telah dioperasikan BRT koridor Kutoarjo-Borobudur. Jumlah penumpang cenderung mengalami peningkatan. Jumlah shelter yang ada sementara sejumlah 13 unit. Direncanakan pada tahun 2021 akan ada penambahan shelter baik permanen maupun portable untuk meningkatkan pelayanan calon penumpang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa angkutan umum yang beroperasi semakin sedikit. Di tahun 2019, jumlah jaringan jalan yang terlayani angkutan umum menurun dari 119 menjadi 98 buah. Perkembangan persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan



jalan kabupaten dalam kurun waktu lima tahun dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.106. Persentase Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	52%	52%	52%	69%	69%
2	Jumlah jaringan jalan yang telah terlayani angkutan umum	119	119	119	98	98
3	Jumlah jaringan jalan yang seharusnya dilayani angkutan umum	229	229	229	143	143

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Dinas Perhubungan menangani pengeluaran ijin trayek. Persentase rasio ijin trayek yang terdaftar selalu sebanding terhadap jumlah ijin trayek yang dikeluarkan. Pada tahun terakhir 2020, terdapat 610 jumlah ijin trayek yang dikeluarkan.

Tabel 2.107. Persentase Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rasio Ijin Trayek	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	602	614	614	610	610
3	Jumlah ijin trayek yang terdaftar	602	614	614	610	610

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

Berikut data jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perdesaaan, dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.108. Jaringan Trayek AKAP, AKDP, Angkutan Perdesaaan, dan Angkutan Perbatasan Kabupaten Purworejo

No	Trayek	Jalur
1	2	3
1.	AKAP	Solo-Yogya-Purworejo-Cilacap PP
		Yogya-Purworejo-Cilacap PP
		Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto PP
		Yogya-Purworejo-Purwokerto PP
		Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta PP
		Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta-Bogor PP
		Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Tasikmalaya PP



No	Trayek	Jalur
1	2	3
		Solo-Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Pekanbaru
		Solo-Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung
		Semarang-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung-Jakarta
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru
		GunungKidul-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta- PP
		Surabaya-Yogya-Purworejo-Jakarta
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru
		Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru-Aceh
		Purworejo-Bandung-Lampung
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung
		Purworejo-Jakarta-Bogor
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung
		Solo- Yogya-Purworejo-Bandung
2	AKDP	Semarang-Purworejo-Purwokerto PP
		Semarang-Purworejo-Cilacap PP
		Purworejo-Magelang PP
		Purworejo-Wonosobo PP
		Purworejo-Kebumen PP
3	Angkutan Perdesaan	Purworejo - Kutoarjo
		Purworejo-Krendetan - Dadirejo
		Purworejo – Kaliboto
		Purworejo - Banyuurip - Sendangsari
		Purworejo - Tegalmiring - Bencorejo
		Kutoarjo - Klepu - Pituruh
		Kutoarjo - Klepu – Pituruh- Kaligintung
		Kutoarjo - Kemiri - Pituruh
		Kutoarjo - Kemiri – Pituruh - Prapaglor
		Kutoarjo - Kedungagung - Wonorejo
		Kutoarjo - Gng Tugel - Winong
		Purworejo - Gintungan - Winong
		Purworejo - Banyuasin
		Purworejo - Kaligesing
		Purworejo - Caok - Tlogorejo
		Purworejo - Somongari - Jatirejo
		Purworejo - Semagung
		Kutoarjo - Kemiri - Bruno
		Cepedak - Bruno – Kemiri - KTA
		Purworejo - Keduren - Sendangsari
		Pundensari - Keduren - Purworejo
		Surorejo - Tegalrejo - Purworejo
		Kutoarjo - Bayan – Piyono - Wingko
		Kutoarjo - Pekutan – Sambeng - Seren
		Kutoarjo - Gebang - Brengkol
		Purworejo - Ngasinan
		Purworejo – Purwodadi - Ngombol
		Purworejo – Purwodadi – Ngombol- Wunut
		Purworejo – Purwodadi – Ngombol-Wonoroto
		Purworejo – Purwodadi – Gesing – Nampurejo
		PWR – Karangduwur - Kemiri – KTA – Andong – Sembaon- Grabag – Purwodadi – Krendetan-Bagelen – Piji – Cangkrep- PWR
		Kutoarjo – Ketawang



No	Trayek	Jalur
1	2	3
		Kutoarjo - Suren - Wareng - Sidomulyo
		Kutoarjo - Grabag - Wunut - Wonoroto
		Purworejo - Jalingkut - Terminal Bus PWR
		Purworejo - Bulus
		Purworejo - Maron - Redin - Kemiri
		Kutoarjo - Kemiri - Kedungpomahan Kulon
		Purworejo - Kaligesing - Goa Seplawan - Pandanrejo
		Purworejo - Krendetan - Tlogokotes- Somorejo
		Purworejo - Krendetan - Bugel
		Purworejo - Bagelen - Haargorojo
		Purworejo - Dewi - Tanjung Anom
		PWR - Perum Boro - Pakisrejo - Bajangrejo
		Purworejo - Jenar - Wingkorejo
		Purworejo - Winong - Sawangan
		Purworejo - Gebang - Tlogosono - Redin
		Purworejo - Bayan - Bringin - Seren
		Purworejo - Sikemplong - Boro Wetan
		Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Kali Glagah
		Kutoarjo - Kaliwatu- Kranggan - Paitan
		Kutoarjo - Loning - Giriloyo
		Purworejo - Ngaran
		Purworejo - Cacaban - Kalitapas
		Purworejo - Ketosari - Sidomukti
		Purworejo - Kaliboto - Kaliwader - Kalitapas
		Purworejo - Purwodadi - Jogoboyo
		Purworejo - Brenggong - Kedunggubah
		Sokoagung - Clapar - Tambakrejo - PWR
		Kutoarjo - Kedungpomahan Wetan
		Sidorejo - Cangkreng - Purworejo
		Kalinongko - Purworejo
		Purworejo - Kalikalong - Rimun
		Wonoroto - Ngombol - Banyuurip - Lengkong - Purworejo
		Pogungrejo - Tangkisan - Bandungkidul - Kutoarjo
		Lingkar Kota
		Terminal Bus - Kolam Renang Artha Tirta
4	Angkutan Perbatasan	Pendowo (Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo) - Kulonprogo PP

Sumber : RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Di Kabupaten Purworejo terdapat 20 jalur yang melayani AKAP, 5 jalur pelayanan AKDP, 67 jalur Angkutan Perdesaan, dan 1 jalur Angkutan Perbatasan.

f. Perkeretaapian

Sistem jaringan kereta api di Kabupaten Purworejo terdiri dari jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Jaringan jalur kereta api meliputi:

- 1) Jaringan jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten berupa pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (*double track*) Jawa Selatan melalui Kecamatan Bagelen - Kecamatan Purwodadi - Kecamatan Banyuurip - Kecamatan Bayan - Kecamatan Kutoarjo - Kecamatan Butuh.



- 2) Jaringan jalur kereta api dalam Kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan Kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam Kabupaten, berupa jaringan jalur kereta api Purworejo – Kutoarjo, melalui Kecamatan Purworejo – Kecamatan Banyuurip – Kecamatan Bayan –Kecamatan Kutoarjo.

Stasiun kereta api di Kabupaten Purworejo antara lain:

- 1) Stasiun Jenar di Kecamatan Purwodadi
- 2) Stasiun Wojo di Kecamatan Bagelen
- 3) Stasiun Purworejo di Kecamatan Purworejo
- 4) Stasiun Montelan di Kecamatan Banyuurip
- 5) Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo
- 6) Stasiun Butuh di Kecamatan Butuh

Terdapat 4 perlintasan KA kewenangan kabupaten yang menerapkan standar keselamatan dan tidak bertambah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.109. Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan pada Perlintasan Sebidang di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah perlintasan KA kewenangan kabupaten yang menerapkan standar keselamatan	4	4	4	4	4
3	Jumlah perlintasan KA kewenangan kabupaten yang harus menerapkan standar keselamatan	4	4	4	4	4

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

g. Pengelolaan Parkir

Kabupaten Purworejo ditargetkan menangani 165 titik parkir berdasarkan dokumen perencanaan. Kondisi persentase titik parkir yang terlayani selalu membaik dari tahun ke tahun. Hingga di tahun 2020, jumlah titik parkir yang dikelola mencapai 165 titik atau 100%.

**Tabel 2.110. Persentase Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Titik Parkir yang Terlayani	90%	91%	94%	97%	100%
2	Jumlah Titik Parkir yang dikelola	148	150	155	160	165
3	Jumlah Titik Parkir	165	165	165	165	165

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2021

16) Komunikasi dan Informasi

Kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Kominfo dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.111. Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website yang Interaktif	26%	95%	100%	100%	100%
2	Cakupan Layanan Cybercity	0%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Layanan Sistem Informasi Desa	6%	43%	80%	100%	100%
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	75%	98%	100%	98%	100%
5	Persentase PD yang Memiliki Jaringan Berbasis LAN	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Layanan Teknologi Informasi	6%	43%	80%	100%	100%
7	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Data dan Informasi Pemerintah yang Dipublikasikan	26%	95%	100%	100%	100%

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Purworejo, 2021

Kondisi perangkat daerah yang memiliki website interaktif selalu tercapai 100% sejak tahun 2018. Sebanyak 42 perangkat daerah telah memiliki website interaktif. Kinerja 100% pada tahun



terakhir juga terdapat pada indikator cakupan layanan *cybercity*, cakupan layanan sistem informasi desa, cakupan layanan system informasi pemerintahan daerah, persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN, cakupan layanan teknologi informasi, cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi, serta persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan.

17) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Secara keseluruhan, Kabupaten Purworejo memiliki 273 koperasi pada tahun 2020. Terlihat pada tabel di bawah ini, jumlah koperasi meningkat pada tahun 2017-2020. Meskipun demikian, peningkatan jumlah koperasi ini tidak berbanding lurus dengan jumlah koperasi aktif, tercatat di tahun 2020 hanya 168 koperasi aktif, menurun dari tahun 2019 (235 koperasi). Tidak sekadar pada koperasi aktif, jumlah koperasi sehat yang dinilai oleh dinas mengalami penurunan lebih signifikan, menurun menjadi 52 di tahun 2020 dari sebanyak 120 di tahun 2019. Penyebab utama mengenai fenomena ini dikarenakan banyak koperasi yang tidak memenuhi 7 aspek kriteria penilaian, diantaranya tidak tertib administrasi.

Tabel 2.112. Persentase Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase jumlah koperasi aktif	81,9%	89,84%	89,81%	88,35%	81,9%
2	Jumlah koperasi aktif	227	230	238	235	224
3	Jumlah koperasi total	277	256	265	266	273
4	Persentase jumlah koperasi sehat	81,94%	80,66%	82,00%	80,00%	34,67%
5	Jumlah koperasi sehat	123	121	123	120	52
6	Jumlah koperasi yang dinilai oleh dinas	150	150	150	150	150

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2021

Saat ini Kabupaten Purworejo memiliki 33.532 UMK. Hal ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jumlah UMK mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan signifikan jumlah UMK



terjadi di tahun 2020, sebesar 15,44% atau bertambah 4.486 dari tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan UMK di tahun terakhir direspon dengan baik oleh DKUKMP Kabupaten Purworejo, terdapat kenaikan 20,09% usaha mikro yang dibina. Meskipun demikian, bertambah banyaknya UMK ini tidak disertai dengan tingginya kenaikan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil. Angka 4,06% termasuk capaian yang rendah dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil adalah dengan meningkatkan omzet dan akses pendanaan. Persentase UMK yang mengakses layanan keuangan dari tahun 2017 ke tahun 2020 menurun dari tahun ke tahun. Proporsi total kredit UMK terhadap total kredit pun mengalami penurunan dari tahun 2016-2017.

Tabel 2.113. Persentase Pertumbuhan UMK, Peningkatan Usaha Mikro yang Dibina, dan Usaha Mikro yang Berkembang menjadi Usaha Kecil di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pertumbuhan UMK	0,00%	6,22%	6,03%	5,83%	15,44%
2	Jumlah UMK	22.330	23.720	25.870	29.046	33.532
3	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina	6,62%	6,22%	9,63%	14,22%	20,09%
4	Usaha mikro terbina	1.478	1.390	2.150	3.176	4.486
5	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	4,74%	7,86%	3,69%	4,43%	4,06%
6	Usaha mikro yang menjadi usaha kecil	929	1.002	1.039	1.085	1.108
7	Persentase akses UMK (Usaha Mikro dan kecil ke layanan keuangan (8.3.1 (c))	N/A	82,10	78,01	53,00	49,66
8	Proporsi kredit UMK terhadap total kredit (8.10.1. (b))	43,33	42,56	N/A	N/A	N/A

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2021



18) Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dalam perekonomian nasional besaran investasi yang muncul dalam sebuah wilayah tercatat dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sementara itu dalam pemerintahan yang tercatat dalam data investasi adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing. Realisasi PMTB di Kabupaten Purworejo selama lima tahun terakhir meningkat hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan pandemi covid-19.

Realisasi investasi di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat diamati pada tabel di bawah ini bahwasanya nilai investasi di tahun 2016 sebesar 267,6 miliar menjadi 1.127,9 miliar di tahun 2020. Terdapat kenaikan nilai investasi yang cukup tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya (85,30%), hal ini disebabkan karena *multiplier effect* dari pembangunan bandara YIA. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu terus berupaya meningkatkan pendataan nilai investasi yang ada yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase nilai investasi dibandingkan PMTB yang meningkat cukup signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Sementara itu, layanan perizinan selalu 100% setiap tahunnya (2016-2020).

Tabel 2.114. Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PMTB ADHB (Juta Rupiah)	3.923.784, 16	4.287.999, 42	4.786.359, 03	5.201.119, 15	4.864.594, 49
2	PMTB ADHK (Juta Rupiah)	2.919.663, 12	3.120.291, 91	3.327.260, 84	3.495.373, 13	3.260.744, 07
3	Laju PMTB	5,46	6,87	6,63	5,05	-6,71
4	Pertumbuhan nilai investasi/ Persentase peningkatan nilai investasi	24,29%	21,21%	58,76%	18,20%	85,30%
5	Nilai investasi	267,6 M	324,4 M	515,0 M	608,7 M	1.127,9 M
6	Persentase jumlah jenis izin yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase Nilai Investasi terhadap PMTB	6,82%	7,57%	10,76%	11,70%	23,19%

Sumber: BPS dan DPMPTSP Kabupaten Purworejo, 2021

Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya optimal untuk meningkatkan iklim investasi melalui pelayanan perizinan yang lebih baik. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purworejo mulai membangun Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP menyediakan 107 layanan dari 24 instansi dengan 28 gerai yang tersedia, termasuk layanan dokumen dan perizinan investasi dan usaha. Pendirian Mall Pelayanan Publik ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian pelayanan perizinan sehingga masyarakat khususnya para investor nyaman dan diuntungkan. Diharapkan pada akhirnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Purworejo akan semakin meningkat.

Namun hingga saat ini Kabupaten Purworejo belum menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Meskipun demikian, pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang tentunya memerlukan review untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Penyesuaian tersebut juga perlu dilakukan karena pada tahun 2021 juga akan dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2031 yang diharapkan akan membuat iklim penanaman modal di Kabupaten Purworejo lebih kondusif yang kemudian berdampak peningkatan nilai investasi.



19) Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja pembangunan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dari Jumlah Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.115. Jumlah Klub, Gedung, Organisasi, dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I	Pemuda dan Olahraga					
1	Jumlah Klub Olahraga	85	85	85	90	90
2	Jumlah Gedung Olahraga	16	16	16	16	16
3	Organisasi Olahraga	1	1	1	2	2
4	Kegiatan Olahraga	12	12	12	13	13

Sumber: Dindikpora Kabupaten Purworejo, 2021

20) Statistik

Bidang urusan statistik diampu oleh Dinas Kominfo. Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel 2.116. Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinkominfo Kab. Purworejo, 2021

Statistik dasar dan sektoral tahun 2016 – 2020 selalu tercapai 100%. Jumlah dokumen statistik sektoral dan daerah yang telah disusun pada tahun berkenaan sejumlah 3 buah dan telah terpublikasi pada laman <http://satudata.purworejokab.go.id>.

21) Persandian

Capaian kinerja urusan persandian sampai dengan tahun 2020 adalah meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita sandi dari pusat dan provinsi. Pengelola persandian juga saat ini memberikan pelayanan telekomunikasi berita telepon/ fax antar perangkat daerah di Kabupaten Purworejo, melayani sejumlah 42 perangkat daerah.

**Tabel 2.117. Persentase Layanan Persandian 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase layanan persandian	100%	100%	100%	100%	106%

Sumber: Dinkominfo Kab. Purworejo, 2021

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan persandian meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Bidang urusan yang diampu oleh Dinas Kominfo ini tahun 2016-2019 selalu melayani persandian 100%. Di tahun terakhir (2020, persentase layanan persandian sebesar 106% karena dari 800 dokumen persandian yang seharusnya terlayani, terdapat 844 dokumen yang telah terlayani.

22) Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 14 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.118. Cakupan Pelaku Budaya dalam Even Budaya Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan Pelaku Budaya dalam Even Budaya Daerah	15%	15%	15%	14%	1%

Sumber: Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021

Indikator cakupan pelaku budaya dalam event budaya daerah memiliki maksud untuk menumbuhkan dan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kelompok seni yang berpartisipasi aktif dalam event-event kebudayaan yang diselenggarakan dengan jumlah keseluruhan kelompok seni di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian pada indikator ini dari tahun 2016 hingga 2019 terlihat cukup stabil meskipun mengalami penurunan



yang cukup tajam pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.119. Cakupan Pembinaan dan Perlindungan Aset Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan Pembinaan Aset Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Perlindungan Aset Budaya	40%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021

Aset budaya yang ada di Kabupaten Purworejo perlu untuk dibina dan dilindungi sehingga tetap terjaga secara lestari. Dari data pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa setiap tahunnya kegiatan pembinaan dan perlindungan aset budaya di Kabupaten Purworejo sudah terlaksana seluruhnya atau sebesar 100%.

Tabel 2.120. Pertumbuhan Prestasi Seni dan Budaya Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan Prestasi Seni dan Budaya Daerah	20%	19%	20%	17%	1%

Sumber: Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021

Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah dihitung dengan membandingkan jumlah prestasi kesenian dan kebudayaan yang berhasil diraih dengan jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi yang cukup variatif namun mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.121. Optimalnya Pemanfaatan Wahana Pembinaan Seni Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Optimalnya Pemanfaatan Wahana Pembinaan Seni Budaya	0%	0%	0%	100%	100%

Sumber: Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021

Optimalisasi pemanfaatan wahana pembinaan seni budaya dilaksanakan dengan adanya sentralisasi wahana peningkatan



prestasi seni budaya dengan membangun dan mengembangkan *Art Centre* pada tahun 2019 sehingga capaian indikator ini pada tahun 2019 dan 2020 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.122. Capaian Indikator Program Kesenian dan Kebudayaan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan Gelar Seni	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Misi Kesenian	100%	100%	100%	100%	17%
3.	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	192	307	430	505	619
4.	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	85	88	91	87	140
5.	Tersedianya museum yang representatif	0	1	1	1	1
6.	Cakupan pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi	100%	100%	100%	100%	0%
7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	100%	100%	100%	100%	0%
8.	Cakupan Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Tersedianya tempat pembinaan seni budaya	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021*

Cakupan gelar seni adalah penyelenggaraan kegiatan yang berwujud gelar seni yang terdiri dari 3 jenis kegiatan yaitu pagelaran, festival, dan lomba kesenian. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga 2020 cakupan gelar seni yang dilaksanakan seluruhnya sudah mencapai target sebesar 100%. Indikator misi kesenian dihitung dengan capaian persentase kegiatan event kesenian yang dipentaskan terhadap kegiatan event kesenian yang direncanakan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2019 misi kesenian yang dilaksanakan sudah mencapai 100% namun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

Jumlah cagar budaya yang diregistrasi dan direvitalisasi merupakan salah satu indikator yang ditetapkan untuk melindungi aset-aset budaya yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah cagar budaya yang diregistrasi dan direvitalisasi di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan. Selain dengan meregistrasi dan



merevitalisasi cagar budaya, perlindungan aset budaya juga dapat terwujud dengan menyediakan museum yang dikelola secara representatif. Pada Kabupaten Purworejo terdapat Museum Tosan Aji yang berfungsi yang telah dikelola dengan baik dan menjadi salah satu tujuan wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Purworejo.

Pembinaan seni, nilai sejarah, adat, dan tradisi dilaksanakan dengan menyelenggarakan workshop sejarah lokal, pembinaan kelompok penghayat, dan persemaian karakter bangsa dengan pemutaran film dan sebagainya. Ketercapaian indikator ini pada tahun 2016 hingga 2019 sudah mencapai 100% namun terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

23) Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu institusi atau lembaga yang bergerak dalam bidang pengolah informasi memiliki peranan penting dimasyarakat era teknologi seperti sekarang ini. Informasi di era ini merupakan sesuatu yang mudah diperoleh namun kemampuan menelusur informasi yang beredar di masyarakat perlu dikelola dengan baik.



Gambar 2.29. Pojok Baca Perpustakaan Paseban Alun-Alun Purworejo

Penerapan mutu layanan perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan pemakai dan mendukung layanan informasi. Perpustakaan harus mampu berperan selaku pusat pengetahuan publik disemua lapisan masyarakat. Terkait hal tersebut, dalam upaya mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat,

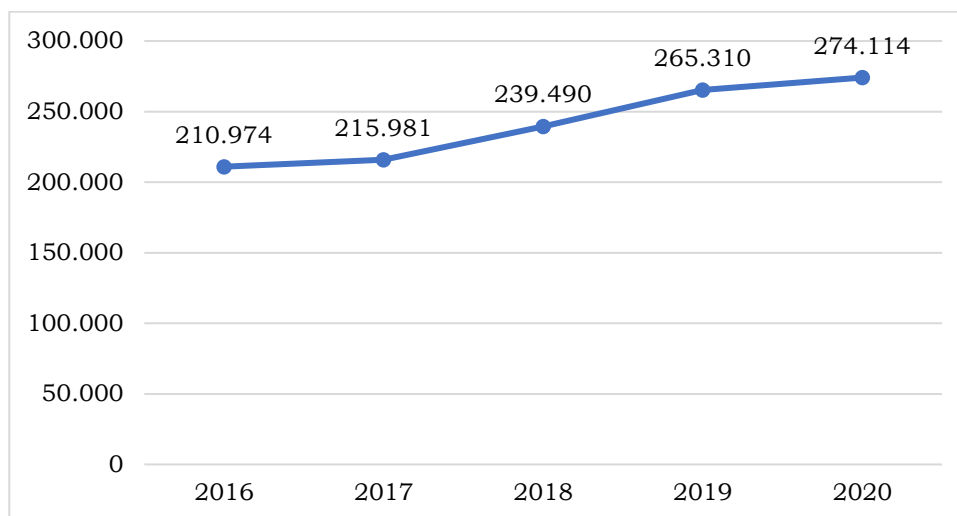


Perpustakaan membuka layanan Pojok Baca dan layanan perpustakaan keliling.



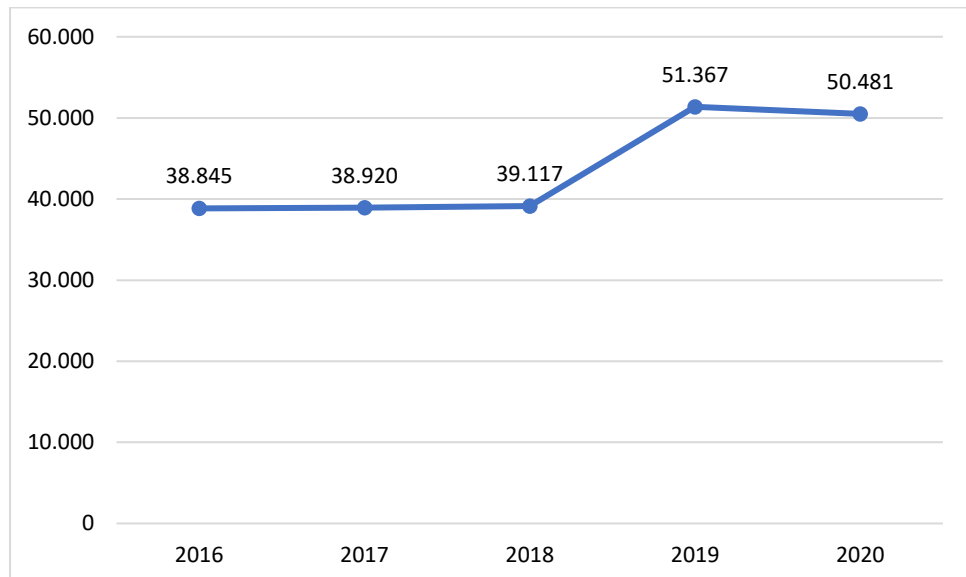
Gambar 2.30. Layanan Perpustakaan Keliling

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Purworejo antara lain dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan dan jumlah perpustakaan.



Gambar 2.31. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Data jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebanyak 210.974 pengunjung menjadi 274.114 pengunjung di tahun 2020. Jumlah koleksi bahan pustaka juga mengalami peningkatan. Dari 38.845 bahan pustaka tahun 2016 menjadi 51.367 bahan pustaka pada tahun 2019, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 50.481 bahan pustaka.



Gambar 2.32. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

Pada tahun 2020 terdapat 605 perpustakaan yang sebagian besar merupakan Perpustakaan Sekolah sebanyak 92,56 persen, 5,7 persen Perpustakaan Desa/Kelurahan, selebihnya sekitar 1,74 persen merupakan Perpustakaan Lainnya termasuk Perpustakaan Daerah.

24) Kearsipan

Arsip merupakan hasil rekaman seluruh kegiatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai nilai guna dimensi kekinian dan masa lalu sebagai sumber kearifan lokal yang menjadi sumber informasi publik. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.



Gambar 2.33. Kegiatan Bintek dan Pelatihan Bidang Kearsipan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo bertugas melaksanakan pembinaan kearsipan pada perangkat



daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah menuju terwujudnya tertib arsip, penggunaan e-arsip, serta berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat dengan didukung sumber daya manusia kearsipan yang berkompeten. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.123. Persentase Tertib Administrasi Kearsipan Lembaga Pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah	64%	70%	75%	86%	95%
2	Penggunaan E-Arsip	-	1	1	1	1
3	Arsip statis yang diakses masyarakat	-	-	20	5	7
4	Arsiparis yg sudah sertifikasi	5	5	5	5	5

Sumber: Dinarpus Kabupaten Purworejo, 2021

Selama kurun waktu 2016-2020 persentase tertib kearsipan Lembaga pemerintahan daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 64% meningkat menjadi 95% pada tahun 2020. Penggunaan e-arsip di mulai pada tahun 2017, e-arsip yang digunakan adalah SIKD. SIKN dan JIKN pada tahun 2020 ada penggabungan antara SIKN dan JIKN menjadi SIKS, sehingga e-arsip yang digunakan pada tahun 2020 adalah SIKD dan SIKS. Sementara itu, arsip statis yang diakses masyarakat dimulai dari tahun 2018.

25) Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 5 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.124. Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun) (%)	-8,97	-39,39	105,63	4,07	4,91



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
2.	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun) (%)	-1,05	3,00	3,00	3,29	-12,67

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada produksi perikanan tangkap mengalami penurunan pada tahun 2017 akibat kondisi iklim yang buruk sehingga menurunkan jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan. Namun pada tahun 2018 terdapat bantuan penambahan kapal dan alat tangkap sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi secara signifikan. Pada produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan hingga tahun 2019 namun mengalami penurunan cukup besar pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 menurunkan jumlah permintaan pasar serta adanya efisiensi bantuan dari pemerintah yang juga menurunkan modal terutama pada budidaya udang.

Kesejahteraan nelayan dapat diukur dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kabupaten Purworejo pada tahun 2016-2020 tidak melakukan pengukuran NTN, namun sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut, Kabupaten Purworejo turut mendukung pencapaian nilai tukar nelayan pada tingkat provinsi dimana trennya meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2020 dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.125. Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Januari	98,7	99,76	104,02
2	Februari	99,57	99,66	102,39
3	Maret	98,45	98,09	101,95
4	April	97,83	98,03	99,59
5	Mei	98,23	99	100,67
6	Juni	99,78	98,02	99,32
7	Juli	100,62	98,69	101,27
8	Agustus	101,52	99,37	102,89
9	September	102,51	100,18	103,89
10	Oktober	102,54	101,87	104,24
11	November	99,89	102,19	105,12
12	Desember	100,19	103,74	107,18

Sumber : Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Sedangkan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya didukung dengan peningkatan kelompok perikanan yang



melakukan pembenihan dan pembesaran untuk memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB di Kabupaten Purworejo).

Tabel 2.126. Persentase Peningkatan Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat	11	11	11	11	11

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kabupaten Purworejo dari tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan melainkan tetap yaitu sebesar 11 kelompok.

Tabel 2.127. Cakupan Wilayah Pengembangan TPI

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan wilayah pengembangan TPI	5	5	5	5	5

Sumber: DINPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Cakupan wilayah pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebanyak 5 TPI. Rencana pembangunan 2 TPI tambahan yaitu TPI Ketawangrejo dan TPI Patutrejo belum bisa dibangun karena belum adanya kejelasan status tanah dan armada yang belum siap.

Tabel 2.128. Jumlah Event Promosi Perikanan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Event promosi perikanan meningkat	2	4	6	5	2

Sumber: DINPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah event promosi perikanan di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan hingga tahun 2018 namun mengalami penurunan terutama di tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19.



26) Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 2 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.129. Pesentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pesentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	70%	70%	4%	33%	-66%
2	Jumlah wisatawan mancanegara. (8.9.1. (a))	38	18	248	280	133
3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. (8.9.1. (b))	630.962	1.292.219	1.112.975	1.484.837	492.411

Sumber: Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021

Pertumbuhan persentase kunjungan wisatawan dihitung dengan membandingkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Purworejo baik wisatawan lokal maupun mancanegara pada tahun n dengan tahun n-1. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 hingga 2019 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan namun mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 yang sangat membatasi pergerakan dan interaksi manusia sehingga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Kinerja tersebut terkait dengan capaian pada indikator TPB nomor 8.9.1. (a) dan 8.9.1 (b).

Tabel 2.130. Kinerja Pengembangan Pariwisata

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kinerja pengembangan pariwisata	61,50%	66,00%	88,00%	88,00%	85,00%

Sumber: Dinparbud Kabupaten Purworejo, 2021

Kinerja pengembangan pariwisata dihitung dari 3 komponen yaitu pengembangan objek wisata dengan bobot sebesar 45%, penyelenggaraan event wisata dengan bobot sebesar 35%, serta pengembangan desa wisata dengan bobot 10%. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengembangan pariwisata di



Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan yang cukup pesat dan stagnan di tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 meskipun tidak terlalu besar yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19.

27) Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 23 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.131. Capaian Kinerja Subsistem Agroinput dan Agroonfarm

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Subsistem Agroinput dan Agroonfarm	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Capaian kinerja subsistem agroinput dan agroonfarm di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 hingga 2020 sudah mencapai 100% yang menunjukkan bahwa subsistem agroinput dan agroonfarm pada 7 komoditas unggulan yang terdiri dari 14 subsistem sudah terlaksana seluruhnya dengan baik.

Tabel 2.132. Jumlah Luasan Panen Komoditas Pertanian (Ha/Tahun)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Luasan Panen Komoditas Pertanian (ha/tahun)	105.932	108.220	106.635	109.424	108.575

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Jumlah luas panen komoditas pertanian yang merupakan indikator dari program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Purworejo yang terdiri dari padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti dapat dilihat dalam tabel di atas.

Tabel 2.133. Capaian Program Penerapan Teknologi Pertanian

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luasan Penerapan Teknologi Intensifikasi Pertanian (ha)	2.000	2.182	2.105	1.900	2.300
2.	Persentase penerapan teknologi IB (%)	80,01%	81,01%	77,51%	97,35%	95,00%

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021



Teknologi pertanian yang diterapkan di Kabupaten Purworejo antara lain terdiri dari dua jenis teknologi yaitu teknologi intensifikasi pertanian yang diukur secara peningkatan persentase luasan tanaman terpadu ramah lingkungan yang dikelola dan teknologi inseminasi buatan (IB) yang diukur secara keberhasilan pelaksanaan. Luasan penerapan teknologi intensifikasi pertanian menunjukkan pergerakan grafik yang fluktuatif setiap tahunnya dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2020. Sedangkan persentase teknologi IB mengalami peningkatan hingga tahun 2019 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tabel 2.134. Capaian Program Peningkatan Produksi/Produktivitas Perkebunan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra	25.317,11	25.393,93	25.546,04	24.970,15	24.980,00
2.	Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)	18.510,48	18.281,62	18.042,68	18.755,93	18.770,00
3.	Jumlah produksi cengkeh (ton)	508,19	636,16	665,31	542,01	560,00
4.	Produktivitas kakao (kg/ha)	1.145,77	1.247,38	1.224,23	1.462,20	1.465,00
5.	produktivitas karet (kg/ha)	672,61	1.200,00	1.200,00	860,12	865,00
6.	Produktivitas aren (kg/ha)	1.018,68	1.007,50	1.007,47	1.160,93	1.162,00
7.	Produktivitas kopi (kg/ha)	315,09	483,84	516,48	330,30	350,00

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan di Kabupaten Purworejo terdiri dari 7 komoditas yaitu kelapa setara kopra, kelapa deres dalam bentuk gula, cengkeh, kakao, karet, aren, dan kopi. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh komoditas secara umum menunjukkan peningkatan yang fluktuatif namun relatif stabil karena penurunan maupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar. Namun pada tahun 2019 dapat dilihat pada komoditas kopi mengalami penurunan yang cukup signifikan karena produksi pertanaman menurun akibat tanaman yang sudah tua.

**Tabel 2.135. Capaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)	0,36%	1,25%	5,01%	1,25%	1,79%

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT) dihitung dengan melihat kenaikan jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi dalam GAP, GMP, dan GHP. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kenaikan cukup pesat terjadi pada tahun 2018 karena terdapat banyak pendampingan dari Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan jumlah kelompok tani yang menerapkan SLPHT. Namun demikian kenaikan tersebut tidak dapat dipertahankan dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan hanya sedikit mengalami peningkatan di tahun 2020.

Program pemberdayaan penyuluh dan peningkatan penyuluhan pertanian terdiri dari 2 indikator yaitu cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI) dan persentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok. Persentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI) dihitung dari jumlah wilayah yang terlayani penyuluhan dan berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 sudah mencapai persentase 100%. Sedangkan persentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok terbagi dalam 3 kelas yaitu kelompok kelas lanjut, madya, dan utama. Pada kelompok kelas lanjut mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun 2017 namun kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2020. Sedangkan kelompok kelas madya dan utama memiliki capaian terbesar pada tahun 2016 namun terus mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2020.

**Tabel 2.136. Capaian Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI) (%)	100	100	100	100	100
2.	Persentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok:					
	- lanjut (%)	-8,82	34,77	10,14	10,14	8,49
	- madya (%)	190,65	18,17	2,04	2,04	2,00
	- utama (%)	373,68	23,33	3,60	3,60	3,48

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Program peningkatan produksi peternakan terdiri dari kenaikan populasi ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan cakupan pelayanan pemotongan ternak pada Rumah Potong Hewan (RPH) setiap tahunnya seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.137. Capaian Program Program Peningkatan Produksi Peternakan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase kenaikan populasi ternak besar	-1,58%	1,22%	7,33%	2,16%	2,07%
2.	Persentase kenaikan populasi ternak kecil	2,09%	2,54%	7,56%	5,82%	4,40%
3.	Persentase kenaikan populasi ternak unggas (pertahun)	5,00%	11,39%	74,18%	7,13%	5,95%
4.	Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH (pertahun)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada populasi ternak besar dan ternak kecil terdapat kenaikan yang sangat besar pada tahun 2018 karena adanya kegiatan pengadaan ternak dan kegiatan GBIB (Gerakan Birahi dan Inseminasi Buatan) serta penanganan gangguan reproduksi (Gangrep) dari pusat yang berdampak pada peningkatan jumlah kelahiran ternak. Pada populasi ternak unggas juga mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2018 karena adanya kemitraan unggas ayam broiler yang dilaksanakan. Sedangkan cakupan pelayanan pemotongan ternak di RPH setiap tahunnya sudah mampu mencapai 100%.

**Tabel 2.138. Capaian Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Produksi Padi (ton/Th)	317.847,9	355.526,5	336.837,0	314.160,3	367.304,5
2.	Produksi jagung (ton/th)	20.569,0	23.496,0	18.290,7	26.815,9	19.616,1
3.	Produksi durian meningkat (ton/th)	1.651,7	2.157,6	2.626,0	2.916,9	2.956,8
4.	Produksi biofarmaka (ton/th)	4.697,0	9.133,0	3.891,8	6.211,0	12.145,0
5.	Persentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing	-6,63%	-13,66%	-5,57%	1,00%	0,70%

Sumber: DPPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Program agribisnis komoditas unggulan pertanian dan peternakan di Kabupaten Purworejo terbagi dalam komoditas padi, jagung, durian, biofarmaka, dan kambing Kaligesing. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2019 diakibatkan adanya kemarau dan puso namun kembali meningkat pada tahun 2020. Sedangkan produksi jagung pada tahun 2018 mengalami penurunan karena musim penghujan di tahun ini terjadi cukup panjang (tahun basah) sehingga produksi palawija menurun namun berhasil kembali ditingkatkan pada tahun 2019. Sedangkan produksi durian menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Produksi biofarmaka mencapai puncaknya pada tahun 2020, meningkat hampir 200% dari tahun sebelumnya. Secara umum, produksi biofarmaka mengalami trend positif dalam produksinya. Sementara itu, populasi ternak Kambing Kaligesing mengalami penurunan hingga tahun 2018 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 karena adanya bantuan ternak kambing. Sedangkan untuk capaian indikator TPB yang terkait bidang pertanian dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.139. Capaian Indikator TPB terkait Bidang Pertanian

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). (2.3.1*)	N/A	32.659.421	32.380.765	30.833.274	(data belum rilis)

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026.



Data capaian di atas menunjukkan terjadi penurunan nilai tambah pertanian dari tahun 2017-2019, sedangkan target nasional adalah peningkatan nilai tambah pertanian per tenaga kerja. Dengan demikian, perlu adanya upaya tambahan untuk pencapaian indikator ini. Pengukuran nilai tambah pertanian memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.

Selain data-data di atas, DPUPR Kabupaten Purworejo pada tahun 2011 mencatat 56.877 hektare di Kabupaten Purworejo merupakan lahan pertanian yang meliputi pertanian lahan basah dan lahan kering. Namun pada tahun 2021 lahan pertanian di Kabupaten Purworejo menjadi 46.857 hektar. Hal ini menunjukkan dalam 10 tahun terakhir terjadi alih fungsi yang cukup signifikan yaitu sebesar 10.020 hektar dari lahan pertanian menjadi kawasan budidaya lainnya.

28) Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang urusan energi dan sumber daya mineral diampu oleh DPMPTSP. Pada tahun terakhir (2020, Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral tidak didanai, meskipun demikian capaian indikatornya tetap 100% karena DPMPTSP tetap memberikan komitmen fasilitasi pada bidang urusan ini. Di tahun 2018, DPMPTSP memberikan layanan sebanyak 9, di tahun 2019 sebanyak 3, sementara di tahun 2020 sebanyak 0 layanan/ fasilitasi. Lebih lanjut, persentase layanan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Purworejo dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.140. Persentase Layanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Layanan Informasi dan Fasilitasi ESDM	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Cakupan Layanan Fasilitasi ESDM	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purworejo, 2021



29) Perdagangan

Kabupaten Purworejo memiliki 27 pasar. Pada tahun 2016 hingga 2019, jumlah pasar yang direvitalisasi/ dibangun selalu meningkat. Pada tahun 2020, dari 27 pasar, sebanyak 26 pasar atau 96,3% pasar telah direvitalisasi/ dibangun. Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah selalu mencapai 100% tiap tahunnya. Sementara itu, di tahun 2020 cakupan jenis komoditas yang dipromosikan menurun, dari 100% di empat tahun sebelumnya (2016-2019 menjadi hanya 14%. Hanya 1 dari 7 pameran yang terlaksana karena anggaran di-*refocusing* karena adanya Pandemi Covid-19. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.141. Persentase Pasar dalam Kondisi Baik, Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah, serta Cakupan Jenis Komoditas yang Dipromosikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah pasar dalam kondisi baik	44,44%	74,00%	81,48%	96,30%	96,30%
2	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan	100%	100%	100%	100%	14%

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2021

30) Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 3 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.142. Capaian Subsistem Agroprosesing dan Agromarketing

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Subsistem Agroprosesing dan Agromarketing (%)	42,86	42,86	100,00	83,33	100,00

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Purworejo, 2021



Subsistem agroprosesing dan agromarketing pada 7 komoditas unggulan Kabupaten Purworejo merupakan indikator dari meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian. Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat adanya peningkatan yang sangat besar pada tahun 2018 karena salah satu komoditas yaitu komoditas beras tidak lagi menjadi penyebut karena sudah masuk pada perdagangan. Penurunan terjadi pada tahun 2019 namun kembali menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2020.

Tabel 2.143. Capaian Jumlah KUB yang dibina

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah KUB yang dibina	93	100	114	123	124

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Purworejo, 2021

Data jumlah KUB yang dibina diperoleh dari banyaknya kelompok usaha yang dibina baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah KUB dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.144. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina Sistem Pengelolaannya

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina Sistem Pengelolaannya	12,60%	10,52%	11,66%	13,36%	15,26%

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Purworejo, 2021

Sistem pengelolaan industri kecil dan menengah (termasuk KUB industri kecil) yang dibina meliputi manajemen usaha, kualitas, dan kuantitas produksi, serta pemasarannya. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase industri kecil dan menengah yang dibina pengelolaannya mengalami fluktuasi yang variatif dari tahun 2016 hingga 2020 dengan capaian tertinggi berada pada tahun 2020.

31) Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi termasuk dalam bagian urusan wajib pelayanan non dasar yang memiliki 2



indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.145. Capaian Layanan Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Transmigrasi

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cakupan Layanan Informasi Dan Fasilitas Penyelenggaraan Transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian cakupan layanan informasi dan fasilitas penyelenggaraan transmigrasi sudah tercapai 100% mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang berarti bahwa informasi tentang fasilitas penyelenggaraan transmigrasi disampaikan kepada calon transmigran sebagaimana peraturan yang berlaku.

Tabel 2.146. Capaian Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Purworejo, 2021

Kelancaran pelaksanaan transmigrasi berarti mekanisme pelaksanaan penempatan transmigrasi berjalan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang dihitung berdasarkan jumlah transmigran (per KK) yang dapat ditempatkan sesuai dengan target penempatan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kelancaran pelaksanaan transmigrasi Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan capaian sebesar 100%. Namun demikian karena adanya pandemi Covid-19, proses transmigrasi dihentikan oleh Kementerian sehingga capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 0%.

32) Sekretariat Daerah

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Bentuk perumusan kebijakan berupa diantaranya berupa, penerbitan produk hukum. Pencapaian



kinerja bidang hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

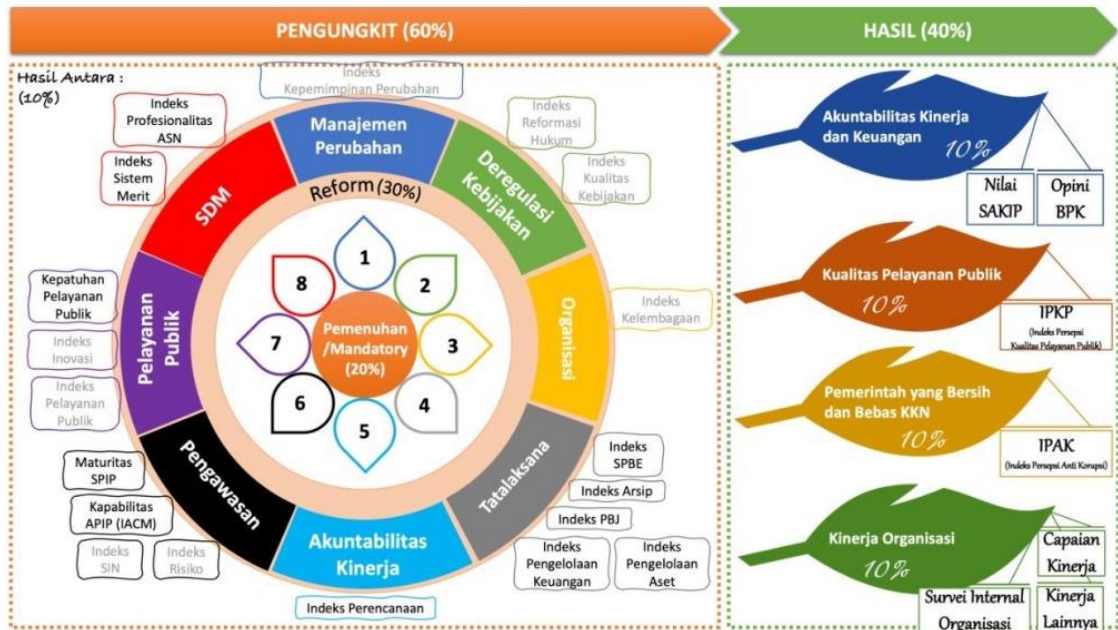
Tabel 2.147. Kinerja Bidang Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa, Persentase ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kondisi baik mampu mencapai 100%. Fungsi Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilakukan oleh Sekretariat Daerah mencakup empat puluh dua perangkat daerah lembaga teknis, dinas daerah, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Kecamatan.

Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo memiliki tuntutan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, diharapkan adanya peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Gambar di bawah ini merupakan unsur-unsur reformasi birokrasi untuk menghasilkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.



Gambar 2.34. Unsur-Unsur Reformasi Birokrasi

Sumber: Permenpanrb No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indek Profesionalitas ASN (penataan manajemen SDM) dan Indeks Pelayanan Publik (peningkatan kualitas pelayanan publik) merupakan dua dari delapan komponen Aspek Reform yang memiliki kontribusi sebesar 30% terhadap reformasi birokrasi. Selanjutnya, tabel berikut menggambarkan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Purworejo, terutama dalam mencapai reformasi birokrasi dalam aspek tersebut.

Tabel 2.148. Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun			Keterangan
	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5
Indeks Reformasi Birkorasi	-	62,83	(dalam proses perhitungan)	Nilai tertinggi: 100,00
Indeks Profesionalitas ASN	50,0	53,8	79,7	Nilai tertinggi: 100,0
Indeks Pelayanan Publik	3,18	4,14	4,09	Nilai tertinggi: 5,00
Indeks Inovasi Daerah	1.526 (sangat inovatif)	3.110 (sangat inovatif)	1.411 (sangat inovatif)	Nilai tertinggi: >1.000

Sumber: Sekretariat Daerah, BKD, & Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

Kabupaten Purworejo saat ini sedang dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020. Sebelumnya di tahun 2019, Kabupaten Purworejo memiliki nilai 62,83 (B), cukup baik dalam



penerapan reformasi birokrasi, bersifat formal dan secara substansial belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Sementara itu di tahun 2020, terjadi sedikit penurunan Indeks Pelayanan Publik, menurun sebesar 0,05 dari tahun 2019, menjadi sebesar 4,09 di tahun 2020. Meskipun masih tergolong sangat baik, Kabupaten Purworejo masih terus perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat serta pelayanan sesuai standar. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, penerapan sistem inovasi diperlukan, sehingga program dan kegiatan yang dijalankan memiliki daya ungkit yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terbagi menjadi dua jenis: inovasi digital dan inovasi non digital, yang bersifat inovasi dalam tata kelola pemerintahan, inovasi dalam pelayanan publik, ataupun inovasi bentuk lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tiga tahun terakhir, Kabupaten Purworejo memiliki predikat sangat inovatif. Meskipun demikian, apabila dilihat dari nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) setiap tahunnya, terdapat penurunan nilai pada tahun 2020 di Kabupaten Purworejo. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator penilaian indeks inovasi pada tahun 2019 (21 indikator penilaian) dan tahun 2020 (14 indikator penilaian) sehingga mempengaruhi perbedaan total nilai meskipun masih berada pada kategori yang sama. Hal ini disikapi dengan pembakuan indikator penilaian yang akan dimulai pada tahun 2021, baik pada jumlah indikator maupun pada kategori inovasi yang akan dicapai sehingga peningkatan IID Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2026 dapat dijelaskan secara lebih valid karena memiliki indikator penilaian yang sama.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sebesar 79,7 (sedang). Pada tabel di bawah ini dapat diamati bahwa peningkatan di tahun terakhir (2020) terdapat pada dimensi kompetensi dan kinerja. Sementara itu dimensi disiplin telah mencapai nilai tertinggi dalam kurun tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih dapat/



perlu ditingkatkan, baik dalam dimensi kualifikasi, kompetensi, maupun kinerjanya.

Tabel 2.149. Penjabaran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Jumlah
1	2	3	4	5	6
2018	12	20	13	5	50
2019	12	23.8	13	5	53.8
2020	12.7	37.1	24.9	5	79.7

Keterangan:

- Dimensi Kualifikasi kisaran nilai 12-12,7 dari maksimal nilai 25
- Dimensi Kompetensi kisaran nilai 20-37,1 dari maksimal nilai 40
- Dimensi Kinerja kisaran nilai 13-24,9 dari maksimal nilai 30
- Dimensi Disiplin mendapat nilai 5 dari maksimal nilai 5

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Secara menyeluruh, langkah strategis diperlukan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis. Hal ini menjadikan birokrasi pemerintahan perlu langkah cepat untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

33) Sekretariat DPRD

Fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi budgeting, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan fungsi pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Sampai dengan tahun 2020 dukungan fungsi DPRD adalah untuk menjamin 3 (tiga) fungsi tersebut tepat waktu tercapai 100%. Jumlah anggota DPRD masa bakti 2019-2024 adalah 45 orang, dengan komposisi 6 orang wanita dan 39 pria.

34) Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan



kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu. Hal tersebut mencakup tiga (3) hal yaitu akuntabilitas tingkat kabupaten dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan ditingkat Kabupaten dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah.

Tabel 2.150. Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100,00%	96,00%	100,00%	98,69%	99,97%
1	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

Untuk menjamin terciptanya perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik. Ketersediaan dokumen perencanaan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.151. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo

No	Jenis Dokumen	Tersedia/ Tidak Tersedia	Nama Dokumen
1	RPJPD	Tersedia	Perda No.3 Tahun 2010
2	RPJMD	Tersedia	Perda No.12 Tahun 2016
3	RKPD	Tersedia	Perbup No.9 Tahun 2015 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2016
4	RKPD	Tersedia	Perbup No.19 Tahun 2016 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2017
5	RKPD	Tersedia	Perbup No.42 Tahun 2017 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2018
6	RKPD	Tersedia	Perbup No. 42 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Tahun 2019
7	RKPD	Tersedia	Perbup No. 21 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Tahun 2020
8	RKPD	Tersedia	Perbup No. 42 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Tahun 2021

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2020



35) Keuangan

Pemerintah Kabupaten Purworejo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali kedelapan berturut-turut sejak 2012. WTP adalah opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.152. Kinerja Keuangan Daerah Dari Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, 2021

Adapun target dan realisasi makro capaian pendapatan asli daerah tahun 2016 sampai 2020, sebagaimana tabel berikut ini (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.153. Target dan Realisasi PAD dari Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	2016	201.409	255.460
2	2017	237.664	298.606
3	2018	278.952	286.969
4	2019	294.467	280.396
5	2020	261.999	304.779

Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, 2021

PAD Kabupaten Purworejo mengami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, PAD mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp 298.606.494.653 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 255.599.240.424.00. Sempat menurun hingga tahun 2019, PAD Kabupaten Purworejo kembali naik di tahun 2020. Rp304.779.565.558,00 merupakan PAD tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pandemi Covid-19 memang berdampak terhadap PAD, namun adanya bandara YIA memiliki dampak



cukup besar dalam pendapatan yang diterima Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.154. Komponen PAD dari Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

No	Uraian Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Pajak Daerah	42.380	53.417	68.815	77.649	74.599
2	Hasil Retribusi Daerah	10.662	11.731	12.868	14.850	12.207
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.380	22.586	10.259	13.686	14.953
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196.037	210.872	195.027	174.211	203.020
	Jumlah	255.460	298.606	286.969	280.396	304.779

Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, 2021

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD nampak pada tabel berikut.

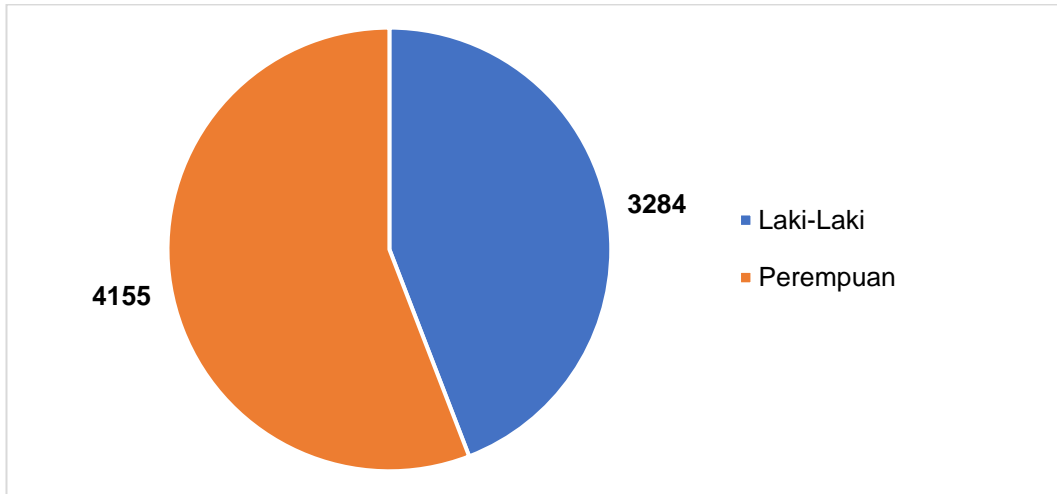
Tabel 2.155. Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari Tahun 2016-2020

Tahun	Waktu Penetapan	Realisasi
1	2	3
2016	30 Desember 2015	tepat waktu
2017	22 Desember 2016	tepat waktu
2018	27 Desember 2017	tepat waktu
2019	21 Desember 2018	tepat waktu
2020	18 Desember 2019	Tepat waktu

Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, 2020

36) Kepegawaian

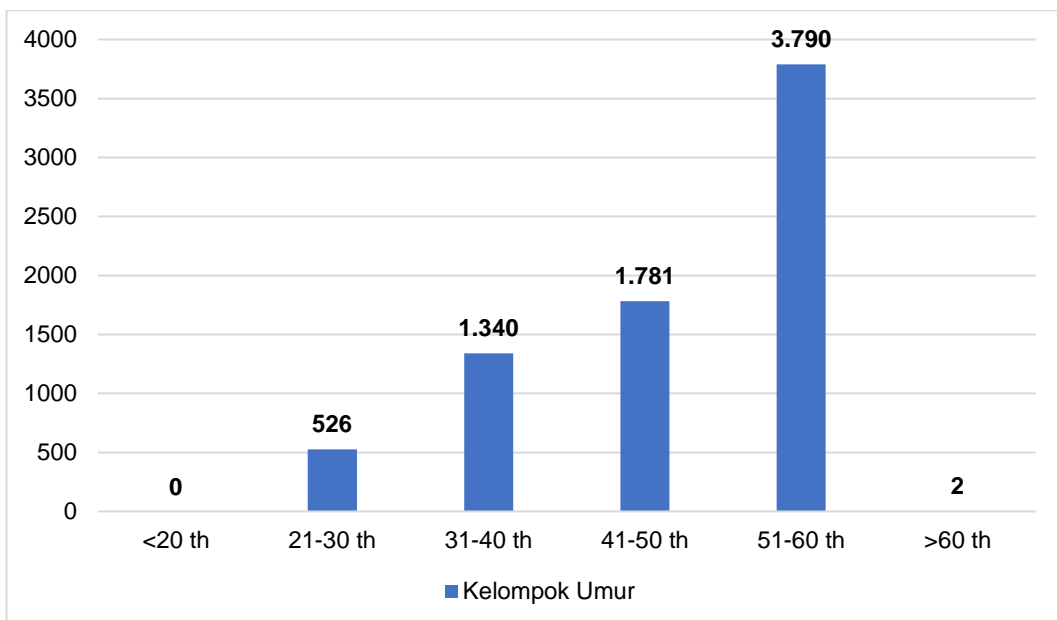
Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki ASN sejumlah 7.439. lebih dari tujuh ribu ASN ini, laki-laki memiliki proporsi 44%, lebih kecil dari ASN perempuan sejumlah 4.155 atau 56%. Lebih lanjut hal ini dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.35. Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Gambar di bawah ini menjelaskan mengenai proporsi ASN berdasarkan kelompok umur. ASN di Kabupaten Purworejo saat ini didominasi oleh kelompok umur 51-60 tahun, sejumlah 3.790 orang atau sebesar 51%. Kondisi ini memerlukan perencanaan SDM yang baik ke depan supaya pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.



Gambar 2.36. Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Kelompok Umur

(Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021)

Gambaran umum mengenai kondisi sumber daya aparatur di Kabupaten Purworejo sebagai pelayan publik berdasarkan latar belakang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.156. Gambaran Umum Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2021

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (ASN)	Proporsi (%)
1	2	3	4
1	Pendidikan	3.414	45,89%
2	Kesehatan	1.133	15,23%
3	Manajemen	334	4,49%
4	Administrasi Negara	147	1,98%
5	Akuntansi	133	1,79%
6	Ilmu Pemerintahan	110	1,48%
7	Pertanian	86	1,16%
8	Manajemen SDM	80	1,08%
9	Ekonomi	70	0,94%
10	Teknik Informatika	61	0,82%
11	Teknik Sipil	55	0,74%
12	Hukum	50	0,67%
13	Manajemen Informatika	50	0,67%
14	D1 ke atas lainnya	564	7,58%
15	SMA/ SMK	979	13,16%
16	SMP	126	1,69%
17	SD	47	0,63%
Total		7.439	100,00%

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Kabupaten Purworejo memiliki ASN sebanyak 7.439 yang didominasi oleh latar belakang pendidikan (45,89%), kesehatan (15,23%), SMA/ SMK (13,16%), serta D1 ke atas lainnya (7,58%). Latar belakang pendidikan dan kesehatan diperlukan untuk menunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purworejo. Beberapa latar belakang lain yang memiliki potensi untuk dimaksimalkan di Kabupaten Purworejo antara lain ASN berlatar belakang manajemen (4,49%), administrasi negara (1,98%), akuntansi (1,79%), ilmu pemerintahan (1,48%), pertanian (1,16%), manajemen SDM (1,08%), serta ekonomi, teknik informatika, teknik sipil, hukum, dan manajemen informatika. ASN yang masih berlatar belakang SMA/ SMK, SMP, serta SD diharapkan dapat menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di pemerintahan Kabupaten Purworejo.

Kepegawaian termasuk dalam bagian unsur penunjang urusan pemerintahan yang memiliki 6 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut:

**Tabel 2.157. Persentase Aparat yang Memiliki Kapasitas Sesuai Standard**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Aparat yang Memiliki Kapasitas Sesuai Standard	92,10%	94,88%	93,25%	92,91%	88,70%

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Aparat yang memiliki kapasitas sesuai standar didefinisikan sebagai aparat pemerintah baik JPT, administrator, maupun fungsional sudah memenuhi kualifikasi teknis maupun fungsional yang dipersyaratkan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standar di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi dengan capaian paling rendah pada tahun 2020.

Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran karena pandemi Covid-19 sehingga terdapat penundaan dan pembatalan sebagian agenda diklat dan pelatihan. Dengan demikian, banyak terdapat pejabat (JPT, administrasi, dan fungsional) yang belum mengikuti diklat/ pelatihan kepemimpinan dan atau teknis fungsional sesuai dengan kompetensinya. Di sisi lain dengan adanya Pilkada Serentak menyebabkan adanya transisi Kepala Daerah sehingga berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 poin 1b, Bupati/ Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat mulai 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Selain itu, kuota jumlah rekrutmen CPNS pada periode ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun.

Tabel 2.158. Persentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi	88,54%	87,37%	89,92%	92,91%	84,80%

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

**Tabel 2.159. Persentase Pegawai yang Telah Lulus Diklat Prajabatan**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Persentase pegawai (CPNS) yang telah lulus diklat prajabatan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2016 hingga 2020 telah menunjukkan capaian sebesar 100%. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya kebijakan yang menyebutkan tentang pelaksanaan diklat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan daerah.

Tabel 2.160. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Diperkirakan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan	92,10%	94,88%	93,25%	92,91%	88,70%

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan terbesar pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya agenda diklat yang ditunda dan dibatalkan sehingga banyak pejabat yang belum melaksanakan diklat.

Tabel 2.161. Tingkat Disiplin Pegawai

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat Disiplin Pegawai (%)	98,13	99,00	98,36	98,57	98,82

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Tingkat disiplin pegawai dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu persentase kasus yang tertangani, persentase PNS yang tidak terkena kasus/tidak melanggar disiplin, serta persentase jumlah Perangkat Daerah yang tidak terdapat pelanggaran disiplin. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat disiplin



pegawai Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi yang tidak terlalu besar dan capaian tertinggi ada pada tahun 2020.

Tabel 2.162. Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian (%)	106,51	97,45	100,00	100,00	100,00

Sumber: BKD Kabupaten Purworejo, 2021

Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang meliputi pensiun, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kartu taspen, inpassing pejabat/kenaikan gaji berkala, satya lencana, serta ujian dinas di Kabupaten Purworejo telah menunjukkan capaian sebesar 100% mulai tahun 2018 hingga 2020.

37) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka upaya pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo baik sumber daya aparatur maupun sumber daya masyarakat, diperlukan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan bidang urusannya. Sebagai gambaran, berikut merupakan tabel realisasi anggaran pengembangan sumber daya manusia dalam 3 (tiga) tahun terakhir serta rasio perbandingan anggaran pengembangan sumber daya manusia dengan belanja daerah.

Tabel 2.163. Realisasi Pengembangan SDM Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Aktivitas	Anggaran Pengembangan SDM (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4	5
2018	60	6.892.475.622	2.125.880.557.581	0,32%
2019	49	12.198.446.533	2.186.305.448.197	0,56%
2020	27	3.226.682.627	2.126.472.056.535	0,15%

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, 2021

Terdapat fluktuasi jumlah aktivitas dan anggaran pengembangan SDM di tiga tahun terakhir. Tahun 2018 merupakan tahun dengan aktivitas pengembangan SDM terbanyak (60 jenis). Menggunakan anggaran sebesar 6,9 miliar, di tahun 2018 pengembangan SDM Kabupaten Purworejo memiliki porsi 0,32% terhadap belanja total daerah. Di tahun selanjutnya (2019), terdapat kenaikan anggaran hampir dua kali lipat (12,2 miliar)



namun jumlah aktivitasnya menurun (49 jenis). Hal ini disebabkan karena di tahun 2019, anggaran pengembangan SDM difokuskan pada Pelatihan Dasar CPNS pengadaan tahun 2018. Kondisi di tahun terakhir (2020) menunjukkan semakin berkurangnya aktivitas (27 jenis) maupun anggaran (3,2 miliar) untuk pengembangan SDM. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran difokuskan untuk *survive* dalam hal kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi. Dengan masih berlangsungnya pandemi, program-program pengembangan SDM perlu memperhatikan ketiga jalur yang ada: klasikal, non-klasikal, maupun *blended learning*. Secara umum pengembangan SDM secara daring akan menjangkau lebih banyak peserta dengan protokol kesehatan yang lebih dapat dikendalikan.

38) Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan termasuk dalam bagian urusan penunjang yang memiliki 2 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016-2020 yang tergambar sebagai berikut.

Tabel 2.164. Persentase Penguatan SIDA

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penguatan SIDA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

Persentase penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) dihitung dengan membandingkan jumlah inovasi yang difasilitasi dengan jumlah keseluruhan inovasi yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian persentase penguatan SIDA di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 hingga 2020 sudah mencapai 100% setiap tahunnya yang berarti seluruh inovasi yang ada telah difasilitasi.

Tabel 2.165. Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase cakupan penelitian pengembangan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 hingga 2020 sudah mencapai target sebesar 100%.

Sampai dengan tahun 2020 pencapaian SIDA pada tahap penguatan kelembagaan yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya inovasi di masyarakat maupun di perangkat daerah. Lomba kreativitas dan inovasi (Krenova) untuk menggali kreativitas dan inovasi masyarakat yang dapat diterapkan di daerah guna peningkatan pendapatan masyarakat.



Gambar 2.37. Pemberian hadiah kepada Juara Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Briket Kokawa dari Purworejo)



Gambar 2.38. Kegiatan Krenova Kabupaten Purworejo

Pemerintah Kabupaten Purworejo memprakarsai pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam Perbup No. 1 Tahun 2019. DRD adalah Lembaga non struktural yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 2.39. Pengukuhan Dewan Risert Daerah Kabupaten Purworejo



Gambar 2.40. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian

39) Inspektorat Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi dinilai dengan tingkat maturitas. Tingkat maturitas SPIP diukur dengan melakukan self-assessment atas maturitas SPIP dengan beberapa parameter sebagai dasar yang selanjutnya sebagai dasar dilakukan Quality Assurance (QA).



Tingkat Maturitas (kematangan) penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah, diukur meliputi lima (5) unsur yaitu:

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian resiko
- c) Aktivitas pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian internal

Tingkat maturitas Kabupaten Purworejo tahun 2017-2019 berada pada level 3,023, naik dibandingkan tahun 2016 pada angka 1,360. Hal ini dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.166. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Maturitas SPIP	1,360	3,023	3,023	3,023	3,023

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2021

Tingkat maturitas pada level 3 menunjukkan bahwa Pemda telah melaksanakan pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pengawasan intern sepanjang tahun 2016-2020 telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap kinerja Desa dan OPD yang terdiri atas:

- a. Audit (kinerja, audit dengan tujuan lain)
- b. Review (Laporan kinerja Pemerintahan Daerah/LKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
- c. Evaluasi (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah/EKPPD).
- d. Pemantauan (monitoring, pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan) dan
- e. Pengawasan lainnya.



40) Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat partisipasi pemilih masyarakat Purworejo dalam pilkada dan pileg mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 61,72% dan tahun 2020 sebesar 70,32%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Purworejo yang didukung dengan kegiatan Pendidikan Politik Bagi Warga Negara. Sementara itu Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi sebesar 77,22 (tahun 2019, selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2016. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.167. Capaian Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (PILPRES, PILEG, PILKADA)	61,72%	61,72%	67,51%	76,80%	70,32%
2	Indeks Demokrasi Indonesia (Prov. Jawa Tengah)	66,71	70,85	72,17	77,22	

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Purworejo, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Daya saing daerah dapat dijelaskan pada fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

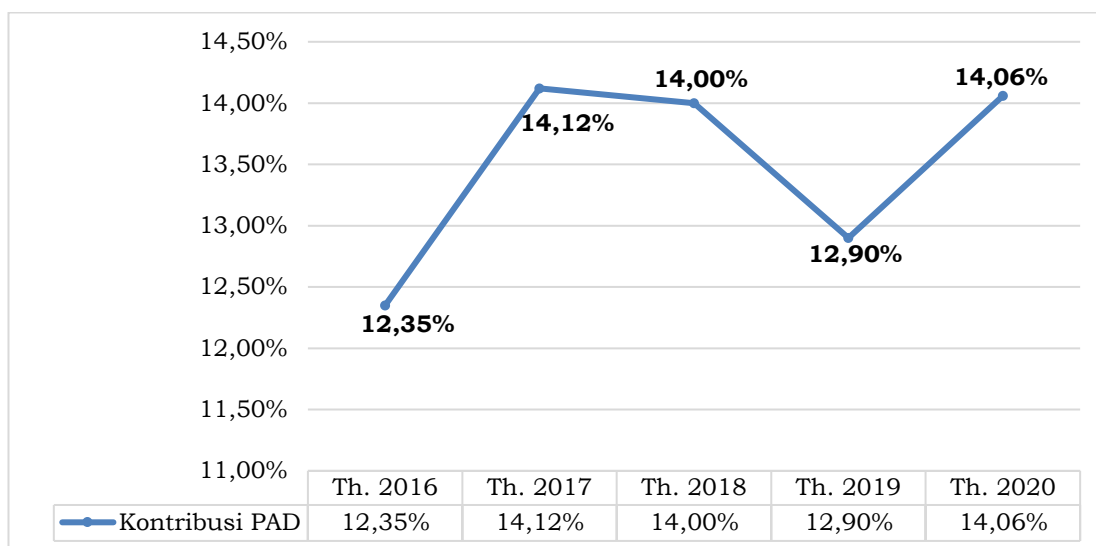
Kemampuan ekonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tanggaya. Kabupaten Purworejo membiayai urusan dari beberapa sumber pendapatan: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. PAD Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sebesar Rp 304.779.565.558, naik 2.15% dari tahun sebelumnya. PAD tahun 2020 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, meskipun terjadi pandemi Covid-19. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2.168. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
2016	Rp 255.599.240.424	Rp 2.069.000.842.574	12,35%
2017	Rp 298.606.494.653	Rp 2.114.807.792.154	14,12%
2018	Rp 286.971.121.793	Rp 2.049.783.717.823	14,00%
2019	Rp 280.396.487.190	Rp 2.172.437.256.704	12,91%
2020	Rp 304.779.565.558	Rp 2.167.260.086.741	14,06%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, 2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 memiliki kontribusi 14,06% terhadap pendapatan daerah. Dari sisi pendapatan daerah, terdapat penurunan di tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tertinggi sejak tahun 2016. Dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2016 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan yang terendah dari lima tahun terakhir (12,35%). Perkembangan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal ini dapat diamati pada gambar berikut.

**Gambar 2.41. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, 2021

2) Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Data kondisi fasilitas wilayah/ infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020, sebagaimana tabel berikut ini.



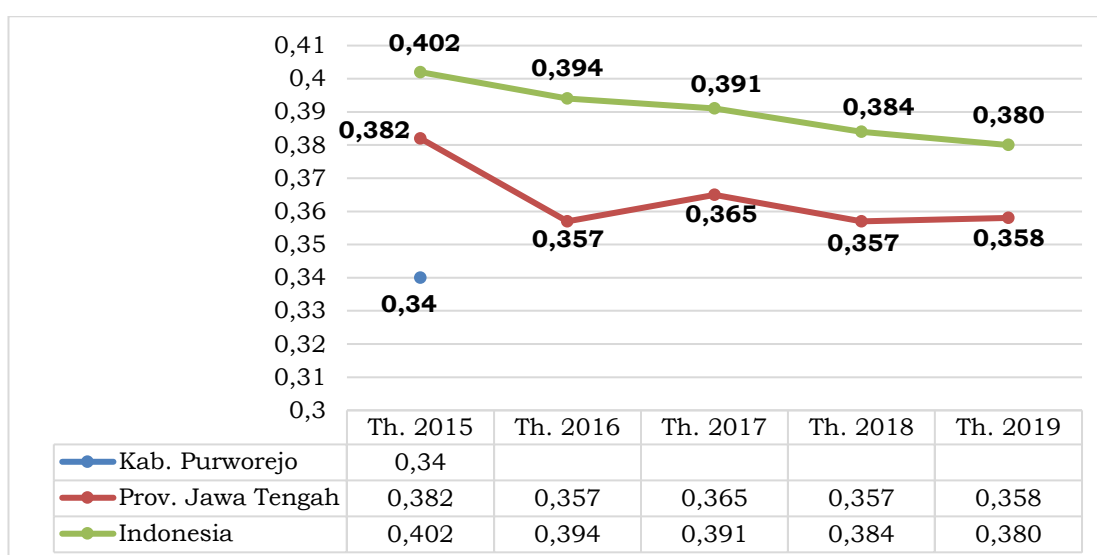
Tabel 2.169. Kondisi Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Kondisi Baik-Sedang (km)	432,67	555,44	588,15	607,28	606,89
2	Jalan Kondisi Rusak (km)	245,23	111,21	95,5	86,74	101,60
3	Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	91,35	102,5	85,6	75,23	60,765
4	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	52%	52%	52%	69%	69%
	a. Jumlah jaringan jalan yang telah terlayani angkutan umum	119	119	119	98	98
	b. Jumlah jaringan jalan yang seharusnya dilayani angkutan umum	229	229	229	143	143

Sumber: Data Dasar Pembangunan Kabupaten Purworejo, 2021

3) Fokus Iklim Berinvestasi

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia dapat diukur dengan koefisien gini (*gini ratio*). Koefisien gini merupakan salah satu indikator makro Kabupaten Purworejo yang terdapat pada dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021. Koefisien ini dapat digunakan untuk mengetahui iklim berinvestasi di Kabupaten Purworejo.



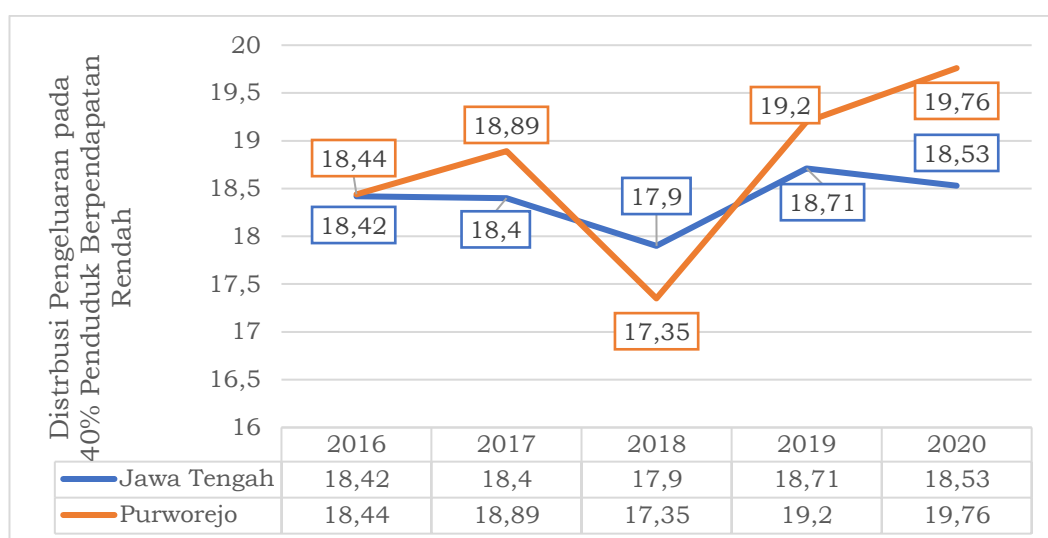
Gambar 2.42. Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2015 – 2019

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2016 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020



Gambar di atas menunjukkan koefisien gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia pada rentang tahun 2015 – 2019. Mulai tahun 2016, BPS tidak lagi mengukur kondisi ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Purworejo. Terakhir, koefisien gini Kabupaten Purworejo sebesar 0,34 (tahun 2015). Melihat di lingkup provinsi dan nasional, ditunjukkan bahwa koefisien gini Provinsi Jawa Tengah selalu berada di bawah koefisien Indonesia. Di tahun 2019, koefisien gini Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,358 sementara Indonesia sebesar 0,380.

Meskipun BPS tidak lagi mengukur koefisien gini pada tingkat kabupaten dan kota, namun BPS menghitung distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia. Distribusi pengeluaran tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan dengan mengelompokkan penduduk dalam tiga kelompok yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur melalui persentase pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Jika hasilnya dibawah 12% menunjukkan ketimpangan tinggi, 12%-17% menunjukkan ketimpangan sedang, dan diatas 17% menunjukkan ketimpangan rendah. Berikut distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia di Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah:



Gambar 2.43. Distribusi Pengeluaran Pada Penduduk 40% Pendapatan Terendah Kabupaten Purworejo Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

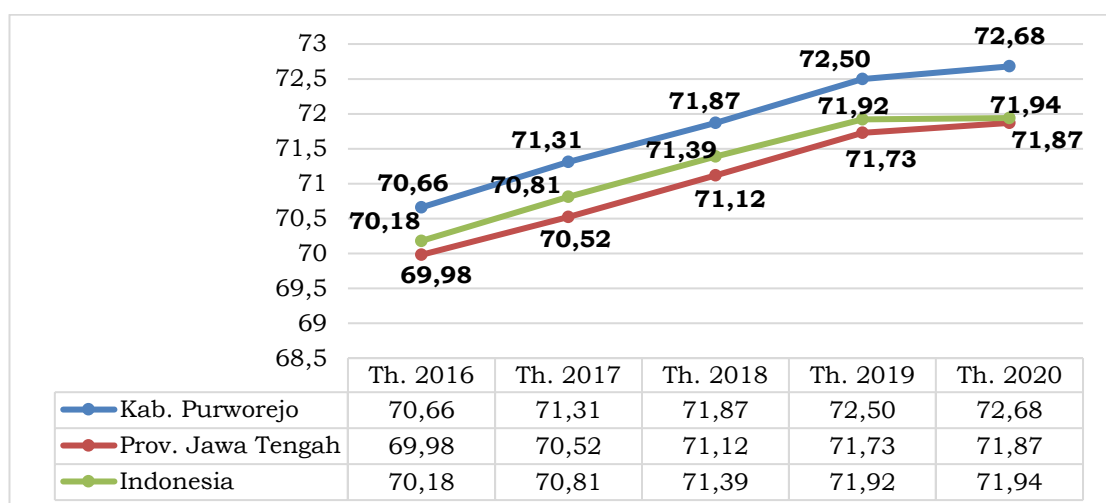


Berdasarkan data di atas, dari tahun 2016-2020 penduduk 40% dengan pendapatan rendah di Kabupaten Purworejo berada pada angka diatas 17% yang dapat diinterpretasikan bahwa Kabupaten Purworejo berada pada tingkat ketimpangan rendah. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2016-2020 secara umum lebih baik dibandingkan dengan total Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 18,89 menjadi 17,35. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 19,76, sedangkan Provinsi Jawa Tengah menurun menjadi 18,53.

4) Fokus Sumber Daya Manusia

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur umur panjang dan hidup sehat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan tingkat pendidikan, sementara pengeluaran per kapita untuk mengukur standar hidup layak.



Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020

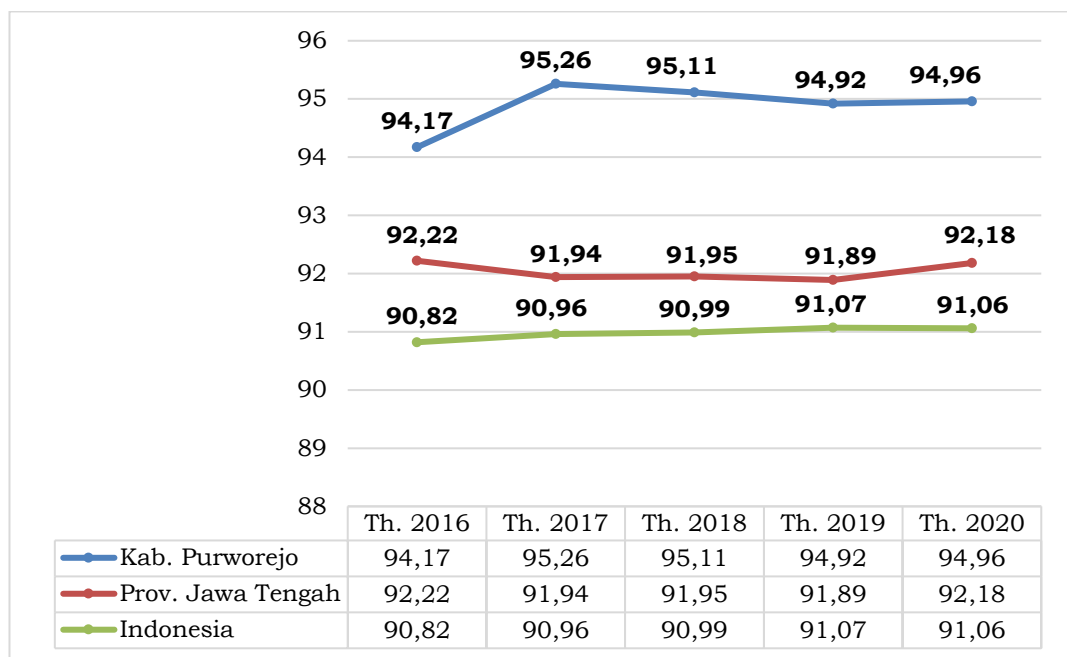
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar di atas menunjukkan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. Di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, IPM selalu mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Angka IPM Provinsi Jawa Tengah selalu berada di garis IPM nasional. Meskipun demikian di tingkat kabupaten, ternyata IPM Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka nasional. Terakhir pada tahun 2020, angka IPM Kabupaten Purworejo sebesar 72,68, berada di atas Indonesia (71,94) dan Provinsi Jawa Tengah (71,87). Adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perkembangan angka IPM. Di tahun terakhir, meskipun tidak menurun, terlihat pada grafik bahwasanya perkembangan IPM melambat, baik skala kabupaten, provinsi, maupun nasional.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dengan ukuran yang terpisah ini, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.



Gambar 2.45. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

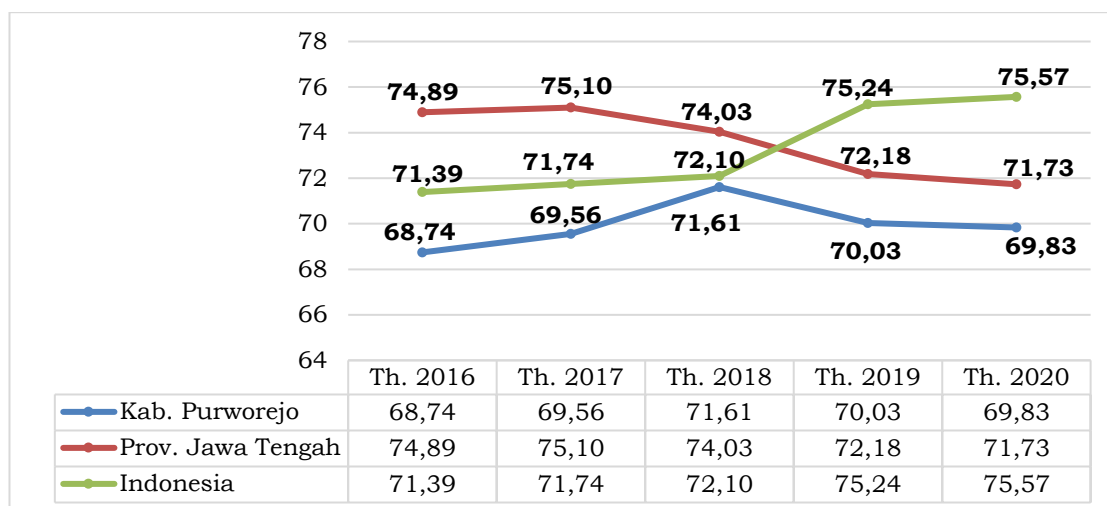
Gambar di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo, Provinsi, dan Indonesia pada rentang



tahun 2016 sampai 2020. Dapat diamati bahwa terjadi fluktuasi IPG baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan IPG signifikan di tahun 2017 (94,17 di tahun 2016 menjadi 95,26 di tahun 2017, namun sedikit menurun di tahun 2018 (95,11) dan tahun 2019 (94,92), kemudian naik kembali di tahun 2020 (94,96). Selaras dengan kondisi IPM, IPG Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka provinsi dan nasional. Sementara itu, berbeda dengan angka IPM, IPG Provinsi Jawa Tengah selalu berada di atas angka nasional.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berbeda dengan IPM dan IPG, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purworejo selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. Di tahun terakhir (2020, IDG Kabupaten Purworejo sebesar 69,83, lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (71,73) dan Indonesia (75,57). Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan yang positif hingga tahun 2018, namun kembali menurun di tahun 2019 hingga tahun 2020. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah yang IDG-nya selalu lebih tinggi dari nasional sampai tahun 2018, terjadi penurunan signifikan, menjadi 71,73. Berbeda di tingkat nasional, angka IDG naik signifikan menjadi 75,57 di tahun 2019. Hal ini dapat diamati pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.46. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020

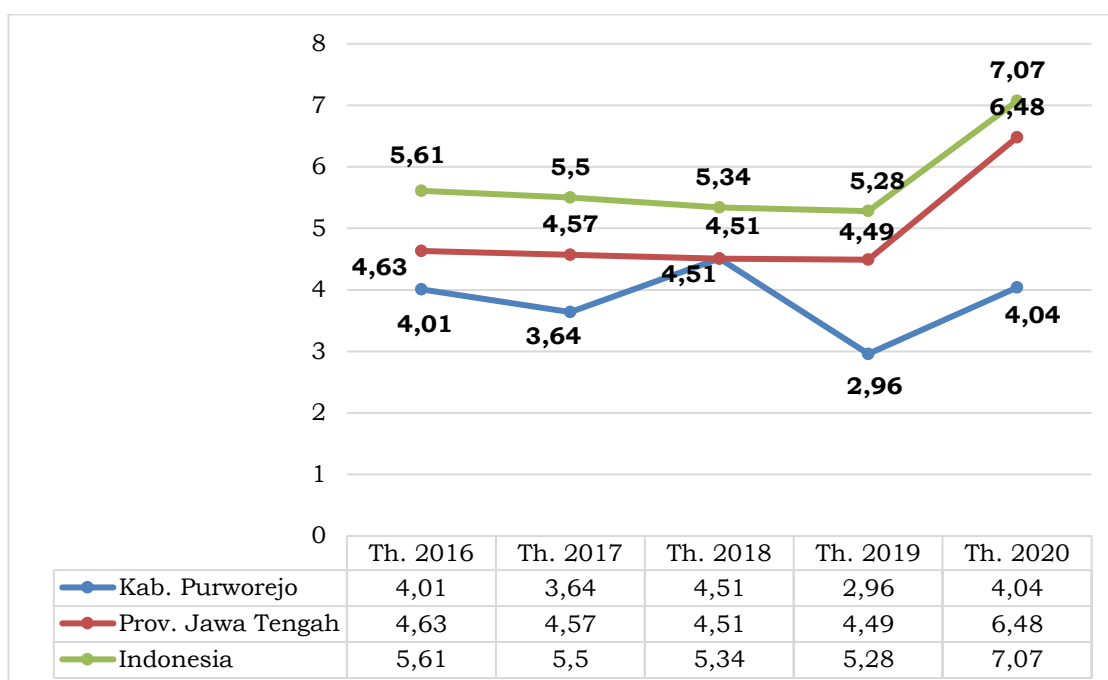
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Purworejo selama periode 2016 – 2020 relatif selalu lebih rendah dari angka di tingkat provinsi dan nasional. Angka TPT Kabupaten Purworejo mengalami kondisi paling rendah di tahun terakhir (2019, sebesar 2,96%, dan tertinggi di tahun tahun 2018 (4,51%).

Terakhir di tahun 2020, TPT Kabupaten Purworejo naik menjadi 4,04%, namun tidak lebih tinggi dari tahun 2018. Adanya pandemi Covid-19 tidak begitu memberikan dampak terhadap angka TPT di Kabupaten Purworejo karena masyarakat dominan bekerja di sektor pertanian. Kondisi capaian tersebut mendukung pada capaian indikator TPB nomor 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah TPT-nya naik hingga 6,48% dan Indonesia 7,07%, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, perkembangan TPT Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia dapat diamati pada gambar berikut ini.



Gambar 2.47. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pada subbab ini, disajikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Masing-masing indikator kinerja pembangunan daerah memiliki target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.



Tabel 2.170. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15%	5,27%	5,33%	5,44%	-1,66%	4,5 - 5%	-36,8%	Belum tercapai
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,09%	1,05%	2,26%	0,85%	-0,10%	4,94%	-2,1%	Belum tercapai
1.1.3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,79%	5,35%	5,64%	6,22%	-4,36%	7,47%	-58,4%	Belum tercapai
1.1.4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	5,11%	5,15%	4,93%	6,18%	0,57%	6,51%	8,8%	Belum tercapai
1.1.5.	Kemiskinan	%	13,91%	13,81%	11,67%	11,45%	11,78%	8,7 - 9,2%	72,0%	Belum tercapai
1.1.6.	IPM	-	70,66	71,31	71,87	72,50	72,68	73,69	98,6%	Akan tercapai
1.1.7.	Gini Ratio	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.
1.1.8.	Indeks Williamson	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.
1.1.9.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	105,3%	Melampaui
1.1.10.	Persentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	12,35%	14,12%	14,00%	12,91%	14,27%	15,30%	93,3%	Akan tercapai
1.1.11.	Opini Hasil Audit BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,0%	Sesuai
1.2.	Kesejahteraan Sosial									
1.2.1.	Pendidikan									
1.2.1.1.	Persentase Angka Buta Huruf (Penurunan)	%	0,258%	0,260%	0,237%	0,233%	0,254%	0,175%	54,7%	Belum tercapai
1.2.1.2.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,66	7,69	7,7	7,91	8,12	7,10	114,4%	Melampaui
1.2.1.3.	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,05	13,47	13,48	13,49	13,50	14,10	95,7%	Akan tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.2.	Kesehatan									
1.2.2.1.	Usia Harapan Hidup	tahun	74,14	74,26	74,4	74,4	74,51	74,40	100,1%	Melampaui
1.2.2.2.	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,05%	0,04%	0,03%	0,06%	0,07%	0,05%	60,0%	Belum tercapai
1.2.2.3.	Persentase Desa Siaga Aktif :									
	- Mandiri	%	7,09%	8,91%	16,40%	23,48%	23,48%	23,00%	102,1%	Melampaui
	- Purnama	%	35,83%	35,65%	38,06%	35,43%	35,43%	45,00%	79,8%	Belum tercapai
	- Madya	%	57,09%	44,68%	45,55%	41,09%	41,09%	22,00%	100,0%	Sesuai
	- Pratama	%	0,00%	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,0%	Sesuai
1.2.3.	Sosial									
1.2.3.1.	Persentase Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses Terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
1.2.4.	Tenaga Kerja									
1.2.4.1.	TPT	%	4,01%	3,64%	4,51%	2,96%	4,04%	3,50%	84,6%	Belum tercapai
1.2.4.2.	Persentase Cakupan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
1.2.4.	Pangan									
1.2.4.1.	Skor Pola Pangan Harapan	%	85,50%	85,70%	85,70%	85,80%	85,90%	85,90%	100,0%	Sesuai
1.2.4.2.	Desa Rawan / Rentan Pangan yang Ditangani	desa	0 desa	11 desa	9 desa	6 desa	13 desa	12 desa	97,5%	Akan tercapai
1.2.5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1.2.5.1.	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	66,10%	66,10%	66,74%	96,80%	99,15%	66,31%	149,5%	Melampaui
1.2.5.2.	Persentase Desa Berkembang	%	22,39%	22,39%	21,75%	2,77%	0,43%	27,29%	100,0%	Sesuai
1.2.5.3.	Persentase Desa Kurang Berkembang	%	11,51%	11,51%	11,51%	0,43%	0,43%	6,40%	100,0%	Sesuai
1.2.5.4.	Persentase Kawasan Perdesaan Yang Tertangani	%	0,00%	81,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
1.2.6.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
1.2.6.1.	Presentase Pertumbuhan Koperasi (Baru, Aktif, Sehat)	%	81,9%	89,8%	89,8%	88,3%	61,5%	84,5%	72,8%	Belum tercapai
1.2.7.	Pariwisata									



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.7.1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	70%	70%	4%	33%	-66%	20,00%	-331,6%	Belum tercapai
1.2.8.	Pertanian									
1.2.8.1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	angka	103,58	105,28	100,66	102,95	n.a	105,87	97,2%	Akan tercapai
1.2.9.	Perindustrian									
1.2.9.1.	Subsistem Agroinput dan Agroonfarm	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
1.2.9.2.	Subsistem Agroprosesing dan Agromarketing	%	42,86%	42,86%	100,00%	83,33%	100,00%	75,00%	133,3%	Melampaui
2)	PELAYANAN UMUM									
2.1.	Pelayanan Urusan Wajib Dasar									
2.1.1.	Pendidikan									
2.1.1.1.	Cakupan Wilayah Penerapan e-Learning di Tingkat SD	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.2.	Cakupan Wilayah penerapan e-Learning di Tingkat SMP	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.3.	APK PAUD 3-6 tahun	%	58,60%	68,35%	60,92%	68,32%	62,63%	56,40%	111,1%	Melampaui
2.1.1.4.	APK PAUD 0-6 tahun	%	26,05%	30,51%	27,78%	31,00%	29,53%	33,60%	87,9%	Belum tercapai
2.1.1.5.	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.6.	Persentase Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.7.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran PAUD	%	30,00%	37,00%	34,81%	36,00%	40,02%	48,20%	83,0%	Belum tercapai
2.1.1.8.	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	50,00%	44,33%	112,8%	Melampaui
2.1.1.9.	APK SD/ SDLB-/MI/ Paket A	%	92,92%	101,54%	107,25%	104,30%	96,65%	100,00%	96,7%	Akan tercapai
2.1.1.10.	APM SD/ SDLB /MI/ Paket A	%	81,57%	90,23%	90,79%	96,92%	93,01%	87,88%	105,8%	Melampaui
2.1.1.11.	APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	%	78,12%	98,46%	102,19%	103,12%	96,19%	100,00%	96,2%	Akan tercapai
2.1.1.12.	APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	%	58,72%	77,67%	96,38%	82,40%	83,33%	78,09%	106,7%	Melampaui
2.1.1.13.	Tersedia Satuan Pendidikan Dalam Jarak Yang Terjangkau Dengan Berjalan Kaki Yaitu Mak-Simal 3 Km Untuk Sd Dan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6 Km Untuk Smp Dari Kelompok Permukiman Permanen Di Daerah Terpencil									
2.1.1.14.	Di Setiap Sd Dan Smp Tersedia Satu Ruang Guru Yang Dilengkapi Dengan Meja Dan Kursi Untuk Setiap Orang Guru, Kepala Sekolah Dan Staf Kependidikan Lainnya; Dan Di Setiap Smp Tersedia Ruang Kepala Sekolah Yang Terpisah Dari Ruang Guru.	%	97,00%	97,00%	97,40%	54,87%	92,97%	52,11%	178,4%	Melampaui
2.1.1.15.	Persentase Ruang Kelas Sd Sesuai Standar Nasional Pendidikan Dan Memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	%	90,74%	92,78%	92,78%	86,90%	99,49%	92,06%	108,1%	Melampaui
2.1.1.16.	Persentase Ruang Kelas Smp Sesuai Standar Nasional Pendidikan Dan Memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	%	90,97%	94,18%	94,18%	82,94%	100,00%	96,25%	103,9%	Melampaui
2.1.1.17.	Persentase SD Yang Memiliki Perpustakaan	%	74,67%	75,81%	75,81%	96,19%	76,97%	91,28%	84,3%	Belum tercapai
2.1.1.18.	Persentase SMP Yang Memiliki Laboratorium Penunjang	%	70,00%	70,00%	70,00%	74,73%	82,61%	83,86%	98,5%	Akan tercapai
2.1.1.19.	Persentase SD Yang Memiliki Sanitasi Layak	%	99%	85%	85%	72%	94%	100%	93,7%	Akan tercapai
2.1.1.20.	Persentase SMP Yang Memiliki Sanitasi Layak	%	100%	100%	100%	73%	91%	100%	91,3%	Akan tercapai
2.1.1.21.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran SD/SMP	%	94,00%	98,00%	98,00%	85,85%	73,27%	87,00%	84,2%	Belum tercapai
2.1.1.22.	Angka Putus Sekolah :									
	a. Jenjang SD/SDLB/MI	%	0,03%	0,00%	0,08%	0,14%	0,19%	0,03%	-424,0%	Belum tercapai
	b. Jenjang SMP /SMPLB/MT's	%	0,05%	0,01%	0,45%	0,36%	0,65%	0,06%	-887,2%	Belum tercapai
2.1.1.23.	Angka Kelulusan :									
	a. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	%	100,00%	100,00%	99,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	b. Angka Kelulusan SMP /MTs /SMPLB	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.24.	Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket A	%	100,00%	100,00%	68,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.1.25.	Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket B	%	90,79%	60,00%	83,94%	69,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.1.26.	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.27.	Persentase Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.28.	Nilai Rata Rata Ujian Nasional									
	SD/MI	-	7,53	7,61	6,91	6,32	n.a	7,43	85,1%	Belum tercapai
	SMP/MTs	-	6,17	5,44	5,52	6,09	n.a	6,38	95,5%	Akan tercapai
2.1.1.29.	Persentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang Sesuai standar	%	83,54%	83,54%	83,54%	83,50%	83,54%	76,34%	109,4%	Melampaui
2.1.1.30.	Persentase Sekolah yang terakreditasi A dan B	%	98,00%	98,00%	98,00%	97,90%	98,84%	100,00%	98,8%	Akan tercapai
2.1.1.31.	Angka Melanjutkan									
	Jenjang SMP / MTs	%	100,00%	99,00%	100,00%	91,90%	98,70%	100,00%	98,7%	Akan tercapai
	Jenjang SMA / SMK / MA	%	100,00%	91,76%	84,20%	99,90%	121,77%	100,00%	121,8%	Melampaui
2.1.1.32.	Cakupan Layanan Pendidikan Untuk Penduduk Miskin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.33.	Ketersediaan Pendidik yang Telah Berkualifikasi S-1/D-IV & Bersertifikat Pendidik PAUDNI	jiwa	839	980	980	821	821	713	115,2%	Melampaui
2.1.1.34.	Ketersediaan Guru Untuk SD Sesuai Standar	%	94,02%	92,12%	92,12%	95,00%	98,04%	97,50%	100,6%	Melampaui
2.1.1.35.	Ketersediaan Guru Untuk SMP Sesuai Standar	%	93,11%	99,00%	91,90%	93,26%	96,82%	96,50%	100,3%	Melampaui
2.1.1.36.	Di setiap SD Tersedia 2 (dua) Orang Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S1 atau D-IV & 2 (dua) Orang Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik;	%	86,00%	100,00%	100,00%	96,38%	97,12%	91,50%	106,1%	Melampaui
2.1.1.37.	Di setiap SMP Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan Separuh diantaranya (35%	%	51,00%	91,21%	91,21%	91,21%	91,21%	61,00%	149,5%	Melampaui



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dari Keseluruhan Guru) Telah Memiliki Sertifikat Pendidik, untuk Daerah Khusus Masing-Masing Sebanyak 40% dan 20%;									
2.1.1.38.	Di setiap SMP Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S-1/ D-IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Masing-masing Satu Orang Untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	%	40,00%	57,80%	57,80%	55,75%	55,75%	42,00%	132,7%	Melampaui
2.1.1.39.	Di setiap Kabupaten/Kota Semua Kepala SD Berkualifikasi Akademik S-1/ D-IV Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	%	97,31%	99,37%	99,37%	98,61%	98,00%	76,00%	128,9%	Melampaui
2.1.1.40.	Kepala SMP Berkualifikasi Akademik S-1 / D-IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	%	59,00%	68,00%	68,00%	70,33%	69,57%	96,50%	72,1%	Belum tercapai
2.1.1.41.	Di Setiap Kabupaten/Kota Semua Pengawas Sekolah Memiliki Kualifikasi Akademik S-1 Atau D-IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik;	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.42.	Cakupan Layanan Manajemen Pendidikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.1.43.	Cakupan Sekolah Berbasis E-Learning (Creative Multi Media)	%	0,00%	5,80%	11,64%	16,58%	16,58%	56,57%	29,3%	Belum tercapai
2.1.2.	Kesehatan									
2.1.2.1.	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KH	110,90/ 100.000 KH	184,3/ 100.000 KH	78,8/ 100.000 KH	179,9/ 100.000 KH	209,92/ 100.000 KH	70/ 100.000 KH	-99,9%	Belum tercapai
2.1.2.2.	Angka Kematian Balita	/ 1.000 KH	15,47/ 1.000 KH	12,4/ 1.000 KH	10,5/ 1.000 KH	13,82/ 1.000 KH	12,71/ 1000KH	10,5 / 1.000 KH	79,0%	Belum tercapai
2.1.2.3.	Angka Kematian Bayi	/ 1.000 KH	12,09/ 1.000 KH	11,2/ 1.000 KH	9,45/ 1.000 KH	10,79/ 1.000 KH	10,93/1000 KH	11/ 1.000 KH	100,6%	Melampaui
2.1.2.4.	Eliminasi malaria									
	- API	%	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	<1	100,0%	Sesuai
	- Kasus Indogenius	%	79,81%	75,88%	96,41%	0,00%	0,00%	20,00%	100,0%	Sesuai
2.1.2.5.	Cakupan Maskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.6.	Cakupan Maskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	6,74%	7,31%	7,70%	6,00%	2,47%	16,00%	648,3%	Melampaui



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.	Persentase Peningkatan Maskin yang Mendapat Bantuan Premi Asuransi Kesehatan Oleh Daerah	%	1,2%	98,0%	624,5%	867,0%	708,9%	440,8%	160,8%	Melampaui
2.1.2.8.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo	%	79,07%	83,92%	81,86%	86,00%	83,33%	96,67%	86,2%	Belum tercapai
2.1.2.9.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 3 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	%	81,94%	87,18%	91,27%	94,54%	95,83%	90,00%	106,5%	Melampaui
2.1.2.10.	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Promosi Kesehatan	%	100,00%	96,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.2.11.	Persentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan	%	100,00%	97,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.2.12.	Persentase Satuan Puskesmas Melaksanakan Promosi Kesehatan Untuk Pemberdayaan dibidang Kesehatan	%	100,00%	96,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.2.13.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	%	91,20%	90,97%	100,00%	96,87%	90,00%	100,00%	90,0%	Akan tercapai
2.1.2.14.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	%	95,97%	98,30%	100,00%	99,25%	95,01%	100,00%	95,0%	Akan tercapai
2.1.2.15.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	%	97,80%	97,80%	98,90%	99,54%	95,00%	100,00%	95,0%	Akan tercapai
2.1.2.16.	Persentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	%	85,33%	90,60%	100,00%	92,95%	80,00%	100,00%	80,0%	Belum tercapai
2.1.2.17.	Prevalensi Balita Pendek (stunting)	%	10,21%	10,57%	8,00%	9,34%	8,99%	7,00%	71,6%	Belum tercapai
2.1.2.18.	Eliminasi Kretin Baru (kasus)	%	0	0	0	0	0	0	100,0%	Sesuai
2.1.2.19.	Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100,00%	99,50%	100,00%	99,93%	70,00%	100,00%	70,0%	Belum tercapai
2.1.2.20.	Persentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	7,03%	0,25%	100,00%	39,57%	16,00%	100,00%	16,0%	Belum tercapai
2.1.2.21.	Persentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah	%	73,83%	57,30%	72,50%	88,29%	45,22%	40,00%	113,1%	Melampaui
2.1.2.22.	Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	50,00%	64,47%	100,00%	56,61%	15,00%	100,00%	15,0%	Belum tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.2.23.	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	34,00%	13,00%	100,00%	12,88%	10,00%	100,00%	10,0%	Belum tercapai
2.1.2.24.	Persentase Penderita Diabetis Mellitus Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	68,75%	32,50%	100,00%	92,40%	35,00%	100,00%	35,0%	Belum tercapai
2.1.2.25.	Persentase Desa /Kelurahan Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	%	3,40%	7,69%	100,00%	100,00%	100,00%	51,00%	196,1%	Melampaui
2.1.2.26.	Persentase Tuberculosis Mendapatkan Pelayanan Tuberculosis Sesuai Standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.27.	Persentase Penderita Tuberculosis Sembuh	%	80% dari yang ditangani	73,2% dari yang ditangani	80% dari yang ditangani	78,9% dari yang ditangani	80,05% dari yang ditangani	80% dari yg ditangani	100,1%	Melampaui
2.1.2.28.	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	%	66,00%	3,13%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	50,0%	Belum tercapai
2.1.2.29.	Persentase Penderita DBD Tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.30.	Persentase ISPA/Diare dan Penyakit Menular Lainnya Tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.31.	Persentase Cakupan Pelayanan Penderita Malaria yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.32.	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hygiene Sanitasi Pangan Sesuai Standar	%	7,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Sesuai
2.1.2.33.	Persentase Respon Verifikasi Terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam Waktu Kurang Dari 24 jam	%	100,00%	100,00%	100,00%	98,43%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.2.34.	Persentase Layanan Pemeriksaan Air Minum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.35.	Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat / ODF (Open Defecation Free)	%	4,9%	6,8%	60,0%	38,0%	43,9%	100,0%	43,9%	Belum tercapai
2.1.2.36.	Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan	%	100%	98%	100%	84%	95%	100%	95,2%	Akan tercapai
2.1.2.37.	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	%	35%	40%	45%	40%	56%	55%	101,3%	Melampaui
2.1.2.38.	Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	78,0%	72,0%	80,0%	82,2%	90,0%	90,0%	100,0%	Sesuai
2.1.2.39.	Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.2.40.	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Puskesmas	7 Puskesmas	27 Puskesmas	27 Puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	27 Puskesmas	100,0%	Sesuai
2.1.2.41.	Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan 24 Jam	Puskesmas	14	12	27	27	27	27	100,0%	Sesuai
2.1.2.42.	Layanan Rumah Sakit Umum Type C	%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.43.	Persentase Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.44.	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan yang Teregristrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.2.45.	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	%	3,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Sesuai
2.1.2.46.	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	%	11,11%	18,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.2.47.	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Teregristrasi	%	100,00%	100,00%	100,00%	99,17%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.2.48.	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80,00%	100,00%	100,00%	56,61%	15,00%	100,00%	15,0%	Belum tercapai
2.1.2.49.	Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	%	19%	30%	50%	50%	50%	100%	50,0%	Belum tercapai
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.1.3.1.	Persentase Interkoneksi Antar Pusat Kegiatan dan Produksi di Kabupaten	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.3.8.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	%	73,19%	72,21%	76,46%	78,94%	78,89%	83,00%	95,1%	Akan tercapai
2.1.3.9.	Persentase Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten	%	30,30%	42,46%	58,51%	89,52%	123,24%	74,31%	165,9%	Melampaui
2.1.3.10.	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	94,50%	92,33%	92,78%	93,23%	99,10%	98,63%	100,5%	Melampaui
2.1.3.11.	Persentase Peningkatan Kapasitas Jembatan	%	29,27%	43,90%	56,10%	63,41%	65,85%	85,37%	77,1%	Belum tercapai
2.1.3.12.	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perkotaan	%	92,46%	92,46%	86,34%	78,72%	92,51%	100,00%	92,5%	Akan tercapai
2.1.3.13.	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perdesaan	%	86,05%	86,05%	89,11%	91,12%	92,51%	100,00%	92,5%	Akan tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.3.14.	Persentase Penduduk yang Dilayani Sistem Air Limbah	%	78,14%	80,15%	83,65%	79,95%	75,07%	99,26%	75,6%	Belum tercapai
2.1.3.15.	Persentase Sampah yang Tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.3.16.	Persentase TPA yang Memenuhi Kriteria dan Dioperasikan Secara Layak	%	40%	40%	44%	100%	100%	80%	125,0%	Melampaui
2.1.3.17.	Persentase Cakupan Layanan Persampahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.3.18.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	25,33%	26,99%	27,61%	28,01%	28,21%	32,26%	87,4%	Belum tercapai
2.1.3.19.	Tersedianya Peraturan & Informasi Rencana Umum&rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR& RTR kawasan strategis)	%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	19,05%	75,0%	Belum tercapai
2.1.3.20.	Persentase Cakupan Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Ruang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.3.21.	Persentase Kesesuaian Bangunan dengan RTBL	%	0,06%	0,21%	2,50%	2,78%	5,70%	10,00%	57,0%	Belum tercapai
2.1.3.22.	Cakupan Penanganan Bangunan Gedung	%	24,05%	42,78%	42,78%	44,16%	89,00%	100,00%	89,0%	Belum tercapai
2.1.3.23.	Persentase Permohonan IUJK yang Terlayani sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.3.24.	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	%	42,86%	42,86%	57,14%	85,71%	100,00%	71,43%	140,0%	Melampaui
2.1.3.25.	Cakupan Infrastruktur Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	%	72,69%	71,26%	76,55%	76,67%	80,98%	79,60%	101,7%	Melampaui
2.1.3.26.	Cakupan Infrastruktur Kawasan Purwokulon (Bordercity)	%	50,99%	57,97%	54,50%	56,60%	55,68%	60,60%	91,9%	Akan tercapai
2.1.3.27.	Cakupan Infrastruktur Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT: Minapolitan, Agropolitan, Pariwisata dan Perbatasan)	%	9,45%	10,42%	12,26%	13,38%	13,52%	14,65%	92,3%	Akan tercapai
2.1.3.28.	Kinerja Sistem Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	60,51%	62,06%	63,40%	64,39%	68,52%	72,34%	94,7%	Akan tercapai
2.1.3.29.	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	54,23%	57,00%	58,68%	61,54%	62,42%	71,85%	86,9%	Belum tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.3.30.	Persentase Pengurangan Genangan Air Banjir pada Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	4,83%	4,83%	4,83%	16,91%	21,74%	55,56%	39,1%	Belum tercapai
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
2.1.4.2.	Persentase Rumah layak Huni	%	83,63%	85,88%	86,34%	86,79%	87,62%	86,01%	101,9%	Melampaui
2.1.4.3.	Persentase Kebutuhan Rumah (Backlog Rumah)	%	3,03%	5,44%	5,44%	6,97%	0,00%	2,74%	100,0%	Sesuai
2.1.4.4.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	%	35,50%	15,75%	12,47%	12,47%	20,80%	43,50%	47,8%	Belum tercapai
2.1.4.5.	Cakupan Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Akibat Bencana Alam/Sosial	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,0%	Belum tercapai
2.1.4.6.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	100,00%	92,32%	65,63%	52,93%	64,18%	18,70%	-143,2%	Belum tercapai
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
2.1.5.1.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.5.2.	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	34,2%	292,4%	Melampaui
2.1.5.3.	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.5.4.	Tertanganinya Gangguan Tramtibum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.5.5.	Kelompok Jejaring Kebencanaan	wilayah	16 wilayah	16 wilayah	16 wilayah	16 wilayah	16 wilayah	16 wilayah	100,0%	Sesuai
2.1.5.6.	Cakupan Wilayah Pencegahan Bencana	%	25%	49%	52%	84%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.5.7.	Persentase Ketersediaan Analisis Jenis Bencana	%	63%	63%	75%	88%	88%	100%	87,5%	Belum tercapai
2.1.5.8.	Cakupan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Kewilayahan	%	2,74%	5,79%	5,79%	7,32%	50,00%	24,39%	205,0%	Melampaui
2.1.5.9.	Cakupan Kejadian Tanggap Darurat yang Tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.5.10.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	%	27%	32%	41%	41%	41%	40%	102,3%	Melampaui
2.1.5.11.	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Pasca Bencana	%	19%	63%	63%	87%	81%	60%	135,4%	Melampaui
2.1.5.12.	Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.5.13.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	%	100%	36%	38%	35%	35%	100%	34,8%	Belum tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.5.14.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.5.15.	Tingkat Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Konflik di Daerah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.1.5.16.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	61,72%	61,72%	67,51%	76,80%	70,32%	80,00%	87,9%	Belum tercapai
2.1.6.	Sosial									
2.1.6.2.	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.1.6.3.	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan	%	0,03%	0,03%	0,03%	0,35%	50,15%	20,47%	245,0%	Melampaui
2.1.6.4.	Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang Dibina	%	29,85%	16,86%	14,03%	13,82%	43,54%	13,82%	315,1%	Melampaui
2.1.6.5.	Cakupan Penghargaan Kepahlawan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar									
2.2.1.	Tenaga Kerja									
2.2.1.2.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelayanan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tiap Tahun	%	10,51%	10,60%	16,58%	17,23%	10,33%	14,83%	69,7%	Belum tercapai
2.2.1.3.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditangani Tiap Tahun	%	16,84%	23,35%	27,72%	31,16%	3,65%	25,23%	14,5%	Belum tercapai
2.2.1.4.	Capaian Sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja	%	13,44%	22,89%	32,04%	36,86%	43,39%	43,22%	100,4%	Melampaui
2.2.1.5.	Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	%	35,38%	47,81%	57,44%	64,90%	69,30%	65,48%	105,8%	Melampaui
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.2.2.1.	Cakupan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Indikator Pemenuhan Hak Anak)	%	70,49%	70,79%	75,50%	78,00%	81,00%	80,00%	101,3%	Melampaui
2.2.2.2.	Persentase PD Kabupaten yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	%	73%	90%	85%	38%	60%	88%	67,6%	Belum tercapai
2.2.2.3.	Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten	%	34,40%	34,42%	41,65%	36,00%	23,54%	40,00%	58,9%	Belum tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.2.4.	Persentase Desa yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Perencanaan Anggaran Desa	%	10,66%	21,54%	41,79%	60,00%	19,02%	80,00%	23,8%	Belum tercapai
2.2.2.5.	Cakupan Ketersediaan Tenaga Pelayanan Pengaduan Terlatih, Bantuan Hukum Untuk Mendampingi Korban dan Saksi dan Layanan Pemulangan Korban Perempuan dan Anak	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.2.6.	Persentase Penanganan Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.2.7.	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak	%	70,00%	70,50%	80,00%	81,00%	81,50%	80,00%	101,9%	Melampaui
2.2.2.8.	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.	%	88,00%	86,44%	82,14%	92,30%	93,00%	85,00%	109,4%	Melampaui
2.2.2.9.	Jumlah Kelompok Perempuan yang Dilatih	kelompok	7	11	20	30	90 orang	40	225,0%	Melampaui
2.2.3.	Pangan									
2.2.3.1.	Rasio Ketersediaan Energi (2200 kal/cap/hari)	%	152,95%	154,77%	135,99%	154,78%	132,11%	100,00%	132,1%	Melampaui
2.2.3.2.	Rasio Ketersediaan Protein (57 gr/cap/hari)	%	163,28%	256,67%	150,70%	256,67%	109,06%	100,00%	109,1%	Melampaui
2.2.4.	Pertanian									
2.2.4.1.	Persentase Penanganan Masalah Pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.4.2.	Persentase Tanah Negara yang Teridentifikasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.4.3.	Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.5.	Lingkungan Hidup									
2.2.5.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	%	59,66	62,69	58,00	68,10	68,98	68,50	100,7%	Melampaui
2.2.5.2.	Persentase Terpenuhinya Baku Mutu Kualitas Air Sungai	%	83,00%	65,00%	50,00%	66,92%	72,72%	80,00%	90,9%	Akan tercapai
2.2.5.3.	Persentase Terpenuhinya Kualitas Udara Ambient	%	72,00%	83,97%	96,60%	97,91%	96,35%	80,00%	120,4%	Melampaui
2.2.5.4.	Persentase Tingkat Tutupan Lahan Berupa Hutan/Vegetasi Terhadap Luas Wilayah	%	21,00%	31,00%	40,00%	46,62%	45,66%	60,00%	76,1%	Belum tercapai
2.2.5.5.	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan 3R	%	18,00%	18,00%	21,65%	23,59%	35,89%	30,00%	119,6%	Melampaui
2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.6.1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	93,13%	94,20%	95,49%	96,00%	96,91%	96,90%	100,0%	Melampaui
2.2.6.2.	Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	%	94,31%	95,79%	98,36%	99,31%	99,48%	96,00%	103,6%	Melampaui
2.2.6.3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	1,06%	35,51%	42,49%	58,60%	74,79%	58,60%	127,6%	Melampaui
2.2.6.4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Bayi yang Lahir pada Tahun Berjalan	%	85,84%	91,36%	96,71%	97,16%	97,32%	90,00%	108,1%	Melampaui
2.2.6.5.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Bagi Penduduk Usia 0-18 Tahun	%	81,86%	83,99%	92,06%	95,27%	96,27%	90,00%	107,0%	Melampaui
2.2.6.6.	Persentase Kepemilikan Akte Kematian	%	25,23%	41,35%	52,62%	75,00%	70,51%	70,00%	100,7%	Melampaui
2.2.6.7.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.6.8.	Persentase Pelayanan Adminduk	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.2.7.5.	Persentase Desa yang Sudah Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Miskin	%	0%	100%	100%	100%	0%	80%	0,0%	Belum tercapai
2.2.7.6.	Persentase Rumah Tangga Miskin Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Produktif Terpadu	%	0,00%	50,00%	69,78%	65,44%	0,00%	36,03%	0,0%	Belum tercapai
2.2.7.7.	Persentase LPMD/K dan KPMD yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Desa	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.2.7.8.	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang Aktif	kelompok	2.545	2.168	2.168	2.168	2.168	3.145	68,9%	Belum tercapai
2.2.7.9.	Persentase PKK aktif di Desa / Kelurahan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.2.7.10.	Jumlah UEP yang Aktif	UEP	121	144	144	144	144	141	102,1%	Melampaui
2.2.7.11.	Jumlah BUMDES	desa	0	157	237	298	374	355	105,4%	Melampaui
2.2.7.12.	Persentase Pasar Desa yang Aktif	%	50,00%	59,65%	59,65%	64,76%	64,76%	95,00%	68,2%	Belum tercapai
2.2.7.13.	Persentase UEP-SP-LPM yang Aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.7.14.	Persentase Posyandu Aktif	%	100,00%	100,00%	100,00%	99,40%	99,40%	100,00%	99,4%	Akan tercapai
2.2.7.15.	Persentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Aktif	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.7.16.	Jumlah Unit Usaha BUMDes Bersama	Bumdes Bersama	0	0	1	3	3	16	18,8%	Belum tercapai
2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2.2.8.1.	Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,36	0,32	0,36	0,26	0,22	0,35	137,1%	Melampaui
2.2.8.2.	Cakupan Keluarga yang Mendapat Layanan UPPKS	%	2,67%	2,70%	3,76%	2,70%	1,86%	2,70%	68,9%	Belum tercapai
2.2.8.3.	Cakupan Keluarga yang Mendapat Layanan Tri Bina	%	60,45%	75,57%	63,76%	62,44%	61,74%	62,44%	98,9%	Akan tercapai
2.2.8.4.	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	anak/keluarga	1,3	1,3	1,3	1,3	0,84	1,30	135,4%	Melampaui
2.2.8.5.	Jumlah Kelompok KB Pria	kelompok	48	49	51	48	48	52	92,3%	Akan tercapai
2.2.8.6.	Rasio Akseptor KB	%	9,62%	9,70%	10,20%	6,83%	11,31%	10,60%	106,7%	Melampaui
2.2.8.7.	Cakupan peserta KB aktif	%	82,52%	82,87%	125,19%	75,97%	70,90%	83,00%	85,4%	Belum tercapai
2.2.8.8.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	7,80%	7,67%	7,49%	12,61%	12,36%	7,00%	23,4%	Belum tercapai
2.2.8.9.	Persentase Remaja yang Diberikan Penyuluhan KRR	%	4,69%	6,30%	8,92%	11,57%	10,50%	10,50%	100,0%	Sesuai
2.2.8.10.	Persentase Jumlah Peserta KB Mandiri	%	47,64%	41,90%	42,50%	37,35%	38,76%	43,52%	89,1%	Belum tercapai
2.2.8.11.	Persentase Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	%	81,84%	85,82%	83,46%	83,86%	83,84%	83,84%	100,0%	Sesuai
2.2.8.12.	Cakupan Kelompok Bina Kelurga Balita (BKB) paripurna	%	6,49%	17,87%	14,39%	27,79%	19,50%	19,47%	100,2%	Melampaui
2.2.8.13.	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	%	12,65%	21,02%	25,24%	31,86%	37,94%	37,94%	100,0%	Sesuai
2.2.8.14.	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	%	6,92%	15,89%	15,40%	17,30%	20,73%	20,73%	100,0%	Sesuai
2.2.8.15.	Jumlah Pasangan Usia Subur Miskin yang Terlayani KB	akseptor	560 akseptor	557 akseptor	1.114 akseptor	1.671 aseptor	0	2.228 akseptor	0,0%	Belum tercapai
2.2.9.	Perhubungan									
2.2.9.2.	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan	%	54%	61%	77%	78%	84%	90%	93,6%	Akan tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.9.3.	Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan	%	37%	37%	63%	63%	74%	80%	92,6%	Akan tercapai
2.2.9.4.	Cakupan Ketersediaan Marka Jalan	%	30%	38%	49%	67%	85%	68%	125,0%	Melampaui
2.2.9.5.	Cakupan Ketersediaan APILL	%	55%	56%	58%	57%	64%	92%	69,4%	Belum tercapai
2.2.9.6.	Persentase Tersedianya Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum	%	63%	88%	88%	100%	175%	100%	175,0%	Melampaui
2.2.9.7.	Persentase Kendaraan Operasional Perhubungan yang Layak Fungsi	%	83%	100%	117%	117%	117%	100%	116,7%	Melampaui
2.2.9.8.	Persentase Titik Parkir yang Terlayani	%	90%	91%	94%	97%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.9.9.	Persentase Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	%	52%	52%	52%	69%	69%	75,00%	91,4%	Akan tercapai
2.2.9.10.	Persentase Rasio Ijin Trayek	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Sesuai
2.2.9.11.	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	%	100%	115%	100%	93%	71%	100%	71,2%	Belum tercapai
2.2.9.12.	Persentase Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Wajib Uji yang Layak Fungsi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.9.13.	Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.9.14.	Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika									
2.2.10.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website yang Interaktif	%	26%	95%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.10.2.	Cakupan Layanan Cybercity	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.10.3.	Cakupan Layanan Sistem Informasi Desa	%	6%	43%	80%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.10.4.	Cakupan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	%	75%	98%	100%	98%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.10.5.	Persentase PD yang Memiliki Jaringan Berbasis LAN	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.10.6.	Cakupan Layanan Teknologi Informasi	%	6%	43%	80%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.10.7.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.10.8.	Persentase Data dan Informasi Pemerintah yang Dipublikasikan	%	26%	95%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
2.2.11.2.	Persentase Pertumbuhan UMK	%	0%	6%	6%	6%	15%	5%	308,9%	Melampaui
2.2.11.3.	Persentase jumlah koperasi aktif	%	81,95%	89,84%	89,81%	88,35%	61,54%	89,00%	69,1%	Belum tercapai
2.2.11.4.	Persentase Jumlah Koperasi sehat.	%	81,94%	80,66%	82,00%	80,00%	34,67%	84,00%	41,3%	Belum tercapai
2.2.11.5.	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina	%	6,62%	6,22%	9,63%	14,22%	20,09%	20,00%	100,5%	Melampaui
2.2.11.6.	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%	4,74%	7,86%	3,69%	4,43%	4,06%	4,00%	101,5%	Melampaui
2.2.12.	Penanaman Modal									
2.2.12.1.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	24%	21%	59%	18%	85%	2%	4264,8%	Melampaui
2.2.12.2.	Persentase Jumlah jenis izin yang dilayani;	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.12.3.	Persentase Peningkatan nilai investasi	% (M)	24%	21%	59%	18%	85%	2%, (237 M)	237,6%	Melampaui
2.2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga									
2.2.13.1.	Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga	%	206,7%	84,0%	46,4%	46,3%	61,4%	10,00%	614,0%	Melampaui
2.2.13.2.	Optimalnya Pemanfaatan Wahana Pembinaan Pemuda dan Olah Raga di Heroes Park dan Sport Center WR. Supratman	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0,0%	Belum tercapai
2.2.13.3.	Jumlah Prestasi Olah Raga	prestasi	62	84	39	57	35	33	106,1%	Melampaui
2.2.13.4.	Jumlah Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	event	13	17	15	3	1	18	5,6%	Belum tercapai
2.2.13.5.	Jumlah event olahraga untuk masyarakat	event	2	2	3	1	1	3	33,3%	Belum tercapai
2.2.13.6.	Persentase klub/organisasi olahraga yang aktif	%	8600%	75%	85%	89%	89%	90%	99,4%	Akan tercapai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.13.7.	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	organisasi kepemudaan	14	25	27	28	28	20	140,0%	Melampaui
2.2.13.8.	Jumlah kewirausahaan Pemuda	12	12	14	25	15	15	17	88,2%	Belum tercapai
2.2.13.9.	Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.13.10.	Jumlah Pemuda Pelopor kabupaten	pemuda pelopor	4	27	8	1	2	9	22,2%	Belum tercapai
2.2.13.11.	Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga	%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.14.	Statistik									
2.2.14.1.	Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Daerah yang Akurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.14.2.	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.15.	Persandian									
2.2.15.1.	Cakupan Layanan Pengamanan Informasi Persandian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.15.2.	Persentase layanan persandian	%	100%	100%	100%	100%	106%	100%	105,5%	Melampaui
2.2.16.	Kebudayaan									
2.2.16.1.	Cakupan Pelaku Budaya dalam Even Budaya Daerah	%	15%	15%	15%	14%	1%	10%	10,9%	Belum tercapai
2.2.16.2.	Cakupan Pembinaan Asset Budaya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.16.3.	Cakupan Perlindungan Asset Budaya	%	40%	100%	100%	100%	100%	38%	263,2%	Melampaui
2.2.16.4.	Pertumbuhan Prestasi Seni dan Budaya Daerah	%	19,53%	18,98%	20,27%	16,67%	1,17%	10,00%	11,73%	Belum tercapai
2.2.16.5.	Optimalnya Pemanfaatan Wahana Pembinaan Seni Budaya	%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.16.6.	Cakupan Gelar Seni	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.16.7.	Misi Kesenian	%	100%	100%	100%	100%	17%	100%	16,7%	Belum tercapai
2.2.16.8.	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	cagar budaya	192	307	430	505	619	614	100,8%	Melampaui



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.16.9.	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	cagar budaya	85	88	91	91	140	87	160,9%	Melampaui
2.2.16.10.	Tersedianya museum yang representatif	museum	0	1	1	1	1	1	100,0%	Sesuai
2.2.16.11.	Cakupan pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi	%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0,0%	Belum tercapai
2.2.16.12.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	86,25%	0,0%	Belum tercapai
2.2.16.13.	Cakupan Organisasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.16.14.	Tersedianya tempat pembinaan seni budaya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.2.17.	Perpustakaan									
2.2.17.1.	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	16,29%	2,37%	17,39%	10,78%	3,32%	2,76%	120,2%	Melampaui
2.2.17.2.	Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan)	jenis	9	9	11	13	13	16	81,3%	Belum tercapai
2.2.17.3.	Jumlah koleksi bahan pustaka	exemplar	38.845	38.920	39.117	51.367	53.367	47.420	112,54%	Melampaui
2.2.18.	Kearsipan									
2.2.18.1.	Persentase Tertib Kearsipan Lembaga Pemerintah Daerah	%	62%	75%	79%	80%	95%	86,00%	110,8%	Melampaui
2.2.18.2.	Persentase pertumbuhan arsip yang dikelola	%	2,84%	9,89%	2,39%	8,23%	8,01%	7,00%	114,4%	Melampaui
2.3.	Pelayanan Urusan Pilihan									
2.3.1.	Pariwisata									
2.3.1.2.	Kinerja pengembangan pariwisata	%	61,50%	66,00%	88,00%	88,00%	85,00%	85,00%	100,0%	Sesuai
2.3.2.	Pertanian									
2.3.2.2.	Jumlah Luasan Panen Komoditas Pertanian (ha/tahun)	ha/tahun	105.932	108.220	106.635	109.424	108.575	118.100	91,9%	Akan tercapai
2.3.2.3.	Luasan Penerapan Teknologi Intensifikasi Pertanian (ha)	ha	2.000	2.182	2.105	1.900	2.300	2.300	100,0%	Sesuai
2.3.2.4.	Persentase penerapan teknologi IB (%)	%	80,01%	81,01%	77,51%	97,35%	95,00%	80,00%	118,8%	Melampaui
2.3.2.5.	Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra	ton/th	25.317,11	25.393,93	25.546,04	24.970,15	24.980,00	24.967,14	100,1%	Melampaui
2.3.2.6.	Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)	ton/th	18.510,48	18.281,62	18.042,68	18.755,93	18.770,00	18.655,94	100,6%	Melampaui
2.3.2.7.	Jumlah produksi cengkeh (ton)	ton/th	508,19	636,16	665,31	542,01	560,00	532,08	105,2%	Melampaui
2.3.2.8.	Produktivitas kakao (kg/ha)	kg/ha	1.145,77	1.247,38	1.224,23	1.462,20	1.465,00	1.217,83	120,3%	Melampaui



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.3.2.9.	produktivitas karet (kg/ha)	kg/ha	672,61	1.200,00	1.200,00	860,12	865,00	866,71	99,8%	Akan tercapai
2.3.2.10.	Produktivitas aren (kg/ha)	kg/ha	1.018,68	1.007,50	1.007,47	1.160,93	1.162,00	1.070,53	108,5%	Melampaui
2.3.2.11.	Produktivitas kopi (kg/ha)	kg/ha	315,09	483,84	516,48	330,30	350,00	331,22	105,7%	Melampaui
2.3.2.12.	Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)	%	0,36%	1,25%	5,01%	1,25%	1,79%	8,00%	22,4%	Belum tercapai
2.3.2.13.	Persentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.3.2.14.	Persentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok									
	- lanjut	%	-8,82%	34,77%	10,14%	10,14%	8,49%	9,00%	100,0%	Sesuai
	- madya	%	190,65%	18,17%	2,04%	2,04%	2,00%	2,00%	100,0%	Sesuai
	- utama	%	373,68%	23,33%	3,60%	3,60%	3,48%	3,00%	115,9%	Melampaui
2.3.2.15.	Persentase kenaikan populasi ternak besar	%	-1,58%	1,22%	7,33%	2,16%	2,07%	1,00%	206,9%	Melampaui
2.3.2.16.	Persentase kenaikan populasi ternak kecil	%	2,09%	2,54%	7,56%	5,82%	4,40%	3,00%	146,7%	Melampaui
2.3.2.17.	Persentase kenaikan populasi ternak unggas (pertahun)	%	5,00%	11,39%	74,18%	7,13%	5,95%	5,00%	119,0%	Melampaui
2.3.2.18.	Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH (pertahun)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.3.2.19.	Produksi Padi (ton/ Th)	ton/th	317.847,9	355.526,5	336.837,0	314.160,3	367.304,5	358.458,0	102,5%	Melampaui
2.3.2.20.	Produksi jagung (ton/th)	ton/th	20.569,0	23.496,0	18.290,7	26.815,9	19.616,1	20.937,0	93,7%	Akan tercapai
2.3.2.21.	Produksi durian meningkat (ton/th)	ton/th	1.651,7	2.157,6	2.626,0	2.916,9	2.956,8	267,0	1107,4%	Melampaui
2.3.2.22.	Produksi biofarmaka (ton/th)	ton/th	4.697,0	9.133,0	3.891,8	6.211,0	12.145,0	4.800,0	253,0%	Melampaui
2.3.2.23.	Persentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing	%	-6,63%	-13,66%	-5,57%	1,00%	0,70%	0,50%	140,0%	Melampaui
2.3.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
2.3.3.1.	Cakupan Layanan Informasi dan Fasilitas ESDM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.3.3.2.	Persentase Cakupan Layanan Fasilitas ESDM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.3.4.	Perdagangan									
2.3.4.1.	Persentase Jumlah pasar dalam kondisi baik	%	44,44%	74,00%	81,48%	96,30%	96,30%	100,00%	96,3%	Akan tercapai
2.3.4.2.	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.3.4.3.	Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan	%	100%	100%	100%	100%	14%	100%	14,3%	Belum tercapai
2.3.5.	Perindustrian									
2.3.5.2.	Jumlah KUB yang dibina	KUB	93	100	114	123	124	106	117,0%	Melampaui
2.3.5.3.	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina Sistem Pengelolaannya	%	12,60%	10,52%	11,66%	13,36%	15,26%	14,47%	105,5%	Melampaui
2.3.6.	Transmigrasi									
2.3.6.1.	Cakupan Layanan Informasi Dan Fasilitas Penyelenggaraan Transmigrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.3.6.2.	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0,0%	Belum tercapai
2.3.7.	Kelautan dan Perikanan									
2.3.7.1.	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun)	%	-8,97%	-39,39%	105,63%	4,07%	4,91%	4,00%	122,7%	Melampaui
2.3.7.2.	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun)	%	-1,05%	3,00%	3,00%	3,29%	-12,67%	3,00%	-422,5%	Belum tercapai
2.3.7.3.	Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat	kelompok	11	11	11	11	11	10	110,0%	Melampaui
2.3.7.4.	Cakupan wilayah pengembangan TPI	TPI	5	5	5	5	5	7	71,4%	Belum tercapai
2.3.7.5.	Event promosi perikanan meningkat	kali	2	4	6	5	2	5	40,0%	Belum tercapai
2.4.	Penunjang Urusan									
2.4.1.	Perencanaan Pembangunan									
2.4.1.1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100,00%	96,00%	100,00%	98,69%	99,97%	97,00%	103,1%	Melampaui
2.4.1.2.	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.2.	Keuangan									
2.4.2.1.	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD & APBD Perubahan	%	0,5	1	1	1	1	1	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.4.2.2.	Tingkat Capaian PAD Terhadap Target	%	108,6%	110,9%	102,9%	90,9%	115,5%	100,0%	115,5%	Melampaui
2.4.2.3.	Persentase pemantauan penyusunan APBDes Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.2.4.	Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	%	76,5%	71,4%	81,0%	93,0%	97,6%	90,0%	108,5%	Melampaui
2.4.2.5.	Ketepatan Waktu dan Keakuratan Laporan Keuangan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.2.6.	Persentase Pengelolaan Aset yang Dikelola dengan Baik	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
2.4.3.1.	Persentase Aparat yang Memiliki Kapasitas Sesuai Standard	%	92,1%	94,9%	93,3%	92,9%	88,7%	95,5%	92,9%	Akan tercapai
2.4.3.2.	Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi	%	88,5%	87,4%	89,9%	92,9%	84,8%	92,0%	92,2%	Akan tercapai
2.4.3.3.	Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Sesuai
2.4.3.4.	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan	%	92,1%	94,9%	93,3%	92,9%	88,7%	95,5%	92,9%	Akan tercapai
2.4.3.5.	Tingkat Disiplin Pegawai	%	98,1%	99,0%	98,4%	98,6%	98,8%	99,3%	99,5%	Akan tercapai
2.4.3.6.	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	%	106,5%	97,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Sesuai
2.4.4.	Penelitian dan Pengembangan									
2.4.4.1.	Persentase Penguatan SIDA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.4.2.	Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.5.	Pengawasan									
2.4.5.1.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	level	1,360	3,023	3,023	3,023	3,023	300,00%	100,8%	Melampaui
2.4.5.2.	Persentase cakupan desa yang diperiksa / dievaluasi	%	20,04%	40,09%	60,13%	83,37%	83,58%	80,81%	103,4%	Melampaui
2.4.5.3.	Persentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100,0%	Sesuai
2.4.5.4.	Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.5.5.	Persentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.5.6.	Persentase pengembalian kerugian negara / daerah ke kas negara /daerah	%	85,81%	38,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.4.5.7.	Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN	%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.5.8.	Persentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis	%	107,27%	107,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.4.5.9.	Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai Penjenjangan	%	80,00%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.4.6.	Sekretariat Dewan									
2.4.6.1.	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.6.2.	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	%	84,88%	80,54%	77,83%	92,27%	100,00%	100,00%	100,0%	Sesuai
2.4.7.	Sekretariat Daerah									
2.4.7.1.	Cakupan Layanan Koordinasi dan Fasilitasi Kehidupan Beragama	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.2.	Cakupan Layanan Komunikasi Publik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.3.	Cakupan Layanan Perumusan Kebijakan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.4.	Persentase BUMD Sehat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.5.	Persentase Penerapan SOP Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.6.	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.7.	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.8.	Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.9.	wahana komunikasi publik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.10.	Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.11.	Persentase Penyelesaian Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.12.	Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.4.7.13.	Tingkat Kemudahan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.14.	Persentase Ketertiban Administrasi Pemerintahan Desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.15.	Persentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
2.4.7.16.	Tingkat Pelayanan Pembentukan Kerjasama Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
3)	DAYA SAING DAERAH									
3.1.	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur									
3.1.1.	Pekerjaan Umum									
3.1.1.1.	Persentase Cakupan Air Minum	%	87,91%	98,00%	89,11%	89,33%	92,51%	100,00%	92,5%	Akan tercapai
3.1.1.2.	Cakupan Akses Sanitasi Layak	%	81,27%	86,06%	79,71%	79,78%	79,78%	100,00%	79,8%	Belum tercapai
3.1.1.3.	Persentase Pengangkutan Sampah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,00%	142,9%	Melampaui
3.1.1.4.	Persentase Luas Titik Genangan yang Tertangani	%	39,10%	40,32%	41,72%	52,36%	53,88%	52,45%	102,7%	Melampaui
3.1.1.5.	Persentase Kinerja Layanan Irigasi	%	57,73%	59,20%	60,47%	62,02%	66,18%	71,50%	92,6%	Akan tercapai
3.1.2.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
3.1.2.1.	Rasio Permukiman Layak Huni	%	63,77%	64,98%	69,84%	75,71%	85,22%	79,96%	106,6%	Melampaui
3.1.3.	Perhubungan									
3.1.3.1.	Tingkat Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan Transportasi	%	73%	78%	83%	88%	95%	92%	103,6%	Melampaui
3.2.	Iklim Berinvestasi									
3.2.1.	Penataan Ruang									
3.2.1.1.	Persentase Peningkatan Kesesuaian Arah Penggunaan Lahan	%	86,64%	86,64%	86,93%	86,93%	86,76%	90,00%	96,4%	Akan tercapai
3.2.1.2.	% Kesesuaian Rencana Tata Ruang dalam RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	Sesuai
3.2.1.3.	Persentase Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh, Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Border City	%	46,13%	48,35%	53,01%	50,65%	51,89%	52,50%	98,8%	Akan tercapai
3.3.	Sumber Daya Manusia									



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2020)	Capaian	Interpretasi
			(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.3.1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
3.3.1.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,17	95,26	95,11	94,92	94,96	93,30	101,8%	Melampaui
3.3.1.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	68,74	69,56	71,61	70,03	n.a	69,00	101,5%	Melampaui

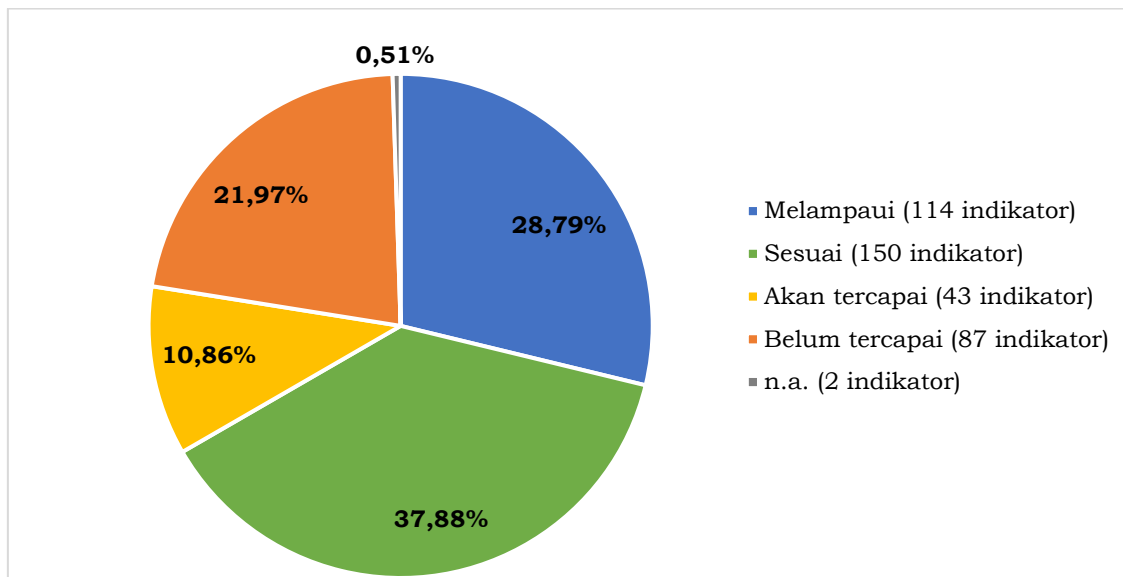
Keterangan:

Interpretasi: > 100% : Melampaui ; 100% : Sesuai ; 90% < 100% : Akan tercapai ; <90% : Belum tercapai

Sumber: BPS dan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, diolah, 2021



Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menargetkan 396 indikator yang terbagi ke dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Di antaranya, 66,67% telah memenuhi/ melampaui target. Indikator-indikator ini dicapai melalui program-program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah.



Gambar 2.48. Interpretasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Dapat diamati pada gambar di atas bahwasanya pemerintah daerah telah berhasil melampaui target pada 114 indikator (28,79%), serta 150 indikator memiliki realisasi sebesar 100%. Terdapat 43 indikator (10,86%) memiliki tingkat capaian >90%. Adapun 87 indikator (21,97%) berada di bawah 90% dari target sehingga dapat dikatakan belum tercapai. Sementara itu, 2 indikator tidak diukur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni Gini Ratio dan Indeks Williamson. Secara umum, sebagian besar indikator yang tidak tercapai diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

2.5.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Minusnya pertumbuhan ekonomi pada kondisi pandemi Covid-19 dimana kontraksi terdalam dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan;



- 2) Belum signifikannya peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pertanian perikanan dan kehutanan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Purworejo;
- 3) Belum signifikannya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo.
- 4) Belum signifikannya pertumbuhan PDRB sektor industri di Kabupaten Purworejo.
- 5) Masih tingginya angka kemiskinan yang diperparah dengan adanya pandemi covid-19 dimana turut menambah angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo;
- 6) Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun masih ditemukannya penduduk dengan buta huruf. Pandemi covid-19 yang melanda pada tahun 2020 perlu diantisipasi untuk mencegah penurunan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo yang berdampak pada peningkatan anak putus sekolah dan angka buta huruf;
- 7) Belum signifikannya peningkatan desa siaga aktif purnama;
- 8) Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat pandemi covid-19;
- 9) Dominannya UMKM di Kabupaten Purworejo perlu diimbangi dengan pertumbuhan koperasi baru, aktif, dan sehat sebagai mitra yang terhubung dalam rantai pasok bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun masih ada koperasi di Kabupaten Purworejo yang tidak memenuhi aspek-aspek kesehatan koperasi; dan
- 10) Belum stabilnya tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Purworejo yang diperparah dengan adanya pandemi *Covid-19*. Dalam lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Purworejo berbenah pada sektor pariwisata dengan mengembangkan destinasi wisata dan pemasaran yang cukup masif. Namun pengembangan destinasi wisata dan upaya pemasarannya di Kabupaten Purworejo belum menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan yang ada selama ini masih perlu didorong dengan mengadakan *event* yang menambah daya tarik pada destinasi wisata.



2.5.2. Aspek Pelayanan Umum

Beberapa indikator pada aspek pelayanan umum yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

a. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a) Rendahnya proporsi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang PAUD;
- b) Rendahnya ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran pada jenjang PAUD;
- c) Rendahnya jumlah SD yang memiliki fasilitas perpustakaan yang layak;
- d) Rendahnya jumlah SMP yang memiliki sarana penunjang pembelajaran;
- e) Perlunya peningkatan keterjangkauan akses pendidikan bagi seluruh siswa menuju sekolah untuk menurunkan persentase Angka Putus Sekolah jenjang SD/SDLB/MI;
- f) Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik sehingga menyulitkan dalam proses belajar mengajar yang optimal, sehingga menyebabkan nilai rata-rata UN pada jenjang SD/MI;
- g) Masih banyaknya Kepala SMP berkualifikasi akademik S1/D-4 yang memiliki sertifikat pendidik; dan
- h) Masih rendahnya cakupan sekolah berbasis e-learning.

2. Kesehatan

- a) Kurang optimalnya kapasitas SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam menangani ibu melahirkan sehingga menyebabkan tingginya AKI;
- b) Perlunya menurunkan angka kematian balita;
- c) Perlunya meningkatkan kualitas/ mutu dan akses pelayanan kesehatan rujukan melalui pengembangan produk-produk/inovasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- d) Perlunya meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan bagi usia bawah lima tahun (balita);



- e) Rendahnya kualitas dan kuantitas makanan balita sesuai standar serta kurang optimalnya pola asuh balita mengakibatkan masih tingginya kasus prevalensi balita pendek (*stunting*);
- f) Perlunya peningkatan akses pelayanan skrining kesehatan sesuai standar untuk siswa satuan pendidikan dasar;
- g) Perlunya peningkatan akses pelayanan skrining kesehatan sesuai standar untuk penduduk usia 15-29 tahun, dan usia 60 tahun ke atas;
- h) Perlunya peningkatan akses pelayanan skrining kesehatan sesuai standar untuk penderita hipertensi;
- i) Perlunya peningkatan akses pelayanan skrining kesehatan sesuai standar untuk diabetes mellitus;
- j) Perlunya peningkatan akses pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar pada orang beresiko terinfeksi HIV;
- k) Rendahnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat/ODF (*Open Defecation Free*);
- l) Perlunya peningkatan akses pelayanan kesehatan sesuai standar untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ); dan
- m) Perlunya peningkatan kondisi sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Belum memadainya kapasitas jembatan untuk kelancaran transportasi dan aksesibilitas;
- b) Kurang optimalnya pengembangan sistem air limbah untuk masyarakat;
- c) Belum memadainya saluran drainase;
- d) Belum memadainya peraturan & informasi Rencana Umum Dan Rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR & RTR Kawasan Strategis);
- e) Masih banyaknya kawasan yang belum dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sehingga pemanfaatan ruang kota belum menunjukkan jati diri kota yang produktif, efisien dan sesuai karakter khas Kabupaten Purworejo;



- f) Kurang optimalnya cakupan penanganan bangunan gedung;
- g) Kurang optimalnya cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan, pariwisata, dan perbatasan);
- h) Masih kurangnya kondisi fisik jaringan irigasi dalam kondisi baik; dan
- i) Belum optimalnya penanganan pengurangan genangan air banjir pada irigasi kewenangan kabupaten.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
- b) Rendahnya cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial; dan
- c) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a) Rendahnya ketersediaan analisis jenis bencana;
- b) Rendahnya tingkat waktu tanggap (*response time rate*); dan
- c) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

b. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a) Belum optimalnya pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun bagi para pencari kerja; dan
- b) Belum optimalnya pelayanan penanganan tenaga kerja tiap tahun;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
- b) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
- c) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan; dan



3. Lingkungan Hidup

- a) Rendahnya tingkat tutupan lahan berupa hutan/ vegetasi terhadap luas wilayah.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Perlunya peningkatan kesadaran desa dan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin;
- b) Perlunya peningkatan pertumbuhan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif;
- c) Kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknya fasilitas pasar; dan
- d) Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama.

5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Masih rendahnya keluarga yang mendapat layanan UPPKS;
- b) Masih rendahnya peserta KB aktif;
- c) Masih rendahnya jumlah peserta KB mandiri;
- d) Masih tingginya persentase *unmetneed* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi); dan
- e) Masih rendahnya Pasangan Usia Subur (PUS) miskin yang terlayani KB.

6. Perhubungan

- a) Belum memadainya ketersediaan alat pengaman jalan; ketersediaan marka jalan, dan ketersediaan APILL; dan
- b) Masih adanya kualitas kendaraan umum yang tidak laik jalan.

7. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Kurang intensifnya pendampingan dan penguatan untuk pertumbuhan koperasi baik koperasi baru, aktif, maupun sehat. Koperasi seharusnya mampu berperan sebagai mitra dari UMKM dalam satu kesatuan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Oleh karena itu, penumbuhan koperasi juga seharusnya mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo.



8. Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Belum optimalnya pemanfaatan wahana pembinaan pemuda dan olah raga di *Heroes Park* dan *Sport Center WR. Supratman*.
- b) Terbatasnya *event* olahraga untuk masyarakat penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19* di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk berkerumun guna pencegahan penularan, sehingga kegiatan olahraga untuk masyarakat perlu diarahkan pada olahraga yang menerapkan kebijakan *physical distancing* hingga pandemi *Covid-19* ini berakhir.
- c) Masih sedikitnya jumlah kewirausahaan pemuda; dan
- d) Masih rendahnya jumlah pemuda pelopor kabupaten.

9. Kebudayaan

- a) Rendahnya keterlibatan pelaku budaya dalam *event* budaya daerah sehingga menyebabkan rendahnya frekuensi penyelenggaraan *event* budaya daerah akibat pandemi *Covid-19*;
- b) Perlunya peningkatan jumlah prestasi kesenian dan kebudayaan daerah;
- c) Kurang optimalnya pelaksanaan misi kesenian akibat pandemi *Covid-19*;
- d) Belum optimalnya penyelenggaraan *workshop* sejarah lokal, pembinaan kelompok penghayat, dan persemaian karakter bangsa sebagai upaya pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi; dan
- e) Rendahnya jumlah sumber daya manusia kesenian.

10. Perpustakaan

- a) Kurang optimalnya jumlah dan jenis layanan perpustakaan.

c. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a) Rendahnya kenaikan produksi perikanan budidaya (per tahun);
- b) Belum optimalnya wilayah pengembangan TPI; dan



- c) Masih rendahnya promosi produk hasil usaha perikanan kepada masyarakat.

2. Pertanian

- a) Masih terbatasnya kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT).

3. Perdagangan

- a) Kurangnya promosi pada komoditas perdagangan unggulan di Kabupaten Purworejo.

4. Transmigrasi

- a) Kelancaran pelaksanaan transmigrasi sangat bergantung pada hubungan antara daerah asal dan daerah penerima. Pada masa pandemi *Covid-19*, dimana pergerakan sangat dibatasi menyebabkan pelaksanaan transmigrasi menjadi terhambat.

2.5.3. Aspek Daya Saing Daerah

Terdapat 1 indikator pada aspek daya saing daerah yang belum tercapai disebabkan oleh faktor berikut:

- 1) Kurang optimalnya pengembangan akses sanitasi layak untuk masyarakat.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51 persen.

Perekonomian global pada tahun 2021 diproyeksi tumbuh 5,5 persen, terutama pada semester kedua sejalan dengan ketersediaan vaksin yang kian besar terutama di negara maju. Kondisi perekonomian global terus membaik yang ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi di berbagai negara yang semakin kecil. Meskipun kasus Covid-19 secara global masih terus meningkat dan dibayangi oleh mutase baru, ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi global. Pada triwulan IV tahun 2020, kontraksi ekonomi Amerika Serikat melunak, begitu juga dengan Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, Tiongkok dan Vietnam mempertahankan pertumbuhan positif. Seiring membaiknya kondisi global, harga komoditas internasional mengalami peningkatan

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, harga komoditas internasional diproyeksi turut mengalami perbaikan. Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh 5,0 persen, lebih tinggi dari konsensus pasar maupun lembaga internasional. Dari sisi pengeluaran, investasi berperan penting dalam pemulihan ekonomi



karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Sementara dari sisi lapangan usaha, pemulihan diperkirakan terjadi di hampir semua sektor.

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan status gawat darurat global untuk wabah Covid 19 berdampak bukan hanya kepada penyebaran penyakitnya tapi juga terhadap perekonomian dunia dalam jangka pendek. Kondisi permasalahan global tersebut berpengaruh juga terhadap perekonomian di Indonesia terutama pada sektor keuangan yang berimbas pada penurunan dana transfer dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengakibatkan menurunnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan diantaranya melakukan restrukturisasi kredit, selektif dalam pemberian kredit, mengendalikan harga, mempercepat realisasi anggaran belanja pemerintah, menurunkan harga BBM dan tarif listrik, mempercepat upaya daya saing dan membuka akses pasar baru untuk tujuan ekspor.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65%. Meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,19% (yoy) dan kawasan Jawa (-2,60%; yoy). Sementara itu, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tumbuh -1,89% (qtq), tumbuh lebih rendah dibandingkan 4,79% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

kondisi perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong peningkatan aktivitas investasi dan ekspor luar negeri. Perbaikan kinerja investasi didorong peningkatan pembangunan infrastruktur pemerintah. Sementara peningkatan permintaan mendorong perbaikan ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah terutama komoditas kayu dan barang dari kayu. Meski pandemi Covid-19 masih melanda global, permintaan produk furnitur dari Jawa Tengah justru mengalami peningkatan. Selain dari pembeli yang



lama, berbagai pelaku usaha mencatat adanya penambahan pembeli baru dari berbagai negara dari kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga Australia.

Berdasarkan lapangan usaha utama, perbaikan perekonomian pada triwulan IV 2020 terjadi pada Pertanian, Industri, Konstruksi dan Perdagangan. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian meningkat cukup pesat yaitu sebesar 7,56% (yoy). Peningkatan sektor primer tersebut disebabkan adanya peningkatan luas panen pada tanaman pangan. Namun, pertumbuhan subsektor peternakan masih belum membaik disebabkan permintaan hewan ternak yang masih rendah ditengah masih minimnya kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sektor industri pengolahan, meskipun masih mengalami kontraksi, juga tercatat membaik seiring menguatnya permintaan luar negeri terhadap komoditas garmen, kayu olahan, dan alas kaki. Perbaikan perekonomian juga didorong oleh sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa kesehatan yang mengalami peningkatan permintaan pada masa pandemi Covid-19.

Dengan perkembangan hingga triwulan IV 2020, perekonomian Jawa Tengah pada 2020 tumbuh -2,65% (yoy), atau lebih rendah dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,40% (yoy). Sebagaimana perkiraan sebelumnya, wabah Covid-19 telah membuat seluruh elemen perekonomian mengalami pelemahan. Dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar pelemahan tersebut bersumber dari investasi dan konsumsi rumah tangga. Momen peningkatan investasi yang telah direncanakan di 2020 terhalang oleh pandemi Covid-19. Berbagai program strategis pemerintah yang dicanangkan di Jawa Tengah terpaksa ditunda dalam beberapa waktu. Investor pun menahan menanam modal ke Jawa Tengah tercermin dari penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh -70,88% (yoy) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh -33,12% (yoy), selama 2020. Relokasi pabrik tekstil dari wilayah lain ke Jawa Tengah yang direncanakan pada akhir triwulan II 2020, tertunda hingga periode yang belum dapat ditentukan.

pada aspek lapangan usaha, industri pengolahan memiliki andil terbesar terhadap pelemahan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 diikuti sektor Perdagangan. Melemahnya permintaan, baik di dalam



negeri maupun luar negeri, membuat produksi menjadi tidak optimal. Prompt Manufacturing Index (PMI) Jawa Tengah berada pada level kontraksi 35,80 selama tahun 2020 atau lebih rendah dari 53,57 pada 2019. Di sisi lain, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu tumbuh positif pada 2020. Pertumbuhan Pertanian terutama didorong kondisi iklim yang mendukung panen secara optimal. Hal ini juga didukung oleh relatif stabilnya permintaan bahan pangan dibandingkan kebutuhan masyarakat lainnya seperti sandang, perlengkapan rumah tangga, maupun transportasi di masa pandemi

Memasuki triwulan I 2021, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan terus membaik. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2021 terutama didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor luar negeri. Prospek investasi baru ke Jawa Tengah diperkirakan akan terealisasi pada periode ini. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan di awal tahun 2021, termasuk pengembangan kawasan industri terpadu Batang. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2020), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2020, Kabupaten Purworejo memiliki angka pertumbuhan ekonomi -1,66%, berada di atas Indonesia (-2,07%) dan Provinsi Jawa Tengah (-2,65%). Adanya pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional mengalami resesi. Dalam kondisi pandemi Covid-19, Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki laju pertumbuhan tertinggi (atas dasar harga konstan 2010), sebesar 14,32% di tahun 2020. Meskipun bukan merupakan penyumbang PDRB tertinggi, lapangan usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan laju pertumbuhannya



minus sebesar -27,25% di tahun 2020. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berdampak besar terhadap lapangan usaha ini.

Selama rentang waktu 4 tahun (2017-2020) struktur perekonomian Purworejo didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi dan jasa pendidikan. Mengacu pada asumsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 mengalami kontraksi dan diharapkan tahun 2022 telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid 19 ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Kondisi kinerja keuangan daerah tahun 2016-2020, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017 melalui perubahan struktur organisasi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Pengalihan urusan kabupaten/ kota menjadi kewenangan provinsi/pusat, dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah.

Mengacu pada asumsi Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2021 juga diharapkan mulai terjadi perbaikan kembali dari dampak pandemi Covid 19 ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.



**Tabel 3.1. Target Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2026**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke-				
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	73,31	73,76	74,21	74,67	75,11
2	Angka Kemiskinan	%	11,42- 10,27	11,02- 9,86	10,62- 9,45	10,22- 9,04	9,82- 8,63
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,64	3,45	3,27	3,11	2,95
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,74	2,31	2,89	3,46	4,04
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,39- 4,39	3,98- 4,98	4,57- 5,57	5,16- 6,16	5,75- 6,75
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	70	72	74	76	78
7	Indeks Risiko Bencana	-	175,87	170,3	163,73	157,16	150,6

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

3.3. Kinerja Keuangan Daerah

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020**

No.	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN DAERAH	2.069.000.842.574,00	2.114.807.792.154,00	2.049.783.717.823,00	2.172.437.256.704,65	2.167.260.086.741,00	1,22%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	255.599.240.424,00	298.606.494.653,00	286.971.121.793,00	280.396.487.190,65	304.779.565.558,00	4,83%
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	42.380.056.430,00	53.416.617.017,00	68.816.307.333,00	77.648.792.775,00	74.598.729.755,00	15,94%
1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.662.278.138,00	11.731.250.610,00	12.867.927.066,00	14.850.301.887,00	12.207.464.126,00	4,33%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.380.440.636,00	22.586.342.042,00	10.259.350.824,00	13.686.362.533,00	14.953.292.871,00	60,52%
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196.176.465.220,00	210.872.284.984,00	195.027.536.570,00	174.211.029.995,65	203.020.078.806,00	1,46%
2	DANA PERIMBANGAN	1.315.706.156.856,00	1.207.260.306.714,00	1.247.436.685.096,00	1.292.431.347.427,00	1.225.319.536.635,00	-1,63%
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.510.298.310,00	32.133.216.461,00	25.827.467.718,00	19.577.301.012,00	31.402.133.052,00	1,77%
2.2	Dana Alokasi Umum	940.778.244.000,00	924.251.795.000,00	924.251.795.000,00	963.312.191.000,00	930.205.439.000,00	-0,24%
2.3	Dana Alokasi Khusus	339.417.614.546,00	250.875.295.253,00	297.357.422.378,00	309.541.855.415,00	263.711.964.583,00	-4,57%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	497.695.445.294,00	608.940.990.787,00	515.375.910.934,00	599.609.422.087,00	637.160.984.548,00	7,40%
3.1	Pendapatan Hibah	101.122.050.000,00	73.321.466.245,00	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.855.970.332,00	-2,98%
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.659.074.294,00	92.084.045.000,00	98.828.069.544,00	98.498.930.096,00	91.978.353.408,00	3,99%
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	52.286.908.000,00	9.000.000.000,00	35.465.110.000,00	62.978.422.000,00	308,65%
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.813.271.000,00	35.279.908.542,00	10.860.374.100,00	17.326.281.918,00	33.355.013.808,00	22,59%
3.5	Dana Desa	279.101.050.000,00	355.968.663.000,00	325.017.443.600,00	366.917.898.000,00	363.993.225.000,00	7,74%



No.	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
B	BELANJA DAERAH	1.968.159.503.754,00	2.265.141.731.647,00	2.125.880.557.581,00	2.186.305.448.196,82	2.126.472.056.535,00	2,26%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.320.625.848.017,00	1.349.130.524.502,00	1.313.579.809.222,00	1.369.391.777.809,00	1.422.103.666.071,00	1,91%
1.1	Belanja Pegawai	929.269.576.117,00	832.772.371.824,00	826.503.323.039,00	819.962.960.299,00	785.403.848.312,00	-4,04%
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	406.391.671,00	
1.3	Belanja Hibah	10.694.942.000,00	16.832.917.300,00	29.956.007.375,00	33.508.537.680,00	89.567.618.695,00	78,63%
1.4	Belanja Bantuan Sosial	6.784.300.000,00	6.596.200.000,00	11.685.375.000,00	11.185.050.000,00	17.045.992.092,00	30,62%
1.5	Belanja Bagi Hasil	9.440.953.688,00	9.715.465.200,00	10.805.195.500,00	8.136.060.932,00	9.250.002.600,00	0,78%
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	363.824.322.200,00	482.290.864.992,00	434.544.088.845,00	496.599.168.898,00	518.785.870.613,00	10,35%
1.7	Belanja Tidak Terduga	611.754.012,00	922.705.186,00	85.819.463,00	-	1.643.942.088,00	-
2	BELANJA LANGSUNG	647.533.655.737,00	916.011.207.145,00	812.300.748.359,00	816.913.670.387,82	704.368.390.464,00	4,23%
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.841.338.820,00	-150.333.939.493,00	-76.096.839.758,00	-13.868.191.492,17	40.788.030.206,00	-193,59%
C	PEMBIAYAAN DAERAH	238.867.071.052,00	326.117.694.262,00	183.208.287.348,00	101.692.578.940,00	107.701.046.204,83	-11,47%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	242.867.071.052,00	339.211.694.262,00	183.208.287.348,00	110.292.578.940,00	107.701.046.204,83	-12,12%
01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	242.840.321.052,00	339.192.444.262,00	175.783.754.409,00	107.111.633.638,00	87.840.209.775,83	-16,39%
01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
01.03	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	19.122.750.150,00	-
01.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	26.750.000,00	19.250.000,00	7.424.532.939,00	3.180.945.302,00	738.086.279,00	9576,75%
01.05	Penerimaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-



No.	URAIAN	REALISASI 2016 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	13.094.000.000,00	-	8.600.000.000,00	-	227,35%
02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	13.094.000.000,00	-	8.600.000.000,00	-	227,35%
02.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	339.708.409.872,00	75.783.754.769,00	7.111.447.590,00	87.824.387.447,83	148.489.076.410,83	258,93%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, 2021, diolah

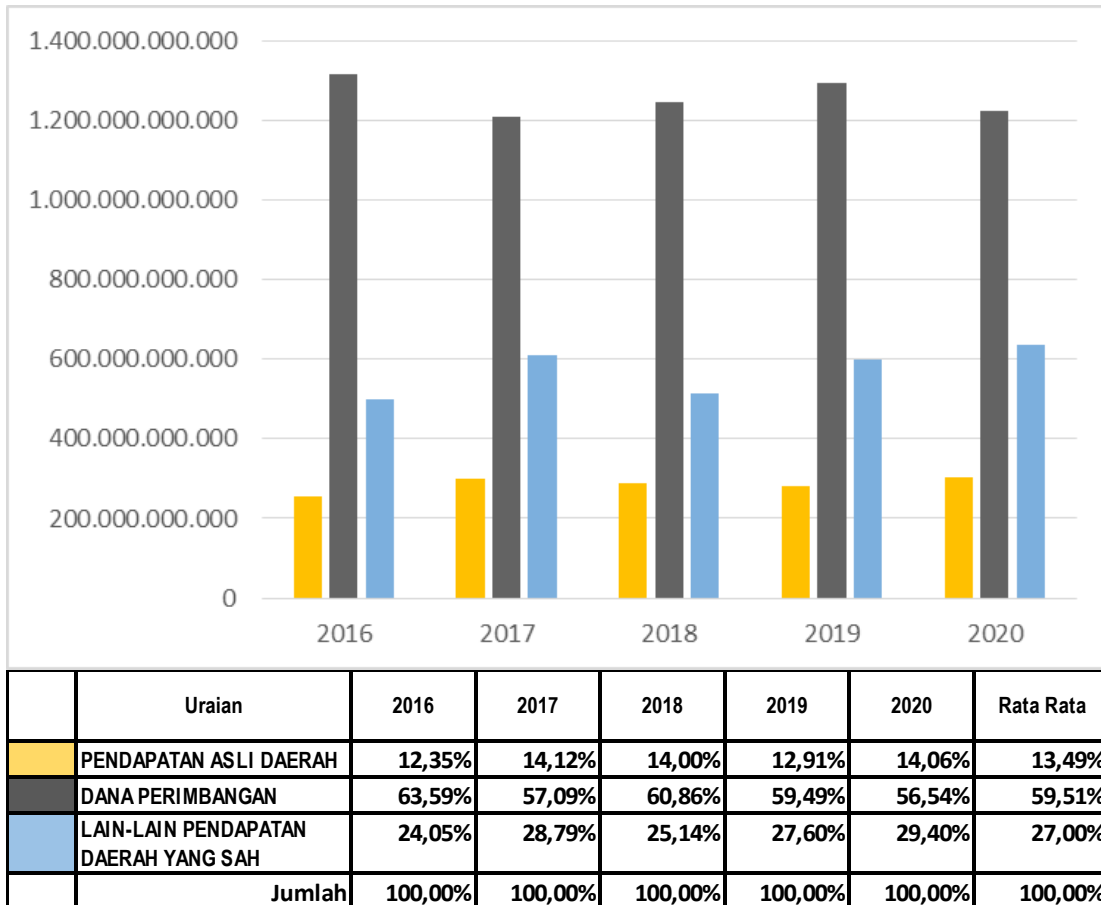


3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata mengalami peningkatan 1,22 % per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Selama kurun waktu tersebut, secara proporsional Dana Perimbangan Daerah menempati porsi terbesar (rata-rata 59,51%) dibandingkan dengan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah (rata-rata 27,00%) dan dana dari Pendapatan Asli Daerah (rata-rata 13,49%). Dengan melihat proporsi pendapatan daerah, terlihat bahwa Dana Perimbangan masih menduduki porsi terbesar penyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah dan ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan, sehingga perlu upaya untuk peningkatan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 3.1. Trend dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak Daerah

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, meliputi: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penyelenggaraan Reklame, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2) Retribusi Daerah

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, meliputi: Retribusi Terminal, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi



Persampahan/Kebersihan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pematangan Hewan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

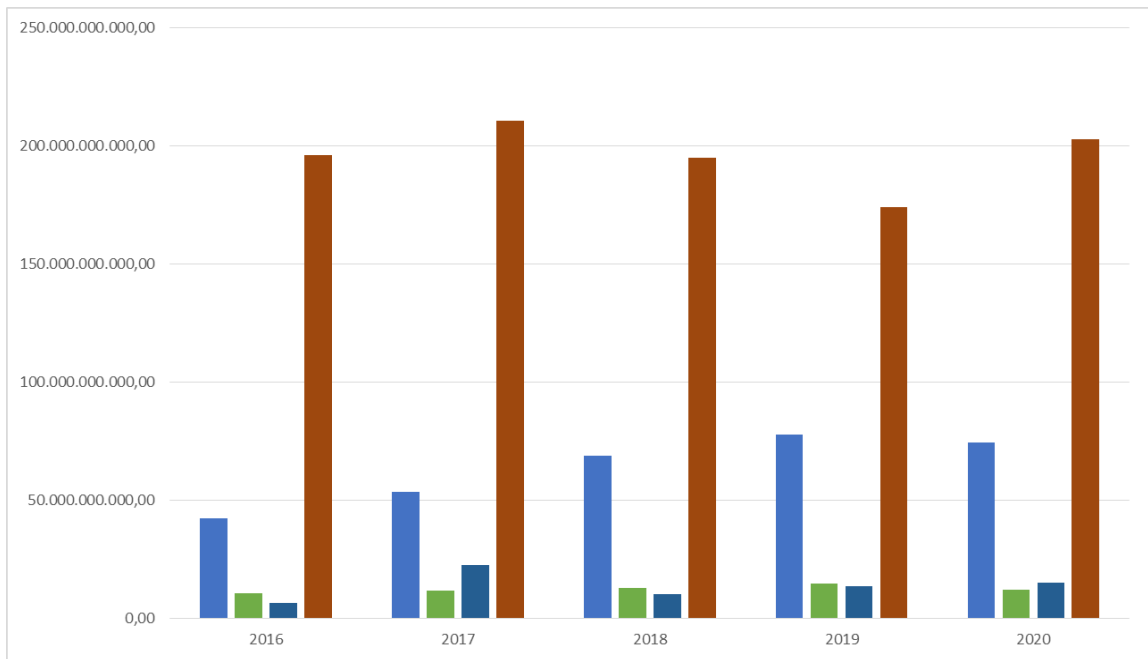
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purworejo yaitu: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, Perusda Aneka Usaha, Perusda BPR Bank Purworejo, PT Bank Jateng, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Purworejo.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Pelayanan Kesehatan di RSUD Citrowardojo Purworejo, Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Dana Kapitasi JKN, BLUD Puskesmas, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sumber utama PAD berasal dari Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan kontribusi rata-rata selama kurun waktu 2016–2020 sebesar 68,81% diikuti Pajak Daerah sebesar 22,12%; Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4,68% dan Hasil Retribusi Daerah sebesar 4,38%;. Pertumbuhan Pajak Daerah sebagai sumber PAD dalam kurun waktu 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2020 dimana Pandemi Covid 19 masih berlangsung Pendapatan Asli Daerah tetap didominasi oleh kontribusi Lain-lain PAD yang Sah sebesar 66,61%, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 24,48%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,91%, dan retribusi daerah sebesar 4,38%. Perkembangan data realisasi PAD Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut.



	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata
	Pendapatan Pajak Daerah	16,58%	17,89%	23,98%	27,69%	24,48%	22,12%
	Hasil Retribusi Daerah	4,17%	3,93%	4,48%	5,30%	4,01%	4,38%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,50%	7,56%	3,58%	4,88%	4,91%	4,68%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76,75%	70,62%	67,96%	62,13%	66,61%	68,81%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.2. Trend dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

b. Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.



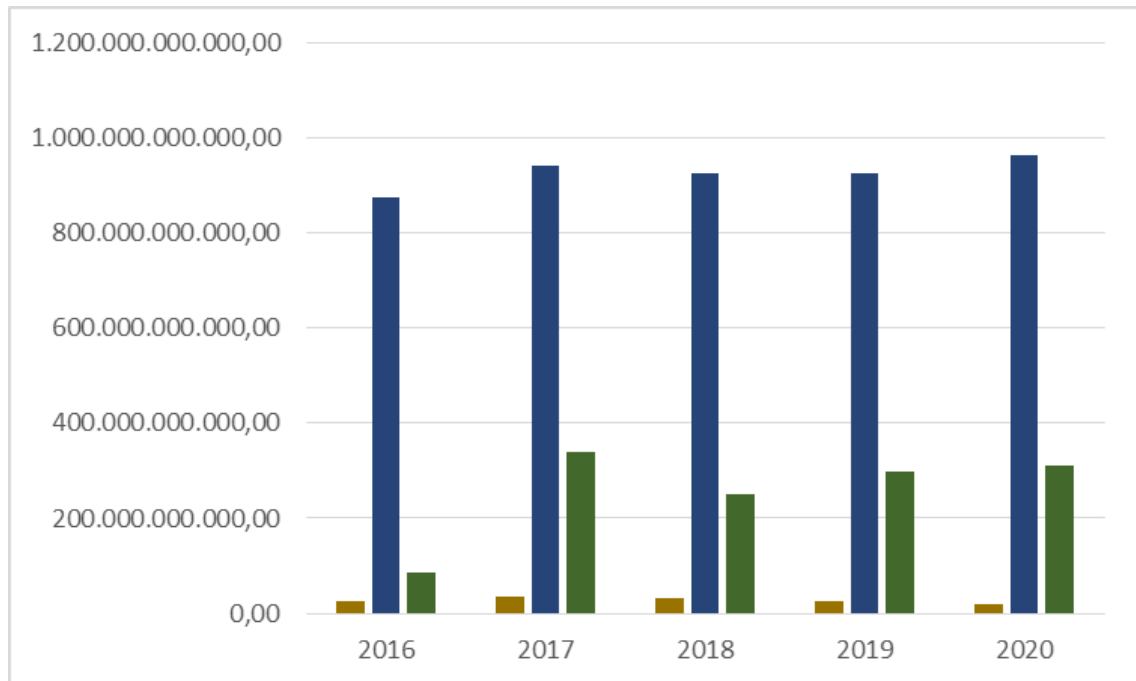
2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Selama kurun waktu 2016–2020, sumber utama Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,09% diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 20,61% dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sebesar 2,30%. DAU Perkembangan Data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,55%	2,70%	2,66%	2,07%	1,51%	2,30%
Dana Alokasi Umum	88,75%	71,50%	76,56%	74,09%	74,53%	77,09%
Dana Alokasi Khusus	8,70%	25,80%	20,78%	23,84%	23,95%	20,61%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

Gambar 3.3. Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

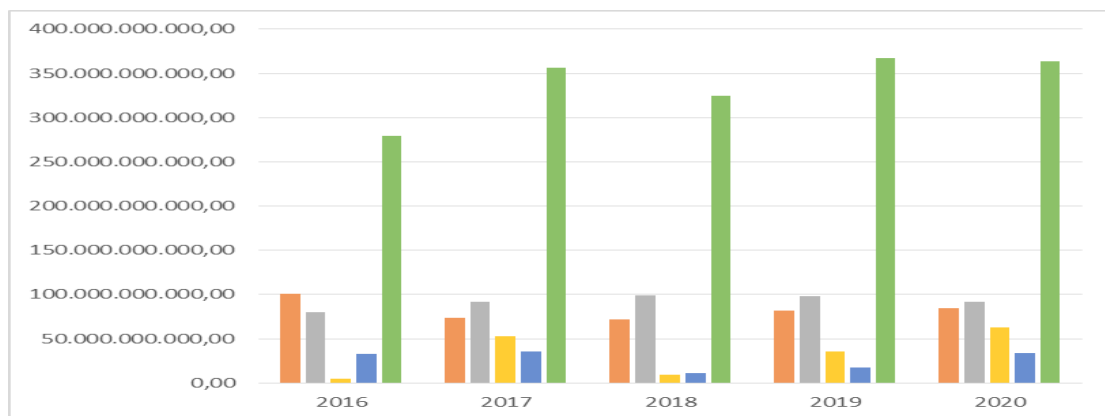
(Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)



c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan hibah diataranya pendapatan hibah dari pemerintah, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Desa.

Proporsi terbesar sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2016-2020 adalah Dana Desa yaitu sebesar 59,18%, disusul Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 16,23%, Pendapatan Hibah sebesar 14,63%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 5,43%, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 4,52%. Perkembangan trend dan proporsi realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2016-2020 sebagaimana data selengkapnya pada gambar berikut.



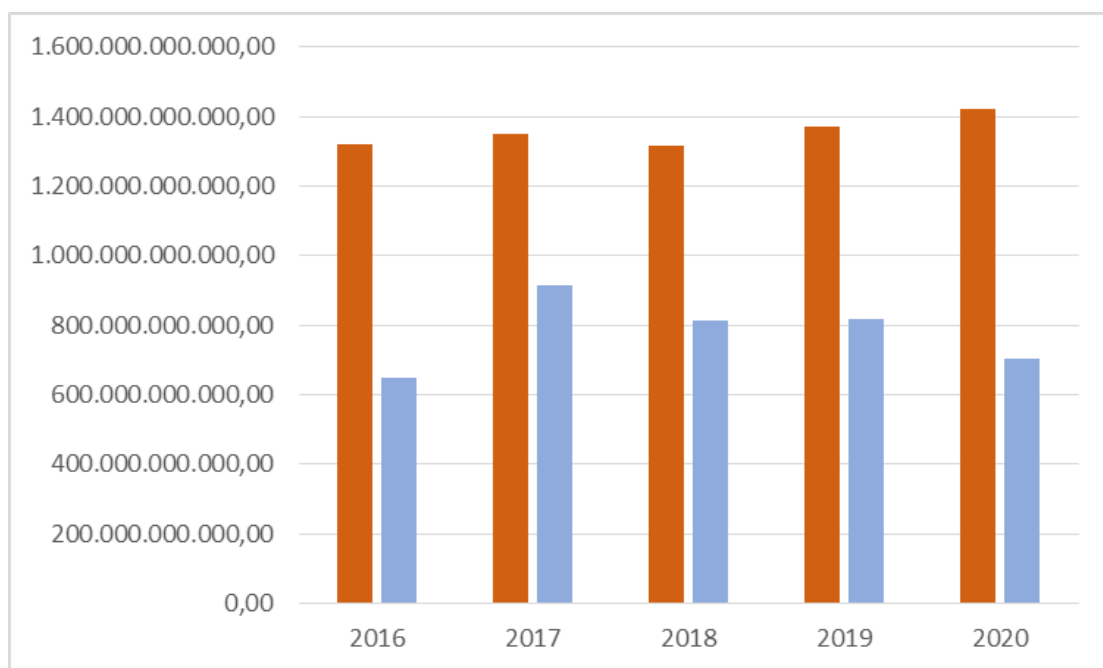
	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata
	Pendapatan Hibah	20,32%	12,04%	13,91%	13,58%	13,32%	14,63%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16,01%	15,12%	19,18%	16,43%	14,44%	16,23%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,00%	8,59%	1,75%	5,91%	9,88%	5,43%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,59%	5,79%	2,11%	2,89%	5,23%	4,52%
	Dana Desa	56,08%	58,46%	63,06%	61,19%	57,13%	59,18%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.4. Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber : BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

3.3.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selama kurun waktu dari 2016-2020, Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,26% per tahun, dengan rincian Belanja Langsung meningkat rata-rata 4,23% per tahun dan Belanja Tidak Langsung meningkat rata-rata 1,91% per tahun. Gambaran trend dan proporsi realisasi belanja pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 sebagaimana gambar sebagai berikut.



	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	67,10%	59,56%	61,79%	62,63%	66,88%	63,59%
	BELANJA LANGSUNG	32,90%	40,44%	38,21%	37,37%	33,12%	36,41%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.5. Trend dan Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah,



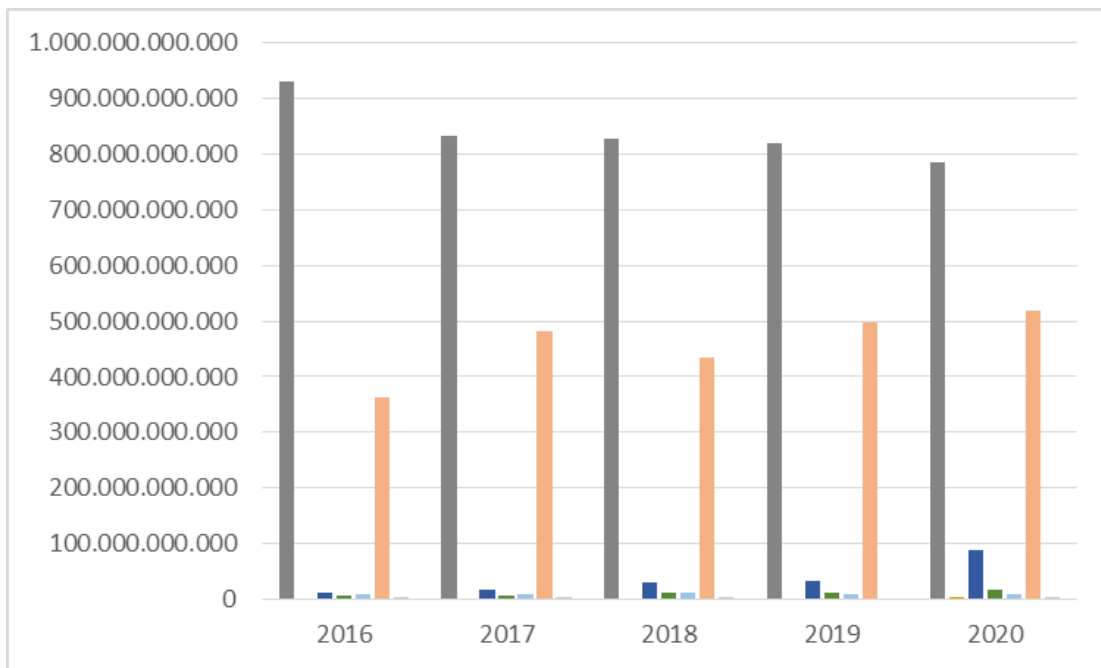
Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah daerah lainnya dan Partai Politik. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 6) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/ kegiatan.

Belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata 1,91%. Pertumbuhan per komponen fluktuatif dari tahun 2016-2020. Pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja bantuan sosial sebesar 158,30% diikuti belanja hibah 49,26%, belanja bantuan



keuangan 21,95%, belanja bagi hasil 0,60%, dan belanja pegawai - 2,92%. Peningkatan signifikan belanja bantuan sosial mulai tahun 2016 dikarenakan adanya kebijakan pengurangan kemiskinan dengan stimulan perbaikan kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Sedangkan pada belanja pegawai dikarenakan konsekuensi pelimpahan kewenangan sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui Trend dan proporsi realisasi rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada gambar berikut.



	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata
	Belanja Pegawai	70,37%	61,73%	62,92%	59,88%	55,23%	62,02%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%
	Belanja Hibah	0,81%	1,25%	2,28%	2,45%	6,30%	2,62%
	Belanja Bantuan Sosial	0,51%	0,49%	0,89%	0,82%	1,20%	0,78%
	Belanja Bagi Hasil	0,71%	0,72%	0,82%	0,59%	0,65%	0,70%
	Belanja Bantuan Keuangan	27,55%	35,75%	33,08%	36,26%	36,48%	33,82%
	Belanja Tidak Terduga	0,05%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,88%	99,98%

Gambar 3.6. Trend dan Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber : BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan



daerah.

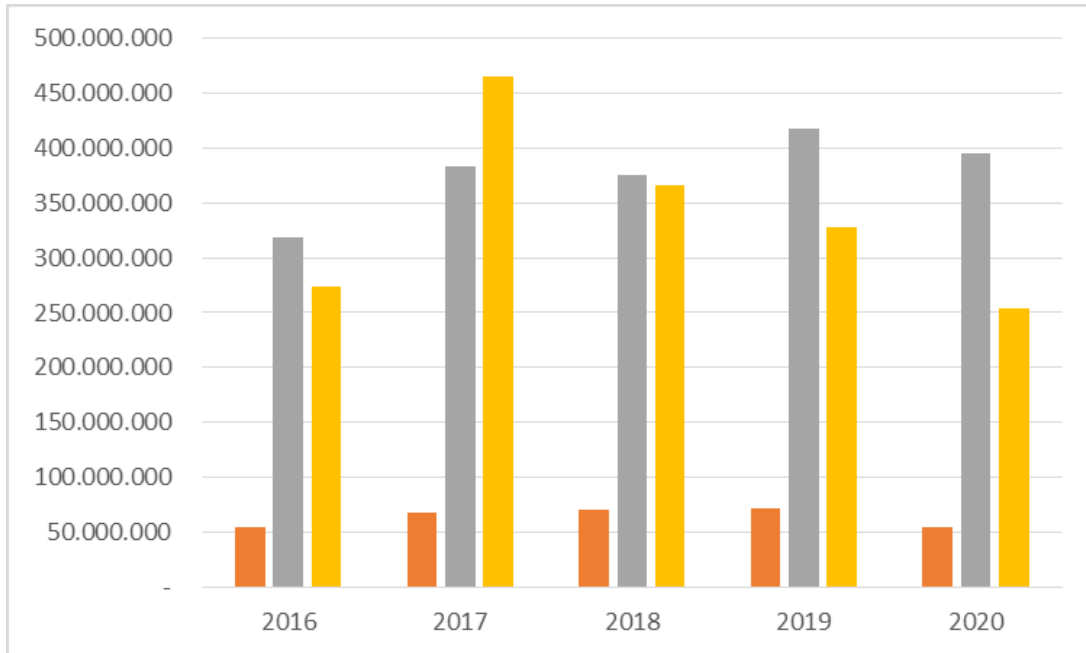
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap Belanja Daerah kurun waktu tahun 2015-2020 cenderung fluktuatif yang semula 32,90% pada tahun 2016 naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 40,44% dan selanjutnya terus menurun pada tahun 2018 menjadi 38,21%, tahun 2019 37,37%, dan pada perubahan tahun 2020 menjadi 33,71%. Untuk tahun 2020 penurunan juga disebabkan karena adanya pandemi Covid19 yang berimbas pada menurunnya kemampuan keuangan daerah dan anggaran difokuskan pada penanganan Covid19 dan penyediaan bantuan sosial untuk jaminan hidup masyarakat terdampak Covid19.

Komposisi Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal selama kurun waktu Tahun 2016–2020 didominasi oleh belanja barang jasa dan belanja modal. Rata rata proporsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja langsung adalah sebesar 48,93%, disusul belanja modal sebesar 42,86%, dan belanja pegawai sebesar 8,21%. Proporsi belanja barang dan jasa terhadap belanja langsung mengalami fluktuasi dari 49,28% di tahun 2016 turun menjadi 41,89% di tahun 2017, tahun 2018 naik menjadi 46,23%, dan terus meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 51,14% dan tahun 2020 menjadi 56,12%. Proporsi belanja modal terhadap total belanja langsung fluktuatif dari tahun 2016 sd 2020. Tahun 2016 proporsinya sebesar 42,35 %, tahun 2017 naik menjadi 50,78%, namun di tahun 2018 turun menjadi 45,04%. Penurunan ini terus terjadi di tahun 2019 yaitu menjadi 40,08%, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 36,06%. Tahun 2020 terdapat kebijakan pengurangan dan penghentian beberapa kegiatan fisik akibat pandemi Covid19. Komposisi belanja pegawai relatif stabil dari tahun 2016 sd 2020 yaitu sebesar 8,37% di tahun 2016, turun



menjadi 7,34% tahun 2017, namun naik kembali menjadi 8,73% di tahun 2018. Tahun 2019 kembali naik menjadi 8,78%, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 7,81%. Penurunan di tahun 2020 disebabkan adanya kebijakan pengurangan belanja honorarium kegiatan. Untuk mengetahui trend dan proporsi realisasi rincian belanja langsung daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata
Belanja Pegawai	8,37%	7,34%	8,73%	8,78%	7,81%	8,21%
Belanja Barang dan Jasa	49,28%	41,89%	46,23%	51,14%	56,12%	48,93%
Belanja Modal	42,35%	50,78%	45,04%	40,08%	36,06%	42,86%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.7. Trend dan Proporsi Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021
(Sumber : BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci

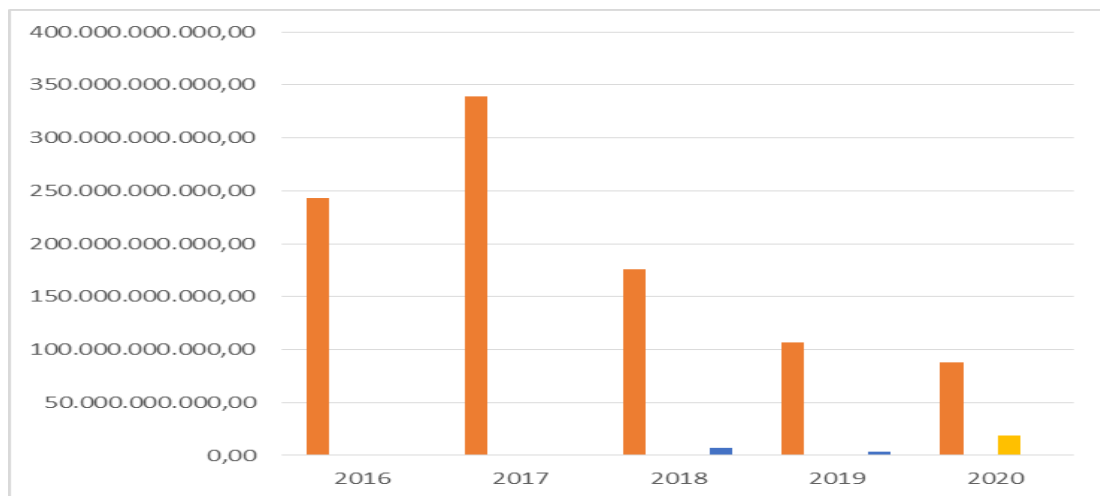


sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui trend dan proporsi realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99,99%	99,99%	95,95%	97,12%	81,56%	94,92%
	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,76%	3,55%
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,01%	0,01%	4,05%	2,88%	0,69%	1,53%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.8. Trend dan Proporsi Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan



maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) dan Pembentukan Dana Cadangan.

Selama kurun waktu Tahun 2016-2020, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha.

3.4. Analisis Keuangan Daerah

3.4.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal merupakan analisis yang menggunakan indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi “kesehatan fiskal” Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2020 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi yang baik yaitu Rp 2.593.648,00 pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 2.959.536,00 pada tahun 2016. Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 2.959.536,00 dan tahun 2018 turun menjadi Rp 2.860.920,00 dikarenakan terjadi penurunan pendapatan daerah. Tahun 2019 meningkat kembali menjadi Rp 3.024.348,00 dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi Rp 3.010.456,00

Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2020 dengan rata rata sebesar 0,28% harus diimbangi dengan upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi agar pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik. Gambaran pendapatan per

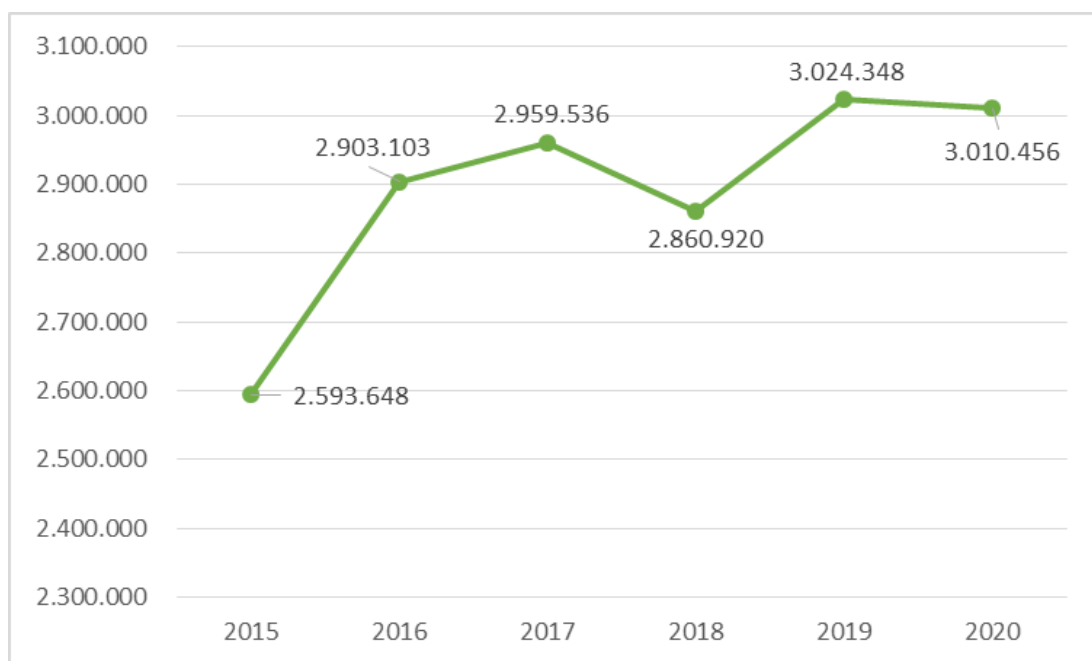


kapita Kabupaten Purworejo tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.3. Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rupiah)
1	2015	1.842.491.063.926	710.386	2.593.648
2	2016	2.069.000.842.574	712.686	2.903.103
3	2017	2.114.807.792.154	714.574	2.959.536
4	2018	2.049.783.717.823	716.477	2.860.920
5	2019	2.172.437.256.705	718.316	3.024.348
6	2020	2.167.260.086.741	719.911	3.010.456

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021, diolah



Gambar 3.9. Pendapatan Daerah Perkapita Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020

(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

2. Kemandirian Keuangan Daerah

a. *Input Based*

Secara teori, kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun pajak. Komponen PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah termasuk di dalamnya pendapatan dari laba BUMD. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini disebut dengan



money follows program.

Di dalam penghitungan DBH sendiri baik DBH Sumber Daya Alam (SDA) maupun DBH perpajakan, peran pemerintah pusat hanya bersifat akuntansi pembukuan untuk kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing daerah sesuai dengan mekanisme alokasi persentase yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, meski peran pemerintah daerah relatif kecil namun strategi pengembangan juga wajib diciptakan oleh masing-masing daerah tersebut.

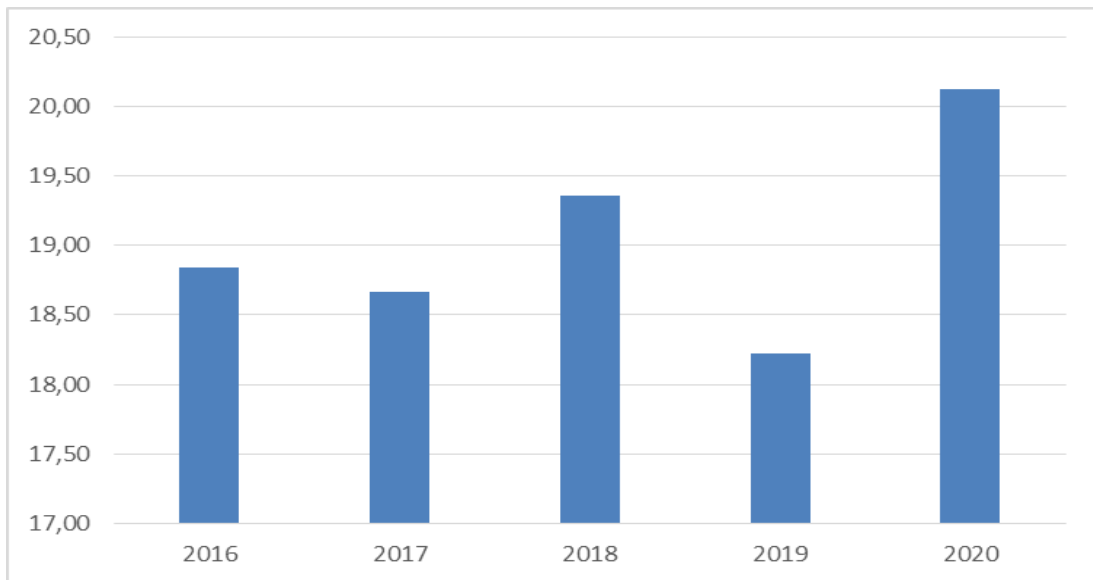
Bertolak dari teori tersebut, kemandirian daerah (APBD) kemudian dihitung dengan menggunakan rumusan PAD ditambah DBH (Pajak dan SDA) dibagi Total Belanja sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah. Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Purworejo yang digunakan sejak tahun 2016 hingga 2020, dapat dilihat bahwa terdapat tren yang fluktuatif di dalam penggambaran tingkat kemandirian APBD Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tahun 2016 tingkat kemandirian APBD kabupaten Purworejo sebesar 18,84% dan menurun menjadi 18,67% di tahun 2017. Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 19,36%. Tahun 2019 terjadi penurunan kemandirian menjadi sebesar 18,23%, namun kembali naik di tahun 2020 menjadi sebesar 20,13%.

Penurunan *share* PAD dan DBH dapat dikaitkan pertama dengan belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Kabupaten Purworejo yang terus meningkat setiap tahunnya. Karenanya perlu dilihat lagi sekaligus dilakukan evaluasi secara menyeluruh berbagai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD yang selama ini dilakukan oleh OPD yang terkait.

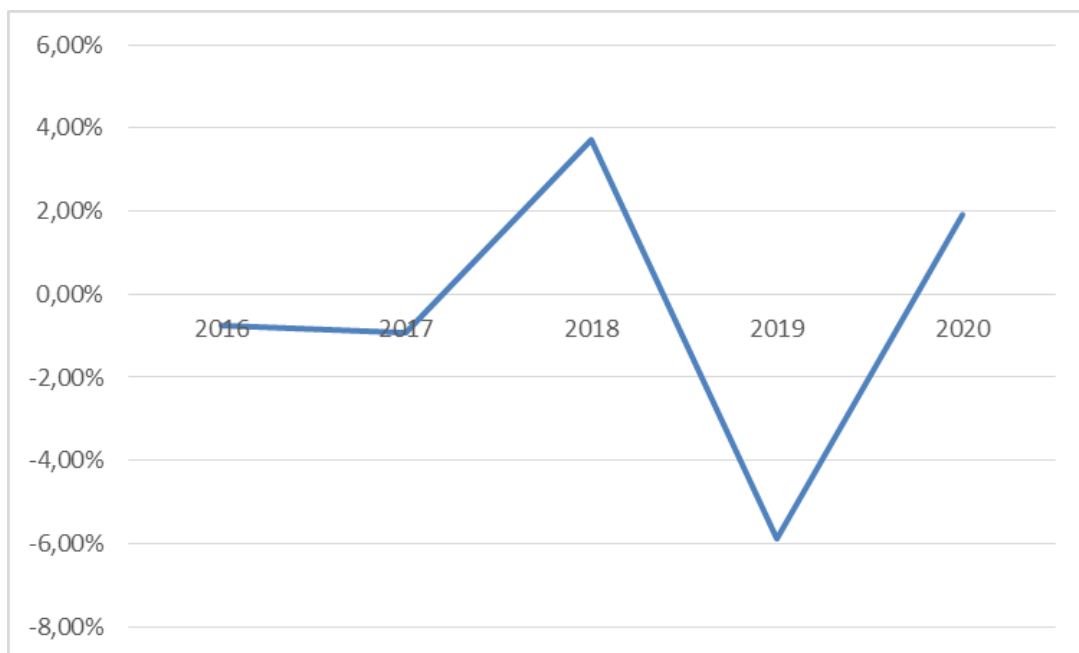
Selain itu adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Pemerintah Kabupaten Purworejo yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Kenaikan beban belanja



APBD ini menjadi positif jika memiliki dampak pertumbuhan dan pembangunan daerah namun menjadi berbahaya jika alokasi lebih banyak menyasar kegiatan yang tidak produktif dan memberikan dampak pertumbuhan ke depannya. Evaluasi kualitas spending dari APBD dapat dideteksi dengan menggunakan analisis penandaan anggaran (*budget tagging*) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.



Gambar 3.10. Share Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Purworejo Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020
(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)



Gambar 3.11. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2020
(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

Jika analisis *share* digunakan untuk melihat aspek kemandirian



dari APBD suatu daerah, maka analisis *growth* ditujukan untuk menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Di dalam rumusannya, digunakan metode laju pertumbuhan dari analisis *share*. Dari hasil perhitungan, nilai *growth* dari 2016-2017 terlihat menurun negatif dari -0,74% di tahun 2016 menjadi -0,91% di tahun 2017. Penurunan ini diakibatkan meningkatnya belanja daerah, sementara PAD dan DBH untuk tahun 2016-2017 cenderung mengalami peningkatan namun peningkatannya lebih rendah dari peningkatan belanja daerah. Tahun 2018 nilai *growth* meningkat menjadi 3,73%. Hal ini terjadi akibat penurunan prosentase belanja daerah yang tinggi, karena dalam saat yang bersamaan PAD juga mengalami penurunan. Penurunan PAD dan DBH masih berlangsung di tahun 2019 sementara belanja daerah meningkat kembali sehingga menyebabkan penurunan nilai *growth* di tahun 2019 menjadi sebesar -5,87%. Tahun 2020 nilai *growth* kembali meningkat menjadi 1,91%. Hal ini didukung oleh meningkatnya PAD dan DBH sementara belanja mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19.

Dengan menggunakan data realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2020, hipotesis yang diajukan di dalam analisis PDRB, *share* dan *growth* sepertinya masih terkoneksi satu dengan lainnya serta memperlihatkan pola yang hampir sama: menurun negatif setiap tahunnya dengan proporsional yang stabil, kecuali tahun 2018 dan 2020. Jika dikaitkan dengan aspek stabilitas, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Selain itu jika dikaitkan dengan tantangan pembangunan tematik pemerintah yang semakin kompleks ke depannya, pola tersebut dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi laju kebutuhan belanja yang naik secara signifikan.

Opsi yang diajukan jelas yaitu opsi realokasi belanja APBD menuju pola spending yang produktif dan berkualitas atau pola ekspansi pendapatan daerah serta pembiayaan inovatif APBD. Dilihat dari aspek pro dan kontra, opsi realokasi belanja APBD memiliki risiko yang lebih rendah dengan kendali utama di pemerintah serta tekanan politik yang lebih rendah. Namun output yang dihasilkan tidak akan terlalu signifikan dan masih berpotensi memunculkan adanya konflik kepentingan antar sektoral.



Sebaliknya opsi ekspansi pendapatan daerah melalui perluasan ekstensifikasi dan intensifikasi sekaligus pembiayaan inovatif daerah tentu memiliki risiko yang lebih tinggi namun dapat dimitigasi dengan kesiapan yang memadai. Kelebihannya output yang dihasilkan akan lebih besar dan mampu mengimbangi laju pertumbuhan belanja pembangunan yang lebih besar ke depannya.

b. Output Based

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2016- 2020, terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 78,70% di tahun 2016 dan berfluktuasi setiap tahunnya dikisaran 78% hingga tahun 2020. Meskipun secara struktur ekonomi peranan Konsumsi Rumah Tangga masih yang terbesar, tetapi sejak tahun 2016 hingga 2020 dominasinya berangsur mengecil dari 78,70% pada tahun 2016 menjadi 78,35% pada tahun 2020. Peranan ini diambil alih oleh PMTB yang semakin meningkat sejak 2016 sampai dengan 2019 dari 26,13% menjadi 27,88% terhadap sumbangan PDRB total Purworejo, walaupun menurun sedikit pada tahun 2020 menjadi 26,10%..

Tabel 3.4. Kontribusi PDRB Kabupaten Purworejo Menurut Pengeluaran Tahun 2015–2020 (%)

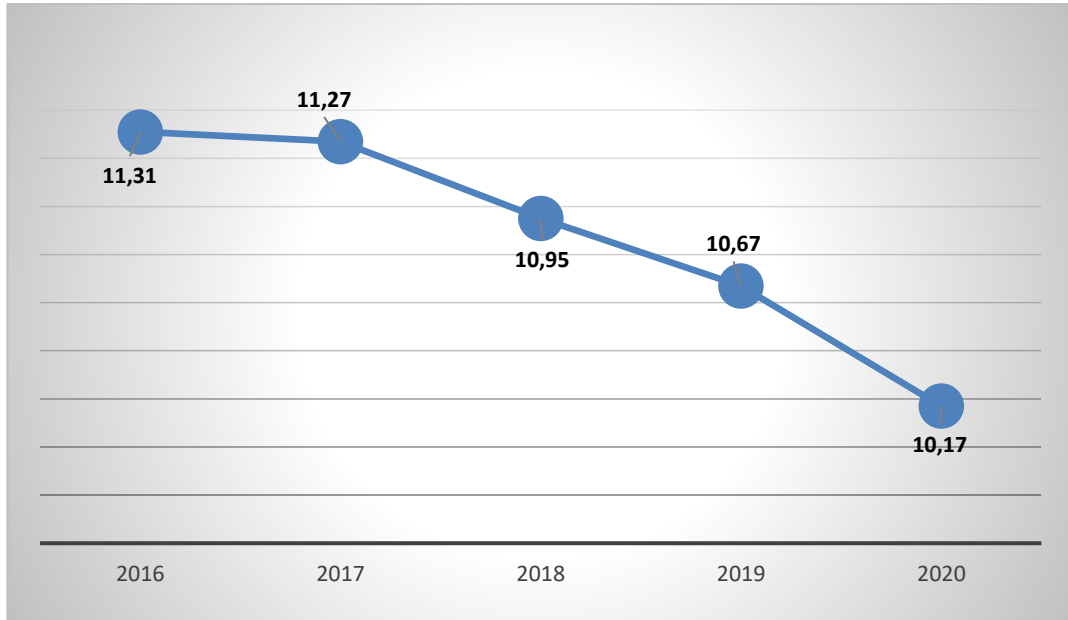
Jenis Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	78,70	78,45	78,22	78,33	78,35
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,92	1,91	1,92	2,04	2,03
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,31	11,27	10,95	10,67	10,17
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,13	26,54	27,40	27,88	26,10
E	Perubahan Inventori	0,83	1,15	1,68	1,16	1,31
F	Ekspor Barang dan Jasa	-18,89	-19,32	-20,17	-20,07	-17,97
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

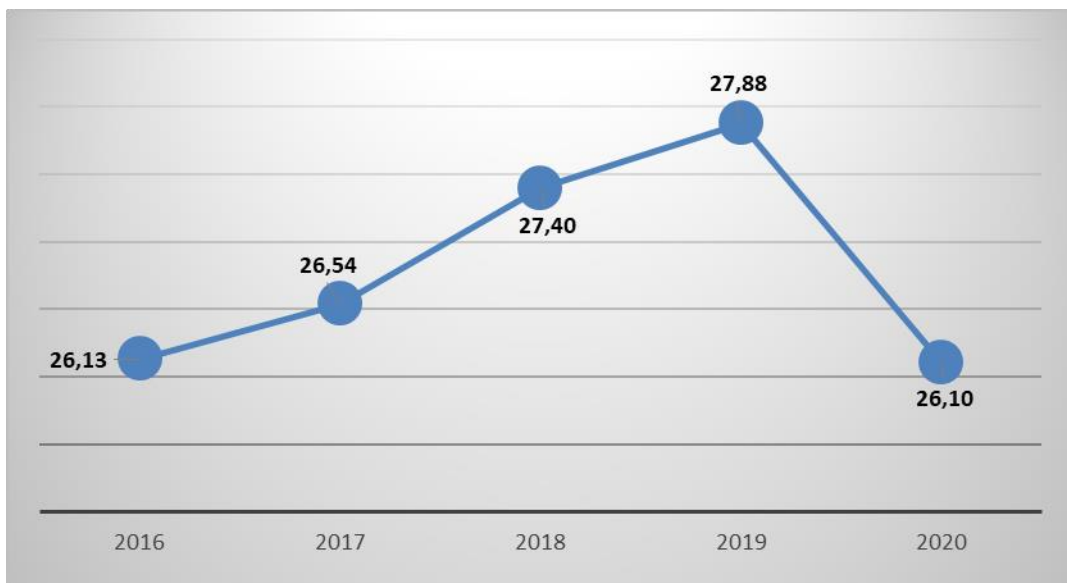
Peran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pertumbuhan ekonomi Purworejo dapat dilihat dari *share* APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami penurunan, dari 11,31% (2016) menjadi 10,17% (2020). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 4 (empat) tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal



terhadap PMTB mengalami tren peningkatan. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif meningkat, dimana belanja modal Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan PMTB. Pada tahun 2020 menurun cukup tajam yang salah satunya disebabkan adanya refokusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19



Gambar 3.12. Kontribusi APBD Kabupaten Purworejo terhadap PDRB Pada Komponen Konsumsi Pemerintah Tahun 2016-2020
(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)



Gambar 3.13. Kontribusi APBD Kabupaten Purworejo Terhadap PDRB pada Komponen PMTB Tahun 2016-2020
(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

Dominasi konsumsi rumah tangga di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Purworejo seharusnya dapat diimbangi dengan pembentukan modal investasi produktif ke depannya. Hal ini menjadi



urgen jika dikaitkan dengan status bonus demografi yang sudah dinikmati saat ini oleh Kabupaten Purworejo. Status bonus demografi yang dinikmati Kabupaten Purworejo menandakan adanya tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan. Dari sektor lapangan usaha prioritas juga terlihat potensi industri pengolahan, pertanian/kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Keseluruhan lapangan usaha tersebut tentu membutuhkan penempatan bonus demografi secara memadai. Ketika sumbangan konsumsi rumah tangga ke depannya dapat diubah menjadi PMTB melalui pembentukan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, maka benefit yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo akan lebih berdampak jangka dan permanen. Peran pemerintah provinsi sangat vital dalam periode pembentukan modal awal melalui *spending* berkualitas di dalam struktur belanja APBD.

3. Ruang Fiskal Daerah.

Ruang fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Purworejo.

Kemampuan keuangan daerah adalah merupakan gambaran kondisi keuangan daerah untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah direncanakan atau belanja daerah dan rencana pengeluaran pembiayaan yang telah direncanakan. Apabila rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan semakin besar, maka kemampuan daerah untuk membiayai belanja daerah akan semakin besar pula. Ruang fiskal Kabupaten Purworejo pada tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pada tahun 2016-2020 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 33,55%, meningkat menjadi 42,82% pada tahun 2017. Tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar



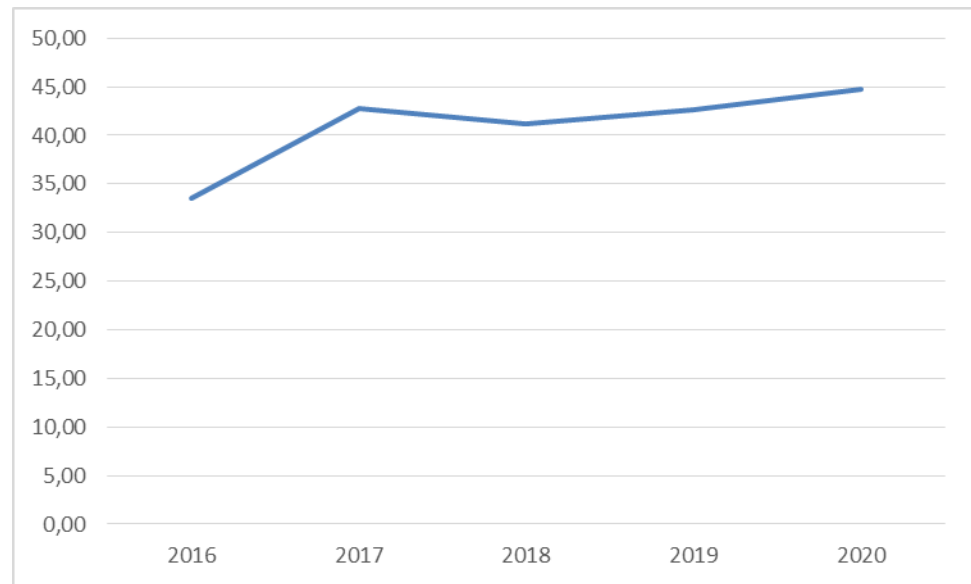
41,24%, dan terus meningkat kembali di tahun 2019 42,63% dan tahun 2020 menjadi sebesar 44,77%. Kondisi tersebut dipengaruhi semakin meningkatnya pendapatan daerah disatu sisi dan semakin menurunnya belanja pegawai. Namun demikian kedepan masih perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Purworejo. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.5. Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus/Dana Darurat	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal (%)
2016	Rp 2.069.000.842.574	Rp 101.122.050.000	Rp 339.417.614.546	Rp 5.000.000.000	Rp 929.269.576.117	Rp 694.191.601.911	33,55
2017	Rp 2.114.807.792.154	Rp 73.321.466.245	Rp 250.875.295.253	Rp 52.286.908.000	Rp 832.772.371.824	Rp 905.551.750.832	42,82
2018	Rp 2.049.784.186.054	Rp 71.670.023.690	Rp 297.357.422.378	Rp 9.000.000.000	Rp 826.503.323.039	Rp 845.253.416.947	41,24
2019	Rp 2.172.436.897.114	Rp 81.401.202.073	Rp 309.541.855.415	Rp 35.465.110.000	Rp 819.962.960.299	Rp 926.065.769.327	42,63
2020	Rp 2.167.260.086.741	Rp 84.855.970.332	Rp 263.711.964.583	Rp 62.978.422.000	Rp 785.403.848.312	Rp 970.309.881.514	44,77

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Gambar 3.14. Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)



4. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

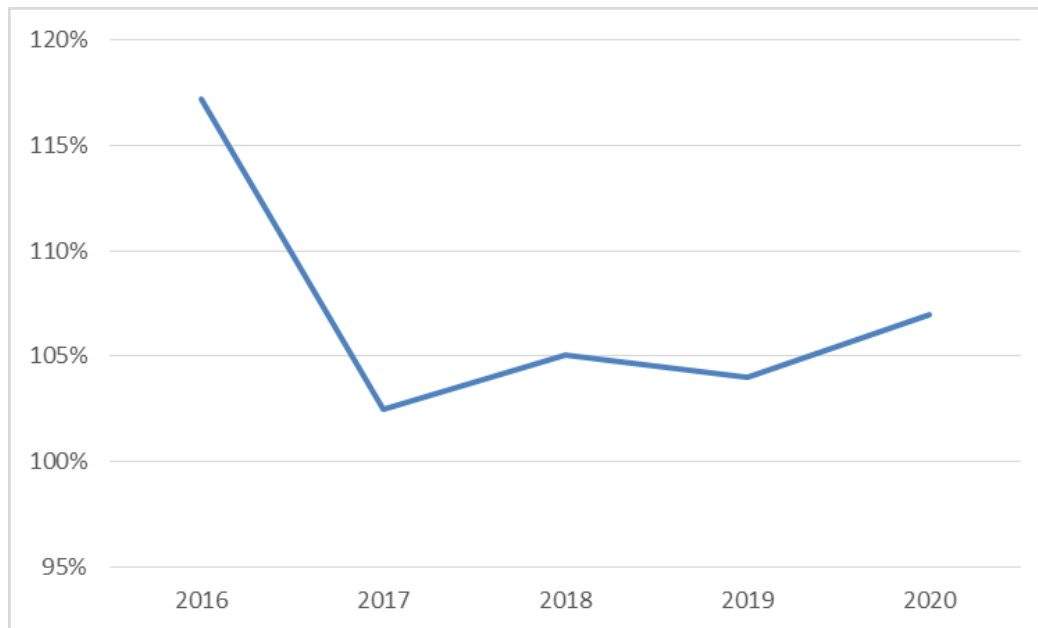
Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 117%, namun menurun menjadi 102% di tahun 2017. Tahun 2018 meningkat menjadi 105% dan tahun 2019 menurun kembali menjadi 104%. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 107%.

Dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/ obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/ swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan. Kemampuan mendanai belanja daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%)
					Pendapatan	Pengeluaran	
2016	2.069.000.842.574	242.867.071.052	1.968.159.503.754	4.000.000.000	2.311.867.913.626	1.972.159.503.754	117%
2017	2.114.807.792.154	339.211.694.262	2.381.393.897.721	13.094.000.000	2.454.019.486.416	2.394.487.897.721	102%
2018	2.049.784.186.054	183.208.287.348	2.125.880.839.764	-	2.232.992.473.402	2.125.880.839.764	105%
2019	2.172.436.897.114	110.292.538.922	2.186.289.226.260	8.600.000.000	2.282.729.436.036	2.194.889.226.260	104%
2020	2.167.260.086.741	107.701.046.205	2.126.472.056.535	-	2.274.961.132.946	2.126.472.056.535	107%

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Gambar 3.15. Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

5. Belanja Modal

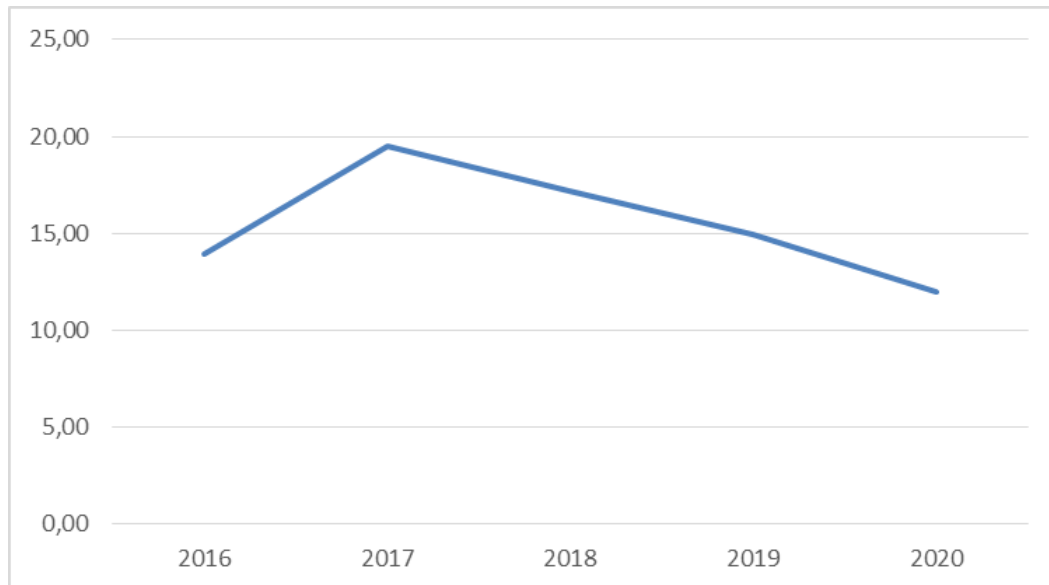
Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Purworejo berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Pada tahun 2016 rasio belanja modal terhadap total belanja 13,93%. Tahun 2017 naik menjadi 19,53%, dan turun lagi menjadi 17,21% di tahun 2018, dan akhirnya terus turun menjadi sebesar 14,98% di tahun 2019 dan 11,95% di tahun 2020. Belanja modal tahun 2017 dan 2018 tinggi karena selain pembangunan infrastruktur jalan juga pembangunan kembali Pasar Baledono yang rusak akibat kebakaran, penataan alun alun Purworejo dan pembangunan beberapa kantor pemerintahan daerah. Tahun 2020 belanja modal mengalami penurunan akibat adanya refocusing dan realokasi kegiatan untuk penanganan pandemi Covid 19. Rincian rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2016 - 2020 sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.7. Rasio Belanja Modal Daerah terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
2016	274.262.561.414,00	1.968.159.503.754,00	13,93
2017	465.126.656.366,00	2.381.393.897.720,60	19,53
2018	365.866.406.531,00	2.125.880.839.764,00	17,21
2019	327.413.701.413,50	2.186.289.226.259,82	14,98
2020	254.015.009.152,00	2.126.472.056.535,00	11,95

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Gambar 3.16. Rasio Belanja Modal Daerah terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

6. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai tidak langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo fluktuatif, dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 47,22% dan menurun menjadi 34,97% di tahun 2017. Tahun 2018 meningkat menjadi 38,88% dan tahun 2019 menurun kembali menjadi 37,50% demikian pula untuk tahun 2020 menurun menjadi 36,93%.

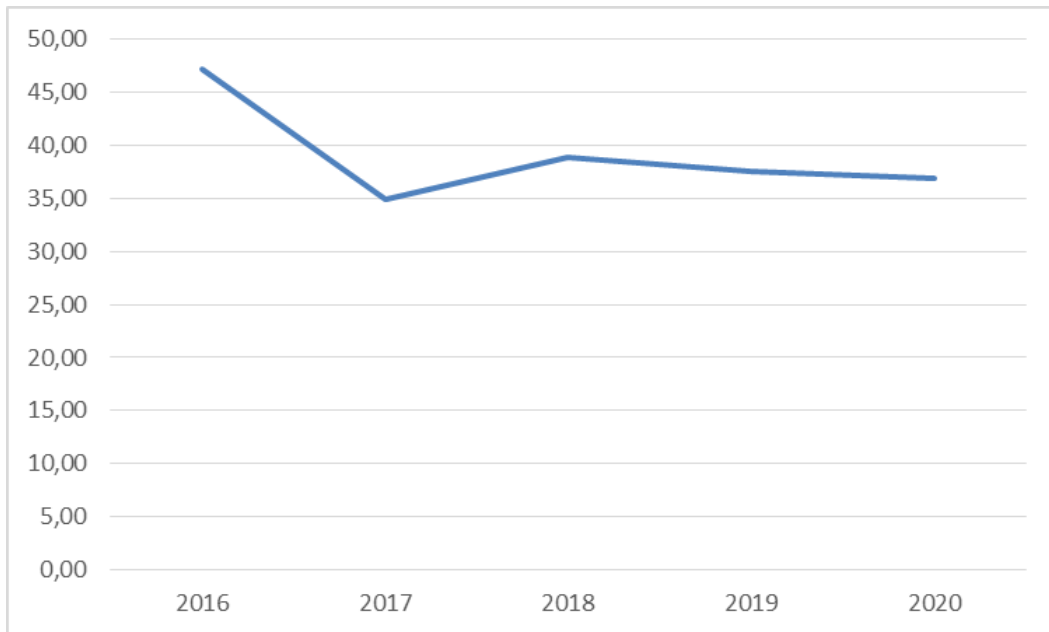
Penurunan ini salah satu sebabnya adalah semakin berkurangnya jumlah ASN karena pensiun sementara pemenuhan ASN baru melalui penerimaan CPNS jumlahnya relatif terbatas tidak sebanding dengan jumlah ASN yang pensiun.



Tabel 3.8. Rasio Belanja Pegawai dengan Total Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja (Rp)	Belanja Pegawai Tidak Langsung
2016	929.269.576.117,00	1.968.159.503.754,00	47,22%
2017	832.772.371.824,00	2.381.393.897.720,60	34,97%
2018	826.503.323.039,00	2.125.880.839.764,00	38,88%
2019	819.962.960.299,00	2.186.289.226.259,82	37,50%
2020	785.403.848.312,00	2.126.472.056.535,00	36,93%

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Gambar 3.17. Rasio Belanja Pegawai dengan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

7. Tax Ratio

Tax Ratio Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang semula pada tahun 2015 sebesar 0,27%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,28%, dan terus meningkat di tahun 2017 menjadi 0,33%, tahun 2018 meningkat menjadi 0,40% dan tahun 2019 menjadi 0,56%. Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi sebesar 0,40% akibat adanya pandemi Covid 19. *Tax ratio* ini masih perlu ditingkatkan karena masih berada dikisaran 1%. Indikasi penyebab rendahnya angka *tax ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu

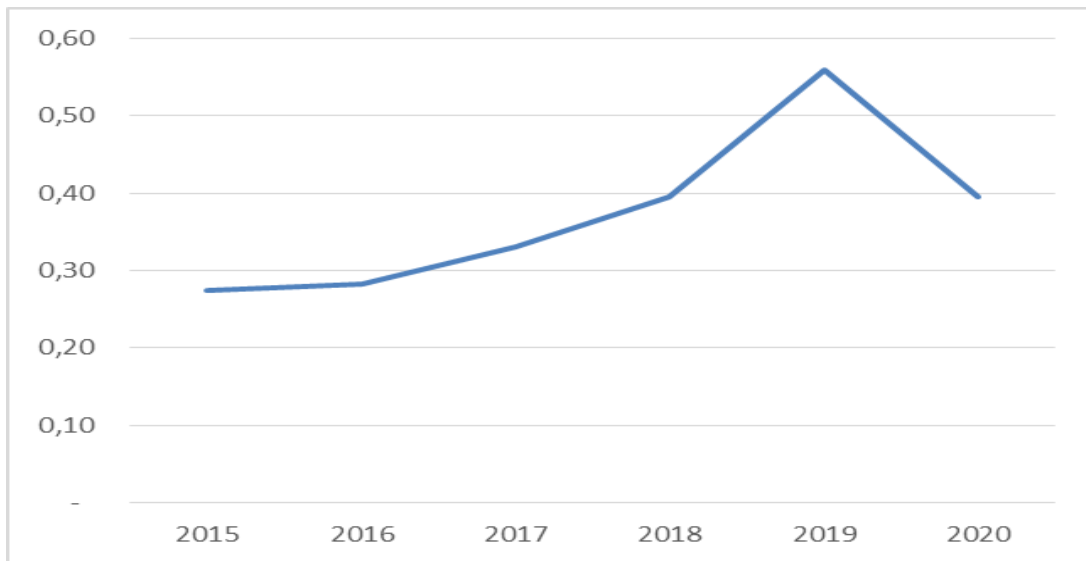


daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya *tax ratio* bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan. Untuk mengetahui rincian *tax ratio* Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.9. Tax Ratio Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020

Tahun	Y Pajak	PDRB	Tax Ratio %
2015	38.016.527.145,00	13.865.643.620.000	0,27
2016	42.380.056.430,00	15.013.872.350.000	0,28
2017	53.416.617.017,00	16.155.396.440.000	0,33
2018	68.816.307.333,00	17.418.243.420.000	0,40
2019	77.648.792.775,00	18.675.140.350.000	0,56
2020	74.189.987.143,00	18.637.129.250.000	0,40

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Gambar 3.18. Tax Ratio Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2020

(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021)

3.4.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2020 akan



dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya fluktuatif, dengan tren yang menurun sampai dengan tahun 2019, akan tetapi kembali naik di tahun 2020. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Ratio Lancar Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kas	Hutang Jangka Pendek	Persentase (%)
1	2016	341.292.406.031	13.812.862.352	2470,83
2	2017	175.792.871.328	8.432.879.374	2084,61
3	2018	107.135.545.936	22.869.355.630	468,47
4	2019	87.840.209.776	27.985.586.663	313,88
5	2020	148.491.088.340	35.472.404.185	418,61

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

Demikian pula yang diukur menggunakan *Quick Ratio*, menunjukkan hasil dengan kondisi fluktuatif. Namun demikian, tiap tahunnya memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek baik. Untuk mengetahui rincian *Quick Ratio* daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Quick Ratio Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Tahun	Aset Lancar	Hutang Jangka Pendek	Persentase (%)
1	2016	398.477.995.391	13.812.862.352	2884,83
2	2017	222.182.939.691	8.432.879.374	2634,72
3	2018	158.090.200.051	22.869.355.630	691,28
4	2019	164.525.158.968	27.985.586.663	587,89
5	2020	198.230.395.678	35.472.404.185	558,83

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

- b. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

- 1) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Rasio total hutang terhadap total aset semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 0,57% dan menurun di tahun 2017



menjadi 0,33%. Akan tetapi di tahun 2018 meningkat kembali menjadi 0,82 dan terus meningkat di tahun 2019 menjadi 0,82% dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,08%. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada setiap tahun selalu meningkat, walaupun relatif kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Ratio Hutang terhadap Aset Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase (%)
1	2016	13.812.862.352	2.415.635.223.398	0,57
2	2017	8.432.879.374	2.588.956.121.375	0,33
3	2018	22.869.355.630	2.772.960.299.931	0,82
4	2019	27.985.586.663	2.987.231.520.048	0,94
5	2020	35.472.404.185	3.274.676.434.776	1,08

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

2) Rasio Hutang Terhadap Modal,

Rasio Hutang Terhadap Modal, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar 0,58% dan menurun menjadi 0,33% di tahun 2017. Akan tetapi naik di tahun 2018 menjadi 0,83% dan terus naik menjadi 0,95% di tahun 2019 dan 1,01% di tahun 2020. Namun demikian nilai total kewajiban masih jauh di bawah total ekuitas sehingga semakin mandiri tidak tergantung pada hutang. Untuk mengetahui rincian rasio total hutang terhadap ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas	Persentase (%)
1	2016	13.812.862.352	2.401.822.361.046	0,58
2	2017	8.432.879.374	2.580.523.242.002	0,33
3	2018	22.869.355.630	2.750.090.944.302	0,83
4	2019	27.985.586.663	2.959.245.933.385	0,95
5	2020	35.472.404.185	3.239.204.030.591	1,10

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Adapun perkembangan kondisi neraca daerah selama kurun waktu 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.14. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

URAIAN	REF	2016 Audited	2017 Audited	2018 Audited	2019 Audited	2020 Audited	Rata Rata Pertumbuhan (%)
ASET							
ASET LANCAR							
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	302.814.132.023,00	147.755.150.067,00	88.216.985.175,00	72.653.771.644,00	104.882.753.785,00	-16,20%
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	928.600,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	34.036.892.484,00	25.451.647.732,00	17.890.952.337,00	6.803.772.645,83	37.333.187.144,83	82,95%
Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD	5.3.1.1.1.5	4.440.491.524,00	2.586.073.529,00	1.027.608.424,00	8.381.736.886,00	6.275.147.410,00	147,12%
Setara Kas	5.3.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3	42.228.673.548,00	27.086.529.202,00	27.379.838.941,00	58.222.168.885,62	31.255.145.153,64	7,89%
Piutang Lainnya	5.3.1.1.4	1.304.379.500,00	1.285.129.500,00	6.860.596.561,00	3.679.719.277,00	2.941.632.998,00	91,49%
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.5	-10.275.734.896,05	-11.189.930.801,10	-12.375.075.665,80	-15.274.407.427,19	-16.284.615.906,00	12,38%
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.6	55.739.744,00	160.500.000,00	750.560.000,00	701.955.084,00	616.946.380,00	134,25%
Persediaan	5.3.1.1.7	23.872.531.463,66	29.047.840.462,53	28.338.734.278,39	29.355.513.373,23	31.210.198.712,36	7,29%
JUMLAH ASET LANCAR		398.477.995.390,61	222.182.939.691,43	158.090.200.050,59	164.525.158.968,49	198.230.395.677,83	-12,13%
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Jangka Panjang Non Permanen							
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



URAIAN	REF	2016 Audited	2017 Audited	2018 Audited	2019 Audited	2020 Audited	Rata Rata Pertumbuhan (%)
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir		-260.704.566,00	-234.772.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		12.739.295.434,00	12.765.227.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen							
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	97.787.786.140,77	108.430.822.932,19	103.424.887.741,70	113.968.654.479,46	116.759.219.284,51	4,73%
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.1.6	97.787.786.140,77	108.430.822.932,19	103.424.887.741,70	113.968.654.479,46	116.759.219.284,51	4,73%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		110.527.081.574,77	121.196.050.152,89	103.424.887.741,70	113.968.654.479,46	116.759.219.284,51	1,91%
ASET TETAP							
Tanah	5.1.6.1.3.1	435.272.087.336,56	429.806.450.062,56	431.031.527.302,56	440.013.150.696,56	407.457.777.786,56	-1,57%
Peralatan dan Mesin	5.1.6.1.3.2	364.937.122.786,53	429.596.472.181,51	476.909.049.877,21	516.762.619.164,55	640.366.349.487,50	15,25%
Gedung dan Bangunan	5.1.6.1.3.3	858.189.634.551,82	1.077.922.842.343,69	1.181.839.224.542,11	1.419.126.302.071,70	1.460.495.881.892,76	14,56%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.6.1.3.4	905.428.870.302,02	1.019.586.287.377,12	1.160.178.275.872,61	1.293.648.379.827,02	1.364.610.569.412,26	10,85%
Aset Tetap Lainnya	5.1.6.1.3.5	59.289.540.154,51	68.111.785.076,33	80.306.260.517,33	93.163.035.076,71	93.207.513.528,45	12,21%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.6.1.3.6	18.428.076.288,00	41.230.182.949,96	128.720.026.060,97	7.776.327.705,97	18.415.198.186,97	94,70%
Akumulasi Penyusutan		-752.114.724.073,28	-841.223.432.911,37	-962.700.005.963,31	-1.076.768.832.557,50	-	9,53%
JUMLAH ASET TETAP		1.889.430.607.346,16	2.225.030.587.079,80	2.496.284.358.209,48	2.693.720.981.985,01	2.907.784.457.737,00	11,45%
DANA CADANGAN							
Dana Cadangan	5.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA							
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	0,00	0,00	0,00			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	3.489.420.000,00	3.489.420.000,00	3.489.420.000,00	3.489.420.000,00	52.453.860.660,00	350,81%



URAIAN	REF	2016 Audited	2017 Audited	2018 Audited	2019 Audited	2020 Audited	Rata Rata Pertumbuhan (%)
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	1.303.502.912,90	3.893.077.134,12	4.667.858.001,74	5.701.680.199,86	6.733.181.899,86	64,70%
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	12.406.616.173,08	13.164.047.317,14	7.003.575.927,94	5.825.624.415,37	- 7.284.680.483,00	-70,64%
JUMLAH ASET LAINNYA	5.3.1.4	17.199.539.085,98	20.546.544.451,26	15.160.853.929,68	15.016.724.615,23	51.902.362.076,86	59,48%
JUMLAH ASET		2.415.635.223.397,52	2.588.956.121.375,38	2.772.960.299.931,45	2.987.231.520.048,19	3.274.676.434.776,20	7,91%
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	56.439.503,00	7.021.919,00	23.911.798,00	0,00	2.011.929,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122.750.150,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	2.109.260.244,84	916.982.053,71	1.150.496.369,92	1.124.608.144,54	1.043.164.242,85	-10,14%
Utang Beban	5.3.2.1.4	11.448.645.633,00	6.402.644.868,00	20.665.896.965,00	26.622.194.047,60	15.066.143.392,20	41,03%
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	198.516.971,00	1.106.230.532,96	1.029.050.497,00	238.784.471,00	238.334.471,00	93,32%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2	13.812.862.351,84	8.432.879.373,67	22.869.355.629,92	27.985.586.663,14	35.472.404.185,05	45,34%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		13.812.862.351,84	8.432.879.373,67	22.869.355.629,92	27.985.586.663,14	35.472.404.185,05	45,34%
EKUITAS							
EKUITAS	5.3.3	2.401.822.361.045,68	2.580.523.242.001,71	2.750.090.944.301,53	2.959.245.933.385,05	3.239.204.030.591,15	7,77%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.415.635.223.397,52	2.588.956.121.375,38	2.772.960.299.931,45	2.987.231.520.048,19	3.274.676.434.776,20	7,91%

Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021, diolah



3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Kebijakan ini bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan, adapun secara terinci dijelaskan sebagai berikut.

3.5.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Daerah Kabupaten Purworejo selama kurun waktu lima tahun (2016–2020) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa dengan persentase yang relatif besar.

Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2016–2020, menunjukkan kecenderungan terjadi penurunan. Hal ini terutama disebabkan semakin berkurangnya alokasi belanja pegawai akibat penurunan jumlah ASN dan kebijakan yang selektif terhadap pemberian honorarium kegiatan. Di lihat dari proporsi belanja aparatur terhadap belanja daerah selama kurun waktu 2016–2020, terjadi penurunan dari 49,87% pada tahun 2016 menjadi 37,58% pada tahun 2017, dan di tahun 2018 naik menjadi 42,22%, akan tetapi turun kembali di tahun 2019 menjadi 40,63% dan di tahun 2020 turun menjadi 39,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Purworejo semakin baik. Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2016–2020 secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut.



Tabel 3.15. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 (dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung					
	Belanja Pegawai	929.269.576,00	832.772.372,00	826.503.323,00	819.962.960,00	785.403.848,00
B	Belanja Langsung					
	Belanja Pegawai	54.171.899,00	67.195.719,00	70.945.243,00	71.747.613,00	55.039.798,00
	Jumlah	983.441.475,00	899.968.091,00	897.448.566,00	891.710.573,00	840.443.646,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2020

Tabel 3.16. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Total Belanja Aparatur (000 Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (000 Rp)	Prosentase
1	2016	983.441.475,00	1.972.159.504,00	49,87%
2	2017	899.968.091,00	2.394.487.898,00	37,58%
3	2018	897.448.566,00	2.125.880.840,00	42,22%
4	2019	891.710.573,00	2.194.889.226,00	40,63%
5	2020	840.443.646,00	2.126.472.057,00	39,52%

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021

3.5.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada analisis ini dapat kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2016 dan 2020 mengalami surplus sebesar 4,68% dan 1,88%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan untuk membiayai semua belanja semakin baik. Adapun kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Untuk melihat kondisi defisit riil anggaran secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.17. Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.069.000.842.574,00	100%	2.114.807.792.154,00	100%	2.049.783.717.823,00	100%	2.172.437.256.704,65	100%	2.167.260.086.741,00	100%
	Dikurangi Realisasi :										
	a. Belanja Daerah	1.968.159.503.754,00	95,13%	2.265.141.731.647,00	107,11%	2.125.880.557.581,00	103,71%	2.186.305.448.196,82	100,64%	2.126.472.056.535,00	98,12%
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000,00	0,19%	13.094.000.000,00	0,62%	0,00	0,00%	8.600.000.000,00	0,40%	0,00	0,00%
	Surplus/Defisit Riil	96.841.338.820,00	4,68%	-163.427.939.493,00	-7,73%	-76.096.839.758,00	-3,71%	-22.468.191.492,17	-1,03%	40.788.030.206,00	1,88%
2	Surplus/Defisit Riil Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan										
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	242.840.321.052,00	99,99%	339.192.444.262,00	99,99%	175.783.754.409,00	95,95%	107.111.633.638,00	97,12%	87.840.209.775,83	81,56%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00		0,00		0,00		19.122.750.150,00	17,76%
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	26.750.000,00	0,01%	19.250.000,00	0,01%	7.424.532.939,00	4,05%	3.180.945.302,00	2,88%	738.086.279,00	0,69%
3	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	242.867.071.052,00	100,00%	339.211.694.262,00	100,00%	183.208.287.348,00	100,00%	110.292.578.940,00	100,00%	107.701.046.204,83	100,00%
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	339.708.409.872,00	100,00%	175.783.754.769,00	100,00%	107.111.447.590,00	100,00%	87.824.387.447,83	100,00%	148.489.076.410,83	100,00%

Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021, diolah

**Tabel 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp.)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
01.00	Jumlah SiLPA	339.708.409.872,00	100%	175.783.754.769,00	100%	107.111.633.638,00	100%	87.840.209.775,83	100%	148.489.076.410,83	100,00%
02.00	Pelampauan penerimaan PAD	20.288.598.982,15	5,97%	29.538.594.943,40	16,80%	8.019.203.301,00	7,49%	- 14.066.947.797,35	-16,01%	42.780.540.778,00	28,81%
03.00	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	133.277.402.118,00	39,23%	35.184.901.686,00	20,02%	- 16.796.789.904,00	-15,68%	- 13.721.260.436,00	-15,62%	9.033.011.842,00	6,08%
04.00	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 4.917.453.457,83	-1,45%	- 5.207.919.863,00	-2,96%	7.682.735.934,00	7,17%	15.594.266.511,00	17,75%	- 4.893.727.452,00	-3,30%
05.00	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	191.059.862.229,68	56,24%	116.268.178.002,60	66,14%	108.206.484.307,00	101,02%	100.034.151.498,18	113,88 %	101.569.251.242,83	68,40%
06.00	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum	-		-		-		-		-	
07.00	Kegiatan lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber: BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



3.6. Kerangka Pendanaan

3.6.1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2026

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2016-2020, maka pendapatan daerah tahun 2021-2026 diupayakan dapat meningkat. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Selanjutnya pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang. Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. yaitu :

1. Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
2. Optimalisasi pungutan PAD melalui :
 - a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan Retribusi Daerah.



- b. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
 - c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - d. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
 - e. Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - f. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
 - g. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
 4. Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah

Tabel.3.19. Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

KODE	REKENING	TAHUN 2021*	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	2.184.276.409.685,00	2.261.008.696.010,00	2.276.700.572.025,00	2.290.822.117.668,00	2.308.642.202.337,00	2.328.022.923.362,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	322.798.976.685,00	399.531.263.010,00	415.223.139.025,00	429.344.684.668,00	447.164.769.337,00	466.545.490.362,00
4.1.01	Pajak Daerah	78.892.114.588,00	90.773.280.656,00	94.883.379.656,00	100.147.575.356,00	105.906.752.756,00	109.083.955.339,00
4.1.02	Retribusi Daerah	22.528.793.602,00	34.736.500.042,00	35.194.474.442,00	35.337.879.298,00	35.433.646.959,00	36.453.259.427,00
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.541.555.092,00	15.534.642.372,00	17.151.090.433,00	16.316.885.247,00	17.279.461.016,00	18.274.636.057,00
4.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.836.513.403,00	258.486.839.940,00	267.994.194.494,00	277.542.344.767,00	288.544.908.606,00	302.733.639.539,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.791.387.993.000,00	1.791.387.993.000,00	1.791.387.993.000,00	1.791.387.993.000,00	1.791.387.993.000,00	1.791.387.993.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.663.656.286.000,00	1.663.656.286.000,00	1.663.656.286.000,00	1.663.656.286.000,00	1.663.656.286.000,00	1.663.656.286.000,00



KODE	REKENING	TAHUN 2021*	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.278.929.017.000,00	1.278.929.017.000,00	1.278.929.017.000,00	1.278.929.017.000,00	1.278.929.017.000,00	1.278.929.017.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.386.753.000,00	26.386.753.000,00	26.386.753.000,00	26.386.753.000,00	26.386.753.000,00	26.386.753.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	913.937.548.000,00	913.937.548.000,00	913.937.548.000,00	913.937.548.000,00	913.937.548.000,00	913.937.548.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	114.262.680.000,00	114.262.680.000,00	114.262.680.000,00	114.262.680.000,00	114.262.680.000,00	114.262.680.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	224.342.036.000,00	224.342.036.000,00	224.342.036.000,00	224.342.036.000,00	224.342.036.000,00	224.342.036.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	20.734.044.000,00	20.734.044.000,00	20.734.044.000,00	20.734.044.000,00	20.734.044.000,00	20.734.044.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	363.993.225.000,00	363.993.225.000,00	363.993.225.000,00	363.993.225.000,00	363.993.225.000,00	363.993.225.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.731.707.000,00	127.731.707.000,00	127.731.707.000,00	127.731.707.000,00	127.731.707.000,00	127.731.707.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00	107.808.707.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00	19.923.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00	70.089.440.000,00

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

- 1) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan



Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;



- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;



- 15) pendapatan dari BLUD;
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundangundangan mengenai barang milik daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek

a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi;



- DBH-Perikanan;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun berkenaan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran berkenaan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya.
 - Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan: • DAK Fisik • DAK Non Fisik Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran berkenaan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 2) Dana Insentif Daerah
- Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu



berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa berkenaan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

- 1) Pendapatan bagi hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan bantuan keuangan, merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota



lainnya.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

b) Dana darurat.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri



yang diselenggarakan Kabupaten Purworejo

3.6.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca Covid-19. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan



akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Adapun Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel.3.20 Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026**

KODE	REKONING	TAHUN 2021*	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH	2.197.230.452.168,00	2.408.123.255.909,00	2.289.012.182.982,45	2.337.741.842.569,02	2.387.612.446.845,59	2.393.732.493.817,08
5.1	BELANJA OPERASI	1.329.556.166.206	1.509.248.206.697,00	1.499.832.765.723,56	1.501.345.607.647,02	1.522.811.064.699,59	1.519.513.806.756,08
5.1.01	Belanja Pegawai	886.678.648.260	1.008.829.756.039,00	1.009.838.585.796,56	1.010.848.424.381,02	1.011.859.272.805,59	1.012.871.132.079,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.612.586.817	393.679.638.276,00	328.204.056.381,00	429.401.005.641,00	449.670.468.368,00	445.172.020.953,00
5.1.03	Belanja Bunga	700.000.000	2.250.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	52.903.881.129	83.017.859.582,00	152.903.881.129,00	52.903.881.129,00	52.903.881.129,00	52.903.881.129,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.661.050.000	21.470.952.800,00	8.011.242.417,00	8.192.296.496,00	8.377.442.397,00	8.566.772.595,00
5.2	BELANJA MODAL	323.523.322.362	359.717.583.166,00	249.565.143.873,89	296.241.201.481,00	324.060.854.199,00	333.058.477.609,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	541.150.963.600	536.157.466.046,00	536.614.273.385,00	537.155.033.441,00	537.740.527.947,00	538.160.209.452,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.142.119.800	12.550.978.070,00	13.007.785.409,00	13.548.545.465,00	14.134.039.971,00	14.553.721.476,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	531.008.843.800	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00

Sumber : Hasil Analisis, 2021



Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. *Belanja Pegawai*, Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. *Belanja Barang dan Jasa*: digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - c. *Belanja Bunga*, berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran



- atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- d. *Belanja Subsidi*, digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. *Belanja Hibah*, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk tahun 2023 direncanakan pemberian hibah dalam rangka Penyelenggaraan Pilkada serentak kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim.
 - f. *Bantuan Sosial*, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya



risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah
- c. batas minimal kapitalisasi aset
- d. berwujud
- e. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
- f. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- g. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh



gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga: digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

a. Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang



bersifat wajib

- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer: belanja transfer dirinci atas 2 jenis yaitu:

- a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bantuan keuangan Kabupaten Purworejo adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa dalam jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan



bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Belanja akan difokuskan untuk menyelesaikan urusan wajib yang terkait layanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target *SDGs (Sustainable Development Goals)* dan sektor-sektor berdasarkan kewenangan urusan/konkuren yang wajib non layanan dasar dan pilihan. Perhitungan kerangka pendanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan diarahkan untuk:

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- c. Mengakomodir program pembangunan yang dijangking melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;
- d. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- e. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Mengutamakan pembiayaan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021–2026 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijangking



- melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
 3. Mengedepankan program-program yang menunjang pengentasan kemiskinan, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pertumbuhan ekonomi;
 4. Memenuhi alokasi prosentase belanja untuk fungsi pelayanan dasar dan mandatory spending.

Di sisi lain, kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan dan ke depan Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan utamanya infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila tidak ada inovasi dalam pembiayaan daerah. Adanya keterbatasan anggaran (*budget constrain*) ini memunculkan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah.

Pinjaman Daerah sebagai instrumen keuangan layak untuk menjadi pilihan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya infrastruktur publik di daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sesungguhnya dapat dilakukan sendiri oleh daerah dan secara keseluruhan dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam tujuan Negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan pinjaman daerah adalah pembangunan untuk pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kabupaten Purworejo dan berpotensi menghasilkan pendapatan daerah, di antaranya:



- a. rumah sakit;
- b. infrastruktur olahraga;
- c. infrastruktur penunjang perekonomian daerah diantaranya pembangunan/ pengembangan terminal, pasar, hotel;
- d. pengembangan kawasan pariwisata;
- e. kegiatan lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Terkait dengan investasi/penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Purworejo mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 berusaha untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal kepada BUMD yang ada sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD dimungkinkan untuk dilakukan *holding* beberapa BUMD.

Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan angka optimal yang berdasarkan atas asumsi dan tren rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan yang dipakai adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dari sisi belanja untuk membiayai program strategis dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja utama Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Dari sisi pembiayaan, apabila diperlukan pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan kebijakan pinjaman daerah untuk membiayai program/kegiatan prioritas atau dalam rangka percepatan pencapaian program /kegiatan serta untuk investasi publik yang menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan terhadap asumsi makro ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, dan perkembangan situasi serta kondisi ekonomi global, nasional, dan regional.



3.6.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut ini.

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dianggarkan guna memenuhi kebutuhan dana untuk Pembangunan Hotel Purworejo di tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah dimaksud. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purworejo akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- b. Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal



pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penyertaan modal kepada BPR yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, karena PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM, maka bagian laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Nasional 100-0-100.
4. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



**Tabel 3.21 Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun 2021-2026**

KODE	REKENING	TAHUN 2021*	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
06.00	PEMBIAYAAN DAERAH	12.954.042.483,00	147.114.559.899,00	12.311.610.957,45	46.919.724.901,02	78.970.244.508,59	65.709.570.455,08
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.954.042.483,00	149.614.559.899,00	84.328.947.445,45	85.409.524.901,02	116.560.244.508,59	111.266.765.455,08
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.656.282.414,00	99.614.559.899,00	84.328.947.445,45	85.409.524.901,02	116.560.244.508,59	111.266.765.455,08
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	297.760.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000,00	2.500.000.000,00	72.017.336.488,00	38.489.800.000,00	37.590.000.000,00	45.557.195.000,00
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	2.500.000.000,00	22.017.336.488,00	38.489.800.000,00	37.590.000.000,00	45.557.195.000,00

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.6.4. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Mendasarkan pada kemampuan fiskal yang berpotensi tidak sepenuhnya dapat membiayai kebutuhan belanja pembangunan maka kerangka pendanaan non APBD akan diperoleh dari :

- Pengembangan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)
- Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- Optimalisasi peran swasta melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR)
- Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), partisipasi masyarakat dan swasta



3.6.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	2.184.276.409.685,00	2.261.008.696.010,00	2.276.700.572.025,00	2.290.822.117.668,00	2.308.642.202.337,00	2.328.022.923.362,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	44.656.282.414,00	99.614.559.899,00	84.328.947.445,45	85.409.524.901,02	116.560.244.508,59	111.266.765.455,08
4	Pinjaman Daerah**	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	297.760.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan	2.229.230.452.168,00	2.410.623.255.909,00	2.361.029.519.470,45	2.376.231.642.569,02	2.425.202.446.845,59	2.439.289.688.817,08
	Dikurangi						
4	Belanja Gaji Pegawai	886.678.648.260,00	1.008.829.756.039,00	1.009.838.585.796,56	1.010.848.424.381,02	1.011.859.272.805,59	1.012.871.132.079,08
5	Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000,00	2.500.000.000,00	72.017.336.488,00	38.489.800.000,00	37.590.000.000,00	45.557.195.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	1.310.551.803.908,00	1.399.293.499.870,00	1.279.173.597.185,89	1.326.893.418.188,00	1.375.753.174.040,00	1.380.861.361.738,00

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah. yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja baik belanja operasional, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.23. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026**

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.310.551.803.908	1.399.293.499.870	1.279.173.597.186	1.326.893.418.188	1.375.753.174.040	1.380.861.361.738
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I						
	Belanja Bagi Hasil	10.142.119.800	12.550.978.070	13.007.785.409	13.548.545.465	14.134.039.971	14.553.721.476
	Belanja Bantuan Keuangan	531.008.843.800	523.606.487.976	523.606.487.976	523.606.487.976	523.606.487.976	523.606.487.976
3	Belanja Program Prioritas Dalam Rangka Pencapaian Visi Misi KDH Dan Prioritas Pembangunan Daerah	769.400.840.308	863.136.033.824	742.559.323.801	789.738.384.747	838.012.646.093	842.701.152.286

Sumber: Hasil Analisis, 2021



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purworejo yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya menunjukkan masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Analisis permasalahan dan isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 meliputi penelaahan permasalahan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial politik dan perekonomian global, nasional, maupun regional. Penelaahan permasalahan dan pengkajian lingkungan strategis juga dirumuskan baik secara eksternal maupun internal pada semua bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

4.1. Lingkungan Eksternal

4.1.1. Lingkungan Global

Konsep Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDG's) yang belum tercapai pada tahun 2000-2015 saat ini dilanjutkan dengan menggunakan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan target capaian hingga tahun 2030. Konsep SDG's merupakan sebuah bentuk kerangka pembangunan global yang mewadahi perubahan yang terjadi terutama yang berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan, perubahan iklim, berkurangnya sumber daya alam, makanan, dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin yang mulai mencuat sejak tahun 2000. Konsep SDG's terdiri dari 17 tujuan sebagai berikut:

- a) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;



- b) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c) Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- d) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g) Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara;
- k) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l) Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap



keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; serta

- q) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan menginternalisasikan tujuh belas poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mencapai hasil pembangunan yang tidak hanya bermanfaat bagi masa sekarang melainkan juga berkelanjutan hingga masa depan. Target-target pembangunan di daerah diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan memformulasikan strategi dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Selain itu, didirikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sejak tahun 2015 memiliki tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan,serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global menuju MEA 2025.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk mewujudkan ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh, ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis, mewujudkan peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral guna membentuk ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat menuju ASEAN yang global perlu dipersiapkan dengan matang oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas produk unggulan daerah sehingga memiliki nilai tambah yang cukup untuk mampu berdaya saing di



skala regional, nasional, maupun global perlu menjadi salah satu prioritas dalam perenancanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

4.1.2. Lingkungan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga memiliki peran yang sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia diharapkan akan mampu mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Target-target dari 17 *goals* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan nasional. Tema pembangunan dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan*



Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan nasional tersebut menjadi peluang yang sangat besar untuk dapat ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga dapat mengharmonisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah beserta indikatornya untuk dapat sejalan dan selaras dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Prioritas-prioritas pembangunan di Kabupaten Purworejo juga diarahkan untuk dapat mengakomodir agenda pembangunan nasional sehingga integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah dapat terakomodir dengan baik.

Selain RPJM Nasional, dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo - Kabupaten Wonosobo - Kota Magelang - Kabupaten Magelang - Kabupaten Temanggung) diarahkan untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Kawasan Pariwisata Borobudur *merupakan Cultural Heritage Masterpiece* - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan mancanegara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang serta berbatasan langsung dengan DI Yogyakarta dan Kabupaten Purworejo diharapkan dapat



mengoptimalkan potensi lain yang berada di Kawasan Purwomanggung. Berdasarkan Perpres No 79 Tahun 2019, tema pembangunan Kawasan Purwomanggung berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan yang dimiliki adalah "*Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.*"

Kondisi eksisting konektivitas Purwomanggung didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terdiri dari 2 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan 10 Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL). Pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat yaitu jalan nasional dan jalur kereta api. Peningkatan konektivitas untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya memerlukan strategi yang mampu menghubungkan simpul kedatangan wisatawan melalui Bandara Adisutjipto dan Yogyakarta *International Airport* (DI Yogyakarta), Bandara Adi Soemarmo (Boyolali), serta Bandara Ahmad Yani (Semarang). Di samping itu, pada jalur transportasi darat diperlukan pengembangan Jalan Bedah Menoreh (Bandara YIA-Borobudur), jalur kereta api Semarang-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta serta peningkatan jalan nasional.

Keberadaan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi simpul utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi antara Purwomanggung dengan kawasan lainnya. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi daya tarik ekonomi pariwisata dan ditetapkannya sebagai UNESCO *World Cultural Heritage* diharapkan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada khususnya terutama dari sektor pariwisata.

Di sisi lain, Pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 mengakibatkan lumpuhnya perekonomian global dan nasional yang tentunya berimbas pada perekonomian Kabupaten Purworejo. Masyarakat miskin/kurang mampu mengalami tekanan hidup untuk memenuhi standar



kelayakan hidupnya. Masyarakat pekerja sektor formal maupun informal mengalami kontraksi pelambatan pendapatan bahkan berhentinya pendapatan yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup rumah tangga pada entitas masyarakat terdampak *Covid-19*. Bertambahnya penduduk miskin serta tingkat pengangguran merupakan salah satu dampak terbesar yang timbul akibat pandemi yang tidak kunjung berakhir, sehingga diperlukan beberapa strategi dan kebijakan sebagai upaya penanganan dampak serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Kebijakan *recovery* telah dilaksanakan dan menjadi upaya untuk penghindaran, pengurangan, serta pemulihan resiko bencana dan optimalisasi kesinambungan kehidupan sosial dan ekonomi entitas masyarakat terdampak *Covid-19*. Kebijakan *recovery* disusun dengan tujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah akibat terjadinya kontraksi pada saat bencana non alam ini terjadi. Dengan demikian, peningkatan jumlah masyarakat miskin/kurang mampu dan jumlah pengangguran dapat dicegah dan atau diturunkan kembali.

Dalam melaksanakan program pembangunan daerah untuk *recovery* dampak *Covid-19* di Kabupaten Purworejo diperlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), salah satunya dalam pola kinerja pegawai sebagai pelayan publik. Dengan adanya pandemi *Covid-19* tentu berpengaruh pada pola kinerja pegawai yang memperhatikan *social and physical distancing* demi melaksanakan program *recovery* yang produktif dan aman. Di samping itu, sosialisasi pencegahan penularan *Covid-19* terus dilaksanakan sehingga masyarakat taat akan protokol kesehatan selain dengan terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi *Covid-19*.

4.1.3. Lingkungan Regional

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten



Korupsi, Mboten Ngapusi”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

- a) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
- d) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sedangkan isu dan permasalahan pembangunan yang berkembang dan harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

- a) Penanggulangan Kemiskinan
- b) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- c) Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha
- d) Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
- e) Kedaulatan Pangan dan Energi
- f) Kesenjangan Wilayah
- g) Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah merupakan tugas yang harus diemban secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Purworejo. Arah kebijakan yang akan dijalankan di Kabupaten Purworejo haruslah mendukung pencapaian target dan penyelesaian masalah yang berkembang di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Purworejo pada khususnya.

Pembangunan wilayah Purwomanggung dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,00% sampai dengan 5,70%, (2) Angka kemiskinan pada kisaran sebesar 6,75 sampai dengan 14,36%, (3) Tingkat



Pengangguran Terbuka pada kisaran 2,20% sampai dengan 4,50%, serta (4) Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 68,61 sampai dengan 78,55. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, pengembangan jalan lingkar serta reaktivasi jalur kereta api untuk mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian dari sentra produksi, komoditas industri hingga alur perjalanan aktivitas pariwisata;
2. Pengembangan destinasi baru di koridor pendukung antar KSPN, seperti Borobudur-Dieng (Wonosobo), serta wisata alam, non-alam, dan buatan di Temanggung dan Purworejo;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan bendungan, (2) energi melalui pengembangan geothermal, (3) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, (4) utilitas seperti sistem persampahan terpadu, dan (5) layanan kesehatan;
4. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas SDM terutama dalam mendukung pendidikan vokasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan;
5. Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM, dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
6. Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah terdampak aktivitas pertanian intensif yang memicu degradasi maupun kawasan pemanfaatan lahan intensif untuk aktivitas pariwisata; dan
7. Mendorong status perkotaan Purworejo yang semula PKL menjadi PKW mengingat kedekatannya dengan DI Yogyakarta serta mengambil dampak positif dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.



Seperti halnya isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang harus dipecahkan bersama oleh seluruh Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Purworejo, strategi percepatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Tengah juga harus diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penentuan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian target-target daerah yang sudah diselaraskan dengan target di tingkat provinsi dan pusat, harus diimbangi dengan pelaksanaan kegiatan yang mampu mendukung strategi dan kebijakan yang dilaksanakan di tingkat regional.

4.2. Lingkungan Internal

Pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2026 termasuk dalam tahap keempat dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025. Tahapan pembangunan jangka IV ini mencakup 7 misi dengan masing-masing terbagi dalam arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalakan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian dalam arti luas;
 - b. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan;
 - c. Meningkatkan produksi perikanan dan daya saing produk-produk perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumber daya kelautan;
 - d. Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah;
- dan



- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumberdaya air sehingga tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik masa sekarang dan generasi mendatang.

Misi 2: Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 2 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan investasi secara optimal terutama dalam rangka pengembangan industri dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengembangan industri kecil, menengah, dan besar melalui pengembangan produk-produk lokal;
- c. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan perdagangan produk unggulan daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana perdagangan.

Misi 3: Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 3 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada; dan
- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan produktivitas masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 4 adalah sebagai berikut:



- a. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokrasi di daerah;
- c. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, persandian, dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah;
- f. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan sistem informasi manajemen data secara digital yang mudah diakses oleh SKPD; dan
- g. Meningkatkan pelayanan penyediaan data/informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan usaha.

Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang terkendali. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 5 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas;
- b. Mengoptimalkan pengembangan budaya membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis;
- c. Peningkatan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan;
- d. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana;



- e. Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (*nation building*) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi;
- f. Mewujudkan pelayanan transmigrasi yang profesional dan peningkatan jumlah transmigran; dan
- g. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

Misi 6: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 6 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan listrik dan efisiensi penggunaan minyak, gas dan listrik serta pengelolaan pertambangan sesuai dengan kelestarian lingkungan;
- b. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkesinambungan;
- c. Pemanfaatan produk-produk kehutanan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan;
- d. Melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian serta peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya; dan
- e. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional yang mantap yang mampu menjadi filter bagi masuknya budaya asing dan modern.

Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta



perlindungan anak. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 7 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan derajat kesehatan melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I;
- c. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Mengoptimalkan pembangunan ideologi bangsa, pembangunan politik, peningkatan tertib hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan dan nilai-nilai demokrasi berdasarkan dasar negara; dan
- e. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak yang menjamin perkembangan generasi muda yang berkualitas.

4.3. Permasalahan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan di daerah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dari adanya *gap* antara kondisi yang tercapai dengan kondisi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dijelaskan pada Bab II, permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut.

4.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Purworejo masih memiliki beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Minusnya pertumbuhan ekonomi pada kondisi pandemi Covid-19 dimana kontraksi terdalam dialami oleh sektor transportasi dan perdagangan;
- 2) Belum signifikannya peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pertanian perikanan dan kehutanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo.



- 3) Masih tingginya angka kemiskinan yang diperparah dengan adanya pandemi covid-19 dimana turut menambah angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo;
- 4) Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun masih ditemukannya penduduk dengan buta huruf. Pandemi covid-19 yang melanda pada tahun 2020 perlu diantisipasi untuk mencegah penurunan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo yang berdampak pada peningkatan anak putus sekolah dan angka buta huruf;
- 5) Angka harapan hidup di Kabupaten Purworejo mengalami perbaikan dari tahun ke tahun namun masih ditemukannya kematian ibu, kasus kematian balita, bayi, neonatal dan gizi buruk pada balita yang menunjukkan perlunya upaya peningkatan layanan kesehatan;
- 6) Dominannya UMKM di Kabupaten Purworejo perlu diimbangi dengan pertumbuhan koperasi baru, aktif, dan sehat sebagai mitra yang terhubung dalam rantai pasok bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun masih ada koperasi di Kabupaten Purworejo yang tidak memenuhi aspek-aspek kesehatan koperasi; dan
- 7) Menurunnya pengeluaran per kapita di Kabupaten Purworejo sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*.
- 8) Belum stabilnya tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Purworejo yang diperparah dengan adanya pandemi *Covid-19*. Dalam lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Purworejo berbenah pada sektor pariwisata dengan mengembangkan destinasi wisata dan pemasaran yang cukup masif. Namun pengembangan destinasi wisata dan upaya pemasarannya di Kabupaten Purworejo belum menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan yang ada selama ini masih perlu didorong dengan mengadakan *event* yang menambah daya tarik pada destinasi wisata.



- 9) Secara umum, investasi (PMTB) di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan proporsinya, namun sejak tahun 2017 mengalami penurunan lajunya hingga terkontraksi paling dalam pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*.

4.3.2. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum di Kabupaten Purworejo masih memiliki beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Purworejo tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan, antara lain:

- a) Perlunya peningkatan keterjangkauan akses pendidikan bagi seluruh siswa menuju sekolah untuk menurunkan persentase Angka Putus Sekolah jenjang SD/SDLB/MI;
- b) Perlunya peningkatan jumlah Kepala SMP yang memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik sehingga kualitas pendidik dapat terjamin;
- c) Rendahnya keterbatasan akses dan SDM dalam pelaksanaan layanan sekolah yang berbasis *e-learning (creative multi media)* dalam menghadapi era teknologi;
- d) Rendahnya proporsi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan PAUD;
- e) Rendahnya jumlah SD yang memiliki fasilitas perpustakaan yang layak;



- f) Rendahnya jumlah SMP yang memiliki fasilitas laboratorium penunjang;
- g) Perlunya peningkatan jumlah SD dan SMP yang memiliki fasilitas sanitasi layak;
- h) Perlunya peningkatan ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran pada jenjang SD dan SMP;
- i) Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik sehingga menyulitkan dalam proses belajar mengajar yang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk bersekolah.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Selain itu dengan merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 juga turut memunculkan permasalahan baru dalam bidang kesehatan di Kabupaten Purworejo. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

- a) Kurang optimalnya kapasitas SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam menangani ibu melahirkan sehingga menyebabkan tingginya AKI;
- b) Perlunya meningkatkan kualitas/ mutu dan akses pelayanan kesehatan rujukan melalui pengembangan



- produk-produk/inovasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- c) Perlunya meningkatkan pelayanan antenatal dan pelayanan persalinan sesuai standar bagi ibu hamil dan ibu bersalin;
 - d) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan bagi bayi baru lahir;
 - e) Perlunya meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan bagi usia bawah lima tahun (Balita);
 - f) Rendahnya kualitas dan kuantitas makanan balita sesuai standar serta kurang optimalnya pola asuh balita mengakibatkan masih tingginya kasus prevalensi balita pendek (*stunting*);
 - g) Perlunya peningkatan akses pelayanan skrining kesehatan sesuai standar untuk siswa satuan pendidikan dasar; penduduk usia 15-29 tahun, dan usia 60 tahun ke atas;
 - h) Perlunya peningkatan akses pelayanan skrining kesehatan sesuai standar untuk penderita hipertensi, diabetes mellitus, serta pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar pada orang beresiko terinfeksi HIV;
 - i) Rendahnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat/ODF (*Open Defecation Free*);
 - j) Perlunya peningkatan akses pelayanan kesehatan sesuai standar untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ); dan
 - k) Perlunya peningkatan kondisi sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam menjamin kesehatan masyarakat secara luas.



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Selain jalan dan jembatan, sumber daya air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian. Selain itu Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada permasalahan-permasalahan tersebut di Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a) Belum memadainya jaringan jalan dengan kondisi mantap;
- b) Belum memadainya kapasitas jembatan untuk kelancaran transportasi dan aksesibilitas;
- c) Kurang optimalnya pengembangan akses sanitasi layak untuk masyarakat;
- d) Belum optimalnya pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan dari sumber air yang terlindungi;
- e) Belum memadainya peraturan & informasi Rencana Umum Dan Rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR & RTR Kawasan Strategis);
- f) Masih banyaknya kawasan yang belum dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sehingga pemanfaatan ruang kota belum menunjukkan jati diri kota yang produktif, efisien dan sesuai karakter khas Kabupaten Purworejo;
- g) Kurang optimalnya cakupan penanganan bangunan gedung;
- h) Kurang optimalnya cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan, pariwisata, dan perbatasan);
- i) Masih rendahnya kinerja sistem irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik;



- j) Masih kurangnya kondisi fisik jaringan irigasi dalam kondisi baik; dan
- k) Belum optimalnya penanganan pengurangan genangan air banjir pada irigasi kewenangan kabupaten.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya kualitas dan akses infrastruktur umum dalam pengembangan wilayah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
- b) Rendahnya cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial; dan
- c) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purworejo adalah belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman yang layak huni.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Purworejo, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana.



Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya kapasitas kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
- b) Tingginya indeks risiko bencana di Kabupaten Purworejo;
- c) Rendahnya ketersediaan analisis jenis bencana;
- d) Rendahnya tingkat waktu tanggap (*response time rate*); dan
- e) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

b. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian ke depan antara lain:

- a) Belum optimalnya pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun bagi para pencari kerja;



- b) Belum optimalnya pelayanan penanganan tenaga kerja tiap tahun;
- c) Peningkatan daya saing tenaga kerja belum mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat setengah pengangguran. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi yang dimiliki para pencari kerja;
- d) Masih banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal; dan
- e) Rendahnya pendapatan penduduk yang bekerja pada sektor informal pertanian dan non pertanian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya peluang kesempatan kerja karena rendahnya produktivitas tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
- b) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
- c) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan; dan
- d) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan



Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Kultur pola pangan di Kabupaten Purworejo kurang beragam;
- b) Masih adanya penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/kapita/hari dan mengalami tidak cukup konsumsi pangan.
- c) Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan; dan
- d) Tidak meratanya daya dukung pangan antar daerah di Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pangan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya ketersediaan pangan yang beragam dan memenuhi kecukupan gizi.

4. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- a) Cukup rendahnya baku mutu kualitas air sungai dimana disebabkan pencemaran sungai yang disebabkan *grey water* dan *black water* masuk ke sungai;
- b) Rendahnya tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah;



- c) Daya dukung air permukaan yang diprediksi akan terus menurun;
- d) Belum adanya kerangka legislasi administrasi dan kebijakan yang terkait pemanfaatan sumber daya genetika;
- e) Belum dilakukan penyusunan dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- f) Kurangnya edukasi terkait daur ulang sampah terhadap masyarakat luas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya kualitas lingkungan hidup akibat rendahnya tutupan lahan dan tingginya pencemaran.

5. Pertanahan

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis, dan aset tanah kas desa. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

- a) Belum tersedianya standar pelayanan dan pengaturan pertanahan di Kabupaten Purworejo;
- b) Perlunya sosialisasi peraturan perundang undangan terkait dengan pertanahan;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah negara;
- d) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- e) Adanya penguasaan tanah negara tanpa dilekati hak
- f) Masih adanya alih fungsi lahan dari tanah sawah produktif ke lahan non pertanian tanpa ijin;
- g) Masih adanya tanah Perseorangan, Badan Hukum, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah yang belum



didaftarkan haknya (tanah belum bersertifikat). Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat.;

- h) Masih adanya pemanfaatan tanah desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) Masih adanya sengketa dan konflik pertanahan di wilayah perbatasan antar desa; dan
- j) Belum optimalnya pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pertanahan di Kabupaten Purworejo adalah belum optimalnya pelayanan, pengaturan, pemanfaatan, dan inventarisasi tanah sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, di mana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Perlunya peningkatan kesadaran desa dan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin;
- b) Perlunya peningkatan pertumbuhan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif;



- c) Kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknya fasilitas pasar;
- d) Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama; dan
- e) Masih kurangnya Posyandu yang aktif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Masih rendahnya keluarga yang mendapat layanan UPPKS;
- b) Masih rendahnya keluarga yang mendapat layanan tri bina;
- c) Masih rendahnya jumlah kelompok KB pria;
- d) Masih rendahnya peserta KB aktif;
- e) Masih rendahnya jumlah peserta KB mandiri;
- f) Masih tingginya persentase *unmetneed* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi); dan
- g) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purworejo adalah masih



rendahnya akses dan kualitas layanan Keluarga Berencana sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

8. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a) Belum memadainya ketersediaan alat pengaman jalan; ketersediaan marka jalan, dan ketersediaan APILL;
- b) Masih adanya kualitas kendaraan umum yang tidak laik jalan;
- c) Masih rendahnya ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Perhubungan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya akses dan kualitas sarana prasarana perhubungan darat.

9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a) Kurang intensifnya pendampingan dan penguatan untuk pertumbuhan koperasi baik koperasi baru, aktif, maupun sehat. Koperasi seharusnya mampu berperan sebagai mitra dari UMKM dalam satu kesatuan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Oleh karena



itu, penumbuhan koperasi juga seharusnya mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo.

- b) Masih banyaknya UMKM yang belum memenuhi syarat untuk mengakses kredit pada layanan keuangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM dalam kesatuan rantai produksi yang terintegrasi.

10. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Pada masa pandemi *Covid-19*, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meningkatkan kinerjanya melalui realisasi investasi namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan nilai PMTB yang terkontraksi cukup dalam akibat pandemi *Covid-19*. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- a) Perlunya peningkatan iklim penanaman modal menyesuaikan perkembangan yang ada.
- b) Turunnya realisasi PMTB di Kabupaten Purworejo akibat pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya daya saing dan iklim penanaman modal dalam upaya menumbuhkan investasi di daerah.

11. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi



olahraga Kabupaten Purworejo, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a) Belum optimalnya pemanfaatan wahana pembinaan pemuda dan olah raga di *Heroes Park* dan *Sport Center* WR. Supratman.
- b) Terbatasnya *event* olahraga untuk masyarakat yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19* di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk berkerumun guna pencegahan penularan, sehingga kegiatan olahraga untuk masyarakat perlu diarahkan pada olahraga yang menerapkan kebijakan *physical distancing* hingga pandemi *Covid-19* ini berakhir.
- c) Kurangnya klub/ organisasi olahraga yang aktif;
- d) Masih sedikitnya jumlah kewirausahaan pemuda; dan
- e) Masih rendahnya jumlah pemuda pelopor kabupaten.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga.

12. Kebudayaan

Nilai-nilai budaya di Kabupaten Purworejo merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain:

- a) Rendahnya keterlibatan pelaku budaya dalam *event* budaya daerah sehingga menyebabkan rendahnya frekuensi penyelenggaraan *event* budaya daerah akibat pandemi *Covid-19*;
- b) Perlunya peningkatan jumlah prestasi kesenian dan kebudayaan daerah;
- c) Kurang optimalnya pelaksanaan misi kesenian akibat



- pandemi *Covid-19*;
- d) Belum optimalnya penyelenggaraan *workshop* sejarah lokal, pembinaan kelompok penghayat, dan persemaian karakter bangsa sebagai upaya pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi; dan
 - e) Rendahnya jumlah sumber daya manusia kesenian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya upaya pelestarian kebudayaan akibat minimnya pelaku dan *event* budaya yang diselenggarakan.

13. Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Purworejo, permasalahan yang masih dihadapi antara lain

- a) Kurang optimalnya jumlah dan jenis layanan perpustakaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Perpustakaan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya minat baca masyarakat akibat belum optimalnya layanan perpustakaan yang dilaksanakan.

c. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a) Rendahnya kenaikan produksi perikanan budidaya (per tahun);



- b) Belum optimalnya wilayah pengembangan TPI; dan
- c) Masih rendahnya promosi produk hasil usaha perikanan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya daya saing dan produktivitas hasil usaha kelautan dan perikanan.

2. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a) Masih terbatasnya kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT);
- b) Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke industri dan pemukiman, sehingga lahan pertanian semakin berkurang; dan
- c) Belum tercapainya target produksi karet dan jagung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pertanian di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya daya saing dan produktivitas hasil usaha pertanian yang tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi.

3. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan



penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a) Kurangnya promosi pada komoditas perdagangan unggulan di Kabupaten Purworejo; dan
- b) Masih adanya pasar yang tidak dalam kondisi baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Perdagangan di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya upaya pengembangan produk ekonomi lokal sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah.

4. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran.

- a) Kelancaran pelaksanaan transmigrasi sangat bergantung pada hubungan antara daerah asal dan daerah penerima. Pada masa pandemi *Covid-19*, dimana pergerakan sangat dibatasi menyebabkan pelaksanaan transmigrasi menjadi terhambat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Transmigrasi di Kabupaten Purworejo adalah terbatasnya pelaksanaan transmigrasi sebagai upaya perluasan kesempatan kerja akibat pandemi global *Covid-19*.

d. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN; dan
- b) Masih kurangnya tingkat disiplin pegawai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Purworejo adalah belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN sebagai pelayan publik.

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a) Kurangnya sinergitas dan harmonisasi dalam penyusunan anggaran daerah di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset yang membutuhkan dukungan dan kerjasama semua perangkat daerah guna mempertahankan capaian Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Keuangan di Kabupaten Purworejo adalah belum optimalnya integrasi penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Pengawasan



Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain:

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan fungsi pengawasan dan atau audit internal guna pengembalian kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah; dan
- b) Perlunya peningkatan ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pengawasan di Kabupaten Purworejo adalah belum optimalnya penyelenggaraan fungsi pengawasan internal guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

4.3.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Purworejo masih memiliki beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Masih adanya jaringan jalan yang belum terlayani angkutan umum yang menghambat mobilitas penduduk;
- 2) Masih adanya jaringan jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang menghambat sirkulasi;
- 3) Masih rendahnya kesesuaian arahan penggunaan lahan;
- 4) Masih rendahnya pengembangan kawasan cepat tumbuh perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan *Border City*;
- 5) Masih adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Purworejo;
- 6) Belum tercapainya Indeks Pembangunan Manusia terhadap target daerah;
- 7) Pembangunan gender di Kabupaten Purworejo secara umum mengalami perbaikan namun dalam kurun waktu lima tahun



- terakhir pemberdayaan gender dimana peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mengalami penurunan.
- 8) Kurang tingginya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah;
 - 9) Belum tercapainya kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap target daerah, kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan sebagian penduduk yang sudah bekerja kehilangan mata pencahariannya karena dibatasi pergerakannya;

4.3.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil penelaahan indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai karakteristik Kabupaten Purworejo, secara keseluruhan terdapat 220 indikator yang terbagi ke dalam 4 pilar pembangunan. Adapun dari seluruh indikator tersebut, masih terdapat beberapa indikator TPB di Kabupaten Purworejo yang masih belum tercapai karena belum memenuhi target nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Perpres No 59 Tahun 2017 dan mengindikasikan bahwa masih adanya permasalahan pembangunan sebagai berikut:

a. Pilar Sosial

- 1) Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- 2) Masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah);
- 3) Belum tersedianya data terkait anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah);
- 4) Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan



- terendah);
- 5) Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah);
 - 6) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah);
 - 7) Masih rendahnya persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah);
 - 8) Belum tersedianya data pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial;
 - 9) Belum tersedianya data pendampingan psikososial korban bencana sosial;
 - 10) Belum dilaksanakannya pendidikan pelayanan khusus pada daerah bencana alam/sosial;
 - 11) Masih tingginya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
 - 12) Belum tersedianya data prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan;
 - 13) Masih tingginya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari;
 - 14) Masih tingginya prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe: kurus;
 - 15) Masih rendahnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif;
 - 16) Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai, dan tingkat konsumsi ikan;
 - 17) Belum tercapainya eliminasi malaria;
 - 18) Belum tersedianya data jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta);



- 19) Belum tercapainya eliminasi kusta;
- 20) Belum tercapainya eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I);
- 21) Belum tersedianya data persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun;
- 22) Belum tersedianya data angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri;
- 23) Belum adanya Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa;
- 24) Belum tersedianya data prevalensi penyalahgunaan narkoba;
- 25) Belum tersedianya data konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir;
- 26) Belum tersedianya data Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern;
- 27) Masih tingginya angka *Total Fertility Rate* (TFR);
- 28) Belum tersedianya data *unmetneed* pelayanan kesehatan;
- 29) Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 30) Belum tersedianya data proporsi kematian akibat keracunan;
- 31) Masih tingginya persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun;
- 32) Belum tersedianya data proporsi anak-anak dan remaja:
(a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika;
- 33) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat;
- 34) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat;
- 35) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun;



- 36) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 37) Masih rendahnya persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun;
- 38) Belum tersedianya data persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun;
- 39) Masih rendahnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- 40) Masih tingginya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir;
- 41) Belum tersedianya data prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan;
- 42) Belum tersedianya data median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun;
- 43) Belum tersedianya data proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi;
- 44) Masih tingginya persentase *unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi); dan
- 45) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

b. Pilar Ekonomi

- 1) Belum tercapainya persentase bauran energi terbarukan karena belum dilaksanakan pada kegiatan;
- 2) Belum tercapainya intensitas energi primer karena belum dilaksanakan pada kegiatan;
- 3) Masih rendahnya PDB per kapita;
- 4) Adanya penurunan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun;
- 5) Adanya penurunan proporsi lapangan kerja informal



- sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin;
- 6) Masih rendahnya persentase tenaga kerja formal;
 - 7) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur;
 - 8) Masih tingginya tingkat setengah pengangguran;
 - 9) Belum tersedianya data persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET);
 - 10) Masih rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB;
 - 11) Belum tersedianya data jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja;
 - 12) Belum tersedianya data jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa;
 - 13) Belum tersedianya data rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum);
 - 14) Masih rendahnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit;
 - 15) Belum tercapainya panjang pembangunan jalan tol sesuai dengan target nasional;
 - 16) Belum tercapainya panjang jalur kereta api sesuai dengan target nasional;
 - 17) Belum adanya peningkatan jumlah dermaga penyeberangan;
 - 18) Adanya penurunan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur;
 - 19) Adanya penurunan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur;
 - 20) Belum tersedianya data proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri;
 - 21) Belum tersedianya data proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit;
 - 22) Belum tersedianya data proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*;
 - 23) Belum tersedianya data proporsi individu yang menggunakan internet;



- 24) Belum tersedianya data Koefisien Gini;
- 25) Belum tersedianya data proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas;
- 26) Belum tercapainya Indeks Kebebasan Sipil;
- 27) Masih rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB;
- 28) Belum tersedianya data tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan;
- 29) Belum adanya penawaran proyek yang dilaksanakan dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- 30) Belum adanya alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- 31) Belum adanya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
- 32) Belum adanya persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
- 33) Masih rendahnya persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target;
- 34) Belum tersedianya data jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*; dan
- 35) Belum adanya persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

c. Pilar Lingkungan

- 1) Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;
- 2) Masih rendahnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau;
- 3) Masih rendahnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan;
- 4) Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki



- akses terhadap layanan sanitasi layak;
- 5) Belum dilaksanakannya insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri;
 - 6) Masih rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
 - 7) Belum tersedianya data jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur;
 - 8) Masih tingginya nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI);
 - 9) Belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001;
 - 10) Belum adanya data jumlah produk ramah lingkungan yang teregister;
 - 11) Belum adanya data jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister;
 - 12) Belum adanya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah;
 - 13) Belum tersedianya kerangka legislasi, administrasi, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata;
 - 14) Belum adanya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati;

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

- 1) Masih tingginya jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir;
- 2) Masih tingginya kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk;
- 3) Belum tersedianya data proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya;
- 4) Masih tingginya proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir;
- 5) Belum tersedianya data prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan;



- 6) Belum tersedianya data proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan;
- 7) Belum tersedianya data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
- 8) Belum tersedianya data persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan.
- 9) Belum adanya data persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); dan
Belum adanya data jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.4. Isu-Isu Strategis Daerah

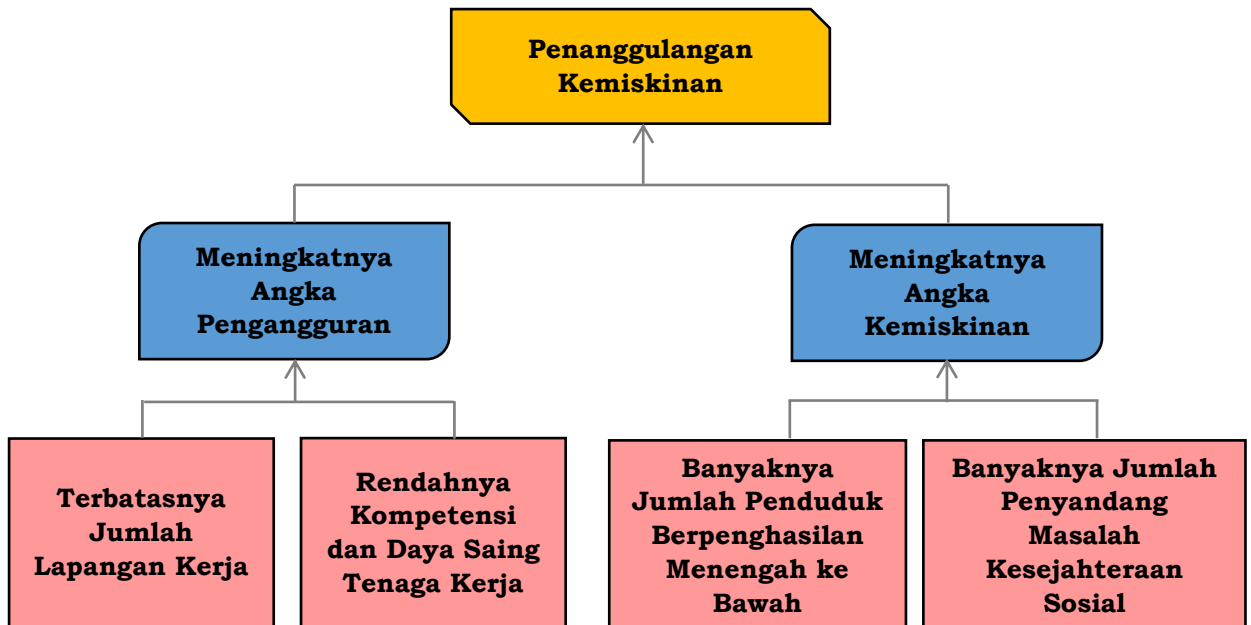
Penelaahan isu-isu strategis di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan menggali dari capaian data-data pembangunan dalam 5 tahun terakhir yang juga telah diintegrasikan ke dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta dengan tetap memperhatikan isu di lingkungan strategis internal maupun eksternal dan dihasilkan 5 butir isu strategis yang berkembang di Kabupaten Purworejo sebagai berikut.

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu global yang juga menjadi salah satu hal pokok yang diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan target *zero poverty* pada tahun 2030. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana tingkat pendapatan masyarakat tidak mencukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo jika disandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Jawa Tengah termasuk dalam jajaran kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tinggi karena masih berada di atas 10%. Kabupaten Purworejo dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,78% pada tahun 2020 berada pada urutan ke-14 kabupaten/kota



dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian permasalahan kemiskinan di Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan melalui bagan berikut.



Gambar 4.1. Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan

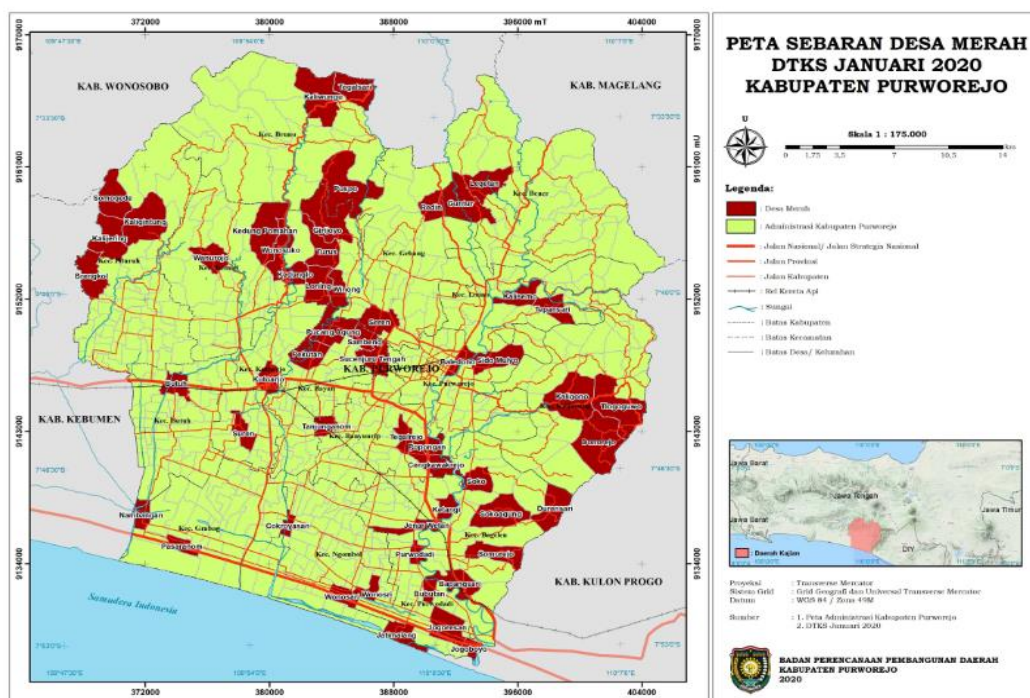
(Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo menunjukkan *trend* positif selama 4 tahun, namun terjadi kenaikan kembali di tahun 2020. Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,38% di tahun 2020 diakibatkan karena adanya Pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada di atas rata-rata persentase nasional sebesar 9,78% dan di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41%. Terlebih sejak merebaknya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu, menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo hingga menyentuh angka 11,78% pada tahun 2020 atau sebanyak 84,79 ribu jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut.



Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Beberapa penyebab umum meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 adalah mewabahnya *corona virus disease* yang melanda dunia dan telah ditetapkan WHO sebagai pandemi yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat di seluruh dunia.

Berdasarkan DTKS Pengesahan Bulan Januari Tahun 2020 yang telah dianalisis oleh Bappeda Kabupaten Purworejo berdasarkan kondisi jumlah rumah tangga yang berada pada desil 1 dan desil 2 pada suatu desa/kelurahan dibandingkan dengan kondisi yang sama pada desa/kelurahan lainnya dalam satu wilayah kecamatan, diperoleh 3 prioritas penanganan kemiskinan dengan basis desa. Prioritas 1 atau prioritas pertama terdiri dari 51 desa dan 3 kelurahan yang selanjutnya disebut dengan desa merah. Prioritas 2 terdiri dari 98 desa/kelurahan sedangkan prioritas 3 terdiri dari 342 desa/ kelurahan dengan sebaran desa merah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Sebaran Desa/Kelurahan Miskin Prioritas 1 Kabupaten Purworejo

(Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2020)



Keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan serta rendahnya daya saing kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Purworejo berkontribusi besar dalam bertambahnya angka pengangguran. Kondisi ini diperparah dengan tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang tepat sehingga masyarakat miskin semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masalah pokok yang dialami masyarakat Kabupaten Purworejo sehingga tergolong dalam kategori miskin adalah rendahnya akses terhadap jaminan kesehatan, pendidikan, sosial, serta infrastruktur layanan dasar yang layak mencakup air minum, sanitasi, hunian, dan listrik. Dengan demikian diperlukan strategi dan kebijakan terkait penjaminan pemenuhan *basic needs access* bagi masyarakat miskin dan pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) sehingga dapat menekan beban pengeluaran masyarakat.

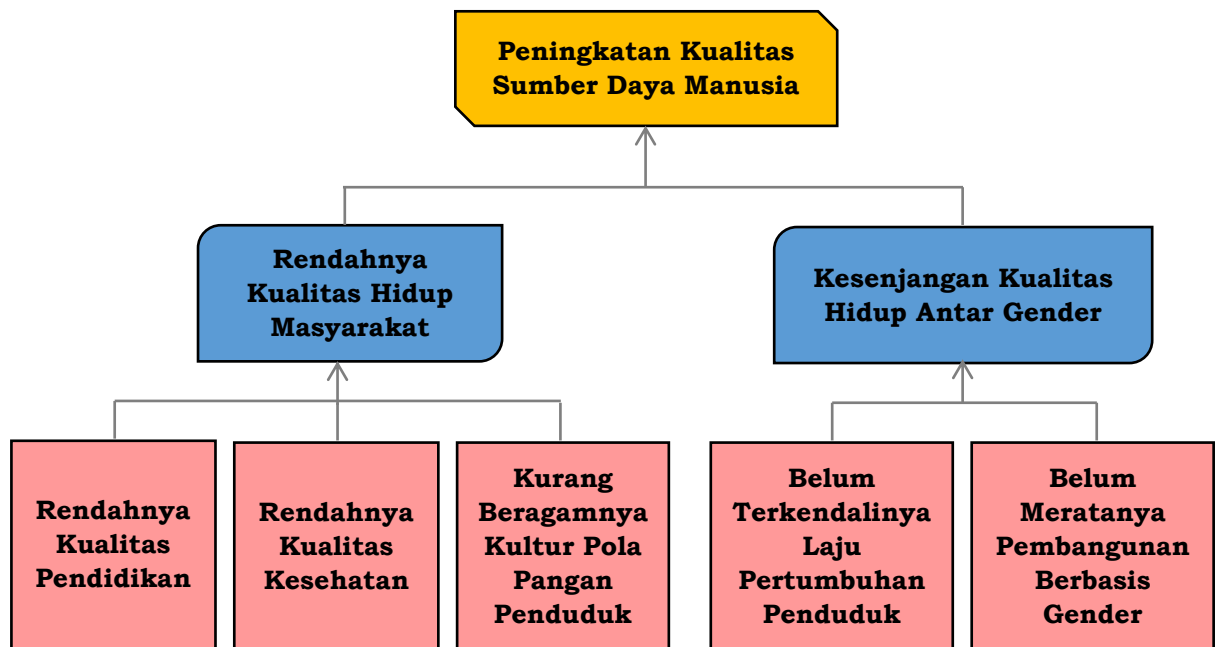
Di samping permasalahan beban pengeluaran, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purworejo juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berdasarkan isu dan permasalahan tersebut, tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Purworejo guna menanggulangi tingginya angka kemiskinan adalah untuk menguatkan masyarakat miskin sehingga menjadi mandiri dan berdaya dengan memberikan stimulan dan pendampingan berkelanjutan.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah. Sumber Daya Manusia merupakan roda penggerak utama dalam pembangunan, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya.

Namun demikian, berdasarkan gambaran umum dan

permasalahan pembangunan Kabupaten Purworejo yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui masih terdapat permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo sebagaimana dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 4.3. Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
(Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026)

Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*) yang diukur dari angka harapan hidup; pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dari angka melek huruf dan angka harapan lama sekolah; serta standar hidup yang layak (*decent standard of living*) yang diukur dari kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran pendapatan per kapita.

Pada tahun 2016 hingga 2020, IPM Kabupaten Purworejo menunjukkan *trend* peningkatan dengan capaian sebesar 72,68 pada tahun 2020. Nilai IPM Kabupaten Purworejo ini berada di atas rata-rata IPM Nasional sebesar 71,94 dan IPM Provinsi Jawa



Tengah sebesar 71,87. Capaian ini perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat sumber daya manusia merupakan sumber daya utama yang diperlukan dalam mencapai hasil pembangunan yang baik. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul dapat dilakukan dari beberapa faktor secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari sisi pemenuhan pendidikan, pemenuhan kesehatan, maupun pemenuhan pendapatan guna dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Ditilik dari dimensi pendidikan, Kabupaten Purworejo dihadapkan pada tantangan pemenuhan mutu dan akses pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan yang berkualitas harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk usia sekolah termasuk di dalamnya penduduk miskin dan berkebutuhan khusus, mulai dari pendidikan jenjang dasar, jenjang menengah, dan jenjang tinggi. Di samping itu, peningkatan budaya literasi baik secara digital maupun konvensional serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter juga menjadi tantangan dalam mengatasi isu kualitas sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, isu utama yang berkembang tidak hanya di Kabupaten Purworejo melainkan merebak secara global adalah ancaman virus Covid-19 yang belum kunjung mereda hingga pertengahan tahun 2021. Adanya pandemi ini tentunya mengubah tatanan kehidupan normal karena harus beradaptasi dengan protokol kesehatan yang baru guna menekan penyebaran virus ini sehingga usia harapan hidup masyarakat secara keseluruhan dapat diperpanjang karena merupakan salah satu indikator dalam penghitungan indeks pembangunan manusia. Melihat hal tersebut, penanganan kesehatan yang selama ini bergerak secara kuratif diprediksi akan bergeser menjadi tindakan preventif dan promotif.

Berdasarkan data tahun 2020 meskipun usia harapan hidup Kabupaten Purworejo berada di atas rata-rata di Provinsi Jawa Tengah, namun angka kematian Ibu dan balita masih tergolong tinggi sedangkan ibu dan balita merupakan hulu dari pembangunan kualitas sumber daya manusia yang baik. Dengan



demikian, upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan di bidang kesehatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait dengan isu kualitas sumber daya manusia.

Penduduk yang sehat tentunya harus didukung dengan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memenuhi angka kecukupan gizi dan kecukupan energi. Kabupaten Purworejo memiliki potensi pangan yang besar mengingat luasnya lahan pertanian yang ada, namun tidak diimbangi dengan besarnya daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok sehingga menyebabkan kurang beragamnya kultur pola pangan penduduk. Produksi pertanian harus dipastikan mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat secara beragam dan bervariasi untuk memenuhi kecukupan gizi yang disertai dengan sistem distribusi logistik daerah di mana pemerintah harus mampu memfasilitasi kemudahan akses produk pangan melalui pasar lokal yang sehat. Satu tantangan lain setelah kecukupan dalam wilayah yang sudah terpenuhi adalah menyiapkan produk pangan mentah maupun olahan untuk dapat bersaing di pasar ekspor di luar wilayah Kabupaten Purworejo guna meningkatkan nilai tambah bagi petani.

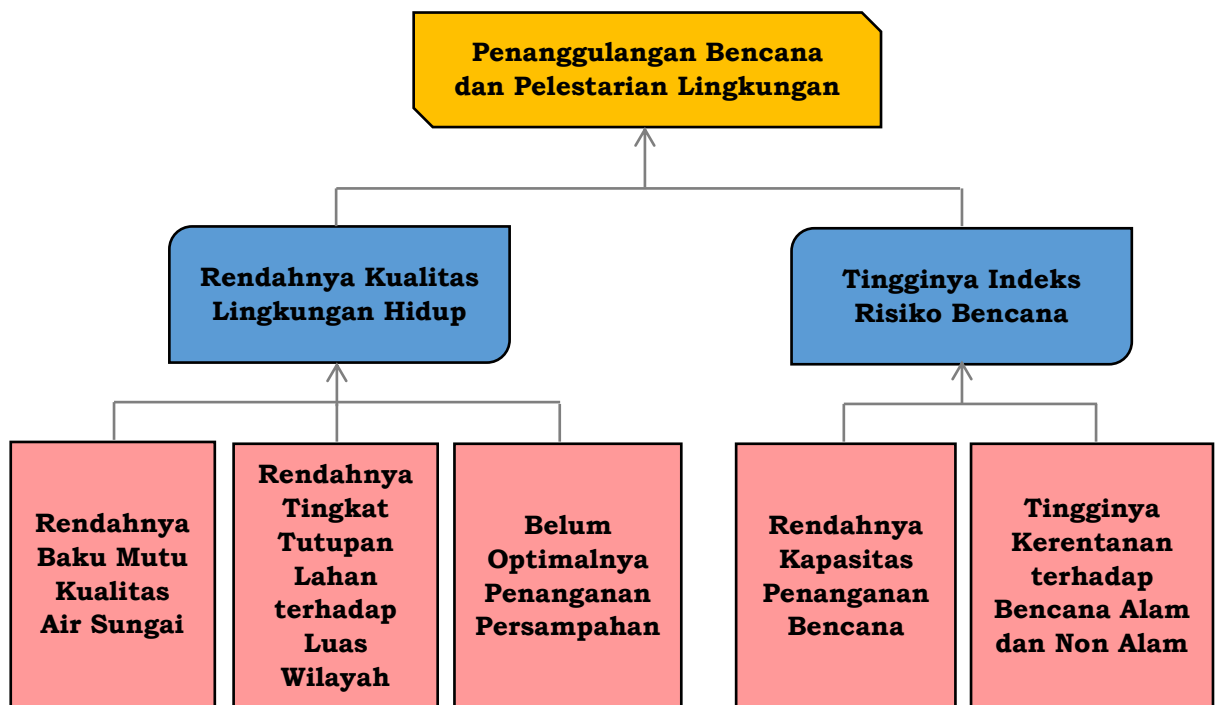
Selain isu-isu di atas, isu lain yang berkembang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo adalah adanya bonus demografi di mana keberadaan penduduk usia produktif lebih besar dibanding penduduk usia non produktif. Adanya bonus demografi ini menjadi tantangan untuk 5 tahun ke depan karena harus dapat dimanfaatkan guna mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memaksimalkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja penggerak roda pembangunan dengan tetap mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta memastikan kesetaraan gender tercapai. Selain itu ancaman keberadaan penduduk usia lanjut



juga harus dipersiapkan secara sinergis sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua.

c. Kebencanaan dan Pelestarian Lingkungan

Isu kebencanaan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari isu global mengenai lingkungan, salah satunya terkait perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan diperlukan guna menjaga kelestarian bumi supaya tidak rusak dan dapat diwariskan hingga beberapa generasi yang akan datang. Hal ini sejalan pula dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada *goal 3* berfokus pada penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Berdasarkan gambaran umum dan permasalahan pembangunan Kabupaten Purworejo yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui masih terdapat permasalahan kebencanaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Purworejo sebagaimana dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 4.4. Isu Strategis Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan
(Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026)



Kabupaten Purworejo memiliki nilai indeks risiko bencana sebesar 215,2 dan menjadi kabupaten dengan nilai IRBI tertinggi di Provinsi Jawa Tengah serta nomor 4 tertinggi secara nasional. Kabupaten Purworejo yang secara geografis terletak di pantai selatan Pulau Jawa dan memiliki topografi beragam mulai dari pesisir hingga pegunungan menyebabkan tingginya ancaman bencana alam yang mungkin terjadi. Berdasarkan jenis bencananya, Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, serta cuaca ekstrim.

Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dengan jenis bencana dengan frekuensi terbanyak pada tahun 2020 adalah bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Bencana ini terjadi akibat kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto mengalami kondisi kritis di bagian hulu dan tengah. Kondisi kritis tersebut dapat digambarkan dari lahan DAS yang mengalami kerusakan sehingga mengalami degradasi fungsi sampai batas yang telah ditentukan. Kondisi kritis pada bagian hulu menyebabkan fungsi kawasan hulu sebagai penyimpan air hujan berkurang sehingga air hujan mengalir ke bagian tengah dan hilir DAS. Apabila debit dan volume air melebihi batas tampungan sungai maka bencana banjir dapat dipastikan akan melanda bagian tengah dan hilir DAS. Pada kondisi tersebut, bencana longsor juga mengancam wilayah dengan kondisi lahan kritis yang memiliki kelerengan cukup curam.

Di sisi lain, kerusakan lahan yang terjadi menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyimpan air hujan sehingga menyebabkan bencana kekeringan saat kemarau panjang, terutama di desa-desa yang berlokasi cukup tinggi di atas permukaan laut. Selain itu lokasi Kabupaten Purworejo di sisi selatan Pulau Jawa berada dekat dengan zona subduksi selatan Jawa yang memiliki *seismic gap* atau kawasan yang aktif secara tektonik. Hasil kajian dari *Global Geophysics Research Group* Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah dipublikasikan



di jurnal internasional *Nature* menyebutkan bahwa kondisi lempeng di selatan Pulau Jawa tersebut menimbulkan potensi terjadinya bencana tsunami besar dengan tinggi maksimal sebesar kurang lebih 20 meter.

Hal tersebut juga perlu diwaspadai mengingat lokasi Kabupaten Purworejo yang berada di pesisir pantai sehingga diperlukan kajian dan upaya mitigasi bencana apabila skenario terburuk terjadi, sehingga kerugian korban jiwa dan harta benda dapat ditekan. Berdasarkan ancaman bencana yang sering terjadi di Kabupaten Purworejo ini diperlukan peningkatan kapasitas terkait penanggulangan bencana alam yang sudah sering terjadi sehingga keamanan masyarakat dapat terjamin.

Selain bencana alam, ancaman bencana non alam yang juga dapat mengancam keselamatan masyarakat harus diperhatikan dan diantisipasi dengan baik. Berkaca pada mewabahnya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sepanjang tahun 2020 hingga 2021 yang tentunya masih akan berdampak pada tatanan kehidupan hingga beberapa tahun ke depan menjadi tantangan perencanaan pembangunan dengan beradaptasi pada kondisi *new normal*. Pengembangan konsep *resilient city* atau kota tangguh bencana baik pada bencana alam maupun non alam perlu menjadi poin penting di mana suatu wilayah diharapkan akan tetap mampu menjalankan fungsinya dengan baik ketika suatu bencana yang terjadi. Konsep penataan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan sehingga ketangguhan dan ketahanan suatu wilayah dapat meningkat.

Melihat dari sisi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang mencakup perlindungan kualitas air, udara, dan tanah menjadi salah satu isu yang penting karena juga termasuk ke dalam salah satu *goal* yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kuantitas dan kualitas air baku, pencemaran udara, serta timbunan sampah merupakan beberapa hal yang dapat mengancam penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan tingkat risiko dan frekuensi kejadian yang cukup tinggi terjadi akibat menurunnya kualitas tutupan lahan, membuktikan bahwa

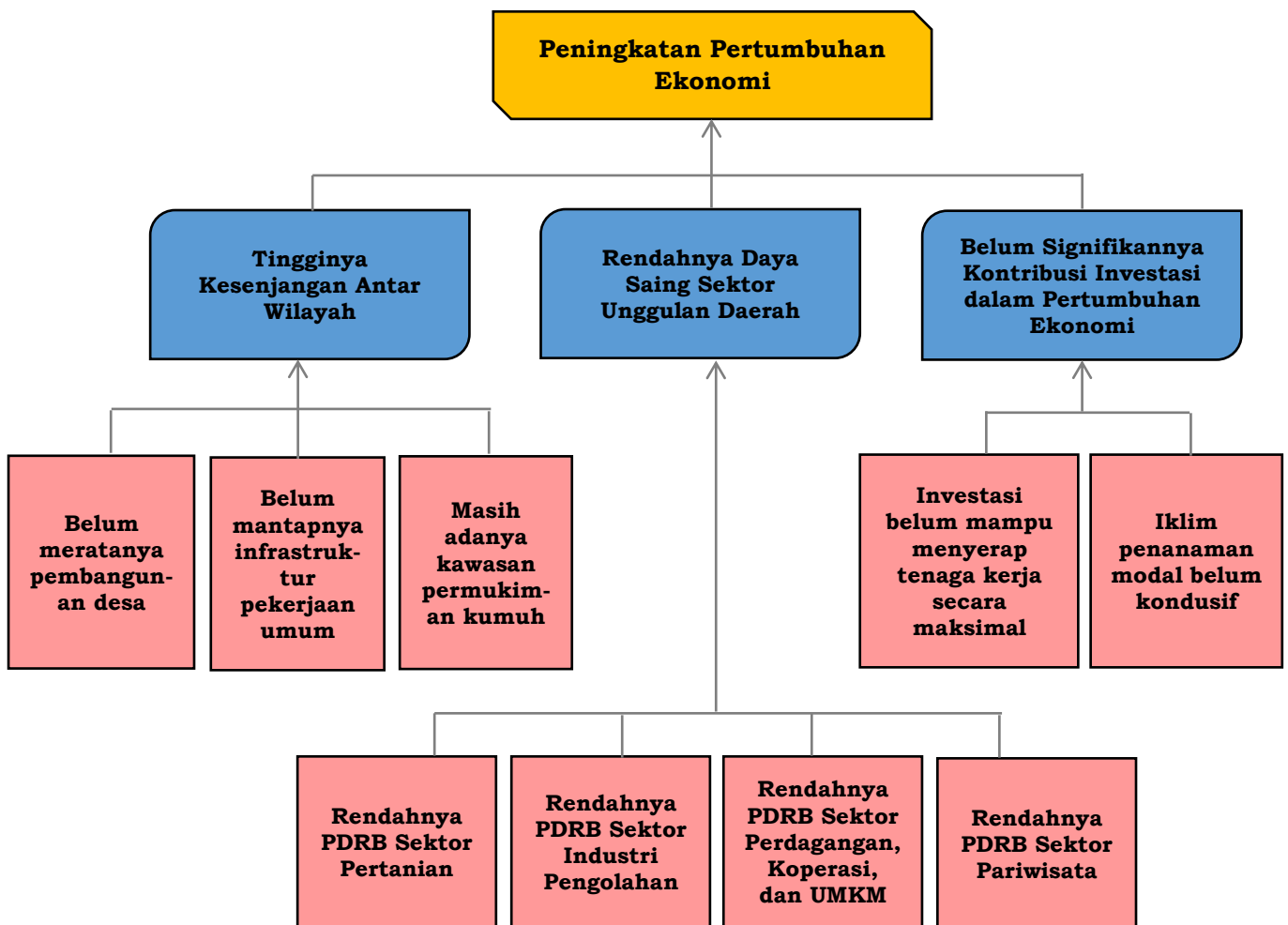


pelestarian lingkungan perlu dijaga dengan baik salah satunya untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin muncul. Pelestarian lingkungan berbanding terbalik dengan risiko bencana alam karena semakin lingkungan dijaga kualitasnya maka risiko bencana yang mungkin timbul akan semakin menurun.

Di samping itu, selain dengan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan juga perlu diperhatikan. Sosialisasi terkait upaya preventif dan upaya mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat guna mengoptimalkan kapasitas masyarakat menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo. Isu kebencanaan dan pelestarian lingkungan merupakan isu besar yang harus diselesaikan bersama sehingga koordinasi dan integrasi antar sektor harus diperkuat.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan aktivitas ekonomi suatu daerah secara keseluruhan, dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dapat diartikan bahwa kondisi perekonomian di wilayah tersebut akan semakin baik pula. Isu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo dibentuk dari komponen-komponen berikut.



Gambar 4.5. Isu Strategis Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

(Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo rata-rata berada pada level 5% setiap tahunnya sebelum adanya pandemi, namun dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi perlu semakin dikembangkan untuk bisa mengatasi permasalahan kemiskinan. Selain itu kondisi Kabupaten Purworejo yang berada di antara kawasan strategis seperti bagian utara yang masuk dalam Kawasan Strategis Badan Otorita Borobudur, bagian barat yang berbatasan dengan Bandara YIA, serta kawasan selatan yang direncanakan sebagai kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan sebagai *engine of growth* perekonomian di Kabupaten Purworejo.

Sektor-sektor unggulan di Kabupaten Purworejo seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM serta sektor pariwisata yang dalam beberapa tahun terakhir menyumbangkan proporsi PDRB yang tinggi perlu



dipertahankan dan lebih ditingkatkan fungsinya karena menjadi tumpuan perekonomian di Kabupaten Purworejo. Ancaman dan tantangan terkait keberlanjutan pertanian, persaingan industri dan pasar, serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup perlu dipersiapkan betul dengan mengingat kondisi geografis dan demografis di Kabupaten Purworejo yang beragam. Kabupaten Purworejo yang secara geografis memiliki kelengkapan zonasi pegunungan dan pesisir pantai serta kekhasan budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan ekonomi dengan didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku wisata.

Dalam pengembangan perekonomian, desa menjadi potensi besar yang ada di Kabupaten Purworejo. Pengembangan desa penting karena terdapat beberapa desa yang berada dalam kawasan strategis antara lain desa-desa yang berada dalam Kawasan Badan Otorita Borobudur, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perbatasan YIA, serta Kawasan Bendung Bener. Desa-desa yang berada dalam kawasan peruntukan industri dan desa-desa yang berbatasan dengan Bandara YIA dapat mengalami perubahan corak pedesaan yang dulunya merupakan kawasan pedesaan berubah menjadi kawasan terbangun dengan fungsi utama non pertanian karena peruntukannya untuk sektor industri dan pendukung aerotropolis.

Di sisi lain, investasi menjadi salah satu poin penting yang memiliki kontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat letak geografis Kabupaten Purworejo yang sangat strategis, Kabupaten Purworejo perlu untuk terus memperbaiki iklim penanaman modal sehingga lebih kondusif dan ramah investasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pula dukungan infrastruktur dan penyesuaian rencana tata ruang untuk mengakomodasi perubahan yang akan terjadi. Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan mampu memberikan peluang kesempatan kerja dan wirausaha yang semakin luas



dengan tetap memperhatikan kualitas calon tenaga kerja yang berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia.

Merebaknya pandemi Covid-19 yang masih belum mereda hingga pertengahan tahun 2021 tentunya memberikan dampak yang begitu besar terhadap minusnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Pengendalian pandemi dengan segala pembatasan kegiatan dalam bentuk *new normal* dan *new habit* diprediksi akan mengurangi permintaan kebutuhan barang sekunder dan tersier dan meningkatkan biaya produksi untuk kebutuhan barang primer. Di sisi lain, investasi diprediksi akan menurun yang berdampak pada penurunan produktivitas tenaga kerja sehingga angka kemiskinan dan tingkat pengangguran akan meningkat. Penyelenggaraan perekonomian terutama pada empat sektor unggulan yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan koperasi dan UMKM, serta pariwisata di tengah pandemi menjadi suatu tantangan tersendiri. Aktivitas ekonomi yang memerlukan interaksi dengan banyak orang harus dapat diantisipasi dengan baik sehingga ekonomi dapat terus bertumbuh dengan meminimalkan risiko penularan penyakit.

e. Tata Kelola Kelembagaan

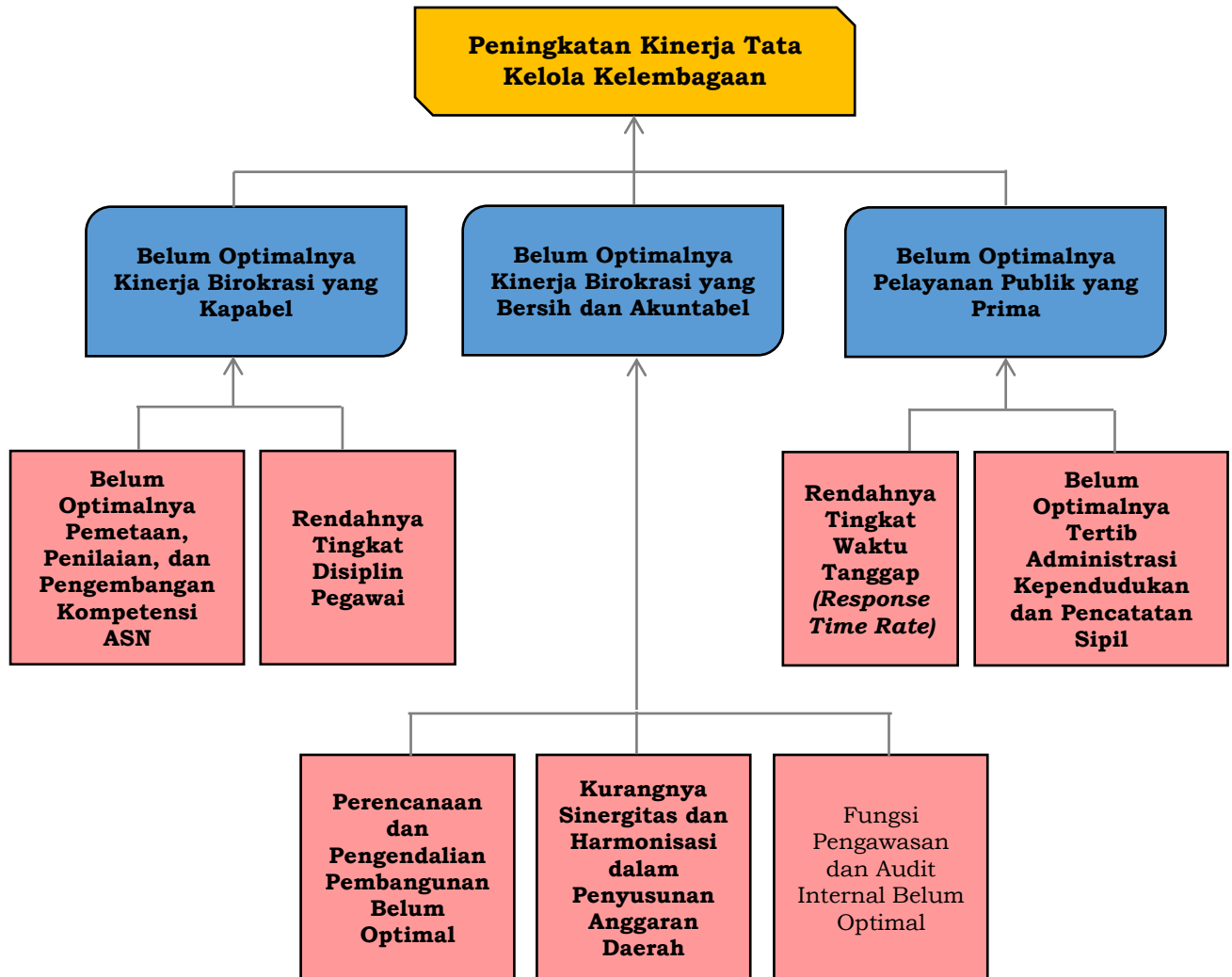
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola merupakan salah satu dari lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan peningkatan produktivitas suatu wilayah dapat dilakukan dengan penyederhanaan sistem birokrasi yang disertai dengan rekayasa dan inovasi teknologi. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang efisien dan produktif dalam melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar perekonomian tetap tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Sistem kelembagaan ini seharusnya difokuskan pada penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo beserta Standar Operasional Pelaksanaan yang bersifat



inter organisasi maupun antar organisasi. Proses bisnis pelaksanaan pembangunan harus tertata dengan baik dengan meningkatkan kinerja dimulai dari tahap perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya yang relevan, selaras, konsisten, dan saling terintegrasi satu sama lain. Tahap realisasi pembangunan yang terus dimonitoring dan dievaluasi secara berkala juga perlu dilaksanakan guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

Tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang berkualitas. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik harus memiliki kualitas, profesionalisme, serta akuntabilitas kinerja yang mumpuni. Peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur sesuai dengan formasi jabatannya menjadi salah satu tantangan yang harus dilaksanakan Kabupaten Purworejo. Di sisi lain, penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kabupaten juga menjadi salah satu kunci keberhasilan tata kelola kelembagaan yang baik guna menjawab isu tata kelola kelembagaan Kabupaten Purworejo sebagai berikut.



Gambar 4.6. Isu Strategis Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kelembagaan
(Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026)

Perkembangan jaman yang terus bergerak secara dinamis serta adanya tantangan pandemi Covid-19 secara global, diperlukan sistem birokrasi dan kelembagaan yang secara cepat mampu menyesuaikan dengan segala keadaan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi dengan memperhatikan isu yang berkembang baik secara global, nasional, maupun regional. Seperti halnya saat mewabahnya pandemi Covid-19, pelayanan publik harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat serta dituntut untuk dapat terus berinovasi sehingga kebutuhan publik tidak terhambat meskipun terdapat pembatasan kegiatan secara ketat.

Selain itu, dengan berkembangnya revolusi industri, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dikuatkan pada sistem kerja pemerintahan sehingga segala basis pelayanan



publik dapat dilakukan dengan sistem elektronik, seperti *e-budgeting*, *e-project planning*, *system delivery*, *e-controlling*, *e-reporting*, *e-monev*, serta aplikasi *custom* lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tupoksi organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang unggul disertai dukungan sistem kinerja yang mumpuni diharapkan mampu melahirkan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik yang inovatif guna mewujudkan *good and clean governance* berdaya saing kompetitif.

Daya saing dan produktivitas dapat diraih bila Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan budaya produktif. Semua hal tersebut menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan. Posisi daya saing Kabupaten Purworejo pada peringkat 14 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo masih memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan potensi yang ada.

Pembenahan terhadap orientasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh perangkat daerah perlu dilakukan sehingga tidak lagi hanya berfokus pada indikator proses seperti besaran serapan anggaran, opini terhadap laporan keuangan, serta hal-hal lain yang bersifat prosedural. Indikator kinerja birokrasi dapat diubah dari indikator proses dan *output based* menjadi *outcome based* dan *impact based* sehingga diharapkan setiap individu memiliki kontribusi yang jelas pada unit kerjanya dengan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas guna membangun atmosfer organisasi yang kondusif.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana pembangunan Kabupaten Purworejo jangka menengah pada periode tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Visi dan misi tersebut secara lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk kemudian diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran ini disusun dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal, lingkungan regional, nasional, maupun global dengan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

5.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Purworejo Berdaya Saing 2025”

Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo Tahap III RPJPD, serta merupakan periode terakhir (Tahap IV) dalam mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2005-2025. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Purworejo

Kata Purworejo merujuk pada Kabupaten Purworejo secara keseluruhan baik mencakup kewilayahan, pemerintahan, dan masyarakatnya.



b. **Berdaya Saing**

Kata berdaya saing dijabarkan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan dengan keunggulan kompetitif dan agamis sehingga dapat meneguhkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing yang akan dicapai pada tahun 2021-2025 meliputi 4 (empat) bidang yaitu:

– Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purworejo untuk berkehidupan dan berperan dalam proses pembangunan di daerah.

– Daya Saing Ekonomi

Daya saing ekonomi merupakan keunggulan kompetitif di sisi ekonomi daerah yang menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai magnet dan pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata di bidang pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, serta seni budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

– Daya Saing Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Daya saing pelayanan publik dan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan keunggulan kompetitif dari seluruh layanan publik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat serta proses-proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara bersih, akuntabel, kapabel, dan prima.

– Daya Saing Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Daya saing infrastruktur berwawasan lingkungan merupakan keunggulan kompetitif dari pemenuhan infrastruktur umum (jalan, air minum, sanitasi, listrik, serta telepon dan internet), pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana.



c. 2025

Tahun 2025 merupakan tahun percepatan pencapaian kondisi daya saing di Kabupaten Purworejo, dengan pemantapan di tahun 2026.

Perwujudan pembangunan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing di bidang sumber daya manusia, bidang pertanian, bidang ekonomi, bidang pelayanan publik, dan bidang infrastruktur berwawasan lingkungan ini dilaksanakan secara berkelanjutan guna menciptakan pembangunan di aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan dengan tetap memperhatikan kesetaraan di segala aspek kehidupan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo pada periode 2021-2026 juga dapat dimaknai sebagai perwujudan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing guna menjaga keberlangsungan sumber daya, menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, serta mutu hidup bukan hanya generasi masa kini melainkan juga untuk generasi yang akan datang.

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam “**Panca Daya Saing**” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan **daya saing sumber daya manusia** yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.

Sumber daya manusia adalah sumber daya utama yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan sehingga memerlukan peningkatan kompetensi dan keilmuan sehingga mampu membangun wilayahnya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Membangun sumber daya manusia unggul di



Kabupaten Purworejo yang berbasis pada religiusitas masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah upaya menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman dalam kebhinekaan, serta toleransi dalam rangka kesatuan.

Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta pembangunan pemuda. Melalui peningkatan kualitas kehidupan ini diharapkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas akan mampu mencapai kesejahteraan ekonomi maupun sosial yang bermuara pada peningkatan pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penurunan tingkat pengangguran.

- 2) Meningkatkan **daya saing sektor pertanian** dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.

Kabupaten Purworejo merupakan wilayah agribisnis yang memiliki potensi cukup besar pada sektor pertanian meskipun belum dikembangkan secara optimal. Melalui misi ini, terkandung maksud untuk mengembangkan sektor pertanian menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang modern guna menghasilkan komoditas hasil pertanian dengan kualitas baik dan kuantitas yang besar. Proses produksi diharapkan tidak hanya berhenti pada sisi *on-farm* (produksi hasil bahan baku mentah), melainkan berkembang pada sektor industri olahan bahan pangan dan perdagangan dalam skala lokal dan ekspor ke luar wilayah guna meningkatkan pendapatan.

Upaya dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian ini selain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, juga dimaksudkan untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Produksi, pengolahan, dan distribusi hasil-hasil pertanian yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan akan mampu



memastikan adanya jaminan jumlah ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang aman secara berkelanjutan, bukan hanya pada generasi masa kini melainkan juga memastikan ketahanan pangan hingga generasi yang akan datang tanpa harus bergantung dengan daerah lain.

- 3) Meningkatkan **daya saing pertumbuhan ekonomi daerah** berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis UMKM, perdagangan, industry, serta potensi pariwisata dan seni budaya dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan sektor-sektor penggerak ekonomi antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta mendorong pertumbuhan investasi. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdaya saing, diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

Selain meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor utama penggerak ekonomi daerah, pembangunan perdesaan menuju maju dan mandiri perlu dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

- 4) Meningkatkan **daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perwujudan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki daya saing tinggi dilaksanakan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan prima. Hal ini digambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan yang berorientasi pada hasil sehingga pengawasan juga diperlukan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Dengan demikian, melalui daya saing kualitas pelayanan publik, diharapkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purworejo dapat terlayani secara cepat, tepat, dan efisien.



- 5) Meningkatkan **daya saing sarana prasarana dan infrastruktur** yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sarana prasarana dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi antar kelompok serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang berdaya saing dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan didukung kemajuan teknologi informasi.

Dukungan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang berdaya saing ini diwujudkan melalui peran jaringan transportasi, dan komunikasi yang memungkinkan pergerakan orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan melalui peran penyediaan sumber air minum layak, sanitasi layak, pengelolaan persampahan yang memadai, sistem drainase yang baik, serta peningkatan PSU permukiman. Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur berwawasan lingkungan serta berkelanjutan juga perlu diperhatikan mengingat letak geografis Kabupaten Purworejo yang berada di lokasi dengan kerawanan bencana cukup tinggi. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat diterapkan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam melayani masyarakat secara umum.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 dirinci secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan supaya lebih terarah dalam implementasinya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 meliputi 7 (tujuh) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran dengan uraian sebagai berikut.



Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat

Misi ini memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, *Penurunan Angka Kemiskinan*, serta *Pengurangan Tingkat Pengangguran*. Tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia diukur keberhasilannya dengan indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan didukung dengan 6 (enam) sasaran yaitu: 1) *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat* yang diukur melalui angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* yang diukur melalui Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); 3) *Meningkatnya Ketahanan Pangan* yang diukur melalui indikator Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH); 4) *Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk* yang diukur melalui indikator laju pertumbuhan penduduk; 5) *Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender* yang diukur melalui angka Indeks Pembangunan Gender (IPG); serta 6) *Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga* yang diukur melalui persentase organisasi kepemudaan dan olahraga yang aktif.

Tujuan penurunan angka kemiskinan diukur keberhasilannya dengan indikator angka kemiskinan dan didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu *Berkurangnya Penduduk Miskin* yang diukur melalui indikator persentase kelompok Rumah Tangga 20% berpenghasilan terendah. Sedangkan tujuan pengurangan tingkat pengangguran diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu *Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja* yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) sasaran tersebut dimaksudkan untuk memastikan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo unggul dalam arti sehat dan sejahtera, terjamin kualitas pendidikannya secara adil dan inklusif,



mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan melindungi hak anak, serta mencapai pembangunan pemuda dan olahraga. Di samping itu, menurunkan angka kemiskinan juga menjadi tujuan dalam perwujudan misi pertama dalam pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2026.

Tujuan ini sejalan pula dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk (*Goal 1 TPB*), mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi (*Goal 2 TPB*), menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat (*Goal 3 TPB*), mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak (*Goal 5 TPB*), serta mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyediaan akses kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua (*Goal 8 TPB*).

Misi 2: Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri

Misi ini memiliki tujuan *Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan* yang diukur keberhasilannya dengan indikator pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Tujuan ini didukung dengan sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan* dengan ukuran keberhasilan melalui pengukuran indikator PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Purworejo sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangannya. Selain itu, dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2005-2025, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas juga menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanatkan dalam pembangunan periode RPJMD saat ini.

Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani yang diwujudkan melalui meningkatkan PDRB sektor pertanian kehutanan, dan perikanan, bukan hanya dimaksudkan untuk



meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan dan sasaran pada misi ini juga dimaksudkan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan (*Goal 2 TPB*) serta memastikan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan (*Goal 12 TPB*).

Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya

Misi ini memiliki tujuan *Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi* yang keberhasilannya diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu: 1) *Meningkatnya PDRB Per Kapita* yang diukur melalui indikator PDRB per kapita serta 2) *Meningkatnya Pembangunan Perdesaan* yang keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Tujuan dan sasaran pada misi ini dimaksudkan untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka mewujudkan perekonomian yang stabil dan terus meningkat secara positif yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan sasaran meningkatnya PDRB per kapita yang dilaksanakan pada tahun 2021-2026 juga turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja penuh, produktif, dan layak (*Goal 8 TPB*) serta mengurangi kesenjangan di wilayah Kabupaten Purworejo (*Goal 10 TPB*).

Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan *Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia* yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Tujuan ini



didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu: 1) *Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel* yang diukur melalui indikator nilai Maturitas SPIP, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan nilai SAKIP; 2) *Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel* yang diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN; serta 3) *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Tata kelola kelembagaan berkelas dunia yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Sistem birokrasi dan pelayanan publik yang dinamis, efektif, efisien, dan terbuka dalam menyerap partisipasi dan aspirasi publik menjadi kondisi yang ingin diwujudkan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Purworejo.

Tujuan dan sasaran dalam misi ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (*Goal 16 TPB*) serta memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*Goal 17 TPB*).

Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

Misi ini memiliki tujuan *Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan* yang keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut: 1) *Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum* yang diukur melalui indikator Indeks Infrastruktur Daerah; 2) *Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan* yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD); serta 3) *Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana* yang diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah.



Tujuan peningkatan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur tangguh bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui tujuan dan sasaran pada misi ini, ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan diharapkan akan dapat tercapai (*Goal 5 TPB*). Selain itu, penjaminan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern (*Goal 7 TPB*) serta pembangunan infrastruktur sarana prasarana yang tangguh, industrialisasi inklusif, berkelanjutan, dan pengembangan inovasi (*Goal 9 TPB*) juga menjadi hasil akhir yang akan dicapai melalui tujuan dan sasaran ini.

Di sisi lingkungan, pembangunan permukiman yang aman, tangguh, dan berkelanjutan (*Goal 11 TPB*) menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat letak geografis Kabupaten Purworejo yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam maupun bencana akibat perubahan iklim dan dampaknya (*Goal 13 TPB*). Upaya lain yang dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran ini adalah dengan melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, serta mengurangi degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati (*Goal 15 TPB*).

Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworejo, beserta indikatornya dijabarkan dalam tabel berikut.



Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Visi: Purworejo Berdaya Saing 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	72,68	72,68*	73,31	73,76	74,21	74,67	75,11	75,11	
			Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,12	8,12*	8,45	8,61	8,77	8,94	9,10	9,10	
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,49	13,49*	13,69	13,79	13,89	13,99	14,09	14,09	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	74,72	74,72*	75,01	75,16	75,30	75,45	75,59	75,59	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	85,90	85,90*	87,83	88,80	89,77	90,73	91,70	91,70	
			Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,22	0,22*	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
			Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94,96	94,96*	94,98	94,99	95,00	95,01	95,02	95,02	
			Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	98,41	98,41*	98,81	98,81	98,81	98,81	100,00	100,00	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Penurunan Angka Kemiskinan		Angka Kemiskinan	%	11,78	11,78*	11,42-10,27	11,02-9,86	10,62-9,45	10,22-9,04	9,82-8,63	9,82-8,63
			Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	37,02	37,02*	33,19	31,42	29,75	28,17	26,67	26,67
		Pengurangan Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,04	4,04*	3,64	3,45	3,27	3,11	2,95	2,95
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,05	70,05*	73,64	75,43	77,23	79,02	80,82	80,82
2	Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri	Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	%	-0,10	-0,10*	1,74	2,31	2,89	3,46	4,04	4,04
			Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	juta rupiah	2.754.144,17	2.754.144,17*	2.834.462,67	2.899.954,73	2.983.634,70	3.086.885,13	3.211.458,12	3.211.458,12
3	Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,66	-1,66*	3,39-4,39	3,98-4,98	4,57-5,57	5,16-6,16	5,75-6,75	5,75-6,75
			Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	18,24	18,24*	19,46	20,07	20,68	21,28	21,89	21,89
			Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,6764	0,6764*	0,7072	0,7226	0,738	0,7534	0,7688	0,7688



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	63,74	63,74*	70,00	72	74	76	78	78
			Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3,023	3,023*	3,075	3,100	3,130	3,170	3,500	3500
				Opini BPK	opini	WTP	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP	nilai	61,3	61,3*	64,00	65,00	67,00	68,00	70,00	70,00
			Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	79,7	79,7*	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,5
			Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,09	4,09*	4,15	4,20	4,25	4,30	4,35	4,35
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	1.411*	1.411*	60	61	64	67	70	73		
5	Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi	Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan		Indeks Risiko Bencana	indeks	190,01	190,01*	175,87	170,3	163,73	157,16	150,6	150,6
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	87,01	87,01*	88,18	89,83	91,47	92,97	94,34	94,34
			Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	indeks	61,18	61,18*	65,67	65,68	65,69	65,7	65,71	65,71
			Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,40	0,40*	0,50	0,55	0,60	0,65	0,73	0,73

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026

Keterangan: * data sementara



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 merupakan sebuah rumusan perencanaan yang lebih komprehensif sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan mengupayakan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan ini disusun dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang serta sasaran strategis dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga menjadi pedoman dalam penentuan program pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

6.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan sebuah penjabaran yang berisikan langkah-langkah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2025 dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, 7 (tujuh) tujuan, dan 17 (tujuh belas) sasaran. Ketujuh belas sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam 24 (dua puluh empat) strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 1**

Visi: Purworejo Berdaya Saing 2025		
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul Dalam Arti Luas, Mengedepankan Kompetensi Keahlian dan Keilmuan yang Berbasis pada Religiusitas Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Meningkatkan Literasi
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Menguatkan Ketersediaan Pangan
	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Angka Kelahiran
	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak
	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Penurunan Angka Kemiskinan	Berkurangnya Penduduk Miskin	Meningkatkan Penanganan Sosial Penduduk Miskin
Pengurangan Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Memperluas Kesempatan Kerja

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026

Misi pertama dalam pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran. Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

a) Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur utama yang harus dipastikan penyelenggaraannya guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Strategi ini akan mampu menjamin pelaksanaan pendidikan yang inklusif, adil, dan memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.

**b) Meningkatkan Literasi**

Literasi dapat diterjemahkan sebagai suatu kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Berdasarkan pada definisi tersebut, literasi berperan sangat penting dalam membantu setiap sumber daya manusia dalam meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dengan tingkat literasi yang baik, penumbuhkembangan budi pekerti dalam diri seseorang juga dapat dipenuhi. Dengan demikian, strategi meningkatkan literasi ini secara umum sangat mendukung dalam pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang mumpuni.

c) Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Upaya meningkatkan kualitas kesehatan seharusnya dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu sehingga derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dapat meningkat. Hal ini merupakan sebuah kondisi yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia sehingga dapat produktif secara sosial maupun ekonomi.

d) Menguatkan Ketersediaan Pangan

Kabupaten Purworejo merupakan wilayah agraris dengan luas lahan pertanian yang cukup besar, sehingga strategi menguatkan ketersediaan pangan merupakan suatu hal yang seharusnya dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dengan terjaminnya ketersediaan pangan baik secara kualitas maupun kuantitas, diharapkan kecukupan pangan yang bergizi untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan baik guna mendukung pembentukan sumber daya manusia yang berdaya saing.

e) Mengendalikan Angka Kelahiran

Mengendalikan angka kelahiran bukan berarti membatasi jumlah kelahiran melainkan merencanakan kelahiran dalam



setiap keluarga. Hal ini dapat dimaknai dengan merencanakan dengan matang jumlah anak dalam sebuah keluarga berdasarkan kemampuan keluarga tersebut, baik kemampuan secara mental maupun secara finansial. Melalui perencanaan jumlah kelahiran yang matang, anak-anak yang terlahir diharapkan dapat bertumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas karena segala kebutuhan anak tersebut dapat dipenuhi oleh keluarganya dengan baik.

f) Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak

Pemaknaan gender bukan hanya sebatas perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan mengacu pada perbedaan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah besar apabila terdapat kesetaraan sehingga tidak memicu adanya ketimpangan kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, pemberdayaan gender guna mencapai kesetaraan gender merupakan suatu strategi yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berdaya saing, sehingga semua masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh bidang kehidupan sehari-hari tanpa terkotakkan dengan istilah gender tertentu serta tanpa didominasi oleh salah satu gender tertentu.

g) Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Meningkatkan pembangunan pemuda merupakan strategi yang dilaksanakan guna memanfaatkan adanya bonus demografi dalam membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing. Optimalisasi potensi pemuda akan memberikan implikasi positif terhadap proses pembangunan sebagai motor penggerak dan *agent of change* dalam pembangunan. Keterlibatan pemuda tidak hanya menjadi obyek pembangunan, namun juga menjadi penggerak dalam berbagai proses perencanaan serta terlibat dalam pembangunan yang berdampak bagi Kabupaten Purworejo.



h) Meningkatkan Penanganan Sosial Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan terbentuk dari berbagai macam faktor yang saling berkaitan sama lain. Strategi meningkatkan penanganan sosial penduduk miskin menjadi salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui perlindungan jaminan sosial untuk penduduk miskin. Selain itu, pemberdayaan penduduk miskin juga dilaksanakan dengan harapan akan mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mencapai kemakmuran.

i) Memperluas Kesempatan Kerja

Memperluas kesempatan kerja dimaksudkan untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan padat karya, memberi pelatihan-pelatihan kerja, penumbuhan iklim wirausaha, serta hal-hal sejenis yang bersifat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kompetensi masyarakat melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat terbentuk yang tentunya akan berdampak langsung pada kualitas kerja yang dilaksanakan.

Tabel 6.2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 2

Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian Dalam Arti Luas yang Sinergi dengan Pengembangan UMKM, Perdagangan, dan Industri		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026

Misi kedua dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode 2021-2026 adalah meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri, dengan tujuan



peningkatan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

a) Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB. Namun selama tahun 2015 hingga tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki laju pertumbuhan negatif. Pada masa pandemi Covid-19, sektor ini juga terbukti mampu bertahan dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Purworejo. Dengan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan per tenaga kerja, maka diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian daya saing pertanian secara luas di Kabupaten Purworejo.

Tabel 6.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 3

Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis UMKM, Perdagangan, Industri Serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Per Kapita	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata
		Meningkatkan Investasi Daerah
	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Meningkatkan Pembangunan Perdesaan

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026

Misi ketiga dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode 2021-2026 adalah meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan



sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

a) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Purworejo. Industri pengolahan dapat memicu perkembangan sektor-sektor lain yang terkait (*back and forward linkage*) seperti sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya. Kemampuan sektor industri pengolahan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah mampu mendorong pada peningkatan perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan juga mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang cukup besar sehingga turut berkontribusi dalam mengurangi pengangguran. Berdasarkan hal tersebut, industri pengolahan menjadi sektor strategis dalam mengangkat perekonomian Kabupaten Purworejo sehingga pertumbuhannya perlu ditingkatkan sebagai salah satu strategi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

b) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM merupakan salah satu sektor perekonomian yang memberikan kontribusi cukup besar dalam aktivitas ekonomi di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo banyak memiliki produk unggulan daerah seperti durian, manggis, Kambing Kaligesing, dan lain sebagainya yang didukung pula dengan perkembangan UMKM dengan produk-produk inovatif yang memanfaatkan potensi lokal. Perkembangan sektor ini diharapkan akan mampu menstabilkan perekonomian masyarakat dari tingkat terkecil dan menjamin terbentuknya *sustainable livelihood* (perekonomian berkelanjutan) sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat dan berujung pada kesejahteraan bersama.



c) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Kabupaten Purworejo dengan kondisi geografis beragam memiliki banyak destinasi wisata alam baik wisata pantai maupun wisata pegunungan, serta wisata edukasi sejarah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja serta berfungsi sebagai pengungkit dari sektor perekonomian yang lain. Dengan tingginya angka kunjungan wisatawan, sektor perdagangan akan mampu didongkrak melalui daya beli para pengunjung wisata. Selain itu, keberadaan objek-objek wisata strategis ini akan menjadi magnet penarik investasi dan penanaman modal yang akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja.

d) Meningkatkan Investasi Daerah

Investasi memberikan andil yang cukup besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Investasi memicu pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan investasi di Kabupaten Purworejo perlu didukung dengan penguatan infrastruktur, tata ruang, energi, birokrasi, regulasi, kepastian hukum, stabilitas sosial dan keamanan.

e) Meningkatkan Pembangunan Perdesaan

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo perlu didukung dengan peningkatan pembangunan kawasan perdesaan, mengingat hampir 95% wilayah di Kabupaten Purworejo merupakan desa. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Peningkatan perekonomian desa juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa. Dengan demikian, tumbuhnya kawasan perdesaan menjadi modal awal dalam mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Purworejo.

**Tabel 6.4. Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 4**

Misi 4: Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Manajemen Berbasis Risiko
		Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Inovasi Daerah		

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026

Misi keempat dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode 2021-2026 adalah meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan tata kelola kelembagaan berkelas dunia. Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

a) Manajemen Berbasis Risiko

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, manajemen berbasis risiko perlu diperkuat, yakni program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Purworejo harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (*program follow result*) dengan memperhatikan analisis risiko yang mungkin akan muncul. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Sistem tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah daerah. Strategi manajemen berbasis kinerja ini perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah yang berdaya saing.

**b) Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah**

Prinsip manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, sinergi, dan bertanggung jawab serta dapat memperkokoh basis perekonomian di Kabupaten Purworejo.

c) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, mulai dari proses identifikasi masalah hingga penentuan strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan perencanaan penganggaran yang tepat. Melalui serangkaian proses yang sinergis dan saling terintegrasi ini, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dapat menghasilkan kualitas yang baik, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan Kabupaten Purworejo yang unggul dan berdaya saing.

d) Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Manajemen sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel atau mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia.

e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan



perbaiki pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, layanan publik perlu berorientasi pada pemenuhan harapan publik (*public expectation*) mengenai kualitas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Beberapa syarat untuk mewujudkan pelayanan publik prima, 1) pemenuhan standar pelayanan, 2) pelayanan yang diberikan harus mengacu pada hukum sehingga memberikan kepastian hukum, 3) kompetensi petugas yang memberikan pelayanan, 4) pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai standar pelayanan, 5) informasi yang disampaikan harus jelas, akurat dan dipahami para pengguna layanan.

f) Meningkatkan Inovasi Daerah

Inovasi merupakan suatu rangkaian proses kreatif yang dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan terobosan baru dalam rangka pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif. Inovasi di bidang pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan menjadi poin penting yang harus diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Iklim inovasi harus terus dikembangkan guna menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang maju.

Tabel 6.5. Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari Misi 5

Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Meningkatkan Akses Infrastruktur
	Terkelolanya Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026



Misi kelima dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode 2021-2026 adalah meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi dengan tujuan peningkatan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

a) Meningkatkan Akses Infrastruktur

Infrastruktur layanan dasar merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan dalam menjalani aktivitas di suatu wilayah. Infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia karena berperan penting dalam aksesibilitas dalam seluruh proses sosial dan ekonomi yang berlangsung. Meningkatkan akses infrastruktur yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purworejo dalam rangka mewujudkan dalam memastikan keberlangsungan kehidupan seluruh masyarakat.

b) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Aktivitas pembangunan yang semakin hari semakin meningkat seringkali tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup sehingga berdampak negatif pada daya dukung lingkungan. Maka dari itu diperlukan strategi pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan supaya pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo tetap memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

c) Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Letak Kabupaten Purworejo yang berada di lokasi rawan bencana dengan indeks resiko bencana dengan nilai tinggi, menjadikan peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dirumuskan sebagai salah satu strategi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana, diharapkan indeks resiko bencana Kabupaten Purworejo dapat diturunkan dan



ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dapat lebih ditingkatkan.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan sebuah instrumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan. Arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan guna menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkembang dengan memperhatikan sasaran strategis dalam tahapan waktu tertentu. Prioritas pembangunan yang ditentukan pada setiap tahunnya memiliki kesinambungan satu sama lain yang dirangkai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah.

Penetapan tema atau fokus pembangunan tahunan bukan berarti mengabaikan kondisi rutin yang memang harus dikerjakan setiap tahunnya. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan dan diberikan alokasi pendanaan. Prinsip perencanaan strategis dan perencanaan operasional harus berjalan secara seimbang, sehingga tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, melainkan juga melaksanakan segala program yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi.

Seperti halnya visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang disusun berlandaskan pada upaya penanggulangan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dirumuskan dari kondisi eksisting Kabupaten Purworejo, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo pada periode 2021-2026 juga diarahkan sebagai arahan penyusunan prioritas daerah sebagai penyelesaian masalah yang berkembang. Selain itu penyusunan arah kebijakan ini juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan regional sebagai bentuk sinergitas perencanaan pembangunan dari level terendah hingga level tertinggi. Amanat



tujuan pembangunan berkelanjutan juga diintegrasikan dalam penyusunan arah kebijakan ini sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terwujud dengan menyeluruh, setara, serta tidak hanya fokus pada masa sekarang melainkan juga pada masa yang akan datang.



Tabel 6.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul Dalam Arti Luas, Mengedepankan Kompetensi Keahlian dan Keilmuan yang Berbasis pada Religiusitas Masyarakat					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan partisipasi sekolah melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan	Program Pendidikan	Pendidikan
		Meningkatkan Literasi	Mengoptimalkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat	Program Literasi	Perpustakaan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Menjamin kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan	Program Kesehatan	Kesehatan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Menguatkan Ketersediaan Pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan	Program Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Pangan
	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan Angka Kelahiran	Meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak	Program Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



	Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, peran, serta partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga	Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga
Penurunan Angka Kemiskinan	Berkurangnya Penduduk Miskin	Meningkatkan Penanganan Sosial Penduduk Miskin	Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta keberfungsian sosial di masyarakat	Program Penanganan PPKS	Sosial
Pengurangan Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Memperluas Kesempatan Kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang disertai peningkatan peluang kerja usia produktif dan perlindungan sosial tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja Transmigrasi
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian dalam Arti Luas yang Sinergi dengan Pengembangan UMKM, Perdagangan, dan Industri					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan pertanian organik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kelautan dan Perikanan Pertanian
Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis UMKM, Perdagangan, Industri, serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Per Kapita	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri kecil yang berbasis potensi lokal secara sistemik dari hulu hingga hilir dalam rangka membentuk rantai penciptaan nilai (<i>value adding production chain</i>)	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	Perindustrian
		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM yang disertai dengan modernisasi koperasi dan pengembangan ekonomi lokal sesuai komoditas masing-masing wilayah yang mendukung kontribusi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	Koperasi dan UKM Perdagangan
		Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang mendukung kontribusi pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pariwisata Kebudayaan
		Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	Meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang kondusif melalui penetapan kebijakan dan kepastian hukum	Program Peningkatan Investasi Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan



	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Meningkatkan Pembangunan Perdesaan	Meningkatkan pembangunan perdesaan dengan mengelola sumber daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan	Program Pembangunan Perdesaan	Penanaman Modal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Misi 4: Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Manajemen Berbasis Risiko	Meningkatkan efektivitas manajemen berbasis risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Program Manajemen Berbasis Risiko	Pengawasan
		Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, produktif dan transparan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Keuangan
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Mewujudkan perencanaan yang terpadu (integrasi, sinkronisasi dan sinergi) dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Perencanaan
	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar	Program Manajemen Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



					Sosial
					Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Statistik
					Komunikasi dan Informatika
					Persandian
					Kearsipan
					Sekretariat Daerah
					Sekretariat DPRD
					Kecamatan
					Kesatuan Bangsa dan Politik
					Penunjang Urusan
		Meningkatkan Inovasi Daerah	Memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
Misi 5: Meningkatkan Daya Saing Sarana Prasarana Dan Infrastruktur yang Didukung Kemajuan Teknologi Informasi					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan



Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Meningkatkan Akses Infrastruktur	Mengembangkan infrastruktur wilayah dan permukiman yang meliputi jaringan transportasi, air bersih, air limbah, drainase, energi kelistrikan, telekomunikasi dan persampahan	Program Akses Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Perhubungan
	Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mitigasi serta penanggulangan bencana	Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Sosial

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026



Sebagai penjabaran pelaksanaan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap tahun, tema dan prioritas pembangunan tentatif di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022-2026 dijabarkan sebagai berikut:

2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Infrastruktur	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekonomi Kerakyatan	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Penguatan Sektor Ekonomi yang Unggul dan Berwawasan Lingkungan Global	Mewujudkan Purworejo yang Berdaya Saing	Mewujudkan Purworejo yang Berdaya Saing dan Sejahtera

Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo
Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026

1) Tema Pembangunan Tahun 2022

Tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah **“Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Infrastruktur”** dengan 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

- Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi
- Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- Keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
- Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah



2) Tema Pembangunan Tahun 2023

Tema pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 ditujukan pada **“Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekonomi Kerakyatan”** dengan 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menuju Purworejo berdaya saing
- b. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel
- c. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- d. Pewujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata
- e. Pewujudan ketahanan bencana dan keberlanjutan lingkungan hidup

3) Tema Pembangunan Tahun 2024

Tema pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 diarahkan pada **“Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Penguatan Sektor Ekonomi yang Unggul dan Berwawasan Lingkungan Global”** dengan 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
- b. Perwujudan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
- c. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- d. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM
- e. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan

4) Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 adalah **“Mewujudkan Purworejo yang Berdaya Saing”** dengan 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan



- b. Perwujudan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
 - c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM
 - d. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
 - e. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan
- 5) Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 ditujukan pada “**Mewujudkan Purworejo yang Berdaya Saing dan Sejahtera**” dengan 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM
- d. Pemantapan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Purworejo termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung yaitu kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kawasan Purwomanggung berpusat di kawasan perkotaan Magelang dengan arah pengembangan untuk mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan



pengembangan wilayah diarahkan pada sektor-sektor unggulan meliputi pertanian, pariwisata, perdagangan jasa, dan industri.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kawasan Purwomanggung diarahkan untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece* - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan mancanegara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung. Berdasarkan Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019, tema pembangunan Kawasan Purwomanggung berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan yang dimiliki adalah "*Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.*"

Kondisi eksisting konektivitas Purwomanggung didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 2 PKW dan 10 PKL. Pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat yaitu jalan nasional dan jalur kereta api. Peningkatan konektivitas untuk mendukung KSPN Borobudur dan sekitarnya memerlukan strategi yang mampu menghubungkan simpul kedatangan wisatawan melalui Bandara Adisutjipto dan Bandara Internasional Yogyakarta (DI Yogyakarta), Bandara Adi Soemarmo (Boyolali), dan Bandara Ahmad Yani (Semarang). Perlu pengembangan Jalan Bedah Menoreh (Bandara Internasional Yogyakarta-Borobudur), jalur kereta api Semarang- Ambarawa-Magelang-Yogyakarta serta peningkatan jalan nasional.

Keberadaan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi simpul utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi antara Purwomanggung dengan kawasan lainnya. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi daya tarik ekonomi pariwisata dan ditetapkannya sebagai UNESCO *World Cultural Heritage* diharapkan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini tentunya harus didukung dengan pembangunan jalur transportasi guna



memperlancar aksesibilitas yaitu dengan pembangunan jalan *ringroad* timur Purworejo, peningkatan jalan akses ke Badan Otorita Borobudur (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano), dan peningkatan jalan Banyuasin – Tridadi – Pucungroto – Batas DIY. Selain itu pembangunan infrastruktur pendukung lain juga dilaksanakan guna mendukung pengembangan wilayah ini yaitu rencana pembangunan SPAM Regional Kuburejo (JDU), pembangunan IKK SPAM Bagelen, serta pembangunan Sekolah Vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata.

Di samping itu, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan pengembangan tata ruang yang terwujud dalam struktur ruang dan pola ruang untuk jangka waktu 20 tahun. Dalam perkembangannya, RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun untuk melihat kesesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam RTRW adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Purworejo yang berdaya saing bertumpu pada sector pariwisata, industry dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi:

- a. Peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah;
- b. Pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan hidup;
- c. Pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan;



- d. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
- e. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Purworejo, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah, diantaranya:

- a. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah;
- b. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
- c. meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
- d. Meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi;
- e. Meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu;
- f. Meningkatkan cakupan pelayanan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan;
- g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h. Meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
- i. Meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana melalui pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana di seluruh kecamatan secara terpadu; dan
- j. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.



Adapun strategi untuk mendukung pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

1. Membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup;
2. Mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
3. Mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan pengisian kembali;
4. Membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dan sekitarnya agar selaras dengan karakteristiknya; dan
5. Membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.

Sedangkan strategi untuk pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan, meliputi:

- a. Mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengembangkan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah;
- c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- d. Mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku produk lokal pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan (agroindustri);
- e. Mengembangkan kawasan permukiman layak huni;
- f. Melestarikan kawasan hutan produksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- g. Mengembangkan kawasan perkebunan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



- h. Mengembangkan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sesuai; dan
- i. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan, meliputi:

- a. Optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
- b. Mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
- d. Mengarahkan kegiatan tambang di wilayah pertambangan di luar kawasan lindung, pertanian berkelanjutan, permukiman dan kawasan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan tinggi.

Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur; dan
- b. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Kota Perbatasan (Border City) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Purworejo yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan merupakan program-program lintas bidang urusan yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah rincian sebagai berikut:



Tabel 6.7. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)									
M	T	S	P				Tahun 0 (2020)	Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)	
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1				Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul Dalam Arti Luas, Mengedepankan Kompetensi Keahlian dan Keilmuan yang Berbasis pada Religiusitas Masyarakat														
	1			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	72,68	72,68*	73,31	350.248	73,76	252.476	74,21	277.342	74,67	284.825	75,11	284.165
		1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,12	8,12*	8,45	153.813	8,61	110.877	8,77	121.796	8,94	125.082	9,10	124.792
			Harapan Lama Sekolah (HLS)		tahun	13,49	13,49*	13,69	13,79		13,89		13,99		14,09			
			1	Program Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	91,86	91,86*	100,00	150.989	100,00	108.841	100,00	119.560	100,00	122.786	100,00	122.501
			Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		%	93,01	93,01*	100,00	100,00		100,00		100,00					
			Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam		%	83,33	83,33*	100,00	100,00		100,00		100,00					



Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)									
M	T	S	P				Tahun 0 (2020)	Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)	
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
					Pendidikan Menengah Pertama													
			2	Program Literasi	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	2,73	2,73*	5,00	2.824	5,00	2.036	5,00	2.236	5,00	2.296	5,00	2.291
		2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	74,72	74,72*	75,01	171.594	75,16	123.693	75,30	135.876	75,45	139.542	75,59	139.218
			3	Program Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	74,72	74,72*	75,01	171.594	75,16	123.693	75,30	135.876	75,45	139.542	75,59	139.218
		3		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	85,90	85,90*	87,83	2.455	88,80	1.770	89,77	1.943	90,73	1.996	91,70	1.993
			4	Program Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	kg/ kapita	246,09	246,09*	248,00	2.455	249,00	1.770	250,00	1.943	251,00	1.996	252,00	1.993
		4		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,22	0,22*	0,26	7.566	0,26	5.453	0,26	5.991	0,26	6.153	0,26	6.139
			5	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,30	1,30*	2,10	7.566	2,10	5.453	2,10	5.991	2,10	6.153	2,10	6.139
		5		Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94,96	94,96*	94,98	1.218	94,99	878	95,00	965	95,01	990	95,02	988
			6	Program Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	69,83	69,83*	72,09	1.218	73,14	878	74,18	965	75,22	990	76,27	988
		6		Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	98,41	98,41*	98,81	13.602	98,81	9.805	98,81	10.771	98,81	11.062	100,00	11.035
			7	Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	%	98,41	98,41*	98,81	13.602	98,81	9.805	98,81	10.771	98,81	11.062	100,00	11.035



Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)									
M	T	S	P				Tahun 0 (2020)	Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)	
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
					yang Aktif													
	2			Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,78	11,78*	11,42-10,27	2.314	11,02-9,86	1.669	10,62-9,45	1.833	10,22-9,04	1.881	9,82-8,63	1.877
		7		Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	37,02	37,02*	33,19	2.314	31,42	1.669	29,75	1.833	28,17	1.881	26,67	1.877
			8	Program Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Tertangani	%	115.534 jiwa	115.534 jiwa*	100	2.314	100	1.669	100	1.833	100	1.881	100	1.877
	3			Pengurangan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,04	4,04*	3,64	2.723	3,45	1.964	3,27	2.156	3,11	2.214	2,95	2.209
		8		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,05	70,05*	73,64	2.723	75,43	1.964	77,23	2.156	79,02	2.214	80,82	2.209
			9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	95,96	95,96*	96,45	2.723	96,69	1.964	96,93	2.156	97,17	2.214	97,42	2.209
2				Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian dalam Arti Luas yang Sinergi dengan Pengembangan UMKM, Perdagangan, dan Industri														
	4			Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-0,10	-0,10*	1,74	57.404	2,31	41.380	2,89	45.456	3,46	46.681	4,04	46.572
		9		Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	2.754.144,17	2.754.144,17*	2.834.462,67	57.404	2.899.954,73	41.380	2.983.634,70	45.456	3.086.885,13	46.681	3.211.458,12	46.572
			10	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan,	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan,	juta rupiah	2.754.144,17	2.754.144,17*	2.834.462,67	57.404	2.899.954,73	41.380	2.983.634,70	45.456	3.086.885,13	46.681	3.211.458,12	46.572



Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)									
M	T	S	P				Tahun 0 (2020)	Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)	
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
				dan Perikanan	dan Perikanan													
3				Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis UMKM, Perdagangan, Industri, serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya														
	5			Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,66	-1,66*	3,39-4,39	114.336	3,98-4,98	40.311	4,57-5,57	43.897	5,16-6,16	44.979	5,75-6,75	44.878
		10		Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	juta rupiah	18,24	18,24*	19,46	112.169	20,07	38.749	20,68	42.181	21,28	43.217	21,89	43.120
			11	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	0,57	0,57*	5,24	3.908	5,83	3.960	6,41	3.965	7,00	3.968	7,59	3.968
			12	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	-4,36	-4,36*	4,00	28.477	4,59	13.318	5,18	14.632	5,76	15.026	6,35	14.989
			13	Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	-4,84	-4,84*	4,85	75.742	5,44	18.556	6,03	20.385	6,62	20.935	7,21	20.885
			14	Program Peningkatan Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	%	-6,71	-6,71*	4,69	4.042	5,40	2.915	5,99	3.199	6,20	3.288	6,79	3.278
		11		Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,6764	0,6764*	0,7072	2.167	0,7226	1.562	0,738	1.716	0,7534	1.762	0,7688	1.758
			15	Program Pembangunan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	24,73	24,73*	29,00	2.167	31,13	1.562	33,26	1.716	35,39	1.762	37,53	1.758



Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)									
M	T	S	P				Tahun 0 (2020)	Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)	
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
4				Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)														
	6			Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	63,74	63,74*	70,00	1.576.523	72	1.683.565	74	1.671.957	76	1.706.675	78	1.724.892
		12		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3.023	3.023*	3.075	554.892	3.100	550.501	3.130	551.618	3.170	551.953	3.500	551.925
			Opini BPK		opini	WTP	WTP*	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
			Nilai SAKIP		nilai	61,3	61,3*	64,00	65,00		67,00		68,00		70,00			
			16	Program Manajemen Berbasis Risiko	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	2,04	2,04*	2,40	3.168	2,60	2.284	2,80	2.509	2,95	2.576	3,00	2.571
			17	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK	opini	WTP	WTP*	WTP	549.701	WTP	546.758	WTP	547.507	WTP	547.732	WTP	547.712
			18	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	N/A*	N/A*	90	2.023	91	1.459	92	1.602	93	1.645	94	1.642
		13		Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	79,7	79,7*	80,1	10.022	80,2	7.224	80,3	7.936	80,4	8.150	80,5	8.140
			19	Program Manajemen Sumber Daya Aparatur	Indeks Sistem Merit	indeks	N/A*	N/A*	0,62	10.022	0,64	7.224	0,68	7.936	0,73	8.150	0,82	8.140
		14		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,09	4,09*	4,15	1.011.609	4,20	1.125.840	4,25	1.112.403	4,30	1.146.572	4,35	1.164.827
			Indeks Inovasi Daerah		indeks	1.411*	1.411*	61	64		67		70		73			
			20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,09	4,09*	4,15	1.010.330	4,20	1.124.918	4,25	1.111.390	4,30	1.145.532	4,35	1.163.789
			21	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	indeks	1.411*	1.411*	61	1.279	64	922	67	1.013	70	1.040	73	1.038



Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)									
M	T	S	P				Tahun 0 (2020)	Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)	
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5				Meningkatkan Daya Saing Sarana Prasarana Dan Infrastruktur yang Didukung Kemajuan Teknologi Informasi														
	7			Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	indeks	190,01	190,01*	175,87	304.575	170,3	267.647	163,73	295.101	157,16	300.357	150,6	289.139
		15		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	87,01	87,01*	88,18	279.638	89,83	249.671	91,47	275.354	92,97	280.077	94,34	268.908
			22	Program Akses Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	87,01	87,01*	88,18	279.638	89,83	249.671	91,47	275.354	92,97	280.077	94,34	268.908
		16		Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	61,18	61,18*	65,67	20.932	65,69	15.089	65,71	16.575	65,73	17.023	65,75	16.982
			23	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	61,18	61,18*	65,67	20.932	65,69	15.089	65,71	16.575	65,73	17.023	65,75	16.982
		17		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,40	0,40*	0,50	4.005	0,55	2.887	0,60	3.172	0,65	3.257	0,73	3.249
			24	Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,40	0,40*	0,50	4.005	0,55	2.887	0,60	3.172	0,65	3.257	0,73	3.249

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026

Keterangan:

M = Misi ; T = Tujuan ; S = Sasaran ; PPD = Program Pembangunan Daerah ; * = data sementara



6.5. Program Unggulan Daerah

Program unggulan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam lima tahun ke depan. Program-program unggulan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Purworejo yang dijabarkan dalam konsep operasional dan indikasi rencana implementasi sebagai berikut:



Tabel 6.8. Konsep Operasional dan Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Misi	No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah
Misi 1 (Keyword: SDM Berdaya Saing)	1	Guru Meguru	Program Unggulan 'Guru Meguru' berfokus pada peningkatan kapasitas/ kompetensi para guru baik SD maupun SMP di Kabupaten Purworejo melalui bimbingan teknis/ pelatihan dengan menghadirkan praktisi unggul/ berprestasi sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kompetensi peserta didiknya.	Pelatihan kompetensi guru-guru SD dan SMP	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	2	Purworejo Makaryo	Purworejo Makaryo' atau 'Purworejo Bekerja' adalah program unggulan yang mendukung pencapaian misi 1 dengan memberikan upaya pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan pengawasan kegiatan industri di Kabupaten Purworejo agar menggunakan tenaga kerja lokal. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kapasitas/ kemampuan daya saing sumber daya manusia dalam hal tenaga kerja di Kabupaten Purworejo.	Pengawasan pelaksanaan kegiatan industri: menggunakan tenaga kerja lokal (industri garmen, bulu mata, sepatu, dsb)	Program Penempatan Tenaga Kerja
				Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di BLK: lulusan SMA/ SMK yang ingin langsung kerja (d disesuaikan kebutuhan pasar)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	3	Purworejo Bergas Lahir Batin	Program Unggulan 'Purworejo Bergas Lahir Batin' adalah program unggulan yang bertujuan untuk membangkitkan daya saing sumber daya manusia dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan, religiusitas, kapasitas kepemudaan dan olahraga.	Penyediaan Poliklinik gratis bagi Dhuafa yang belum tercover JKN	Pihak Ketiga
				Pembangunan Islamic Centre non APBD	Pihak Ketiga
				Pengembangan kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



Misi	No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Misi 2 (Keyword: Pertanian Berdaya Saing dan Berkelanjutan)	1	Tani Rejo Joyo	Tani Rejo Joyo atau 'Pertanian Purworejo Berjaya' adalah program unggulan daerah yang dimaksudkan mampu mendorong pertanian di Kabupaten Purworejo mampu menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, peralihan menjadi pertanian organik ditengah keterbatasan/kelangkaan pupuk kimia, optimalisasi pola tanam tumpang sari, optimalisasi sistem resi gudang, pengelolaan sistem irigasi, serta pemanfaatan tanah tanah marginal dengan optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian. Memasuki revolusi Industri 4.0, sektor pertanian juga perlu beradaptasi untuk menjawab tantangan ke depan. Penggunaan alat pertanian modern diharapkan dapat mengubah proses usaha tani menjadi semakin efisien, meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas.	Modernisasi alat-alat mesin pertanian (Alsintan) untuk petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Edukasi, koordinasi, dan penerapan pola tanam Tumpangsari	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Subsidi pupuk untuk petani dan peningkatan pertanian organik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Optimalisasi sektor unggulan/ tanaman (kopi, durian, manggis, kelengkeng) di tanah-tanah marginal	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Optimalisasi sistem resi gudang (SRG)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	2	Purworejo Tuwuh Ngunduh	Program Unggulan 'Purworejo Tuwuh Ngunduh' diterjemahkan sebagai program pemanfaatan lahan pekarangan produktif. Pemanfaatan pekarangan sehat dan produktif dalam	Gerakan menanam di pekarangan: cabai dan sayur mayur	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat



Misi	No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah
			penyediaan ketersediaan pangan guna mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Selain untuk memenuhi ketersediaan pangan, gerakan menanam di lahan pekarangan juga dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang diarahkan pada komoditas unggulan Kabupaten Purworejo yaitu cabai dan sayuran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
Misi 3 (Keyword: Ekonomi Berdaya Saing)	1	Tresno Purworejo, Larisi Purworejo	'Tresno Purworejo, Larisi Purworejo' adalah program dukungan bagi produk produk lokal di Kabupaten Purworejo dengan turut memasarkan hingga mengkonsumsi produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat Purworejo	Fasilitasi pemasaran hasil perkebunan: kelapa	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Gerakan ASN Purworejo membeli produk lokal Purworejo	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	2	Dolan Purworejo	'Dolan Purworejo' atau 'Jalan Jalan Purworejo' merupakan akronim dari Daya Tarik Wisata Internasional Andalan Purworejo memiliki maksud sebagai pembangunan destinasi wisata dengan event/pertunjukkan berkelas internasional yang terintegrasi secara spasial yang dilengkapi dengan sarana transportasi pendukung serta akomodasinya.	Pengembangan destinasi pariwisata Pantai Dewaruci berkelas internasional (sand track, pacuan kuda, lari pantai, voli pantai, aquarium, layang-layang)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Pengembangan kawasan strategis pariwisata: Mini Zoo, Kolam Renang, Taman Bunga, Taman Cerdas	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Pengembangan kawasan strategis pariwisata: Alun-alun, Museum Tosan Aji, Art Center, Masjid Agung, Gereja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



Misi	No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	
				Penyediaan sarana pendukung dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Pembangunan hotel nuansa kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) Purworejo	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Pembangunan Gapura Batas Wilayah	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				Pengembangan Museum Angkutan Darat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Pengembangan daya tarik wisata: <i>Offroad Track</i> berkelas internasional	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
	3	Tresno Budoyo	'Tresno Budoyo' atau 'Cintai Budaya' adalah program unggulan yang mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu daya saing ekonomi dalam hal pariwisata dan kebudayaan dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan khas yang memperkuat daya tarik wisata di Kabupaten Purworejo	Pelestarian kesenian tradisional: Jaran Bolong	Program Pengembangan Kebudayaan	
				Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan: Kompleks Pendopo	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan: Sanggar Seni, Amphitheater	Program Pengembangan Kebudayaan	
	Misi 4 (Keyword:	1	Purworejo	'Purworejo Tangkas' adalah program unggulan	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik	Program Pelayanan



Misi	No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah
Pelayanan Publik Berdaya Saing)		Tangkas	yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo dengan meningkatkan fasilitas dan pengembangan kompetensi SDM pelayan publik yang dapat mendukung pada upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo.	sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb.	Penanaman Modal
				Pengembangan kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Upaya penciptaan suasana kerja kondusif melalui rehabilitasi gedung yang representatif dan perlengkapan mebel yang memadai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Penatausahaan arsip dinamis pada OPD	Program Pengelolaan Arsip
				Penyediaan tenaga ahli pendamping pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2	Desaku Mletik	'Desaku Mletik' atau 'Desaku Melek Teknologi Informasi dan Komunikasi' adalah upaya peningkatan layanan TIK bagi penduduk di desa karena sebagian besar wilayah di Kabupaten Purworejo adalah desa. Upaya peningkatan layanan TIK ini dapat diwujudkan dengan mendorong pembangunan infrastruktur penunjang serta peningkatan kapasitas bagi aparatur desa di Kabupaten Purworejo.	Sosialisasi aplikasi Porjo di masing-masing kecamatan. Sasaran: kepala desa & sekretaris desa	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Internet menjangkau seluruh desa (<i>Smart Village</i>)	Program Aplikasi Informatika	
Misi 5 (Keyword: Infrastruktur)	1	Dalane Mantep	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Purworejo melalui pembangunan,	Meningkatkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten yang	Program Penyelenggaraan



Misi	No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah
			peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan sehingga terwujud kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang).	memenuhi kriteria tertentu	Jalan
				Peningkatan & pemeliharaan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan
				Pembangunan, peningkatan, & pemeliharaan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
	2	Purworejo Padhang	'Purworejo Padhang' atau 'Purworejo Terang' adalah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Kabupaten. PJU merupakan infrastruktur penunjang penting bagi masyarakat di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Purworejo untuk beraktivitas di malam hari.	Pembangunan PJU	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RPJMD Kab. Purworejo 2021-2026



6.6. Program Inovasi Daerah

Program inovasi daerah merupakan program-program inovatif yang disusun sebagai sebuah upaya kreatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam mengatasi isu-isu pembangunan yang muncul dalam 5 tahun ke depan. Beberapa program inovasi yang akan dijalankan Kabupaten Purworejo antara lain:

a) Sanding Erat Desa Kita

Sanding Erat Desa Kita merupakan sebuah konsep pendampingan desa oleh setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sanding Erat Desa Kita adalah akronim dari Satu Pendamping Perangkat Daerah di Desa Prioritas untuk Masyarakat “KITA” (kuat secara ekonomi, inovatif, tata tentrem, ayem lan akur). Adapun bentuk pendampingan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pemerintah Desa
 - Pendampingan untuk verifikasi dan validasi DTKS,
 - Pendampingan untuk tertib administrasi kependudukan.
2. Masyarakat RTM
 - *Scanning* lapangan ke RTM,
 - Koordinasi dengan desa apakah sudah masuk dalam pengusulan bantuan (RTLH, Pemberdayaan/pelatihan),
 - Pendampingan setelah diberikan pelatihan proses usaha dari tahap permodalan, produksi, distribusi/pemasaran, serta pengelolaan keuangan hingga menjadi mandiri,
 - Pendampingan *mindset* RTM agar lebih percaya diri dan mandiri dalam menjalani usaha.

Konsep Sanding Erat Desa Kita sebagai salah satu program inovasi yang diselenggarakan Kabupaten Purworejo dan bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan ini dikembangkan dalam rangka mendukung pencapaian misi pertama di mana salah satu tujuannya adalah penurunan angka kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Melalui pendampingan rumah tangga miskin yang dilaksanakan dari tingkat terbawah yaitu tingkat desa, diharapkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dapat meningkat



sehingga angka kemiskinan dan tingkat pengangguran dapat diturunkan secara signifikan.

b) Petani Milenial

Gerakan tani dengan para petani milenial merupakan sebuah program inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Purworejo guna mendukung pencapaian misi kedua yaitu meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri. Petani milenial memiliki peran penting di era industri 4.0 dan *society* 5.0 saat ini karena pengembangan pertanian memerlukan dukungan sumber daya manusia pertanian yang maju, mandiri, modern, dan melek teknologi.

Petani milenial merupakan para petani yang berusia antara 19-39 tahun atau petani yang tidak berada dalam *range* umur tersebut tetapi berjiwa milenial, tanggap teknologi digital, dan tanggap alat mesin pertanian (alsintan) modern. Program inovasi ini dikembangkan guna menumbuhkan minat generasi muda dalam mengelola lahan pertanian produktif dan berkelanjutan. Konsep dari Petani Milenial tidak hanya dijalankan dengan meningkatkan kapasitas, keterampilan, sikap, dan pengetahuan petani, tetapi juga mengubah pola pikir serta meningkatkan kapasitas para petani ke arah yang lebih modern mulai dari tahap produksi hingga distribusi komoditas hasil pertanian yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan diversifikasi pertanian berbasis sumber daya lokal. Sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian, meningkatkan produksi ketahanan pangan, dan berdampak pada peningkatan nilai tambah pertanian, pendapatan para petani, serta perekonomian secara luas.

Kebutuhan pangan di masa depan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Namun di sisi lain, petani dianggap sebagai pekerjaan orang tua sehingga banyak pemuda yang enggan berprofesi sebagai petani. Di samping itu, rendahnya tingkat kesejahteraan petani juga menjadi faktor penyebab enggannya pemuda untuk berprofesi



sebagai petani. Maka dari itulah dibentuk program inovasi petani milenial yang bertujuan untuk mengembangkan konsep pertanian yang lebih modern dan mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi para petani secara luas. Petani milenial yang sudah mengenyam jenjang pendidikan lebih tinggi, diharapkan memiliki kemampuan yang lebih tinggi pula dalam mengolah lahan pertanian dengan sarana prasarana yang modern, teknik yang inovatif, sehingga menghasilkan komoditas hasil pertanian yang memiliki kuantitas terjamin dan berkualitas tinggi sehingga lebih sehat dan aman dikonsumsi.

Sisi produksi yang lebih milenial diharapkan akan mampu menjadikan proses pengelolaan lahan pertanian menjadi lebih efektif dan efisien dalam arti penghematan sumber daya, baik dari segi alat, mesin serta bahan baku, segi tenaga manusia, maupun dari segi waktu pengolahan. Lebih daripada itu, sistem pengolahan yang memperhatikan kualitas mutu dengan beralih pada sistem pertanian organik akan turut berdampak baik pada peningkatan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Purworejo. Pertanian organik mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai *input* dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan. Budidaya organik juga berdampak baik pada lingkungan hidup dengan mempertahankan kesuburan tanah dan menghindari pencemaran.

Menilik dari sisi distribusi secara milenial, diharapkan proses pemasaran komoditas hasil pertanian dapat dijalankan dengan cara yang lebih modern. Pemanfaatan *e-commerce* secara digital dapat memperluas jangkauan pemasaran, mempermudah dalam pemesanan dan pengiriman, serta mempercepat waktu pemasaran. Dengan demikian, Petani Milenial merupakan sebuah program inovasi guna memaksimalkan potensi Kabupaten Purworejo sebagai daerah agribisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan nilai



tambah hasil pertanian serta membuka kesempatan kerja baru untuk seluruh masyarakat.

c) *One Agency One Innovation*

One Agency One Innovation merupakan sebuah konsep yang dirancang dengan mengembangkan minimal satu inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo. Program inovasi ini dikembangkan dalam rangka mengatasi isu tata kelola kelembagaan dan mendukung pelaksanaan misi keempat yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang baik guna mewujudkan *good governance*. Melalui program inovasi ini pula, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dapat dijalankan dengan cara-cara baru yang lebih inovatif. Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah diharapkan juga dapat berjalan dengan lebih cepat, tepat, mudah, dan responsif.

Beberapa produk inovasi pelayanan publik yang sudah berkembang di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Satu Data

Data dan informasi statistik daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan perangkat daerah, instansi vertikal, siswa/mahasiswa, serta masyarakat umum dalam melaksanakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban, penelitian, penyusunan rencana usaha dan aktivitas-aktivitas lainnya. Pembangunan aplikasi statistika “SATU DATA” menjadi informasi awal yang dapat memberi gambaran tentang kondisi Kabupate Purworejo pada berbagai bidang di dalamnya. Bersama dengan publikasi data statistik milik BPS, diharapkan aplikasi Satu Data ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan.



2. SI-IDA

SI-IDA (Sistem Informasi Perizinan dalam Jaringan) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo. SI-IDA adalah sebuah bentuk inovasi pengelolaan perizinan guna menjawab kebutuhan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan murah. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan beberapa perangkat daerah lain di Kabupaten Purworejo antara lain:

- SI-IDA dengan SIAK (Disdukcapil), konfirmasi data kependudukan pemohon perizinan
- SI-IDA dengan SIMTARU (DPUPR), mempermudah dalam mengolah izin terkait penataan ruang
- SI-IDA dengan KSWP (KPP Pratama), konfirmasi kewajiban pembayaran pajak pemohon perizinan.

3. PESONA (Pelayanan Dokumen Kependudukan Satu Hari untuk Anda), merupakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan langsung dan gratis

4. PANEN DUREN (Perekaman KTP-el Penduduk Rentan), merupakan pelayanan perekaman KTP elektronik dengan sasaran penduduk dengan keterbatasan mobilitas baik karena mengalami gangguan fisik, mental, jompo, maupun keterbatasan lain.

5. JALINTOL (Kerjasama SIAK Relasi Melalui Jalin Lintas Sektor Online), merupakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan Kerjasama penerapan SIAK Relasi melalui lintas sektor online dengan desa/kelurahan, Puskesmas, dan Rumah Sakit.

6. STOP CALO (Syarat Terpenuhi Ora Bayar Proses Catat Akte Lewat *Online*), merupakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara *online*.

7. DO PELARIS (Delivery Order Pelayanan Langsung Antar Terintegrasi dan Gratis), memberikan pelayanan mengambil dan mengantar dokumen persyaratan/berkas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah selesai diproses ke Kecamatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas.



8. MODAL IKLAS (Mobil Datang Administrasi Lengkap Identitas Kependudukan Langsung Selesai), memberikan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui *car free day*, jemput bola, dan pelayanan keliling.
9. PAK SUBUR (Pelayanan Akta Kematian Sebelum Jenazah Dikubur), memberikan pelayanan akta kematian sebelum jenazah dikubur dengan input data jenazah melalui SIAK Relasi desa/kelurahan.
10. KESAH KUTHO (Perkawinane Sah Dokumene Cetho), memberikan pelayanan akta perkawainan non muslim melalui Kerjasama dengan gereja.
11. BALI NYATE (Bayi Lahir Nyangking Akte), memberikan pelayanan akta kelahiran pada bayi yang baru lahir di Rumah Sakit dan Puskesmas secara *online*.
12. BABAT TAMAT SINDIKAT (Bareng-bareng Tuntaskan Akta Kematian Bersih dan Valid Data Kependudukan), memberikan pelayanan akte kematian dan *update* Kartu Keluarga melalui SIAK Relasi desa/kelurahan.
13. TIGTAK GOES TO SCHOOL (Tim Tanggap Kartu Identitas Anak ke Sekolah), merupakan tim pelayanan jemput bola Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah
14. SINDOLALAK (Sistem Informasi Dokumen Online Layanan Administrasi Kependudukan) merupakan sistem pelayanan dokumen administrasi kependudukan berbasis *website* layanan *online*.
15. PIKANTUK MANTU (Pelayanan KK KTP untuk Manten Baru), merupakan pelayanan dokumen kependudukan perubahan status bagi pasangan pengantin baru
16. GERTAK (Gerakan Cetak Cepat Akta Kelahiran), merupakan pelayanan cetak cepat akta kelahiran tanpa permohonan, memerlukan klarifikasi data ke desa/kelurahan

d) One Village One Product

Program inovasi *one village one product* atau satu desa satu produk merupakan sebuah program yang mengarahkan untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil, dan



menengah untuk dapat menghasilkan suatu produk lokal khas wilayah Kabupaten Purworejo. Produk-produk ini diharapkan dapat menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan dengan produk lain yang sejenis dan memiliki daya saing lebih tinggi.

Dalam pemberdayaan gerakan OVOP ini, terdapat 3 (tiga) prinsip yang menjadi dasar pengembangan, yaitu: (1) *Local yet Global*, dengan maksud bahwa produk yang dikembangkan memiliki kearifan lokal khas di wilayahnya namun tetap mampu bersaing secara kompetitif di skala global; (2) *Self-reliance and Creativity*, memiliki maksud bahwa dalam mengembangkan produk, masyarakat harus memiliki kemandirian dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara lebih maksimal; serta (3) *Human Resources Development*, komitmen dalam pengembangan produk harus diiringi dengan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mulai dari proses produksi hingga distribusi.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III pada sub bab 3.6. Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi:

- a. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
- b. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
- c. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien,



akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga dengan proporsi yang semakin berimbang dalam rangka menjaga kualitas fiskal daerah. Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2021-2026 tertuang dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	BELANJA DAERAH	2.197.230.452.168,00	2.408.123.255.909,00	2.289.012.182.982,45	2.337.741.842.569,02	2.387.612.446.845,59	2.393.732.493.817,08
	BELANJA OPERASI	1.329.556.166.206	1.509.248.206.697,00	1.499.832.765.723,56	1.501.345.607.647,02	1.522.811.064.699,59	1.519.513.806.756,08
	Belanja Pegawai	886.678.648.260	1.008.829.756.039,00	1.009.838.585.796,56	1.010.848.424.381,02	1.011.859.272.805,59	1.012.871.132.079,08
	Belanja Barang dan Jasa	381.612.586.817	393.679.638.276,00	328.204.056.381,00	429.401.005.641,00	449.670.468.368,00	445.172.020.953,00
	Belanja Bunga	700.000.000	2.250.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	52.903.881.129	83.017.859.582,00	152.903.881.129,00	52.903.881.129,00	52.903.881.129,00	52.903.881.129,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.661.050.000	21.470.952.800,00	8.011.242.417,00	8.192.296.496,00	8.377.442.397,00	8.566.772.595,00
2	BELANJA MODAL	323.523.322.362	359.717.583.166,00	249.565.143.873,89	296.241.201.481,00	324.060.854.199,00	333.058.477.609,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	541.150.963.600	536.157.466.046,00	536.614.273.385,00	537.155.033.441,00	537.740.527.947,00	538.160.209.452,00
	Belanja Bagi Hasil	10.142.119.800	12.550.978.070,00	13.007.785.409,00	13.548.545.465,00	14.134.039.971,00	14.553.721.476,00
	Belanja Bantuan Keuangan	531.008.843.800	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00	523.606.487.976,00

Sumber: Hasil Analisis, 2021



7.2. Program Perangkat Daerah

Mendasarkan kerangka pendanaan pembangunan daerah, dijabarkan rencana program prioritas seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rencana program prioritas daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2022-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Program-program akan dilaksanakan hingga 5 (lima) tahun guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Purworejo. Tabel 7.2 berikut menunjukkan *Cascading* Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2026.



Tabel 7.2. Cascading Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan partisipasi sekolah melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan	1. Program Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Program Pengembangan Kurikulum			
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			
						Program Pengembangan Bahasa dan Sastra			
				Meningkatkan Literasi	Mengoptimalkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.	2. Program Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		
				2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Menjamin kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan.	3. Program Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
		3. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Menguatkan Ketersediaan Pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan.	4. Program Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
					Program Penanganan Kerawanan Pangan				
					Program Pengawasan Keamanan Pangan				
			Mengendalikan Angka Kelahiran		5. Program Pengendalian	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Sosial, Pengendalian		
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		Meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana.	Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penduduk dan Keluarga Berencana
		5. Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender	Meningkatkan Pemberdayaan Gender	Meningkatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.	6. Program Pemberdayaan Gender	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		6. Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, peran, serta partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga	7. Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	Penurunan Angka Kemiskinan	7. Berkurangnya Penduduk Miskin	Meningkatkan Penanganan Sosial Penduduk Miskin	Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta keberfungsian sosial di masyarakat.	8. Program Penanganan PPKS	Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pengurangan Tingkat Pengangguran	8. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Memperluas Kesempatan Kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga	9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian,



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				kerja yang disertai peningkatan peluang kerja usia produktif dan perlindungan sosial tenaga kerja		Program Hubungan Industrial Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan pertanian organik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.	10. Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatkan PDRB Per Kapita	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri kecil yang berbasis potensi lokal secara sistemik dari hulu hingga hilir dalam rangka membentuk rantai penciptaan nilai	11. Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				(value adding production chain).			
			Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM yang disertai dengan modernisasi koperasi dan pengembangan ekonomi lokal sesuai komoditas masing-masing wilayah yang mendukung kontribusi pada Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda.	12. Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
			Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang mendukung kontribusi pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13. Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	Meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang kondusif	14. Program Peningkatan Investasi Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				melalui penetapan kebijakan dan kepastian hukum		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
						Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Promosi Penanaman Modal	
						Program Pelayanan Penanaman Modal	
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Peningkatan Kerjasama Desa
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
6	Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia	12. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Manajemen Berbasis Risiko	Meningkatkan efektivitas manajemen berbasis risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.	16. Program Manajemen Berbasis Risiko	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Meningkatkan pengelolaan keuangan	17. Program Peningkatan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan,
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	daerah yang sehat, produktif dan transparan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Akuntabilitas Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendapatan dan Aset Daerah
			Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Mewujudkan perencanaan yang terpadu (integrasi, sinkronisasi dan sinergi) dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah	18. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		13. Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar	19. Program Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		14. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.	20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pencatatan Sipil	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Penataan Desa	
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	
						Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
						Program Perizinan Penggunaan Arsip	
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
						Program Perekonomian dan Pembangunan	
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
						Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah						
Meningkatkan Inovasi Daerah	Memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.	21. Program Peningkatan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
7	Peningkatan Infrastruktur		Meningkatkan Akses Infrastruktur	Mengembangkan infrastruktur wilayah	22. Program Akses Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Berkas Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	15. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum		dan permukiman yang meliputi jaringan transportasi, air bersih, air limbah, drainase, energi kelistrikan, telekomunikasi dan persampahan.		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
						Program Penataan Bangunan Gedung	
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
						Program Penyelenggaraan Jalan	
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
						Program Kawasan Permukiman	
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan			
		16. Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	23. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)							
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)							
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)							
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH							



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
						Program Pengelolaan Persampahan	
		17. Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mitigasi serta penanggulangan bencana.	24. Program Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian satuan pendidikan sekolah dasar yang terakreditasi minimal B sebesar 100% di tahun 2026, satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang terakreditasi minimal B sebesar 91,01% di tahun 2026, satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi minimal b sebesar 26,80% di tahun 2026, serta satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terakreditasi minimal B sebesar 100% dari tahun 2022 hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung langsung terhadap pencapaian 3 jenis layanan dalam SPM pendidikan, antara lain pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada RTRW, program ini mendukung terhadap perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: (a) Perwujudan Kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA, (b) Perwujudan kawasan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag; perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya: perwujudan kawasan sekitar kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB). Program ini juga mendukung perwujudan struktur ruang sistem perkotaan pada perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

b. Program Pengembangan Kurikulum

Dari tahun 2022 hingga 2026, program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase ketersediaan muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan sebesar 100%.



c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian rasio ketersediaan guru terhadap murid pendidikan dasar, PAUD dan kesetaraan sebesar 89,10% pada akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Guru Meguru dengan indikasi rencana implementasi Pelatihan kompetensi guru-guru SD dan SMP.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang dilaksanakan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase ketersediaan muatan lokal bahasa dan sastra pada setiap jenjang pendidikan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

2. Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase ketercapaian faskes yang menyelenggarakan pelayanan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung langsung terhadap 12 jenis layanan SPM kesehatan, antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, balita, pelayanan kesehatan pada usia dasar pendidikan, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, orang terduga Tuberkulosis, serta orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). Pada RTRW, program ini mendukung perwujudan kawasan



strategis kawasan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag dan perwujudan kawasan sekitar kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB). Program ini juga mendukung perwujudan struktur ruang sistem perkotaan pada perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkugnan (PPL).

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase SDM kesehatan yang memiliki kapasitas kompetensi sesuai standar sebesar 80% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan SDM kesehatan yang memiliki kapasitas kompetensi sesuai standar terus meningkat setiap tahunnya.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase peredaran obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu sebesar sebesar 98% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, peredaran obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu diharapkan terus meningkat setiap tahunnya.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian desa siaga aktif mandiri sebesar 45% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan desa siaga aktif mandiri terus meningkat setiap tahunnya.

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 69,62% di tahun



2026. Program ini mendukung program unggulan Tani Rejo Joyo dengan rencana implementasi Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengembangan jaringan air bersih bukan perusahaan daerah air minum dalam konteks perwujudan sistem jaringan sumber daya air.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak sebesar 100% di tahun 2026. Program ini mendukung langsung terhadap jenis layanan SPM bidang pekerjaan umum: penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan, serta pengembangan jaringan air minum bukan jaringan perpipaan dan/ atau perpipaan mandiri di kawasan perdesaan dan desa rawan air bersih dalam konteks perwujudan sistem jaringan prasarana.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan sebesar 4,66% di tahun 2026. Pada RTRW, program ini terkait dengan pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan dalam perwujudan sistem perkotaan.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 85,85% di tahun 2026. Program ini mendukung langsung terhadap jenis layanan SPM bidang pekerjaan umum: penyediaan pelayanan pengelolaan air



limbah domestik. Pada RTRW, program ini terkait dengan perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dalam perwujudan sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 35,55% di tahun 2026. Pada RTRW, program ini terkait dengan peningkatan utilitas kawasan peruntukan industri serta pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana pada sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik sebesar 87,50% di tahun 2026. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana di sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag dan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun sebesar 100% di tahun 2026. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana, serta Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat



dalam perwujudan kawasan sekitar kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB). Program ini juga terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan berlandaskan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan, dan pengembangan dan pemantapan PPL.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang sebesar 85% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Dalane Mantep dengan rencana implementasi Meningkatkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten yang memenuhi kriteria tertentu; Peningkatan & pemeliharaan jalan kabupaten; dan Pembangunan, peningkatan, & pemeliharaan jembatan. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana di sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag & kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 100% di tahun 2026, rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota sebesar 100% di tahun 2026, serta rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sebesar 100% dari tahun 2022 hingga akhir



periode RPJMD.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) sebesar 69,67% di tahun 2026. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengelolaan kawasan inti dan kawasan penyangga sebagai perwujudan kawasan perutukan lindung, serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandar YIA dan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan relokasi program pemerintah sebesar 100% hingga tahun 2026, persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota sebesar 100% hingga tahun 2026, persentase rumah susun dan rumah khusus yang terbina sebesar 100% hingga tahun 2026, serta persentase penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diajukan pemohon sebesar 100% hingga tahun 2026. Program ini mendukung langsung terhadap dua jenis layanan SPM bidang perumahan dan permukiman, yakni penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase



luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani sebesar 100% di akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, pengembangan lingkungan sehat permukiman, serta pengembangan prasarana dan sarana permukiman pada kawasan peruntukan budi daya permukiman.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh sebesar 4,43% di akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengelolaan kawasan permukiman kumuh perkotaan, pengembangan perumahan swadaya, serta penyediaan rumah layak huni pada kawasan peruntukan budi daya permukiman.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 92,04% di akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan berlandaskan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase warga negara yang memperoleh layanan terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi sebesar 100% dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Program ini mendukung langsung dalam dua jenis layanan SPM



bidang Trantibumlinmas, yakni pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi, serta pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung langsung terhadap pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang merupakan salah satu dari enam jenis layanan SPM bidang Trantibumlinmas.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 100% hingga tahun 2026, persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 100% hingga tahun 2026, persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung langsung terhadap 3 jenis layanan SPM bidang Trantibumlinmas, yakni pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada RTRW, program ini mendukung perwujudan pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi pada kawasan peruntukan lindung (cagar budaya, kawasan lindung geologi, kawasan ekosistem mangrove, dan kawasan perlindungan setempat), kawasan



peruntukan budidaya (peruntukan industri, permukiman, perikanan, pariwisata, dan perkebunan rakyat), kawasan perkotaan (*border city*) sekitar Bandar YIA, kawasan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag), serta pewujudan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana dan pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana pada kawasan sekitar kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB).

6. Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina sebesar 100% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina terus meningkat setiap tahunnya.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan sebesar 100% dari tahun 2022 hingga 2026.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini ditargetkan untuk persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial (indikator SPM) sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung langsung terhadap 4 jenis layanan SPM bidang sosial, yakni rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, serta rehabilitasi sosial dasar



tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial sebesar 69,47% di akhir periode RPJMD.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten sebesar 100% pada tahun 2022 hingga 2026. Program ini mendukung langsung terhadap satu jenis layanan SPM bidang sosial, yakni perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana taman makam pahlawan sebesar 100% di akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini mendukung perwujudan struktur ruang pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase rencana tenaga kerja yang disusun sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi sebesar 88,61%



serta persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 7,81% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Makaryo dengan rencana implementasi Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di BLK: lulusan SMA/ SMK yang ingin langsung kerja (disesuaikan kebutuhan pasar).

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja sebesar 27,84% di akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Makaryo dengan rencana implementasi Pengawasan pelaksanaan kegiatan industri: menggunakan tenaga kerja lokal (industri garmen, bulu mata, sepatu, dsb).

d. Program Hubungan Industrial

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja sebesar 56,72% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan sarana hubungan industrial dan syarat kerja terus meningkat setiap tahunnya.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender sebesar 41,46% di tahun 2026.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase



keluarga yang mendapatkan pelayanan peningkatan kualitas keluarga sebesar 89% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan keluarga yang mendapatkan pelayanan peningkatan kualitas keluarga terus meningkat setiap tahunnya.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini ditargetkan untuk pencapaian cakupan data anak dan gender teranalisis dan tersaji dalam kelembagaan data sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase layanan pemenuhan hak anak sebesar 86,50% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan persentase layanan pemenuhan hak anak terus meningkat setiap tahunnya.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif sebesar 100% dari tahun 2022 hingga tahun 2026.

3. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase infrastruktur yang tersedia sebesar 100% di akhir periode RPJMD. Para RTRW, program ini mendukung pada perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA serta dalam perwujudan sistem perkotaan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan



Masyarakat

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase ketersediaan pangan utama sebesar 100% hingga akhir tahun periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tuwuh Ngunduh dengan rencana implementasi Gerakan menanam di pekarangan: cabai dan sayur mayur.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini ditargetkan untuk persentase penanganan pada daerah rawan/ rentan pangan target sebesar 19,72% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan penanganan pada daerah rawan/ rentan pangan terus meningkat setiap tahunnya.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pangan segar aman dengan target 100% hingga akhir periode RPJMD.

4. Pertanian

a. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penerbitan izin lokasi sebesar 100%, mulai tahun 2023 hingga tahun 2026.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

c. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

5. Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup



Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup berkualitas sebesar 100% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup berkualitas terus meningkat setiap tahunnya.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pemenuhan baku mutu kualitas air sungai dan udara ambien sebesar 65% di tahun 2026. Para RTRW, program ini mendukung pada perwujudan kawasan peruntukan lindung melalui perwujudan sempadan sungai, kawasan konservasi, serta kawasan ekosistem mangrove. Hal ini ditempuh dengan pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian indeks tutupan lahan sebesar 49,45% di akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Dolan Purworejo dengan rencana implementasi Pembangunan Gapura Batas Wilayah. Pada RTRW, program ini terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik di kawasan strategis perbatasan (border city) sekitar Bandara YIA serta kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pengendalian B3 dan limbah B3 sebesar 50% di tahun 2026. Pada RTRW, program ini memiliki keterkaitan terhadap penanganan limbah kawasan peruntukan industri pada kawasan peruntukan budi daya, khususnya pada kawasan



strategis sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini ditargetkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan sebesar 70% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan terus meningkat setiap tahunnya.

- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pengakuan kearifan lokal terkait PPLH sebesar 6,07% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan pengakuan kearifan lokal terkait PPLH terus meningkat setiap tahunnya.

- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif sebesar 8,21% di akhir periode RPJMD. Program ini memiliki keterkaitan terhadap perwujudan sistem perkotaan: perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup untuk



masyarakat sebesar 66,67% di tahun 2026.

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

j. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penanganan sampah sebesar 16,24% dan persentase pengurangan sampah sebesar 28,65% di akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini terkait dengan peningkatan utilitas kawasan peruntukan industri pada sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk sebesar 98,53% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terus meningkat setiap tahunnya.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebesar 90% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terus meningkat setiap tahunnya.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase instansi/ lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan sebesar 100% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan



instansi/ lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan terus meningkat setiap tahunnya.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kesesuaian profil dengan regulasi yang berlaku sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penataan desa sesuai peraturan yang berlaku sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa sebesar 100% di tahun 2026.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini ditargetkan untuk pencapaian *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) sebesar 15% di tahun 2026.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive*



Prevalence Rate/ mCPR)/ proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern sebesar 54,64%, serta persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 20,43% di akhir periode RPJMD.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Keluarga yang mendapat layanan Tribina sebesar 64,25% dan cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB sebesar 84,50% di tahun 2026.

9. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang tersedia sebesar 73,19% dan persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 5,47% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Padhang dengan rencana implementasi Pembangunan PJU. Pada RTRW, program ini memiliki keterkaitan terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kawasan rawan pada sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag serta kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA. Program ini juga terkait dengan percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan, serta



pengembangan dan pemantapan PPL dalam konteks perwujudan struktur ruang pada sistem perkotaan.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Desaku Mletik dengan rencana implementasi Sosialisasi aplikasi Porjo di masing-masing kecamatan yang memiliki sasaran kepala desa & sekretaris desa.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara 100%, serta Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan sebesar 100% dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Desaku Mletik dengan rencana implementasi Internet menjangkau seluruh desa (*Smart Village*).

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase rekomendasi izin koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu sebesar 100% hingga tahun 2026.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian sebesar 82,05% di



tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian terus meningkat setiap tahunnya.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase koperasi sehat sebesar 87,23% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan jumlah koperasi sehat meningkat setiap tahunnya.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase koperasi yang memiliki SDM berkompeten sebesar 25% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan koperasi yang memiliki SDM berkompeten meningkat setiap tahunnya.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase koperasi yang dibina sebesar 29,30% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan koperasi yang dibina meningkat setiap tahunnya.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase usaha mikro yang dibina sebesar 10,44% di akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perwujudan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag, kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA, kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB). serta dalam sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).



g. Program Pengembangan UMKM

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase usaha mikro berizin yang meningkat menjadi wira usaha sebesar 10,97% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan usaha mikro berizin yang meningkat menjadi wira usaha meningkat setiap tahunnya.

12. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini ditargetkan untuk pencapaian pertumbuhan jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 5% hingga akhir periode RPJMD.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase nomor induk berusaha yang terbit terhadap jumlah kepeminatan sebesar 99,50% di tahun 2026.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelayanan penanaman modal sesuai norma standar prosedur dan kriteria sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan NSPK sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jenis data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang disediakan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

13. Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase organisasi kepemudaan yang aktif sebesar 100,00% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Bergas Lahir Batin dengan rencana implementasi Pengembangan kepemudaan dan olahraga.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase organisasi keolahragaan yang aktif sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Bergas Lahir Batin dengan rencana implementasi Pengembangan kepemudaan dan olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase organisasi kepramukaan yang aktif sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

14. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini ditargetkan untuk pencapaian cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini terkait dengan koordinasi dan Kerjasama antar perangkat daerah untuk pengembangan wilayah dalam konteks perwujudan sistem perkotaan.

15. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase



layanan persandian sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

16. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kebudayaan yang dikembangkan sebesar 100% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Tresno Budoyo dengan rencana implementasi Pelestarian kesenian tradisional: Jaran Bolong; dan Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan: Sanggar Seni, Amphitheater.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kelembagaan pelaku kesenian tradisional yang aktif sebesar 63,16% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan kelembagaan pelaku kesenian tradisional yang aktif meningkat tiap tahunnya.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pembinaan sejarah lokal sebesar 100% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan pembinaan sejarah lokal meningkat tiap tahunnya.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase cagar budaya yang dikelola sebesar 11,85% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Tresno Budoyo dengan rencana implementasi Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan: Kompleks Pendopo.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase benda museum yang memenuhi syarat koleksi sebesar 100%



di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan benda museum yang memenuhi syarat koleksi meningkat tiap tahunnya.

17. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase perpustakaan yang layak sebesar 8,36% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan perpustakaan yang layak terus meningkat tiap tahunnya.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase naskah kuno milik daerah kabupaten yang dilestarikan sebesar 25% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan naskah kuno milik daerah kabupaten yang dilestarikan terus meningkat tiap tahunnya.

18. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Peningkatan Arsip yang Dikelola sebesar 100% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Penatausahaan arsip dinamis pada OPD.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase arsip yang dilindungi dan ditetapkan sebesar 100% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan arsip yang dilindungi dan ditetapkan terus meningkat tiap tahunnya.

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase



kenaikan produksi perikanan tangkap sebesar 3% di tahun 2026.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kenaikan produksi perikanan budidaya sebesar 2% di akhir periode RPJMD. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengolahan produk budidaya perikanan serta pengembangan teknologi budi daya perikanan dalam perwujudan kawasan peruntukan budi daya perikanan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebesar 100% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) meningkat tiap tahunnya.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar 10% di akhir periode RPJMD.

2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase fasilitasi pengelola daya tarik destinasi pariwisata aktif sebesar 100% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Dolan Purworejo dengan rencana implementasi Pengembangan destinasi pariwisata Pantai Dewaruci berkelas internasional (sand track, pacuan kuda, lari pantai, voli pantai, aquarium, layang-layang); Pengembangan kawasan strategis pariwisata: Mini Zoo, Kolam Renang, Taman Bunga, Taman Cerdas; Pengembangan kawasan strategis pariwisata: Alun-alun, Museum Tosan Aji, Art Center, Masjid Agung, Gereja; Penyediaan sarana



pendukung dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata; dan Pembangunan hotel nuansa kearifan lokal (*local wisdom*) Purworejo. Program ini juga mendukung program unggulan Dolan Purworejo dengan rencana implementasi Pengembangan Museum Angkutan Darat; dan Pengembangan daya tarik wisata: Offroad Track berkelas internasional. Pada RTRW, program ini terkait dengan pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan pada kawasan ekosistem mangrove sebagai perwujudan kawasan peruntukan lindung. Selain itu, program ini juga terkait dengan pengembangan untuk pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan destinasi wisata, pengembangan diversifikasi produk wisata, pengorganisasian destinasi wisata dalam sistem distribusi dan pengembangan terpadu, pengembangan fasilitasi layanan wisata, serta pemberdayaan masyarakat sadar wisata pada perwujudan kawasan pariwisata dan sebagian kawasan hutan produksi dalam konteks kawasan peruntukan budi daya.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jumlah sarana promosi/ pemasaran pariwisata sebesar 25,67% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan jumlah sarana promosi/ pemasaran pariwisata meningkat tiap tahunnya.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif sebesar 33,33% di tahun 2026.



- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jumlah sumber daya manusia yang dilatih sebesar 20% di akhir periode RPJMD.

3. Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyediaan sarana pertanian bagi kelompok tani sebesar 100% di akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Tani Rejo Joyo dengan rencana implementasi Modernisasi alat-alat mesin pertanian (Alsintan) untuk petani; Edukasi, koordinasi, dan penerapan pola tanam Tumpangsari; Subsidi pupuk untuk petani dan peningkatan pertanian organic; dan Optimalisasi sektor unggulan/ tanaman (kopi, durian, manggis, kelengkeng) di tanah-tanah marginal.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyediaan prasarana pertanian bagi kelompok tani sebesar 100% di tahun 2026. Pada RTRW, program ini terkait dengan perlindungan LP2B dan KP2B serta peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan pada perwujudan kawasan pertanian.

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 23% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan persentase penurunan kejadian



dan jumlah kasus penyakit hewan menular terus membaik tiap tahunnya.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana OPT sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jumlah usulan izin usaha pertanian sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kenaikan jumlah petani milenial sebesar 100% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan jumlah petani milenial terus meningkat tiap tahunnya.

4. Perdagangan

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pasar daerah dalam kondisi baik sebesar 32,26% dan Persentase ketertiban pengelola sarana distribusi sebesar 36,00% di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Tani Rejo Joyo, dengan rencana implementasi Optimalisasi sistem resi gudang (SRG). Pada RTRW, program ini terkait dengan peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian di kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandar YIA, pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pariwisata secara terintegrasi, percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan, serta pengembangan



dandpemantapan PPL pada perwujudan sistem perkotaan.

- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase koefisien variasi harga antar waktu sebesar 20% serta persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 90% di akhir periode RPJMD.

- c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase produk UMKM yang dipromosikan ekspor sebesar 33,33% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan produk UMKM yang dipromosikan ekspor terus meningkat tiap tahunnya.

- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 76% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku terus meningkat tiap tahunnya.

- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jenis produk lokal yang dipromosikan sebesar 71,43% di akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Tresno Purworejo, Larisi Purworejo dengan rencana implementasi Fasilitasi pemasaran hasil perkebunan: kelapa; dan Gerakan ASN Purworejo membeli produk lokal Purworejo.

5. Perindustrian

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya sebesar



8,33%. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan produktivitas IKM terus meningkat tiap tahunnya.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan sebesar 40% di tahun 2026. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan terus meningkat tiap tahunnya.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini ditargetkan untuk pencapaian tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri sebesar 76,92% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri terus meningkat tiap tahunnya.

6. Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penempatan transmigrasi sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kegiatan perekonomian dan pembangunan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

2. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD



Program ini ditargetkan untuk pencapaian tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase dokumen rencana kerja perangkat daerah yang berkualitas sebesar 100% hingga tahun 2026. Pada RTRW, program ini terkait dengan koordinasi dan Kerjasama antara perangkat daerah maupun antar pemerintah daerah untuk pengembangan wilayah pada perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dalam konteks perwujudan sistem perkotaan.

2. Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD sebesar 100%, tertib pengelolaan kas daerah sebesar 100%; ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 100%; persentase realisasi bantuan keuangan terhadap anggaran bantuan keuangan sebesar 100%, serta persentase pengelolaan data dan implementasi sistem



informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% hingga tahun 2026.

c. Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase tertib pengelolaan pendapatan daerah sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian dan penilaian kinerja aparatur sebesar 100%, serta persentase penyelenggaraan mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini ditargetkan untuk pencapaian rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebesar 20 JP di tahun 2026. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi pengembangan kompetensi ASN hingga akhir periode RPJMD.

4. Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

7.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan



1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan pengawasan internal sebesar 100% serta persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan sebesar 100% serta persentase hasil pendampingan dan asistensi sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

7.2.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini ditargetkan untuk persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.



- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik



Sosial

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase koordinasi penanganan konflik sosial sebesar 100% hingga tahun 2026.

7.2.9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; peningkatan pelayanan BLUD; administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah; fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah; penataan organisasi; pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan; layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD; dan layanan administrasi DPRD.

Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Upaya penciptaan suasana kerja kondusif melalui rehabilitasi gedung yang representatif dan perlengkapan mebel yang memadai; dan Penyediaan tenaga ahli pendamping pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Selanjutnya, indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan kabupaten purworejo tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 7.3. Indikasi Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)	Target
01:00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
01:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	%	99,61	99,61*	99,61	150.576	99,61	108.543	99,61	119.233	100,00	122.451	100,00	122.166	100,00	622.969	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B	%	87,64	87,64*	87,64		89,89		91,01		91,01		91,01		91,01			91,01
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	%	17,95	19,72*	19,72		21,49		23,26		25,03		26,80		26,80			26,80
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	%	70,00	90,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal pada Setiap Jenjang	%	100,00	100,00*	100,00	133	100,00	96	100,00	105	100,00	108	100,00	108	100,00	550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
		Pendidikan																
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Ketersediaan Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kesetaraan	%	60,60	88,01*	88,96	58	88,98	42	89,02	46	89,05	47	89,10	47	89,10	240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan	%	100,00	100,00*	100,00	58	100,00	42	100,00	46	100,00	47	100,00	47	100,00	240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra pada Setiap Jenjang Pendidikan	%	0,00	0,00*	100,00	164	100,00	118	100,00	130	100,00	133	100,00	133	100,00	678	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	%	100,00	100,00*	00,00	169.231	100,00	121.990	100,00	134.005	100,00	137.621	100,00	137.301	100,00	700.148	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase SDM Kesehatan yang	%	73,09	72,50*	74,00	1.358	75,00	979	76,00	1.075	78,00	1.104	80,00	1.102	80,00	5.618	Dinas Kesehatan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar																
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	%	90,80	88,00*	91,00	573	93,00	413	94,00	454	96,00	466	98,00	465	98,00	2.371	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	23,48	23,48*	25,00	432	30,00	311	35,00	342	40,00	351	45,00	350	45,00	1.786	Dinas Kesehatan
01:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	62,43	62,43*	64,82	30.269	66,02	21.819	67,22	23.968	68,42	24.615	69,62	24.558	69,62	125.229	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak	%	92,51	92,51*	96,30	17.254	97,77	12.438	99,24	13.663	100,00	14.031	100,00	13.999	100,00	71.385	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	2,63	2,63*	3,04	600	3,44	433	3,85	475	4,25	488	4,66	487	4,66	2.483	Dinas Pekerjaan Umum dan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prasarana Persampahan																Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	84,70	84,70*	84,93	6.250	85,16	4.505	85,39	4.949	85,62	5.083	85,85	5.071	85,85	25.858	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	28,21	28,21*	29,79	3.674	31,23	2.648	32,67	2.909	34,11	2.988	35,55	2.981	35,55	15.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik	%	70,42	70,42*	73,75	35.878	77,92	25.863	81,25	28.410	84,58	29.176	87,50	29.109	87,50	148.436	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun	%	0,00	0,00*	12,50	200	37,50	144	62,50	158	87,50	163	100,00	162	100,00	827	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang	%	78,89	78,89*	80,93	175.000	81,95	174.242	82,96	192.497	83,98	194.983	85,00	184.012	85,00	920.734	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	68,18	68,18*	75,00	120	79,55	87	86,36	95	93,18	98	100,00	97	100,00	497	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	%	58,33	58,33*	75,00		83,33		91,67		100,00		100,00		100,00			
		Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	%	51,67	51,67*	58,00	733	62,33	528	64,33	580	67,33	596	69,67	595	69,67	3.032	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
01:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten dan	%	58,21	66,40*	100,00	1.735	100,00	1.251	100,00	1.374	100,00	1.411	100,00	1.408	100,00	7.179	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
		Relokasi Program Pemerintah																
		Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%	0,00	0,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina	%	100,00	50,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon	%	100,00	60,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha yang Ditangani	%	0,00	38,58*	63,22	18.836	39,85	13.578	71,34	14.915	88,83	15.318	100,00	15.282	100,00	77.929	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	%	10,88	10,83*	8,98	6.060	8,25	4.368	7,45	4.799	5,96	4.928	4,43	4.917	4,43	25.072	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	75,71	75,71*	81,87	687	84,25	495	86,96	544	89,32	559	92,04	557	92,04	2.842	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	%	100,00	100,00*	100,00	909	100,00	655	100,00	720	100,00	739	100,00	737	100,00	3.760	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100,00	100,00*	100,00	3.296	100,00	2.376	100,00	2.610	100,00	2.680	100,00	2.674	100,00	13.636	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100,00	100,00*	100,00	3.787	100,00	2.730	100,00	2.999	100,00	3.080	100,00	3.072	100,00	15.668	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
01:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%	88,79	89,58*	90,00	69	93,00	50	95,00	55	97,00	56	100,00	56	100,00	286	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	%	0,00	0,00*	100,00	5	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	21	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	%	100,00	100,00*	100,00	481	100,00	347	100,00	381	100,00	391	100,00	390	100,00	1.990	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	69,95	69,87*	69,47	1.759	69,47	1.268	69,47	1.393	69,47	1.430	69,47	1.427	69,47	7.277	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	%	100,00	100,00*	100,00	218	100,00	157	100,00	173	100,00	177	100,00	177	100,00	902	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	%	30,00	40,00*	50,00	124	70,00	89	80,00	98	90,00	101	100,00	101	100,00	513	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02:00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
02:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	%	0,00	0,00*	100,00	83	100,00	60	100,00	66	100,00	67	100,00	67	100,00	343	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	%	49,78	84,64*	88,00	2.047	88,16	1.476	88,31	1.621	88,46	1.665	88,61	1.661	88,61	8.470	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,00	0,00*	1,56	3,13	4,69	6,25	7,81	7,81							
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	%	24,58	33,79*	26,47	274	26,74	198	27,01	217	27,43	223	27,84	222	27,84	1.134	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	%	37,50	40,78*	46,56	177	50,78	128	53,28	140	55,00	144	56,72	144	56,72	733	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
02:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan	%	39,53	41,46*	41,46	577	41,46	416	41,46	457	41,46	469	41,46	468	41,46	2.387	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program dan Kegiatan Responsif Gender																Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00*	100,00	449	100,00	299	100,00	306	100,00	315	100,00	300	100,00	1.669	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	19,75	20,00*	20,00		87,50	25	88,00	50	88,50	50	89,00	64	89,00	189	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	%	100,00	100,00*	100,00	9	100,00	6	100,00	7	100,00	7	100,00	7	100,00	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	%	83,00	83,00*	83,50	101	84,00	73	85,00	80	86,00	82	86,50	82	86,50	418	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00*	100,00	82	100,00	59	100,00	65	100,00	67	100,00	67	100,00	340	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang Disediakan	%	0,00	1 unit*	20,00	2.000	40,00	1.442	60,00	1.584	80,00	1.626	100,00	1.623	100,00	8.275	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	100,00	100,00*	100,00	320	100,00	231	100,00	253	100,00	260	100,00	260	100,00	1.324	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PANGAN MASYARAKAT																	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	%	1,40	1,40*	2,11	22	4,93	16	9,86	17	14,79	18	19,72	18	19,72	91	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman	%	100,00	00,00*	100,00	113	100,00	81	100,00	89	100,00	92	100,00	92	100,00	467	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	%	0,00	0,00*	100,00		100,00	40	100,00	48	100,00	58	100,00	69	100,00	215	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%	100,00	47,18*	100,00	94	100,00	112	100,00	124	100,00	76	100,00	100	100,00	506	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%	100,00	41,43*	100,00	200	100,00	60	100,00	60	100,00	105	100,00	69	100,00	494	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
																		Pertanahan
02:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas	%	25,00	25,00*	50,00	200	75,00	144	75,00	158	100,00	163	100,00	162	100,00	827	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Sungai dan Udara Ambien	%	87,50	87,50*	65,00	306	65,00	221	65,00	242	65,00	249	65,00	248	65,00	1.266	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Tutupan Lahan	indeks	49,34	49,34*	49,37	5.212	49,39	3.757	49,41	4.127	49,43	4.238	49,45	4.229	49,45	21.563	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan LB3	%	0,00	0,00*	30,00	40	35,00	29	40,00	32	45,00	33	50,00	32	50,00	166	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang Tertuang dalam Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	%	0,00	0,00*	50,00	69	55,00	50	60,00	55	65,00	56	70,00	56	70,00	286	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH	%	4,05	4,05*	4,45	140	4,86	101	5,26	111	5,67	114	6,07	114	6,07	580	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	%	10,32	0,52*	7,51	194	7,69	140	7,86	154	8,03	158	8,21	157	8,21	803	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan	%	66,67	66,67*	66,67	70	66,67	50	66,67	55	66,67	57	66,67	57	66,67	289	Dinas Lingkungan Hidup dan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup untuk Masyarakat																Perikanan
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan	%	100,00	100,00*	100,00	32	100,00	23	100,00	25	100,00	26	100,00	26	100,00	132	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	%	17,87	18,14*	16,97	14.669	16,78	10.574	16,59	11.616	16,40	11.929	16,24	11.901	16,24	60.689	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
		Persentase Pengurangan Sampah	%	23,88	25,04*	25,71		26,52		27,27		27,96		28,65		28,65		
02:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	90,39	90,29*	93,86	581	95,63	419	97,43	460	97,83	472	98,53	471	98,53	2.403	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	84,75	85,67*	86,00	466	87,00	336	88,25	369	89,00	379	90,00	378	90,00	1.928	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Persentase Instansi/ Lembaga yang	%	15,00	24,00*	57,50	327	70,00	236	82,50	259	92,50	266	100,00	265	100,00	1.353	Dinas Kependudukan dan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan																Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	%	100,00	100,00*	100,00	56	100,00	40	100,00	44	100,00	46	100,00	45	100,00	231	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02:07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa sesuai Peraturan yang Berlaku	%	100,00	100,00*	100,00	63	100,00	45	100,00	50	100,00	51	100,00	51	100,00	260	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	%	6,40	7,46*	36,67	101	100,00	73	100,00	80	100,00	82	100,00	82	100,00	418	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00*	100,00	5.556	100,00	4.005	100,00	4.400	100,00	4.518	100,00	4.508	100,00	22.987	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	100,00*	100,00	2.066	100,00	1.489	100,00	1.636	100,00	1.680	100,00	1.676	100,00	8.547	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Age Specific Fertility Rate (ASFR)</i>	%	19,00	18,00*	17,00	124	17,00	89	16,00	98	16,00	101	15,00	101	15,00	513	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>) / Proporsi	%	51,27	52,09*	52,82	6.387	53,49	4.604	54,09	5.058	54,64	5.194	54,64	5.182	54,64	26.425	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
		Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern																
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	23,14	22,43*	21,81		21,28		20,83		20,43		20,43		20,43		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	%	62,44	63,00*	63,30	1.055	63,55	760	63,90	835	64,02	858	64,25	856	64,25	4.364	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	%	83,84	84,18*	84,22		84,30		84,40		84,45		84,50		84,50		
02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
	PROGRAM PENYELENGGAR	Persentase Peningkatan	%	45,36	46,90*	47,82	15.079	55,09	10.870	62,47	11.940	69,86	12.262	73,19	12.234	73,19	62.385	Dinas Perhubungan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia																
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	12,32	12,32*	10,47		8,90		7,57		6,43		5,47		5,47		
02:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	100,00	58,00*	100,00	2.097	100,00	1.512	100,00	1.661	100,00	1.705	100,00	1.701	100,00	8.676	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan secara Daring dengan Memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100,00	46,00*	100,00	6.373	100,00	4.594	100,00	5.046	100,00	5.183	100,00	5.171	100,00	26.367	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
02:11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam) yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00*	100,00	11	100,00	8	100,00	9	100,00	9	100,00	9	100,00	46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	61,54	66,66*	67,40	20	71,06	14	74,73	16	78,39	16	82,05	16	82,05	82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	34,67	69,33*	86,05	84	86,36	61	86,67	67	86,96	68	87,23	68	87,23	348	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	%	0,00	00,00*	5,00	390	10,00	281	15,00	309	20,00	317	25,00	316	25,00	1.613	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
																		dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dibina	%	0,00	10,99*	14,65	124	18,32	89	21,98	98	25,64	101	29,30	101	29,30	513	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	20,09	22,44*	4,47	1.377	5,96	993	7,46	1.090	8,95	1.120	10,44	1.117	10,44	5.697	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	%	1,87	3,60*	5,08	9.226	6,55	6.651	8,03	7.306	9,50	7.503	10,97	7.485	10,97	38.171	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
02:12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	42,48	-10,15*	5,00	195	5,00	141	5,00	154	5,00	159	5,00	158	5,00	807	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit	%	99,84	99,97*	99,50	183	99,50	132	99,50	145	99,50	149	99,50	148	99,50	757	Dinas Penanaman Modal dan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	MODAL	terhadap Jumlah Kepeminatan																Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100,00	100,00*	100,00	380	100,00	274	100,00	301	00,00	309	100,00	308	100,00	1.572	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentasae Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	%	100,00	100,00*	100,00	402	100,00	290	100,00	318	100,00	327	100,00	326	100,00	1.663	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100,00	100,00*	100,00	120	100,00	87	100,00	95	100,00	98	100,00	97	100,00	497	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02:13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	95,24	95,24*	95,24	371	95,24	267	95,24	294	95,24	302	100,00	301	100,00	1.535	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Persentase Organisasi Keolahragaan	%	100,00	100,00*	100,00	12.919	100,00	9.313	100,00	10.230	100,00	10.506	100,00	10.481	100,00	53.449	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	SAING KEOLAHRAGAAN	yang Aktif																Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100,00	100,00*	100,00	312	100,00	225	100,00	247	100,00	254	100,00	253	100,00	1.291	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
02:14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	%	100,00	27,00*	100,00	226	100,00	163	100,00	179	100,00	184	100,00	183	100,00	935	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Persandian	%	100,00	26,00*	100,00	165	100,00	119	100,00	131	100,00	134	100,00	134	100,00	683	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02:16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	%	70,00	70,00*	70,00	2.715	80,00	1.857	80,00	2.040	90,00	2.088	100,00	2.053	100,00	10.753	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelembagaan Pelaku Kesenian Tradisional yang Aktif	%	60,00	60,00*	60,00	-	60,00	100	60,00	110	61,58	120	63,16	150	63,16	480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM	Persentase	%	44,44	44,44*	55,56	539	66,67	389	77,78	427	88,89	438	100,00	437	100,00	2.230	Dinas



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal																Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	%	11,85	11,85 *	11,85	777	11,85	560	11,85	615	11,85	632	11,85	630	11,85	3.214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Benda Museum yang Memenuhi Syarat Koleksi	%	20,00	33,33*	46,67	602	60,00	434	73,33	477	86,67	490	100,00	488	100,00	2.491	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02:17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Layak	%	2,52	2,52*	3,69	2.809	4,86	2.025	6,03	2.224	7,19	2.284	8,36	2.279	8,36	11.621	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	0,00	0,00*	5,00	15	10,00	11	15,00	12	20,00	12	25,00	12	25,00	62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02:18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dikelola	%	74,37	79,17*	83,33	244	87,50	126	91,67	133	95,83	128	100,00	128	100,00	759	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	34,42	50,00*	57,50	-	67,50	50	77,50	60	90,00	70	100,00	70	100,00	250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
03:00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
03:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap	%	3,73	-7,08*	3,00	116	3,00	84	3,00	92	3,00	94	3,00	94	3,00	480	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya	%	-12,67	-46,11*	2,00	2.235	2,00	1.500	2,00	1.650	2,00	1.688	2,00	1.673	2,00	8.746	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	%	38,46	38,46*	46,15	-	53,85	111	69,23	120	84,62	130	100,00	140	100,00	501	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	-60,00	-88,92*	10,00	30	10,00	22	10,00	24	10,00	24	10,00	24	10,00	124	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
03:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	2,22	39,55*	72,80	67.834	87,58	12.856	94,77	14.122	98,18	14.503	100,00	14.469	100,00	123.784	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN	Persentase Jumlah Sarana Promosi/	%	100,00	10,00*	10,33	1.544	19,00	1.113	20,67	1.223	24,33	1.256	25,67	1.253	25,67	6.389	Dinas Kepemudaan,



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata																Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Fasilitas Sub Sektor Ekonomi Kreatif	%	0,00	0,00*	0,00	235	16,67	169	16,67	186	33,33	191	33,33	191	33,33	972	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih	%	0,00	0,00*	20,00	1.496	20,00	1.078	20,00	1.185	20,00	1.217	20,00	1.214	20,00	6.190	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
03:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	106 paket	18 paket*	20,00	14.077	40,00	10.147	60,00	11.147	80,00	11.448	100,00	11.421	100,00	58.240	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	28 paket	56 paket*	20,00	8.531	40,00	6.150	60,00	6.755	80,00	6.938	100,00	6.921	100,00	35.295	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Penurunan	%	9.275 kasus	N/A*	12,00	212	14,00	153	16,00	168	19,00	172	23,00	172	23,00	877	Dinas Ketahanan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular																Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	100,00	100,00*	100,00	150	100,00	108	100,00	119	100,00	122	100,00	122	100,00	621	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100,00*	100,00	25	100,00	18	100,00	20	100,00	20	100,00	20	100,00	103	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	%	0,00	0,00*	20,00	1.759	40,00	1.268	60,00	1.393	80,00	1.430	100,00	1.427	100,00	7.277	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	%	14,29	17,24*	19,35	15.351	22,58	3.857	25,81	4.237	29,03	4.352	32,26	4.341	32,26	32.138	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
		Persentase Keterlibatan Pengelola Sarana Distribusi	%	11,98	15,91*	20,00		24,00		28,00		32,00		36,00		36,00		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	%	8,50	5,80*	20,00	289	20,00	208	20,00	229	20,00	235	20,00	234	20,00	1.195	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	94,05	36,54*	74,00		78,00		82,00		86,00		90,00		90,00		Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%	0,00	0,00*	6,67	679	13,33	489	20,00	538	26,67	552	33,33	551	33,33	2.809	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	38,28	57,39*	61,00	777	64,00	560	68,00	615	72,00	632	76,00	630	76,00	3.214	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	0,00	0,00*	14,29	149	28,57	107	42,86	118	57,14	121	71,43	121	71,43	616	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
03:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Produktivitas IKM Tiap Tahunnya	%	0,00	7,29*	7,54	3.821	7,69	3.897	7,80	3.897	8,10	3.897	8,33	3.897	8,33	19.409	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Perizinan Industri	%	6,67	10,00*	15,00	22	20,00	16	30,00	17	35,00	18	40,00	18	40,00	91	Dinas Perindustrian,



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
	IZIN USAHA INDUSTRI	Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan																Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%	53,33	60,00*	62,86	65	64,44	47	65,45	51	66,15	53	76,92	53	76,92	269	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
03:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	0,00	0,00*	100,00	142	100,00	102	100,00	112	100,00	115	100,00	115	100,00	586	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
04:00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04:01	SEKRETARIAT DAERAH																	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	48,70*	100,00	9.403	100,00	6.778	100,00	7.446	100,00	7.647	100,00	7.629	100,00	38.903	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	100,00	47,14*	100,00	1.703	100,00	1.228	100,00	1.349	100,00	1.385	100,00	1.382	100,00	7.047	Sekretariat Daerah
04:02	SEKRETARIAT DPRD																	



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	%	97,34	38,61*	100,00	18.993	100,00	13.691	100,00	15.040	100,00	15.445	100,00	15.409	100,00	78.578	Sekretariat DPRD
05:00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
05:01	PERENCANAAN																	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100,00	100,00*	100,00	786	100,00	567	100,00	622	100,00	639	00,00	638	100,00	3.252	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00*	100,00	1.237	100,00	892	100,00	980	100,00	1.006	100,00	1.004	100,00	5.119	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
05:02	KEUANGAN																	
	PROGRAM	Ketepatan Waktu	%	100,00	100,00*	100,00	543.848	100,00	542.539	100,00	542.872	100,00	542.972	100,00	542.963	100,00	2.715.194	Badan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)	
	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian Raperda APBD																Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Tertib Pengelolaan Kas Daerah	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00*	100,00	1.730	100,00	1.247	100,00	1.370	100,00	1.407	100,00	1.404	100,00	7.158	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00*	100,00	4.123	100,00	2.972	100,00	3.265	100,00	3.353	100,00	3.345	100,00	17.058	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
																		dan Aset Daerah
05:03	KEPEGAWAIAN																	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, dan Penilaian Kinerja Aparatur	%	100,00	100,00*	100,00	4.412	100,00	3.180	100,00	3.494	100,00	3.588	100,00	3.588	100,00	18.262	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Penyelenggaraan Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
05:06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	14,00	15,00*	16,00	5.610	17,00	4.044	18,00	4.442	19,00	4.562	20,00	4.552	20,00	23.210	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05:07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100,00	100,00*	100,00	1.279	100,00	922	100,00	1.013	100,00	1.040	100,00	1.038	100,00	5.292	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
																		Penelitian, dan Pengembangan
06:00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
06:01	INSPEKTORAT DAERAH																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100,00	100,00*	100,00	1.942	100,00	1.400	100,00	1.538	100,00	1.579	100,00	1.576	100,00	8.035	Inspektorat
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	%	100,00	100,00*	100,00	1.226	100,00	884	100,00	971	100,00	997	100,00	995	100,00	5.073	Inspektorat
		Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	%	100,00	100,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
07:00	UNSUR KEWILAYAHAN																	
07:01	KECAMATAN																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00*	100,00	1.558	100,00	1.123	100,00	1.234	100,00	1.267	100,00	1.264	100,00	6.446	Semua Kecamatan



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100,00	100,00*	100,00	504	100,00	363	100,00	399	100,00	410	100,00	409	100,00	2.085	Semua Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00*	100,00	109	100,00	79	100,00	86	100,00	89	100,00	88	100,00	451	Semua Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00*	100,00	3.078	100,00	2.219	100,00	2.437	100,00	2.503	100,00	2.497	100,00	12.734	Semua Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00*	100,00	26.291	100,00	18.952	100,00	20.818	100,00	21.380	100,00	21.330	100,00	108.771	Semua Kecamatan
08:00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
08:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100,00	100,00*	100,00	56	100,00	40	100,00	44	100,00	46	100,00	45	100,00	231	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100,00	100,00*	100,00	1.192	100,00	859	100,00	944	100,00	969	100,00	967	100,00	4.931	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100,00	100,00*	100,00	1.067	100,00	769	100,00	845	100,00	868	100,00	866	100,00	4.415	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100,00	100,00*	100,00	101	100,00	100.073	100,00	80	100,00	82	100,00	82	100,00	100.418	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Persentase Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00*	100,00	344	100,00	248	100,00	272	100,00	280	100,00	279	100,00	1.423	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)
	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100,00	100,00*	100,00	925.448	100,00	963.731	100,00	1.044.176	100,00	1.076.505	100,00	1.094.925	100,00	5.104.785	Semua Perangkat Daerah
	Jumlah						2.408.123		2.289.012		2.337.742		2.387.612		2.393.732		11.816.221	

Ket: * data sementara

Sumber: Tim Penyusun, 2021



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Purworejo memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Risiko Bencana. Penetapan target IKU selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1. sebagai berikut.

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke-				
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	73,31	73,76	74,21	74,67	75,11
2	Angka Kemiskinan	%	11,42- 10,27	11,02- 9,86	10,62- 9,45	10,22- 9,04	9,82- 8,63
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,64	3,45	3,27	3,11	2,95
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,74	2,31	2,89	3,46	4,04
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,39- 4,39	3,98- 4,98	4,57- 5,57	5,16- 6,16	5,75- 6,75
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
7	Indeks Risiko Bencana	indeks	175,87	170,3	163,73	157,16	150,6

Sumber: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2021



Penetapan target IKU Kabupaten Purworejo selama lima tahun ke depan memperhatikan keselarasan dengan target indikator makro yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 beserta rancangan perubahannya. Selain faktor tersebut, penetapan target juga tetap memperhatikan kondisi riil perekonomian secara makro dan kemampuan keuangan daerah. Dengan semakin baiknya penanganan Pandemi Covid-19, diharapkan pandemi ini dapat segera teratasi di akhir tahun 2021 sehingga mulai tahun 2022 proses pembangunan dapat berjalan baik sesuai penargetan yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan ini.

8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) terbagi ke dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. IKD merupakan rangkuman indikator tujuan daerah, indikator sasaran daerah, indikator program pembangunan daerah, serta indikator program perangkat daerah beserta dengan targetnya selama tahun perencanaan lima tahun ke depan. Kabupaten Purworejo memiliki 217 (dua ratus tujuh belas) IKD dengan rincian: 41 (empat puluh satu) indikator aspek kesejahteraan masyarakat, 171 (seratus tujuh puluh satu) indikator aspek pelayanan umum, dan 4 (empat) indikator aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK merupakan bagian dari IKD yang selanjutnya dijabarkan ke dalam aspek pelayanan umum di masing-masing urusan. Penjabaran IKD dan IKK lebih lanjut disajikan dalam Tabel 8.2.



Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A ASPEK KESEJAHTARAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	72,68	72,68*	73,31	73,76	74,21	74,67	75,11	75,11
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,12	8,12*	8,45	8,61	8,77	8,94	9,10	9,10
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,49	13,49*	13,69	13,79	13,89	13,99	14,09	14,09
4	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	91,86	91,86*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	93,01	93,01*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	83,33	83,33*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	2,73	2,73*	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	74,72	74,72*	75,01	75,16	75,30	75,45	75,59	75,59
9	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	85,90	85,90*	87,83	88,80	89,77	90,73	91,70	91,70
10	Ketersediaan Pangan Utama	kg/kapita	246,09	246,09*	248,00	249,00	250,00	251,00	252,00	252,00
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,22	0,22*	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
12	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,30	1,30*	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94,96	94,96*	94,98	94,99	95,00	95,01	95,02	95,02



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	69,83	69,83*	72,09	73,14	74,18	75,22	76,27	76,27
15	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	98,41	98,41*	98,81	98,81	98,81	98,81	100,00	100,00
16	Angka Kemiskinan	%	11,78	11,78*	11,42-10,27	11,02-9,86	10,62-9,45	10,22-9,04	9,82-8,63	9,82-8,63
17	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%	37,02	37,02*	33,19	31,42	29,75	28,17	26,67	26,67
18	Persentase PPKS yang Tertangani	%	115.534 jiwa	115.534 jiwa*	100	100	100	100	100	100
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,04	4,04*	3,64	3,45	3,27	3,11	2,95	2,95
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,05	70,05*	73,64	75,43	77,23	79,02	80,82	80,82
21	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	95,96	95,96*	96,45	96,69	96,93	97,17	97,42	97,42
22	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-0,10	-0,10*	1,74	2,31	2,89	3,46	4,04	4,04
23	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	2.754.144,17	2.754.144,17*	2.834.462,67	2.899.954,73	2.983.634,70	3.086.885,13	3.211.458,12	3.211.458,12
24	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,66	-1,66*	3,39-4,39	3,98-4,98	4,57-5,57	5,16-6,16	5,75-6,75	5,75-6,75
25	PDRB Per Kapita	juta rupiah	18,24	18,24*	19,46	20,07	20,68	21,28	21,89	21,89
26	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	0,57	0,57*	5,24	5,83	6,41	7,00	7,59	7,59
27	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	-4,36	-4,36*	4,00	4,59	5,18	5,76	6,35	6,35
28	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	-4,84	-4,84*	4,85	5,44	6,03	6,62	7,21	7,21



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Pertumbuhan PMTB	%	-6,71	-6,71*	4,69	5,40	5,99	6,20	6,79	6,79
30	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,6764	0,6764*	0,7072	0,7226	0,738	0,7534	0,7688	0,7688
31	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	24,73	24,73*	29,00	31,13	33,26	35,39	37,53	37,53
32	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	63,74	63,74*	70,00	72	74	76	78	78
33	Maturitas SPIP	skor	3.023	3.023*	3.075	3.100	3.130	3.170	3.500	3.500
34	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	2,04	2,04*	2,40	2,60	2,80	2,95	3,00	3,00
35	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	Nilai SAKIP	nilai	61,3	61,3*	64,00	65,00	67,00	68,00	70,00	70,00
37	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	N/A*	N/A*	90	91	92	93	94	94
38	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	79,7	79,7*	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,5
39	Indeks Sistem Merit	indeks	N/A*	N/A*	0,62	0,64	0,68	0,73	0,82	0,82
40	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,09	4,09*	4,15	4,20	4,25	4,30	4,35	4,35
41	Indeks Inovasi Daerah	indeks	1,411*	1,411*	61	64	67	70	73	73
B ASPEK PELAYANAN UMUM										
1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1 Pendidikan										
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	%	99,61	99,61*	99,61	99,61	99,61	100,00	100,00	100,00
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B	%	87,64	87,64*	87,64	89,89	91,01	91,01	91,01	91,01
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	%	17,95	19,72*	19,72	21,49	23,26	25,03	26,80	26,80



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	%	70,00	90,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal pada Setiap Jenjang Pendidikan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio Ketersediaan Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kesetaraan	%	60,60	88,01*	88,96	88,98	89,02	89,05	89,10	89,10
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra pada Setiap Jenjang Pendidikan	%	0,00	0,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Kesehatan									
	Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar	%	73,09	72,50*	74,00	75,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	%	90,80	88,00*	91,00	93,00	94,00	96,00	98,00	98,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	23,48	23,48*	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	62,43	62,43*	64,82	66,02	67,22	68,42	69,62	69,62
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak	%	92,51	92,51*	96,30	97,77	99,24	100,00	100,00	100,00
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	%	2,63	2,63*	3,04	3,44	3,85	4,25	4,66	4,66
	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	84,70	84,70*	84,93	85,16	85,39	85,62	85,85	85,85
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	28,21	28,21*	29,79	31,23	32,67	34,11	35,55	35,55
	Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik	%	70,42	70,42*	73,75	77,92	81,25	84,58	87,50	87,50
	Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun	%	0,00	0,00*	12,50	37,50	62,50	87,50	100,00	100,00
	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang	%	78,89	78,89*	80,93	81,95	82,96	83,98	85,00	85,00
	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	68,18	68,18*	75,00	79,55	86,36	93,18	100,00	100,00
	Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	%	58,33	58,33*	75,00	83,33	91,67	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan Daerah Kabupaten									
	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	%	51,67	51,67*	58,00	62,33	64,33	67,33	69,67	69,67
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah	%	58,21	66,40*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%	0,00	0,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina	%	100,00	50,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon	%	100,00	60,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha yang Ditangani	%	0,00	38,58*	63,22	39,85	71,34	88,83	100,00	100,00
	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	%	10,88	10,83*	8,98	8,25	7,45	5,96	4,43	4,43
	Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	75,71	75,71*	81,87	84,25	86,96	89,32	92,04	92,04
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Sosial									
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%	88,79	89,58*	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00	100,00
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	%	0,00	0,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	69,95	69,87*	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	%	30,00	40,00*	50,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja									



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	%	0,00	0,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	%	49,78	84,64*	88,00	88,16	88,31	88,46	88,61	88,61
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,00	0,00*	1,56	3,13	4,69	6,25	7,81	7,81
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	%	24,58	33,79*	26,47	26,74	27,01	27,43	27,84	27,84
	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	%	37,50	40,78*	46,56	50,78	53,28	55,00	56,72	56,72
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	%	39,53	41,46*	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46	41,46
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	19,75	20,00*	20,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00
	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	%	83,00	83,00*	83,50	84,00	85,00	86,00	86,50	86,50
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pangan									
	Persentase Infrastruktur yang Disediakan	%	0,00	1 unit*	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	%	1,40	1,40*	2,11	4,93	9,86	14,79	19,72	19,72
	Persentase Pangan Segar Aman	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pertanahan									
	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	%	0,00	0,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%	100,00	47,18*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%	100,00	41,43*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Lingkungan Hidup									
	Persentase Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas	%	25,00	25,00*	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Sungai dan Udara Ambien	%	87,50	87,50*	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	Indeks Tutupan Lahan	indeks	49,34	49,34*	49,37	49,39	49,41	49,43	49,45	49,45



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pengendalian B3 dan LB3	%	0,00	0,00*	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang Tertuang dalam Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	%	0,00	0,00*	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
	Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH	%	4,05	4,05*	4,45	4,86	5,26	5,67	6,07	6,07
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	%	10,32	0,52*	7,51	7,69	7,86	8,03	8,21	8,21
	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	66,67	66,67*	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penanganan Sampah	%	17,87	18,14*	16,97	16,78	16,59	16,40	16,24	16,24
	Persentase Pengurangan Sampah	%	23,88	25,04*	25,71	26,52	27,27	27,96	28,65	28,65
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	90,39	90,29*	93,86	95,63	97,43	97,83	98,53	98,53



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	84,75	85,67*	86,00	87,00	88,25	89,00	90,00	90,00
	Persentase Instansi/ Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan	%	15,00	24,00*	57,50	70,00	82,50	92,50	100,00	100,00
	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase Penataan Desa sesuai Peraturan yang Berlaku	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	%	6,40	7,46*	36,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	%	19,00	18,00*	17,00	17,00	16,00	16,00	15,00	15,00
	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/ Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan	%	51,27	52,09*	52,82	53,49	54,09	54,64	54,64	54,64



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern									
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	23,14	22,43*	21,81	21,28	20,83	20,43	20,43	20,43
	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	%	62,44	63,00*	63,30	63,55	63,90	64,02	64,25	64,25
	Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	%	83,84	84,18*	84,22	84,30	84,40	84,45	84,50	84,50
9	Perhubungan									
	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	%	45,36	46,90*	47,82	55,09	62,47	69,86	73,19	73,19
	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	12,32	12,32*	10,47	8,90	7,57	6,43	5,47	5,47
10	Komunikasi dan Informatika									
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	%	100,00	58,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kegiatan (<i>Event</i>) Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan secara Daring dengan Memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100,00	46,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam) yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Koperasi yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	61,54	66,66*	67,40	71,06	74,73	78,39	82,05	82,05
	Persentase Koperasi Sehat	%	34,67	69,33*	86,05	86,36	86,67	86,96	87,23	87,23
	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	%	0,00	00,00*	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
	Persentase Koperasi yang Dibina	%	0,00	10,99*	14,65	18,32	21,98	25,64	29,30	29,30
	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	20,09	22,44*	4,47	5,96	7,46	8,95	10,44	10,44
	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	%	1,87	3,60*	5,08	6,55	8,03	9,50	10,97	10,97
12	Penanaman Modal									
	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	42,48	-10,15*	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	%	99,84	99,97*	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentasae Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Kepemudaan dan Olahraga									
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	95,24	95,24*	95,24	95,24	95,24	95,24	100,00	100,00
	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Statistik									
	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	%	100,00	27,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persandian									
	Persentase Layanan Persandian	%	100,00	26,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Kebudayaan									
	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	%	70,00	70,00*	70,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00
	Persentase Kelembagaan Pelaku Kesenian Tradisional yang Aktif	%	60,00	60,00*	60,00	60,00	60,00	61,58	63,16	63,16
	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	%	44,44	44,44*	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	%	11,85	11,85*	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
	Persentase Benda Museum yang Memenuhi Syarat Koleksi	%	20,00	33,33*	46,67	60,00	73,33	86,67	100,00	100,00
17	Perpustakaan									
	Persentase Perpustakaan yang Layak	%	2,52	2,52*	3,69	4,86	6,03	7,19	8,36	8,36
	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	0,00	0,00*	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
18	Kearsipan									
	Persentase Arsip yang Dikelola	%	74,37	79,17*	83,33	87,50	91,67	95,83	100,00	100,00
	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	34,42	50,00*	57,50	67,50	77,50	90,00	100,00	100,00
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan									
	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap	%	3,73	-77,08*	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya	%	-12,67	-46,11*	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	%	38,46	38,46*	46,15	53,85	69,23	84,62	100,00	100,00
	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	-60,00	-88,92*	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Pariwisata									



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	2,22%	39,55*	72,80	87,58	94,77	98,18	100,00	100,00
	Persentase Jumlah Sarana Promosi/ Pemasaran Pariwisata	%	100,00	10,00*	10,33	19,00	20,67	24,33	25,67	25,67
	Persentase Fasilitasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif	%	0,00	0,00*	0,00	16,67	16,67	33,33	33,33	33,33
	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih	%	0,00	0,00*	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Pertanian									
	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	106 paket	18 paket*	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	28 paket	56 paket*	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	9.275 kasus	N/A*	12,00	14,00	16,00	19,00	23,00	23,00
	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	%	0,00	0,00*	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
4	Perdagangan									
	Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	%	14,29	17,24*	19,35	22,58	25,81	29,03	32,26	32,26



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%	11,98	15,91*	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	36,00
	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	%	8,50	5,80*	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	94,05	36,54*	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00	90,00
	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%	0,00	0,00*	6,667	13,333	20,000	26,667	33,333	33,333
	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	38,28	57,39*	61,00	64,00	68,00	72,00	76,00	76,00
	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	0,00	0,00*	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43
5	Perindustrian									
	Persentase Peningkatan Produktivitas IKM Tiap Tahunnya	%	0,00	7,29*	7,54	7,69	7,80	8,10	8,33	8,33
	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	%	6,67	10,00*	15,00	20,00	30,00	35,00	40,00	40,00
	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%	53,33	60,00*	62,86	64,44	65,45	66,15	76,92	76,92
6	Transmigrasi									
	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	0,00	0,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unsur Pendukung Pemerintahan									
1	Sekretariat Daerah									



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	48,70*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	100,00	47,14*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Sekretariat DPRD									
	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKP	%	97,34	38,61*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unsur Penunjang Pemerintahan										
1	Perencanaan									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Keuangan									
	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tertib Pengelolaan Kas Daerah	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Kepegawaian									
	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, dan Penilaian Kinerja Aparatur	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pendidikan dan Pelatihan									
	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	14,00	15,00*	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
5	Penelitian dan Pengembangan									
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
1	Inspektorat Daerah									
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unsur Kewilayahan										
1	Kecamatan									
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unsur Pemerintahan Umum										
1	Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	Th. 1 (2022)	Th. 2 (2023)	Th. 3 (2024)	Th. 4 (2025)	Th. 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100,00	100,00*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Risiko Bencana	indeks	190,01	190,01*	175,87	170,3	163,73	157,16	150,6	150,6
2	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	87,01	87,01*	88,18	89,83	91,47	92,97	94,34	94,34
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	61,18	61,18*	65,67	65,69	65,71	65,73	65,75	65,71
4	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,40	0,40*	0,50	0,55	0,60	0,65	0,73	0,73

Ket: * data sementara

Sumber: Tim Penyusun, 2021



BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang mengarahkan perkembangan serta apa yang hendak dicapai Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang (2022-2026). Dijelaskan cara mencapai dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dapat tercapai.

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041.

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Purworejo. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Purworejo untuk periode satu tahun.

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD) mulai tahun 2022 hingga 2026. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo dan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 serta RKP Tahun 2027. Hal ini didasarkan pada tahun 2027 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD periode 2026-2031, dimana dalam tahun 2027 masih dalam proses penyusunan.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Purworejo periode berikutnya.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN



**RPJMD
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 - 2026**

